



# Laporan Tata Kelola Perusahaan

*Good Corporate Governance Report*



# Perkembangan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup BWS

*Corporate Governance Development within BWS*



## Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup BWS

*Commitment to Implementation of Good Corporate Governance within BWS*

Bank menyadari bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif merupakan hal penting dalam membangun industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Bank berpedoman bahwa GCG merupakan rangkaian proses, perilaku, kebijakan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengendalian pada Bank. Dalam praktiknya, Bank juga melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan untuk memastikan jalannya penerapan GCG dalam lingkungan Bank.

Sebagai perusahaan publik yang mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Bank berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank menekankan praktik terbaik penerapan GCG yang berlaku di industri beserta perkembangannya terkini, antara lain kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta Road Map Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menerapkan GCG, Bank mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

*Bank realizes that the effectiveness of GCG implementation is an important instrument, especially to build the banking industry and the economy in general. Bank believes that GCG is a series of processes, behaviors, policies that affect the Bank in direction, management, and control. In practice, Bank also involves all stakeholders to ensure the implementation of GCG within the Bank.*

*As a public company that listed and trades its shares in Indonesia Stock Exchange, The Bank is fully committed in implementing GCG principles as a basis in creating continuous added value to all shareholders, society, and the other stakeholders (employees, consumers, regulators, business partners, etc) in both short time and long time period.*

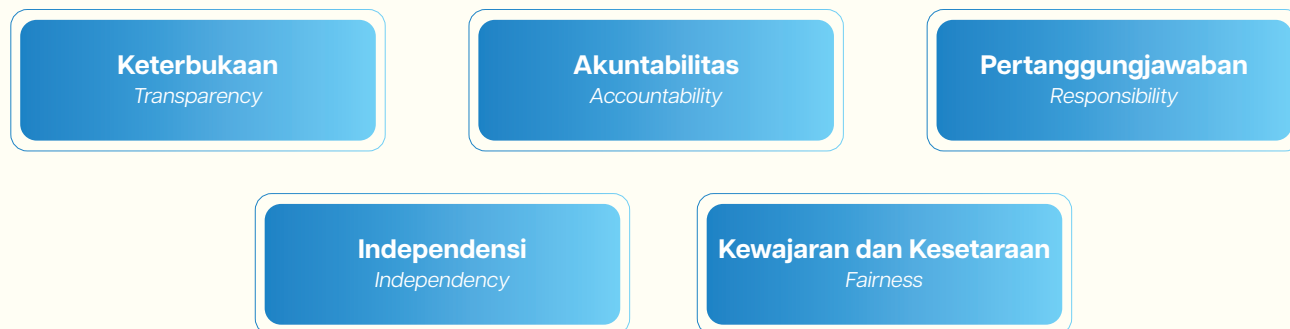
*Bank emphasizes the best practices in implementing GCG and its updated regulation, such as, compliance to the prevailing laws and regulations and also Indonesia's Corporate Governance Roadmap issued by Financial Service Authority (OJK).*

*In implementing GCG, The Bank refers to 5 (five) basic principles from GCG General Guidelines issued by National Governance Policy Committee (KNKG), namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.*



## 5 (Lima) Prinsip atau Azas GCG

5 (Five) GCG Basic Principles



Penjelasan dan pelaksanaan ke-5 prinsip tersebut di lingkup Bank adalah sebagai berikut:

- Prinsip Keterbukaan  
Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan Bank dalam menyampaikan informasi material dan relevan mengenai segala sesuatu tentang Bank.

Bank menerapkan prinsip keterbukaan ini antara lain dalam:

- » Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- » Laporan Tahunan.
- » Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan triwulanan.

- Prinsip Akuntabilitas  
Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan Bank dapat berjalan efektif dan efisien.

Bank memiliki 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, meliputi:

- » Akuntabilitas Korporasi  
Adalah pertanggung jawaban atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Masing-masing organ Bank dapat dimintai akuntabilitas masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- » Akuntabilitas Tim  
Adalah pertanggungjawaban suatu unit kerja/bisnis/ supporting atas tercapai/tidak tercapai tugasnya.
- » Akuntabilitas Individual  
Adalah pertanggungjawaban atas aktivitas kinerja individu yang dijalankan dalam Bank.

Explanation and implementation of the 5 principles in the Bank are as follows:

- Transparency Principle  
The transparency principle applied in the process of taking decision and the transparency of the Bank on delivering the information related to the Bank.

Bank implement the transparency principles in following:

- » Arranging and explaining The Annual Business Plan and The Budgets of a company;
- » Annual Report;
- » A periodic Financial Statement Reports which covers Annual Report, Semi-Annual Report, and Quarterly Report

- Accountability Principle  
The Accountability Principle is the principle of distinctness of functions, structures, systems, implementation, and responsibilities in an organization so that the management of The Bank can running effectively and efficiently.

Bank has 3 (three) levels of accountability in every activities, as follows:

- » Corporate Accountability  
It is the responsibility on the business activities. Each organization of the Bank can be asked for their accountability based on their duties and responsibilities by referring to the applicable and valid laws and regulations.
- » Team Accountability  
It is the responsibility of a work unit/business/ support for achieving/not achieving the tasks given.
- » Individual Accountability  
It is the responsibility for individual performance carried out by the Bank.

- Prinsip Pertanggungjawaban  
Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Bank menerapkan prinsip pertanggungjawaban antara lain dengan:
  - » Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - » Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.
  - » Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
  - » Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan.
- Prinsip Independensi  
Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan Bank yang baik. Penerapan unsur Independensi di lingkungan Bank adakah sebagai berikut:
  - » Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Bank.
  - » Pemegang saham dan Komisaris tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Bank.
  - » Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan.
  - » Kegiatan Bank yang memiliki potensi benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana diatur, dan mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
  - » Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, seperti dalam kebijakan kepegawaian, pengadaan dan keuangan.
- Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan  
Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip Keadilan di Bank diterapkan antara lain dengan:
  - » Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - » Bank memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan.
  - » Bank memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Responsibility Principle  
*The Responsibility Principle is the principle that suggest the suitability of The Bank Management to the applicable laws and regulations and the clean principles of The Bank management.*  
*Bank implements the responsibility principle in:*
  - » *Complying the provisions of Articles of Association and the applicable laws and regulations.*
  - » *Carrying out the tax obligations properly and on time.*
  - » *Carrying out the corporate social responsibility (“CSR”).*
  - » *Carrying out the obligation of information disclosure based on the established regulations.*
- Independency Principle  
*The Independency Principle is the principle that emphasizes the professionalism without any conflicts, influences, and pressures from anyone that is in contradiction to the applicable laws and regulations and the Good Corporate Governance of The Bank.*  
*The implementation of the element of independence in the Bank’s environment is as follows:*
  - » *Respecting each other’s rights, obligations, duties, authorities, among the Bank’s structure.*
  - » *The Shareholders and The Board of Commisioners may not interfere in management handling of the Bank.*
  - » *The Board of Commissioners, The Board of Directors, and The Employees are always avoid conflicts of interest in making decisions.*
  - » *The Activities of the Bank which have conflict of interests have to acquire the prior approval from the Independent Shareholders or their representatives who are authorized for it in the General Meeting of Shareholders (GMS) as it is regulated, and they have to obey the rules regarding the conflict of interest.*
  - » *The implementation of policies and systems that can minimize the conflict of interest, such as employee, procurement, and financial policies.*
- Fairness and Equality Principle  
*Fair and equal in fulfilling the rights of The Stakeholders based on the valid and applicable laws and regulations.*  
*The Fairness Principle in The Bank are implemented by following ways:*
  - » *The Shareholders have the rights to attend and vote on the GMS based on a valid and applicable laws and regulations.*
  - » *The Bank treats all the partners fairly and transparently.*
  - » *The Bank provides good and safe working condition for all employees based on The Bank’s capabilities and the applicable laws and regulations.*





## Struktur Tata Kelola dan Mekanisme Tata Kelola

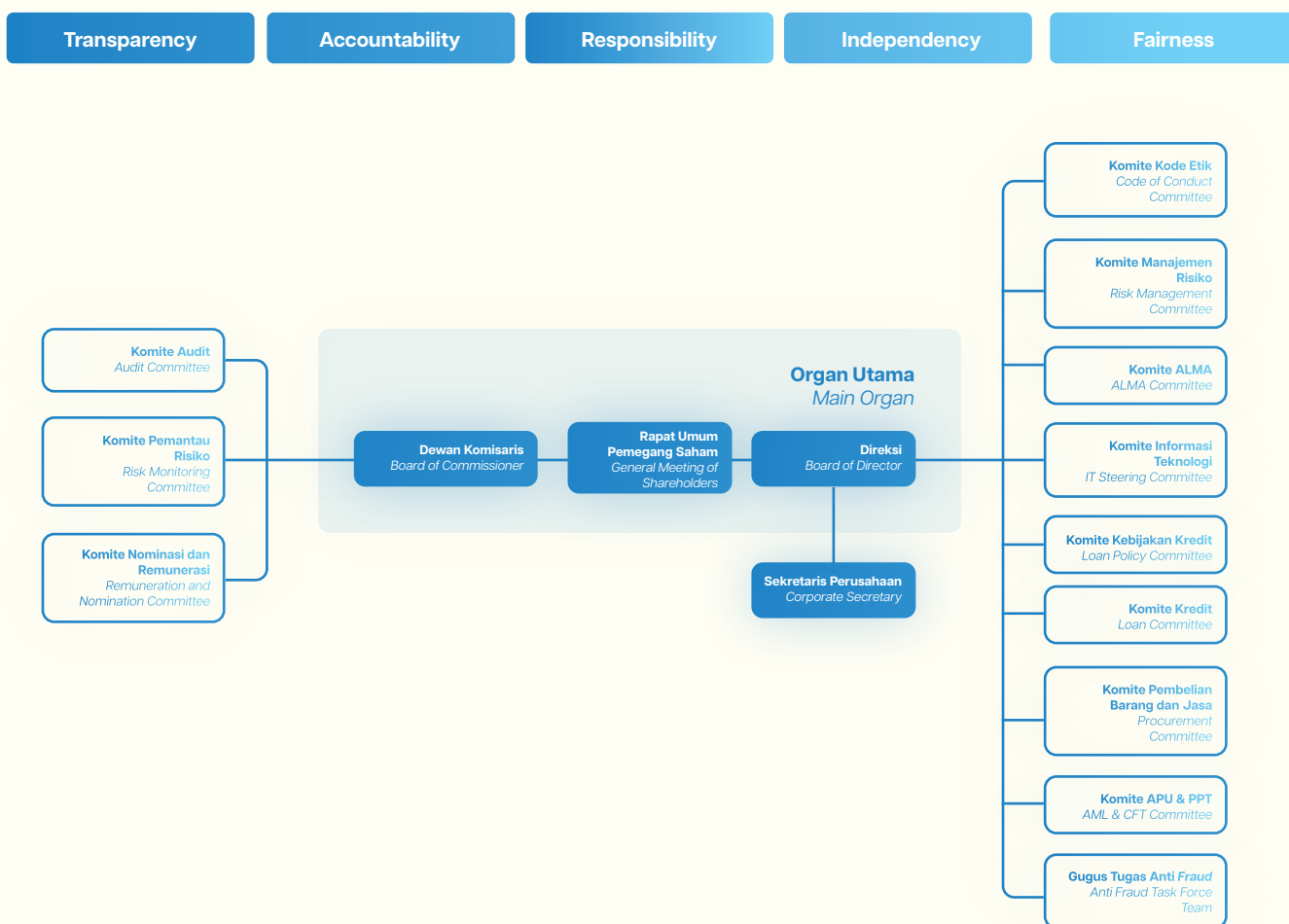
### Governance and Mechanisms Structure

Struktur Tata Kelola Bank memiliki beberapa aspek utama yang berperan dalam menunjang penguatan kontrol dan pengelolaan Bank yang *prudent*. Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dengan tugasnya mengelola, serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *Two-tier System*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan dan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

The Structures of GCG of the Banks has some main aspects that play a role in supporting the reinforcement of control and management of the Bank. Based on the laws Number 40 on 2007 concerning the Limited Liability of The Company, the organizational infrastructure of a Limited Liability of a company covers the interests of the shareholders as it is contained through the General Meeting of Shareholders or GMS, The Board of Directors with their duties in managing it, and the Board of Commissioners who has a function to supervise it. The Management System of a Limited Liability of a company have 2 (two) model or two tier system, they are The Board of Commissioners and The Board of Directors with a clear authority and responsibility based on their respective function and mandatory as it is stated in the applicable Laws and regulation as well as in The Articles of Association.

### Struktur Tata Kelola Kelola BWS

#### Governance Structure of BWS



Implementasi GCG yang terkandung dalam visi, misi dan strategi Bank, dinyatakan dengan nilai-nilai Bank serta kode etik yang disusun untuk memastikan adanya kepatuhan seluruh jajaran Bank. Hal tersebut berguna untuk menghindari benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak ketiga yang tidak tepat. Oleh karena itu, risiko Bank dikelola dengan sistem pengendalian dan monitoring yang baik.

*The Implementation of GCG consist in the visions, missions, and the strategies of the Bank, it was mentioned on the value of the Bank as well as in the code of ethics that has been arranged to ensure that all of the Bank structure is complying to the applicable laws and regulations. It can be a useful thing to avoid the conflict of interests and the transaction with the inappropriate third parties. Therefore, the Risks of the Bank is being managed by the good control and monitoring system.*

Kualitas penerapan GCG di Bank diuji berdasarkan pedoman GCG dan efektivitas pelaksanaan pedoman GCG diterapkan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham tanpa merugikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Analisis atas kajian mengenai praktik GCG diperlukan untuk membantu investor dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata kelola. Sistem pemeringkatan dengan skor atau indeks tata kelola Perusahaan mencerminkan bahwa Bank menerapkan GCG yang dinilai berdasarkan indeks sehingga dapat merepresentasikan tingkat penerapan GCG yang komprehensif di BWS.

*The Quality of GCG implementation on The Bank has been tested based on the GCG guidelines and the effectiveness of implementing GCG has been implemented to create values for shareholders without damaging the interests of other stakeholders. The Analysis of the Study regarding GCG practices is needed to help investors in getting a clear description of the governance. The rating system with the scoring or index of corporate governance reflects and shows that the Bank has implemented the GCG based on the index so that it can represent the comprehensive implementation of GCG in BWS.*

Mekanisme GCG BWS dituangkan dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang ditandatangani bersama-sama oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan mengatur pelaksanaan hubungan kerja seluruh Organ Tata Kelola di lingkungan BWS, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik dibentuk berdasarkan regulasi yang tepat dalam membuat keputusan serta memastikan kesuksesan bisnis dan akuntabilitas Bank.

*The mechanism of GCG in BWS has been served in The Board Manual signed together by the Board of Commissioners and the Board of Directors and arranging the the implementation of the work relations of all Governance organization in the environment of BWS, based on the provisions of the Articles of Association of the Company and/or the valid laws and regulations. A Good Corporate Governance Structure is formed based on the right regulation in making decision and ensuring the success of the business and accountability of the bank.*



## Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG Bank

### *Assessment and Evaluation of GCG Implementation in The Bank*

Bank memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar GCG dengan selalu berusaha menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, melalui berbagai usaha perbaikan dan peningkatan, serta merujuk pada standar minimal maupun rekomendasi yang harus dipenuhi. Penilaian penerapan GCG secara konsisten dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di lingkungan Bank. Penilaian yang dilakukan oleh Bank menggunakan berbagai acuan standar praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku.

*Bank committed to implemented GCG standards, through various improvements and developments, and referring to the minimum standards and recommendations. An assessment of the implementation of GCG is consistently carried out annually to determine the adequacy level of GCG implementation within the Bank. The assessment conducted by the Bank with various applicable best practice standards.*

Bank melakukan penilaian berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

*Bank conduct an assessment based on OJK Regulation regarding Good Corporate Governance Implementation on Commercial Bank, an evaluation of GCG implementation based on 5 (five) basic principles grouped in a governance system consisting of 3 (three) governance aspects: governance structure, governance process, and governance outcome.*

### Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Self Assessment Result of Governance

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
Individual Individual	2	Baik Good
Konsolidasi Consolidation	-	-

### Matriks Peringkat Faktor Tata Kelola Rating Matrix of Governance

Peringkat Rating	Definisi Definition
2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. <i>Reflecting the Bank management has made the implementation of Governance in general is good. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Bank's management.</i>
ANALISIS ANALYSIS	

#### A. Governance Structure

Kekuatan pada Governance Structure antara lain sebagai berikut :

*Strengths in the Governance Structure are as follows:*

1. Terpenuhinya struktur atau komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta komposisi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada Semester I/2021 terdapat perubahan komposisi Direksi sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Nomor 26 tanggal 30 Maret 2021. Mr Hwang Gyusoon efektif menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. pada tanggal 18 Juni 2021.  
Bank telah memiliki struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan kompleksitas Bank, struktur organisasi ini disusun untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal di Bank Woori Saudara.  
*The fulfillment of the structure or formation of members of the Board of Commissioners and Directors as well as the formation of members of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination, and Remuneration Committee. On semester 1-2021 there is a change in the Board of Directors and the Board of Commissioners composition as stipulated in the Deed of GMS Meetings of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk, No. 26 dated March 30, 2021. Mr. Hwang Gyusoon effective to serve as President Directors of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk on June 18, 2021. The Bank presented an organizational structure that had been adapted to the Bank complexities, this organizational structure is prepared to support the Board of Commissioners and Board of Directors duties and responsibilities as well as the implementation of risk management and internal control at BWS.*
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Internal Audit, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, berjalan dengan efektif.  
*The well-performed task and responsibilities of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Internal Audit Division, Compliance Unit and Risk Management Division fulfilled the principles of Governance, hence it run effectively.*

Kelemahan pada Governance Structure :

*Weaknesses in Governance Structure:*

Bank telah memiliki sistem informasi dan sumber daya manusia yang baik, namun dengan semakin tumbuhnya bisnis Bank, maka Bank harus terus berupaya untuk terus melakukan pengembangan-pengembangan terutama pengembangan perbankan ke era digitalisasi. Untuk mendukung hal ini diperlukan sumber daya yang memadai, baik secara manusia, sistem dan struktur penerapan manajemen risiko serta pengendalian internal yang lebih baik lagi kedepannya.  
*Besides good information system and human resources, the Bank is still expected to improve the banking development into digitalization era. To support this development, Bank needs adequate resources, either human resources, system, and structure of risk management implementation as well as better internal control in the future.*

#### B. Governance Process

Kekuatan pada Governance Process antara lain sebagai berikut :

*Strengths in Governance Process include the following:*

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan melakukan rapat bersama Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Komisaris memberikan masukan kepada Direksi yang disampaikan dalam forum rapat Direksi dan Dewan Komisaris.  
*The Board of Commissioners supervised the implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Directors by conducting monthly meetings with the Board of Directors; and providing advices to the Directors to support the implementation of the duties of the Board of Directors. The Commissioner provided input to the Board of Directors to be submitted in the Board of Directors and Board of Commissioners meeting forums.*
2. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
*The implementation of the Board of Commissioners, Directors and Committee meetings was in accordance with the applicable regulations.*



### Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Self Assessment Result of Governance

3. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan melakukan upaya-upaya untuk mendorong Budaya Kepatuhan Bank dengan melakukan:  
*The director in charge of the Compliance Function was making efforts to encourage the Bank' culture of compliance by:*

- Analisa dan opini Kepatuhan  
*Compliance Analysis*
- Monitoring Ketentuan Regulator dan Compliance Info  
*Monitoring the provision of regulation and Compliance Info*
- Sosialisasi dan Compliance Test  
*Socialization and Compliance Test*

Selain hal diatas, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan merekomendasikan peneanan sanksi (punishment) terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

*In addition, The director in charge of the Compliance recommend the imposition of sanctions (punishment) on violations.*

4. Bank telah berupaya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan review secara berkala dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*The Bank endeavored to ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities were in accordance with OJK Regulation and other applicable laws and regulations. One of them was by periodical review and/or recommendation towards update and refinement of policies, provisions, systems, and procedures that were owned by the Bank to comply with OJK Regulation and governing laws and regulations.*

5. Bank telah menyusun, menyampaikan dan mempublikasikan laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum.

*The Bank developed, submitted, and published a Governance Implementation report with its content and coverage aligned with the OJK Regulation No.55/POJK.03/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation on Commercial Bank and OJK Circular Letter No.13/SEOJK.03/2017 concerning Good Corporate Governance Implementation on Commercial Bank.*

#### Kelemahan pada Governance Process:

*Weaknesses in Governance Process:*

1. Di tahun 2021 masih terdapat sanksi berupa teguran dan/atau denda terkait pelaporan, namun Bank berkomitmen untuk selalu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia atau OJK yang mengatur proses pelaporan Bank.  
*In 2021 the Bank still receive sanctions in the form of warnings and/or fines related to reports, but the Bank is committed to always ensuring compliance with Bank Indonesia or OJK Regulations which is governing the Bank's reporting process.*
2. Bank dituntut untuk selalu melakukan pengembangan atas pengelolaan manajemen risiko serta pengendalian internal yang baik, hal ini perlu dilakukan guna meminimalisir risiko-risiko penyalahgunaan (fraud).  
*Banks shall to develop good risk management and internal control, this is required to minimize the risks of abuse (fraud).*

#### C. Governance Outcome

Kekuatan pada Governance Outcome antara lain sebagai berikut :

*Strengths in Governance Outcome include the following:*

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga, remunerasi dan fasilitas lain, serta *share option* yang dimiliki dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola yang dipublikasikan melalui website Bank dan didistribusikan kepada seluruh pemegang saham dan kepada pihak-pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.  
*All members of the Board of Commissioners and Board of Directors disclosed the share ownership, financial and family relations, remuneration, and other facilities, as well as share options held in the governance implementation report published on the Bank's website and distributed to all shareholders and to other parties as stipulated in the applicable provisions.*
2. Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah dibuatkan berita acara rapat untuk ditindaklanjuti.  
*The results of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee meetings were provided with minutes of the meeting to be followed up.*

### Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Self Assessment Result of Governance

3. Bank telah meluncurkan sistem *whistleblowing* melalui aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui website internal (BWS Portal).  
*Bank launched whistleblowing systems through application that can be accessed by every employee through internal website (Portal BWS)*
4. Bank telah membuat Rencana Bisnis yang menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dengan peningkatan pada aspek finansial maupun non finansial. Pada tahun 2021, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. meraih beberapa penghargaan yaitu:  
*The Bank developed a Business Plan that described the Bank's sustainable growth with improvements in financial and non-financial aspects. In 2021, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk won several awards, as follows:*
  1. Penghargaan 5<sup>th</sup> Years Appreciation Customer Loyalty Award - PT Rintis Sejahtera (PRIMA)  
*5<sup>th</sup> Years Appreciation Customer Loyalty Award - PT Rintis Sejahtera (PRIMA)*
  2. Predikat "The Best Bank in SME Financing 2021" - Infobank  
*"The Best Bank in SME Financing 2021" - Infobank*
  3. Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company - IICD (Indonesia Institute for Corporate Directorship)  
*Top 50 Mid-Capitalization Public Listed Company by Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).*
  4. "Bank Terbaik 2021" kategori Bank Umum dengan Modal Inti Rp5 Triliun – Rp30 Triliun -  
*"2021 The Best Bank" for Commercial Bank Category with Core Capital IDR5 Trillion - IDR30 Trillion*
  5. The Strongest Performance Bank (Special Award), Crown Trophy (Kinerja "Sangat Bagus" 25 Tahun Berturut-Turut), Modal Inti Rp5 Triliun Sampai Dengan Di Bawah Rp30 Triliun (Buku 3) - Aset Di Bawah Rp50 Triliun "Sangat Bagus" - Infobank  
*The Strongest Performance Bank (Special Award), Crown Trophy ("Excellent" Performance for the Consecutive 25 Years Participations), with Core Capital IDR5 Trillion to Below IDR30 Trillion (BUKU 3) - Assets Below IDR50 Trillion - Infobank*
5. Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank melalui *kick off meeting* yang dilaksanakan setiap tahun maupun melalui Rapat Kerja yang diselenggarakan secara berkala.  
*The corporate plan and the Bank's business plan along with their realization were delivered by the Board of Directors to the Controlling Shareholders and to all levels of the organization that are available at the Bank through annual kick-off meetings and through periodic Work Meetings.*

#### Kelemahan pada Governance Outcome :

##### Weaknesses in Governance Outcome:

1. Kejadian *fraud* yang terjadi pada tahun 2021 dan sanksi dari regulator terhadap proses pelaporan Bank, dapat menjadi indikasi bahwa Bank perlu meningkatkan Budaya kepatuhan yang lebih baik dari yang telah diimplementasikan saat ini.  
*The fraud incident in 2021 and sanctions from the regulator on the Bank's reporting process, can be an indication that the Bank needs to improve a better compliance culture in the future.*
2. Pencapaian rencana strategis Bank didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur, namun perlu ditingkatkan kesinergisan dalam hal pelaksanaannya agar dapat mendukung rencana strategis yang telah ditetapkan.  
*The achievement of the Bank's strategic plan is supported by the preparation of adequate infrastructure, both in terms of human resources, information technology, office networks, policies and procedures, but synergies need to be improved in terms of its implementation in order to support the established strategic plan.*



## Perkembangan Penerapan GCG di Tahun 2021

### Development of GCG Implementation in 2021

Sebagai komitmen untuk meningkatkan penerapan GCG, Bank melakukan berbagai kegiatan di tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang telah mendapat persetujuan dari RUPS.
- b. Melaksanakan penerapan manajemen risiko sesuai peraturan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- c. Meningkatkan penerapan dan monitoring atas kebijakan dan pedoman benturan kepentingan yang mengikat seluruh karyawan Bank.
- d. Melakukan pengkinian terhadap rincian pihak terkait guna meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait.
- e. Menyusun Rencana Bisnis yang berpedoman pada Peraturan OJK mengenai Rencana Bisnis Bank Umum.
- f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi termasuk Laporan Tahunan 2020 dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank.
- g. Melakukan transparansi informasi produk dan aktivitas Bank sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang dilakukan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengurangi dampak risiko hukum dan risiko reputasi terhadap Bank.
- h. Membuat *Self Assessment* dan Laporan *Good Corporate Governance* serta melaporkannya kepada OJK dan pihak-pihak tertentu.
- i. Menyampaikan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.
- j. Mengupayakan peningkatan praktek perbankan yang sehat baik di bidang pendanaan maupun perkreditan.
- k. Komitmen jajaran manajemen dan karyawan BWS terhadap penerapan pengendalian gratifikasi dan anti suap.
- l. Pengkinian Kebijakan dan Prosedur internal BWS:
  - Revisi Pemberian Wewenang kepada Direksi
  - Revisi Pedoman Pengendalian Gratifikasi
  - Revisi Pedoman dan Tata Tertib Komite Pembelian Barang dan Jasa
  - Revisi Penunjukan Tim Gugus Tugas Anti *Fraud*
  - Revisi Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

As a commitment to improve the implementation of GCG, the Bank conducted various activities in 2021, as follows:

- a. Implementing the financial reports by Public Accountant Firm registered on OJK that has been approved by GMS.
- b. Implementing the Risk Management based on the OJK regulation regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Bank.
- c. Improving the implementation and monitoring of policies and the guidelines for conflict of interest that tied up all of BWS Employees.
- d. Updating the details of related parties to improve and facilitate the monitoring towards the provisions of fund with related parties.
- e. Arranging the Business Plan based on the OJK regulation regarding the Commercial Bank Business Plan.
- f. Arranging and submitting Published Financial Reports including the 2020 Annual Report in order to implement transparency of the Bank's financial condition.
- g. Implementing the Transparency of Products Information and Bank Activities based on the Policies and Guidelines for Transparency of Information of the products of the Bank and the Use of Personal Data of the Customers conducted through media that can be accessed easily by public to reduce the legal risks and reputation risks on The Bank.
- h. Making a Self-Assessment and Good Corporate Governance Reports and reporting it to certain parties.
- i. Delivering the implementation of Corporate Secretary duties to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.
- j. Making an effort on increasing the fair banking practices in the field of both funding and loan.
- k. Commitment from BWS management and employees to the umplementation of gratification control and bribery.
- l. Updating on BWS Internal Policies and Procedures:
  - Revision on Authorities delegetion to Board of Directors
  - Revision on Gratification Control Guideliness
  - Revision on Guidelines and Procedures of Procurement Committee
  - Revision on the appointment of Anti Fraud Task Force Team
  - Revision on Procedure of Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism



# Struktur dan Organ Tata Kelola Bank

## Structure and Organ of Bank Governance



### Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

#### Shareholders and General Meeting of Shareholders

#### Pemegang Saham

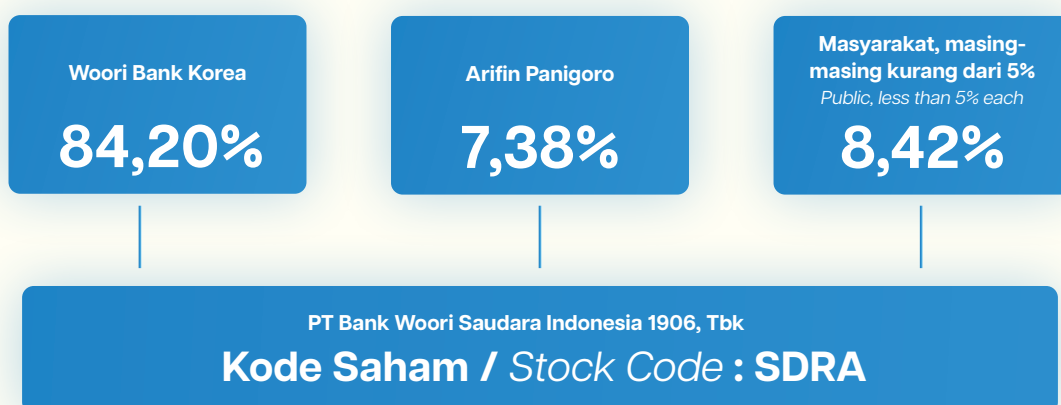
Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Bank merupakan Perseroan Terbatas yang mencatat dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 99% saham Bank dicatatkan di Bursa, dan dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%.

#### Shareholders

Shareholders as an owners of capital have rights and responsibilities in accordance with laws and regulations and the Bank's Articles of Association.

The Bank is a Limited Liability Companies that listed and trades its shares in Indonesia Stock Exchange 99% the Bank's shares was traded on the Exchange, and owned by public with less than 5% ownership.



Pemegang Saham Utama/Pengendali Bank adalah Woori Bank Korea yang memiliki saham Bank sebesar 84,20%. Pemegang Saham Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

The Bank's Major Shareholder/Controller is Woori Bank Korea which owns 84.20% of the Bank's shares. The Controlling Shareholders must meet the requirements of fit and proper test.

#### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank, para pemegang saham memiliki mekanisme pengambilan keputusan terhadap laju perkembangan Bank melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah organ Bank yang memiliki fungsi dan independensi dalam mengelola Bank secara profesional, efisien, dan efektif. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. RUPS yang dilaksanakan oleh Bank terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

#### General Meeting of Shareholders

Based on the laws Number 40 on 2007 concerning the Limited Liability of The Company and The Article of Associations of The Bank, all shareholders has mechanism for decision making on the rate of bank development through General Meeting Shareholders (GMS) forum. The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Bank structure that has a function and independence in managing the Bank in a professional, efficient, and effective way. GMS has an authority that is not given to The Board of Directors or The Board of Commissioners within the limits that was specified in The Article of Associations of The Bank and the applicable laws and regulations. GMS held by The Bank consist of Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) and other GMS.

Sesuai Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, namun dalam kondisi tertentu OJK dapat menentukan selain batas waktu tersebut.

Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan:

- Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Bank.
- Usulan penggunaan laba jika Bank memiliki saldo laba yang positif.
- Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai Anggaran Dasar Bank.

RUPS lainnya yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank. RUPS ini disebut juga sebagai RUPS Luar Biasa.

### **Wewenang RUPS**

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Bank. Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Pengambilan Keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

### **Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Bank**

Mekanisme penyelenggaraan RUPS Bank mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
3. Anggaran Dasar Bank

*In accordance with the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations, the Annual GMS must be held at the latest 6 (six) months after the fiscal year ends, but under certain conditions OJK can determine the other deadline.*

*In the Annual GMS, the Directors convey:*

- *Annual Reports as referred to in the Bank's Articles of Association.*
- *Proposed the use of the bank's profits if the Bank has a positive retained earnings.*
- *Proposed appointment of a Public Accountant registered in OJK.*
- *Any other things submitted properly on the General Meeting of Shareholders with the provisions of The Articles of Association of the Company.*

*The other GMS held at any time based on the Bank needs. This GMS is also known as an Extraordinary GMS.*

### **Authority of GMS**

*The Authority of General Meeting of Shareholders (GMS) includes appointing and dismissing The member of The Board of Commissioners and The Board of Directors, evaluating the performance of The Board of Commissioners and The Board of Directors, approving the Amendments of the Articles of Associations, Approving the Annual Reports and determining the form and the amount of remuneration for the members of The Board of Commisioners and The Board of Directors and making decisions regarding company actions or any other strategic decisions submitted by The Board of Directors. The decision is being made without reducing the authority and power that is owned by The General Meeting of Shareholders, The GMS or the shareholders cannot interfere on any of the functions, duties, and authority of The Board of Commissioners and The Board of Directors in carrying out their obligations and rights based on The Article of Associations and the valid laws and regulations. The decision making of GMS is being made in fair and transparent way.*

### **Mechanism for the Bank's GMS**

*The GMS implementation mechanism is refers to :*

1. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies*
2. *OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company General Meeting of Shareholders*
3. *Bank's Articles of Association*

Ketentuan mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, hak untuk menghadiri, pengumuman ringkasan risalah, dan penyampaian risalah RUPS adalah sebagai berikut:

- Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- Pengumuman ringkasan risalah RUPS dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- Penyampaian risalah RUPS kepada OJK dilakukan paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan.

*The provisions regarding the notifications, the announcements, the invitation, the rights to attend, the announcements of summary or minutes, and the reports of GMS's summary (Deed of Minutes) is mentioned as follows:*

- *The notification of the main agenda of GMS to the OJK should be notified no later than 5 (five) working days prior to the announcement of GMS without taking into account the date of the GMS announcement.*
- *Announcement of GMS is being delivered no later than 14 (fourteen) days prior to the invitation to the GMS without taking any account the date of the GMS announcement and invitation.*
- *The invitation to the GMS is being made no later than 21 (Twenty-one) days prior to the GMS without taking into account the date of invitation and the date of the GMS.*
- *The Shareholders who have the right to attend on GMS is shareholders whose names are registered in the list of Shareholders of the company a day prior to invitation of GMS.*
- *Announcement of the summary of the minutes of a GMS is made no later than 2 (two) working days after the GMS was held.*
- *Submission of the GMS minutes to OJK is being delivered no later than 30 days after the GMS was held.*

### Informasi Penyelenggaraan dan Keputusan RUPS di Sepanjang Tahun 2021 Serta Pelaksanaan Keputusan RUPS oleh Manajemen

Di sepanjang tahun 2021 Bank menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu:

- RUPS Tahunan pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2020 yang diselenggarakan tanggal 30 Maret 2021.
- RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 14 Juli 2021.

Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing RUPS serta keputusan RUPS dan pelaksanaan hasil keputusan oleh manajemen.

#### » RUPS Tahunan

### Information on The Implementation and Resolutions of GMS throughout 2021 as well as the Implementation of GMS Resolutions by Management

*Throughout 2021, the Bank held 2 (two) GMS, namely:*

- *Annual GMS accountability for the financial year 2020 performance which will be held on March 30, 2021.*
- *Extraordinary GMS held on July 14, 2021.*

*The following are delivered the implementation of each GMS and the GMS resolutions as well as its implementations by management.*

#### » Annual GMS

<b>Hari/Tanggal</b> <i>Day/Date</i>	Selasa, 30 Maret 2021 <i>Tuesday, March 30 2021</i>
<b>Waktu</b> <i>Time</i>	Pk. 10.12 WIB s.d Pk. 10.59 WIB <i>10:12 a.m to 10:59 a.m</i>
<b>Tempat</b> <i>Place</i>	Gedung Treasury Tower Lantai 27 District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190



## Kepatuhan Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan

Compliance With The Stages of Annual GMS

### PEMBERITAHUAN RENCANA RUPS KEPADA OJK

(Paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS)

Surat disampaikan kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK tanggal 10 Februari 2021 perihal Penyampaian Mata Acara RUPS Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, surat tertanggal 16 Februari 2021 perihal Perubahan Tanggal Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan surat tertanggal 4 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara RUPS Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

### NOTIFICATION OF GMS PLAN TO OJK

(No later than 5 working days prior to the GMS)

Letter submitted to OJK through OJK SPE (Electronic Reporting System) dated February 10, 2021 regarding Agenda of the Annual GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, letter concerning Changes in the date of Annual GMS Implementation of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dated February 16, 2021, and letter on Announcement of the Changes in the Agenda of Annual GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dated March 4, 2021

### PENGUMUMAN RUPS

(Paling lambat H-14 dari pemanggilan RUPS (tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pengumuman))

Melalui surat kabar harian Media Indonesia, Website BEI, Website KSEI dan Website Bank tanggal 18 Februari 2021

### GMS ANNOUNCEMENT

(No later than H-14 from GMS summons (regardless to date of summons and announcement))

Through Media Indonesia Daily News, IDX Website, KSEI Website and Bank Website dated February 18, 2021

### PEMANGGILAN RUPS

(Tanpa memperhitungkan tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan)

Melalui surat kabar harian Media Indonesia Website BEI, Website KSEI dan Website Bank tanggal 5 Maret 2021

### GMS SUMMONS

(regardless to date of the GMS summons and implementation)

Through Media Indonesia Daily News, IDX Website, KSEI Website and Bank Website dated March 5, 2021

### BERITA ACARA RUPS

(Paling lambat 30 hari setelah RUPS)

Disampaikan ke OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK tanggal 12 April 2021

### AGENDA OF GMS

(No later than 30 working days after GMS)

Submitted to OJK through OJK Electronic Reporting System (SPE) dated April 12, 2021

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPS

(Paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan RUPS)

Melalui surat kabar harian Media Indonesia, Website BEI, Website KSEI dan Website Bank tanggal 1 April 2021

### ANNOUNCEMENT FOR SUMMARY OF GMS MINUTES

(No later than 2 working days after GMS)

Through Media Indonesia Daily News, IDX Website, KSEI Website and Bank Website dated April 1, 2021

### Pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2021

Annual GMS Impementation for  
the 2021 financial year dated  
March 30, 2021

RUPS Tahunan Bank untuk pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2020 dihadiri oleh 6.288.106.585 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,55% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

The Bank's Annual General Meeting of Shareholders for accountability of the 2020 financial year performance was attended by 6,288,106,585 shares, which had valid voting rights or equivalent to 95.55% of the total number of shares with valid voting rights that had been issued by the Bank.

Berikut daftar Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan Bank:

The following is list of attendance for the Board of Commissioners and Board of Directors at the Bank's Annual General Meeting of Shareholders:

- Presiden Komisaris, Arief Budiman: hadir
- Komisaris Independen, Ahmad Fajarprana: hadir
- Komisaris Independen, Adi Haryadi: hadir \*)
- Direktur, Sadhana Priatmadja: hadir
- Direktur, M. Tri Budiono: hadir \*)
- Direktur, Benny Sudarsono Tan: hadir \*)
- Direktur, Kang Bong Joo: hadir \*)
- Direktur, Edwin Sulaeman: hadir \*)

- President Commissioner, Arief Budiman: present
- Independent Commissioner, Ahmad Fajarprana: present
- Independent Commissioner, Adi Haryadi: present \*)
- Director, Sadhana Priatmadja: present
- Director, M. Tri Budiono: present \*)
- Director, Benny Sudarsono Tan: present \*)
- Director, Kang Bong Joo: present \*)
- Director, Edwin Sulaeman: present \*)

\*) Hadir dalam Rapat melalui media video teleconference.

\*) Present at the meeting by media video teleconference.

Sedangkan Bapak Park Tae Yong selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Choi Jung Hoon selaku Presiden Direktur Perseroan berhalangan hadir.

While Mr. Park Tae Yong as the Company's Commissioner and Mr. Choi Jung Hoon as the Company's President Director were unable to attend.

Kronologis pelaksanaan RUPS Tahunan pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Chronology of the Annual GMS implementation for performance accountable in 2020 is as follows:

Mata Acara RUPS Tahunan Pertanggungjawaban Kinerja Tahun Buku 2020 Tanggal 30 Maret 2021 <i>Agenda of the Annual GMS for performance accountable in 2020 dated March 30, 2021</i>	Penanya (orang) <i>Questioner (person)</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Keterangan <i>Information</i>
Mata Acara ke-1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2020	Nihil	6.288.095.421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Nihil	11.164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara
<i>1<sup>st</sup> Agenda Approve and ratify the Company's Annual Report include the Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners and approve the Company's Financial Statement for the 2020 financial year</i>	<i>Nil</i>	<i>6,288,095,421 shares or 99.99982% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Nil</i>	<i>11,164 shares or 0.00018% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Decision through deliberation to reach consensus</i>
Mata Acara ke-2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Bank untuk tahun buku 2020	Nihil	6.288.095.421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Nihil	11.164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara
<i>2<sup>nd</sup> Agenda Approval on Company's Net Profits allocation for the 2020 financial year</i>	<i>Nil</i>	<i>6,288,095,421 shares or 99.99982% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Nil</i>	<i>11,164 shares or 0.00018% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Decision through deliberation to reach consensus</i>

Mata Acara RUPS Tahunan Pertanggungjawaban Kinerja Tahun Buku 2020 Tanggal 30 Maret 2021 <i>Agenda of the Annual GMS for performance accountable in 2020 dated March 30, 2021</i>	Penanya (orang) <i>Questioner (person)</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Keterangan <i>Information</i>
Mata Acara ke-3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2021	Nihil	6.288.095,421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Nihil	11,164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara
<i>3<sup>rd</sup> Agenda The appointment of public accountant firm to audit the Company's Financial Statements for the 2021 financial year</i>	<i>Nil</i>	<i>6,288,095,421 shares or 99,99982% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Nil</i>	<i>11,164 shares or 0,00018% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Decision through deliberation to reach consensus</i>
Mata Acara ke-4 Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank untuk tahun buku 2021 serta tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2020	Nihil	6.288.095,421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Nihil	11,164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara
<i>4<sup>th</sup> Agenda The determination on the salary/ honorarium and the other allowance for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2021 and tantieme for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company members for the 2020 financial year</i>	<i>Nil</i>	<i>6,288,095,421 shares or 99,99982% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Nil</i>	<i>11,164 shares or 0.00018% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Decision through deliberation to reach consensus</i>
Mata Acara ke-5 Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Nihil	6.288.095,421 saham atau 99,99982% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Nihil	11,164 saham atau 0,00018% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara
<i>5<sup>th</sup> Agenda The change of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company</i>	<i>Nil</i>	<i>6,288,095,421 shares or 99,99982% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Nil</i>	<i>11,164 shares or 0.00018% from all shares which had valid voting Rights was attended in the meeting</i>	<i>Decision through deliberation to reach consensus</i>

Risalah RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Akta nomor 26 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Notaris di Jakarta Selatan. Berikut disampaikan hasil keputusan RUPS Tahunan pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2020 dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

*Minutes of the 2020 Annual GMS Resolution for performance accountable has been stipulated in Deed No. 26 March 30, 2021 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary as a Notary in South Jakarta. The Annual GMS Resolution for performance accountable in 2020 and management follow up is as follows:*

### Keputusan Mata Acara ke-1 1<sup>st</sup> Agenda

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan - firma anggota jaringan global PwC, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 26 Februari 2021.
  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
1. *Approve and accept the Company's Annual Report for the financial year 2020, include the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2020 financial year.*
  2. *Ratify the Company's Financial Statement for the financial year 2020 which was audited by the Public Accountant Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (A member of PwC Global Networks)", with the reasonable opinion, in all material respects, as stated in the Report on February 26, 2021*
  3. *Grant the release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision they have performed during the financial year 2020, as long as all of the actions are not a criminal offense and reflected in the Company's Annual Report for the 2020 Financial year.*

### Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2021 Follow-up by Management Until the End of 2021

- ✓ Tidak diperlukan tindak lanjut oleh Manajemen terkait keputusan Mata Acara Rapat ini, hasil keputusan Rapat ini telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS
- No follow-up is required by the Management regarding the decision of this Meeting Agenda, approval and ratification have been set forth in the Deed of Minutes of GMS*

### Keputusan Mata Acara ke-2 2<sup>nd</sup> Agenda

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp536.000.667.583,- (lima ratus tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:
    - a. Sebesar Rp65.809.262.540,- (enam puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh Rupiah) atau Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 12,28% (dua belas koma dua puluh delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai.
    - b. Sebesar Rp470.191.405.043,- (empat ratus tujuh puluh milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima ribu empat puluh tiga Rupiah) atau sebesar kurang lebih 87,72% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh dua persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
  2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. *Approve and allocate the Company's Net Profits for the 2020 Financial Year IDR536,000,667,583,- (five hundred thirty six billion six hundred sixty seven thousand five hundred and eighty three Rupiah), as follows*
    - a. *IDR65,809,262,540,- (sixty five billion eight hundred nine million two hundred sixty two thousand five hundred forty Rupiah) or IDR10,- (ten Rupiah) per share or approximately 12.28% (twelve point twenty eight percent) of the net profit of the Company to be distributed as cash dividend.*
    - b. *IDR470, 191,405,043,- (four hundred seventy billion one hundred ninety one million four hundred five thousand and forty three Rupiah) or 87.72% (eighty seven point seventy two percent) of the Net Profit of the Company allocated as retained earnings.*
  2. *Approve to grant power and authority to the Company's Board of Directors to determine the schedule and procedures for distribution of Cash Dividend for the 2020 Financial Year in accordance with applicable regulations*

### Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2021 Follow-up by Management Until the End of 2021

- ✓ Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 telah digunakan sesuai dengan keputusan RUPS, pembayaran dividen tunai telah dilaksanakan oleh Bank pada tanggal 30 April 2021.
- The Company's net profit for Fiscal Year 2020 has been used in accordance with the resolutions of the GMS, payment of cash dividend distribution has been carried out by the Bank on April 30, 2021*



### Keputusan Mata Acara ke-3 3<sup>rd</sup> Agenda

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
  2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
1. *Approve to grant authority to Board of Commissioners to appoint the Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2021 financial year.*
  2. *Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020, and giving authority to the Board of Commissioners to determine the Public Accountant's honorarium as well as other requirements for appointment, and also to appoint the substitute Public Accountant if for whatever reason, the appointed Public Accountant cannot complete the audit on the Company's Financial Statements for the financial year 2020, with regulation that in conducting Public Accountant appointments, the Board of Commissioners must pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Service Activities.*

### Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2021 Follow-up by Management Until the End of 2021

Bentuk tindak lanjut dari Manajemen BWS yaitu dengan menetapkan penggunaan jasa Audit External untuk BWS Tahun Buku 2021 berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 013/BWS-DEKOM/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 dan Surat Perikatan Audit No. 195/SSR-HO/BWS-A21/MS/IX-2021 tertanggal 15 September 2021 yang telah disetujui oleh kedua pihak.

✓ *The form of follow-up from BWS Management was to determine the use of External Audit services for BWS for Fiscal Year 2021 based on Approval Letter Number 013/BWS-DEKOM/VIII/2021 dated August 31, 2021 and Audit Engagement Letter No. 195/SSR-HO/BWS-A21/MS/IX-2021 dated September 15, 2021 which had been approved by both parties.*

### Keputusan Mata Acara ke-4 4<sup>th</sup> Agenda

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
  2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
1. *Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary/honorarium and other allowances for the member of the Board of Directors of the Company for the 2021 financial year.*
  2. *Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company with prior approval from Woori Bank Korea as the controlling shareholder of the Company to determine the honorarium and other allowances for the member of the Board of Commissioners of the Company for the 2021 financial year and to determine the tantieme for the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2020 financial year.*

### Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2021 Follow-up by Management Until the End of 2021

Bentuk realisasi atas hasil keputusan dari Mata Acara tersebut diatas telah dituangkan dalam Surat Keputusan No. 009/KEP.DEKOM/III/2021 yang telah di tanda tangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Maret 2021.

✓ *The form of realization of the results of the decisions of the above agenda has been stated in the Decree No. 009/KEP.DEKOM/III/2021 which was signed by the Board of Commissioners on March 30, 2021.*

## Keputusan Mata Acara ke-5 5<sup>th</sup> Agenda

1. a. Menyetujui pemberhentian Sdr. Choi Jung Hoon dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.  
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Sdr. Choi Jung Hoon selaku Presiden Direktur Perseroan atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.
2. Menyetujui pengangkatan Sdr. Hwang Gyusoon selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Selama Sdr. Hwang Gyusoon belum efektif menjabat sebagai Presiden Direktur, menunjuk Sdr. Kang Bong Joo yang saat ini menjabat sebagai Direktur merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur Perseroan.
4. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

### DIREKSI

Presiden Direktur : Hwang Gyusoon\*)

Direktur : Sadhana Priatmadja

Direktur : Mochamad Tri Budiono

Direktur : Benny Sudarsono Tan

Direktur : Edwin Sulaeman

Direktur : Kang Bong Joo

\*) Pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

5. Menyetujui pemberhentian Sdr. Park Tae Yong dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2021  
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 28 Agustus 2021 menjadi sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris: Arief Budiman

Komisaris Independen: Ahmad Fajarprana

Komisaris Independen: Adi Haryadi

6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

1. a. *Approved the resignation of Mr. Choi Jung Hoon from his position as President Director of the Company as of the closing of the Meeting.*  
b. *Grant the release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to Mr. Choi Jung Hoon as President Director of the Company for the actions of management that have performed since January 1, 2021 until the closing of the Meeting, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements concerned and as the Annual Report and Financial Statements of the Company is approve and authorize by the General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2021, which will be held in 2022.*
2. *Approve the appointment of Mr. Hwang Gyusoon as the Company's President Director as of the closing of the Meeting, which will be effective after obtaining approval from the OJK for the fit and proper test and has complied with all the provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022, which will be held in 2023, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to terminate him at any time.*
3. *As long as Mr. Hwang Gyusoon still not effective to serve as President Director, the shareholders appointed Mr. Kang Bong Joo who serve as director at this time to concurrently as Act. The Company's President Director.*
4. *Therefore, the composition of the members of the Board of Directors of the Company is as follows:*

### BOARD OF DIRECTORS

President Director : Hwang Gyusoon\*)

Director : Sadhana Priatmadja

Director : Mochamad Tri Budiono

Director : Benny Sudarsono Tan

Director : Edwin Sulaeman

Director : Kang Bong Joo

\*) The appointment of the members of the Company's Board of Directors is effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan on the fit and proper test and fulfills the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia

5. *Approved the resignation of Mr. Park Tae Yong from his position as the Company's Board of Commissioners as of August 28, 2021 Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company since August 28, 2021 is as follows:*

### BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Arief Budiman

Independent Commissioner : Ahmad Fajarprana

Independent Commissioner : Adi Haryadi

6. *Approve to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the substitution right to take all necessary actions related to the decision of this Meeting agenda in accordance with applicable laws, including to declare in a separate notary deed and notify the Changes to the Board of Commissioners of the Company to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.*

**Keputusan Mata Acara ke-5**  
5<sup>th</sup> Agenda

**Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2021**  
Follow-up by Management Until the End of 2021

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah efektif dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan RUPS, susunan anggota Direksi Bank terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor 44 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Bara Indra Ardiyasha, Sarjana Hukum, selaku pengganti dari Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0344926 tanggal 2 Juni 2021, dan susunan anggota Dewan Komisaris Bank terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor 49 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0442192 tanggal 30 Agustus 2021

Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Bank have been effective and implemented in accordance with the GMS resolutions, the latest composition of the Bank's Board of Directors members as stipulated in the Deed of Annual GMS Resolutions of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 44 dated 31 May, 2021 made before Bara Indra Ardiyasha, Bachelor of Law, as a substitute for Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the South Jakarta, whose the company data changes have been received and recorded in the Legal Entity Administration System under the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Letter No. AHU-AH.01.03-0344926 dated June 2, 2021, and the latest composition of the Bank's Board of Commissioners as stipulated the Deed of Annual GMS Resolutions of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 49 dated 30 August 2021 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the South Jakarta, whose the company data changes have been received and recorded in the Legal Entity Administration System based on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Letter No. AHU-AH.01.03-0442192 dated August 30, 2021

✓ = sudah | ✗ = belum terlaksana  
✓ = done | ✗ = not done yet

» **RUPS Luar Biasa Tahun 2021**

» **Extraordinary GMS 2021**

<b>Hari/Tanggal</b> Day/Date	Rabu, 14 Juli 2021 Wednesday, July 14, 2021
<b>Waktu</b> Time	Pk. 10.12 WIB s.d Pk. 10.40 WIB 10:12 a.m to 10:40 a.m
<b>Tempat</b> Place	Gedung Treasury Tower Lantai 27 District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

## Kepatuhan Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2021

Compliance With The Stages of Extraordinary GMS 2021

### PEMBERITAHUAN RENCANA RUPS KEPADA OJK

(Paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS)

Surat disampaikan kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK berdasarkan surat tertanggal 28 Mei 2021 perihal Penyampaian Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan surat tertanggal 21 Juni 2021 perihal Penyampaian Perubahan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

### NOTIFICATION OF GMS PLAN TO OJK

(No later than 5 working days prior to the GMS)

Letter submitted to OJK through OJK SPE (Electronic Reporting System) dated May 28, 2021 regarding Agenda of the Extraordinary GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, and letter on the Changes in Agenda of the Extraordinary GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dated June 21, 2021

1

### PENGUMUMAN RUPS

(Paling lambat H-14 sebelum pemanggilan RUPS (tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pengumuman))

Melalui surat kabar harian Media Indonesia Website BEI, Website KSEI dan Website Bank tanggal 7 Juni 2021

### GMS ANNOUNCEMENT

(No later than H-14 from GMS summons (regardless to date of summons and announcement))

Through Media Indonesia Daily News, IDX Website, KSEI Website and Bank Website dated June 7, 2021

2

### PEMANGGILAN RUPS

(Paling lambat 21 hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS)

Melalui Surat Kabar Harian Media Indonesia Website BEI, Website KSEI dan Website Bank tanggal 22 Juni 2021

### GMS SUMMONS

(No later than 21 days before the date of holding the GMS)

Through Media Indonesia Daily News, IDX Website, KSEI Website and Bank Website dated June 22, 2021

3

### BERITA ACARA RUPS

(Paling lambat 30 hari setelah RUPS)

Disampaikan kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK tanggal 27 Juli 2021

### AGENDA OF GMS

(No later than 30 days after GMS)

Submitted to OJK through OJK Electronic Reporting System (SPE) dated July 27, 2021

6

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPS

(Paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan RUPS)

Melalui surat kabar harian Media Indonesia, Website BEI, Website KSEI dan Website Bank pada tanggal 16 Juli 2021

### ANNOUNCEMENT FOR SUMMARY OF GMS MINUTES

(No later than 2 working days after GMS)

Through Media Indonesia Daily News, IDX Website, KSEI Website and Bank Website dated July 16, 2021

5

### Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Juli 2021

Annual GMS Impementation for  
the 2021 financial year dated  
July 14, 2021

4



RUPS Luar Biasa Tahun 2021 dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui pemberian kuasa (eASY.KSEI) sejumlah 6.284.326.569 saham atau merupakan 95,49% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Berikut daftar Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2021 BWS:

- Presiden Komisaris, Arief Budiman: hadir
- Komisaris Independen, Ahmad Fajarprana: hadir \*)
- Komisaris Independen, Adi Haryadi: hadir \*)
- Presiden Direktur, Hwang Gyusoon: hadir \*)
- Direktur, Sadhana Priatmadja: hadir
- Direktur, M. Tri Budiono: hadir \*)
- Direktur, Benny Sudarsono Tan: hadir \*)
- Direktur, Kang Bong Joo: hadir \*)
- Direktur, Edwin Sulaeman: hadir \*)

\*) Hadir dalam Rapat melalui media video *teleconference*.

Sedangkan Bapak Park Tae Yong selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir.

Kronologis pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The 2021 Extraordinary GMS was attended by 6,284,326,569 shares, either physically or electronically by granting the power (eASY.KSEI) or equivalent to 95.49% of the total number of shares with valid voting rights that had been issued by the Bank. The following is list of attendance for the Board of Commissioners and Board of Directors at the BWS's Extraordinary GMS:

- President Commissioner, Arief Budiman: present
- Independent Commissioner, Ahmad Fajarprana: present \*)
- Independent Commissioner, Adi Haryadi: present \*)
- President Director, Hwang Gyusoon: present \*)
- Director, Sadhana Priatmadja: present
- Director, M. Tri Budiono: present \*)
- Director, Benny Sudarsono Tan: present \*)
- Director, Kang Bong Joo: present \*)
- Director, Edwin Sulaeman: present \*)

\*) Present at the meeting by media video *teleconference*.

Meanwhile, Mr. Park Tae Yong as Commissioner of the Company was unable to attend.

Chronology of the 2021 Extraordinary GMS implementation is as follows:

Mata Acara RUPS Luar Biasa <i>Extraordinary GMS Agenda</i>	Penanya (orang) <i>Questioner (person)</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Keterangan <i>Information</i>
Mata Acara ke-1 Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Elek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan.	Nihil	6.284.326.469 saham atau 99,9999%	100 saham atau 0,0001%	Nihil	Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara
<i>1<sup>st</sup> Agenda</i> Addition in Capital by granting Pre-emptive Rights (PMHMETD) and Amendment to Article 4 of the Articles of Association the Company regarding the addition of the Issued/Paid-Up Capital of the Company.	<i>Nil</i>	<i>6,284,326,469 shares or 99.9999%</i>	<i>100 shares or 0.0001%</i>	<i>Nil</i>	<i>Decision through deliberation to reach consensus.</i>
Mata Acara ke-2 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Nihil	6.284.326.469 saham atau 99,9999%	100 saham atau 0,0001%	Nihil	Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara
<i>2<sup>nd</sup> Agenda</i> Changes in The Company's Articles of Association.	<i>Nil</i>	<i>6,284,326,469 shares or 99.9999%</i>	<i>100 shares or 0.0001%</i>	<i>Nil</i>	<i>Decision through deliberation to reach consensus.</i>

Risalah RUPS Luar Biasa ini telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 15 tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku Notaris di Jakarta Selatan. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

Minutes of the Extraordinary GMS Resolution has been stipulated in Deed of Minutes of the Extraordinary GMS No. 15 dated July 14, 2021 made before Ashoya Ratam, Bachelor Law, Master of Notary as a Notary in the South Jakarta. The Extraordinary GMS Resolution and management follow up is as follows:

## Keputusan Mata Acara ke-1 1<sup>st</sup> Agenda

1. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK HMETD") yang akan ditawarkan melalui PMHMETD III, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.680.000.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang pelaksanaan PMHMETD III Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK HM ETD, termasuk namun tidak terbatas :
    - a. Melaksanakan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
    - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III;
    - c. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD III;
    - d. Menentukan harga PMHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
    - e. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD III;
    - f. Menentukan kepastian penggunaan dana;
    - g. Menentukan kepastian jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD III;
    - h. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD III termasuk akta-akta dan/atau penambahannya;
    - i. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral
    - j. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
  3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III dan menyatakan kepastian peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan pengeluaran saham baru dalam rangka PMHMETD III, dan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. *Approve the addition in Capital by granting Pre-emptive Rights (PMHMETD), as stipulated in OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Addition in Capital for the Public Company by granting Pre-emptive Rights as has been amended with OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning amendments for OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Addition in Capital for the Public Company by granting Pre-emptive Rights ("POJK HMETD") which will be offered by PMHMETD III, thus the Company will issue new shares from the portfolio with a maximum amount of 2,680,000,000 (two billion six hundred eighty million) shares with a nominal value of IDR100,- (one hundred Rupiah) per share, which will be will be implemented after the effective registration statement from OJK.*
  2. *Grant the power and authority to the Company's Board of Directors to take action to implement PMHMETD III, including but not limited to comply with the requirements of applicable laws and regulations including POJK HM ETD, including but not limited to :*
    - a. *Carried out the Registration Statements to Otoritas Jasa Keuangan;*
    - b. *Determined the certainty of total shares that will be issued by PMHMETD III;*
    - c. *Determined the ratios of shareholders who have rights for HMETD III;*
    - d. *Determined the price of PMHMETD III by Board of Commissioners approval;*
    - e. *Determined the date for Shareholders list (DPS) who have rights for HMETD III;*
    - f. *Determined the certainty for the use of fund;*
    - g. *Determined the schedule of PMHMETD III implementation;*
    - h. *Signed the documents which required for PMHMETD III including the Deeds and/or its amendments;*
    - i. *Registered the Company's shares in collective custody in accordance with the regulations of the Central Custodian*
    - j. *Listed the Company's shares that have been issued and fully paid take into account the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.*
  3. *Grant the power and authority to the Company's Board of Commissioners to declare the number of shares that have been issued in order to PMHMETD III and declare the addition in issued and paid up capital after the issuance of new shares in the context of PMHMETD III, and amendments to Article 4 paragraph 2 and paragraph 3 of the Company's Articles of Association and take all necessary actions in connection with the decision with due observance of the prevailing laws and regulations.*

## Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2021 Follow-up by Management Until the End of 2021

- ✓ Keputusan Rapat telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perubahan anggaran dasar Bank sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor dari hasil PMHMETD III sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor 10 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0458385 tanggal 8 Oktober 2021
- Meeting resolutions have been implemented in accordance with the applicable regulations, amendments in the Bank's articles of association in connection with the addition in issued and paid up capital from PMHMETD III as stipulated in the Deed of Extraordinary GMS Resolutions of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 10 dated October 6, 2021 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the South Jakarta, whose notification of amendment to the articles of association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System based on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Letter No. AHU-AH.01.03-0458385 dated October 8, 2021.*

## Keputusan Mata Acara ke-2 2<sup>nd</sup> Agenda

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. *Approve the amendments of the Company's Articles of Association among others adjustment in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of GMS for the Public Company and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of GMS for Public Company by Electronic.*
  2. *Grant the power and authority to the Company's Board of Directors with the substitution right to take all necessary actions related to the decision of this Meeting agenda including but not limited to improve or change the Company's Articles of Association and restated the all changes in the Company's Articles of Association into the Notary Deed including to ask approval and notify the Company's data changes to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and taking all necessary actions in connection with those things in accordance with the requirements of applicable laws and regulations.*

## Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2021 Follow-up by Management Until the End of 2021

Keputusan Rapat telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perubahan anggaran dasar Bank sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor 16 tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0431029 tanggal 24 Juli 2021

Meeting resolutions have been implemented in accordance with the applicable regulations, amendments in the Bank's articles of association as stipulated in the Deed of Extraordinary GMS Resolutions of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 16 dated July 14, 2021 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the South Jakarta, whose notification of amendment to the articles of association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System based on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Letter No. AHU-AH.01.03-0431029 dated July 24, 2021

### Informasi Penyelenggaraan dan Keputusan RUPS di Sepanjang Tahun 2020 Serta Pelaksanaan Keputusan RUPS oleh Manajemen

Di sepanjang tahun 2020 Bank menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS, yaitu:

- RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan tanggal 29 April 2020.
- RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 13 Agustus 2020.
- RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 17 Desember 2020.

Seluruh penyelenggaraan RUPS di sepanjang tahun 2020 telah memenuhi ketentuan yang diberlakukan oleh OJK dan pasar modal. Berikut disampaikan keputusan RUPS dan pelaksanaan hasil keputusan oleh manajemen.

### Information on The Implementation and Resolutions of GMS throughout 2020 as well as the Implementation of GMS Resolutions by Management

Throughout 2020, the Bank held 3 (three) GMS, namely:

- 2019 Annual GMS held on April 29, 2020.
- Extraordinary GMS held on August 13, 2020.
- Extraordinary GMS held on December 17, 2020.

The GMS implementation throughout 2020 has been comply with the provisions imposed by the OJK and the capital market. The following are delivered the implementation of each GMS and the GMS resolutions as well as its implementations by management.

**Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 29 April 2020  
(Risalah dimuat dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Woori Saudara  
Indonesia 1906 Tbk No 36 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Fathiah Helmi,  
Sarjana Hukum Notaris di Jakarta)**

*The 2019 Annual GMS Resolutions on April 29, 2020 (The minutes is contained in the Deed of Minutes of the Annual GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No 36 dated April 29, 2020 made by Fathiah Helmi, Bachelor of Law Notary in Jakarta)*

**Bentuk Tindak Lanjut oleh Manajemen  
Follow up by Management**

Keputusan Mata Acara ke-1

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Bank untuk Tahun Buku 2019, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan - firma anggota jaringan global PwC, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 2 Maret 2020, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquitted et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Bank untuk Tahun Buku 2019.

Persetujuan dan pengesahan telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS

1<sup>st</sup> Agenda

*Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2019, include the Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners and approve the Company's Financial Statement for the financial year 2019 which was audited by the Public Accountant Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (A member of PwC Global Networks)", as stated in the Report on March 2, 2020, with the reasonable opinion, in all material respects, as well as the granting of release and discharge (acquitted et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision they have performed during the financial year 2020, as long as all of the actions are not a criminal offense and reflected in the Company's Annual Report for the 2019 Financial year.*

*Approval and ratification have been set forth in the Deed of Minutes of GMS*

Keputusan Mata Acara ke-2

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Bank Tahun Buku 2019 yaitu sebesar Rp499.791.206.484,- sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp85.552.041.302,- atau Rp13,- per saham atau sebesar kurang lebih 17,12% dari Laba Bersih Bank dibagikan sebagai Dividen Tunai.
  - b. Sebesar Rp414.239.165.182,- atau sebesar kurang lebih 82,88% dari Laba Bersih Bank ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui untuk memperhitungkan dampak dari implementasi PSAK 71 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dimana kenaikan/penurunan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang diperhitungkan berdasarkan PSAK 71 akan diambil dari Laba Ditahan Bank, yang besarnya akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank yang akan diadakan selanjutnya sesuai dengan hasil Pemeriksaan Audit Periode Laporan Keuangan Desember 2020.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Labanya bersih perseroan tahun buku 2019 telah digunakan sesuai dengan keputusan RUPS, pembayaran dividen tunai telah dilaksanakan oleh Bank pada tanggal 18 Mei 2020.

2<sup>nd</sup> Agenda

1. Approve and allocate the Company's Net Profits for the 2019 Financial Year IDR438,725,414,555 as follows:
  - a. IDR85,552,041,302,- or IDR13,- per share or approximately 17.12% of the net profit of the Company to be distributed as cash dividend.
  - b. IDR414,239,165,182,- or 82.88% of the Net Profit of the Company allocated as retained earnings.
2. Approve to take into account the impact of the implementation of IFRS 9 which became effective on January 1, 2020 wherein the increase/decrease in Allowance for Impairment Losses (CKPN) calculated based on IFRS 9 will be taken from the Company's Retained Earnings, the amount of which will be presented at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held then in accordance with the results of the Audit Audit Financial Report Period December 2020
3. Approve to grant power and authority to the Company's Board of Directors to determine the schedule and procedures for distribution of Cash Dividend for the 2019 Financial Year in accordance with applicable regulations

The Company's net profit in 2019 has been used, according to the GMS resolution, cash dividend payout has been conducted by the Bank on May 18, 2020



**Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 29 April 2020  
(Risalah dimuat dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Woori Saudara  
Indonesia 1906 Tbk No 36 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Fathiah Helmi,  
Sarjana Hukum Notaris di Jakarta)**

*The 2019 Annual GMS Resolutions on April 29, 2020 (The minutes is contained in the Deed of Minutes of the Annual GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No 36 dated April 29, 2020 made by Fathiah Helmi, Bachelor of Law Notary in Jakarta)*

**Bentuk Tindak Lanjut oleh Manajemen  
Follow up by Management**

Keputusan Mata Acara ke-3

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2020 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Berdasarkan Memo Penunjukan KAP oleh Komisaris BWS tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) untuk tahun buku 31 Desember 2020. Penunjukan ini telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 278/BWSDIR/OJK/IX/2020 tanggal 17 September 2020.

Laporan Keuangan tahun 2020 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) telah dirilis pada tanggal 26 Februari 2021

3<sup>rd</sup> Agenda

*Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020, and giving authority to the Board of Commissioners to determine the Public Accountant's honorarium as well as other requirements for appointment, and also to appoint the substitute Public Accountant if for whatever reason, the appointed Public Accountant cannot complete the audit on the Company's Financial Statements for the financial year 2020, with regulation that in conducting Public Accountant appointments, the Board of Commissioners must pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Service Activities.*

*Based on the Memo of Public Accountant Firm Appointment by the Board of Commissioner of BWS dated September 9, 2020, it has appointed a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in order to audit of annual financial statements by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner (PwC Indonesia) for the financial year of December 31, 2020. This appointment has been reported to OJK by letter No. 278/BWSDIR/OJK/IX/2020 dated September 17, 2020*

*The 2020 Financial Statement which audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner (PwC Indonesia) has been released on February, 2021*

Keputusan Mata Acara ke-4

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali, untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.

Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 004/KEP.DEKOM/IV/2020, Dewan Komisaris telah menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020, menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, serta uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali.

4<sup>th</sup> Agenda

1. Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary/honorarium and other allowances for the member of the Board of Directors of the Company for the 2020 financial year.
2. Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company with prior approval from Woori Bank Korea as the controlling shareholder of the Company to determine the honorarium and other allowances for the member of the Board of Commissioners of the Company for the 2020 financial year and to determine the tantieme for the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2019 financial year.

*Based on The Board of Commissioners' Decree No. 004/KEP.DEKOM/IV/2020, the Board of Commissioners has determined salaries and other benefits for members of the Board of Directors for The Financial Year 2020, established honorariums and other benefits for members of the Board of Commissioners for The Financial Year 2020, as well as service money (tantiem) for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for The Financial Year 2019, by first obtaining approval from Woori Bank Korea as the Controlling Shareholder.*

**Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 29 April 2020  
(Risalah dimuat dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Woori Saudara  
Indonesia 1906 Tbk No 36 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Fathiah Helmi,  
Sarjana Hukum Notaris di Jakarta)**

*The 2019 Annual GMS Resolutions on April 29, 2020 (The minutes is contained in the Deed of Minutes of the Annual GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No 36 dated April 29, 2020 made by Fathiah Helmi, Bachelor of Law Notary in Jakarta)*

**Bentuk Tindak Lanjut oleh Manajemen  
Follow up by Management**

Keputusan Mata Acara ke-5

Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:

1. Menyetujui membatalkan pengangkatan Kim Yoong Wook selaku Direktur yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Maret 2019.
2. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
  - Arief Budiman selaku Presiden Komisaris
  - Ahmad Fajarprana selaku Komisaris Independen
  - Kim Dong Soo selaku Komisaris Independen
  - Park Tae Yong selaku Komisaris
  - Choi Jung Hoon selaku Presiden Direktur
  - Mochamad Tri Budiono selaku Direktur
  - Benny Sudarsono Tan selaku Direkturserta mengangkat:
  - Edwin Sulaeman selaku Direktur
  - Kang Bong Joo selaku Direkturterhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui mengangkat kembali Sadhana Priatmadja selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengangkat Sadhana Priatmadja selaku Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan.
4. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:  
DEWAN KOMISARIS  
Presiden Komisaris: Arief Budiman  
Komisaris Independen: Ahmad Fajarprana  
Komisaris Independen: Kim Dong Soo  
Komisaris: Park Tae Yong  
DIREKSI  
Presiden Direktur: Choi Jung Hoon  
Direktur: Sadhana Priatmadja  
Direktur: Mochamad Tri Budiono  
Direktur: Benny Sudarsono Tan  
Direktur: Edwin Sulaeman\*)  
Direktur: Kang Bong Joo\*)

Pengangkatan anggota Direksi Bank telah mendapatkan persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK, berdasarkan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-101/D.03/2020, No. KEP-102/D.03/2020, dan No. KEP-103/D.03/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank hingga akhir tahun 2020 telah sesuai dengan keputusan RUPS ini.

\*) Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan tentang ketenagakerjaan

**Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 29 April 2020  
(Risalah dimuat dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Woori Saudara  
Indonesia 1906 Tbk No 36 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Fathiah Helmi,  
Sarjana Hukum Notaris di Jakarta)**

*The 2019 Annual GMS Resolutions on April 29, 2020 (The minutes is contained in the Deed of Minutes of the Annual GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No 36 dated April 29, 2020 made by Fathiah Helmi, Bachelor of Law Notary in Jakarta)*

**Bentuk Tindak Lanjut oleh Manajemen  
Follow up by Management**

5<sup>th</sup> Agenda

Approved the Change to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as follows:

1. Approved to cancel the appointment of Kim Yong Wook as the Director of the Company which appointed at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on March 28, 2019.
2. Approve to re-appoint members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:
  - Arief Budiman as President Commissioner of the Company
  - Ahmad Fajarprana as Independent Commissioner of the Company
  - Kim Dong Soo as Independent Commissioner of the Company
  - Park Tae Yong as Commissioner of the Company
  - Choi Jung Hoon as President Director of the Company
  - Mochamad Tri Budiono as Director of the Company
  - Benny Sudarsono Tan as Director of the Company

and to appoint:

- Edwin Sulaeman as Director of the Company
- Kang Bong Joo as Director of the Company

As of the closing of the Meeting

3. Approved and re-appointed Sadhana Priatmadja as Director of the Company as the closing of the Meeting and appoint Sadhana Priatmadja as Director in charge of the Compliance function which will be effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan for the fit and proper test.
4. The term of office of the appointed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors expires until the closing of the 3rd Annual General Meeting of Shareholders since the appointment concerned which is the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2022 which will be held in 2023, with due observance of the laws and regulations in the capital market sector without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss them at any time.
5. Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:
 

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner: Arief Budiman

Independent Commissioner: Ahmad Fajarprana

Independent Commissioner: Kim Dong Soo

Commissioner: Park Tae Yong

BOARD OF DIRECTORS

President Director: Choi Jung Hoon

Director: Sadhana Priatmadja

Director: Mochamad Tri Budiono

Director: Benny Sudarsono Tan

Director: Edwin Sulaeman\*)

Director: Kang Bong Joo\*)

\*) The appointment of the members of the Company's Board of Directors is effective after obtaining approval from the OJK on the fit and proper test and fulfills the applicable laws and regulations including manpower regulations.

The appointment of members of the Bank's Board of Directors has obtained fit and proper test approval from OJK, based on a copy of the Decision of members of the OJK Board of Commissioners No. Kep-101/D.03/2020, and No. KEP-103/D.03/2020 dated August 7, 2020 .

Composition of Bank's Board of Commissioners and Board of Directors at the end of 2020 was in accordance with this GMS Resolutions.

**Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2020**  
**(Risalah dimuat dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 12 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan)**  
*Extraordinary GMS Resolutions on August 13, 2020 (Minutes was stipulated in the Deed of Minutes of the Extraordinary GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No 36 dated August 13, 2020 made by Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the South Jakarta)*

**Bentuk Tindak Lanjut oleh Manajemen**  
*Follow up by Management*

1. a. Menyetujui pengunduran diri Kim Dong Soo dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Kim Dong Soo selaku Komisaris Independen atas semua tindakan pengawasan yang telah dijalankannya sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
2. Menyetujui pengangkatan Chung Hee Kyung selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:  
DEWAN KOMISARIS  
Presiden Komisaris: Arief Budiman  
Komisaris: Park Tae Yong  
Komisaris Independen: Ahmad Fajarprana  
Komisaris Independen: Chung Hee Kyung\*)  
\*) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Chung Hee Kyung telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Komisaris Independen sebelum permohonan *Fit and Proper Test* dengan alasan kesehatan berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 2 November 2020 dan telah disetujui dalam RUPSLB tanggal 17 Desember 2020.

1. a. *Approved the resignation of Mr. Kim Dong Soo from his position as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting.*
- b. *Release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to Mr. Kim Dong Soo as the Independent Commissioner of the Company for all supervisory actions has carried out since January 1, 2020 until the closing of the Meeting, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements concerned and as the Annual Report and Financial Statements of the Company is approve and authorize by the General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2020, which will be held in 2021*
2. *Approve the appointment of Mr. Chung Hee Kyung as the Company's Independent Commissioner as of the closing of the Meeting, which will be effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan for the fit and proper test and has complied with all the provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022, which will be held in 2023, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to terminate him at any time.*
3. *Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company is as follows:*  
BOARD OF COMMISSIONERS  
*President Commissioner: Arief Budiman  
Commissioner: Park Tae Yong  
Independent Commissioner: Ahmad Fajarprana  
Independent Commissioner: Chung Hee Kyung\*)*  
\*) *The appointment of the members of the Company's Board of Commissioners is effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan on the fit and proper test and fulfills the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia.*
4. *Approve to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the substitution right to take all necessary actions related to the decision of this Meeting agenda in accordance with applicable laws, including to declare in a separate notary deed and notify the Changes to the Board of Commissioners of the Company to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.*

Chung Hee Kyung has resigned from his position as Independent Commissioner prior to the application for a fit and proper test for health reasons based on the Resignation letter dated November 2, 2020 and has been approved at the EGM on December 17, 2020.



**Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020**  
**(Risalah dimuat dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 12 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan)**  
*Extraordinary GMS Resolutions on August 13, 2020 (Minutes was stipulaed in the Deed of Minutes of the Extraordinary GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No 36 dated August 13, 2020 made by Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the South Jakarta)*

**Bentuk Tindak Lanjut oleh Manajemen**  
*Follow up by Management*

- Menyetujui pengunduran diri Chung Hee Kyung sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 13 Agustus 2020 terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menyetujui pengangkatan Adi Haryadi sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.  
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:  
DEWAN KOMISARIS  
Presiden Komisaris: Arief Budiman  
Komisaris: Park Tae Yong  
Komisaris Independen: Ahmad Fajarprana  
Komisaris Independen: Adi Haryadi\*)  
) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris Bank hingga akhir tahun 2020 telah sesuai dengan keputusan RUPS ini. Adi Haryadi telah mendapatkan surat persetujuan dari OJK atas hasil *Fit and Proper Test*-nya pada tanggal 9 Februari 2021.

- Approved the resignation of Mr. Chung Hee Kyung from his position as Independent Commissioner of the Company which has been appointed based on the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 13, 2020 as of the closing of the Meeting.*
- Approve the appointment of Mr. Adi Haryadi as the Company's Independent Commissioner as of the closing of the Meeting, which will be effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan for the fit and proper test and has complied with all the provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2022, which will be held in 2023, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to terminate it at any time. Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company is as follows:  
BOARD OF COMMISSIONERS  
President Commissioner: Arief Budiman  
Commissioner: Park Tae Yong  
Independent Commissioner: Ahmad Fajarprana  
Independent Commissioner: Adi Haryadi\*)  
) The appointment of the members of the Company's Board of Commissioners is effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan on the fit and proper test and has complied with all the provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia*
- Approve to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the substitution right to take all necessary actions related to the decision of this Meeting agenda in accordance with applicable laws, including to declare in a separate notary deed and notify the Changes to the Board of Commissioners of the Company to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations*

*Composition of Bank's Board of Commissioners and Board of Directors at the end of 2020 was in accordance with this GMS Resolutions. Adi Haryadi has been approved by OJK for Fit and Proper Test results on February 9, 2021.*

## Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ tata kelola yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai keorganisasian Bank maupun usaha Bank dan memberikan nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

### Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris Bank, fungsi tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Tugas Dewan Komisaris
  - a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
  - b. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  - c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  - d. Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan/atau Bank Indonesia jika ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  - e. Wajib membentuk Komite-komite guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:
    1. Komite Audit
    2. Komite Pemantau Risiko
    3. Komite Nominasi dan Remunerasi.

*The Board of Commissioners is a governance organ that is in charge and collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors and ensuring that the Bank has implemented GCG at all levels or levels of the organization. The Board of Commissioners is obliged to supervise management policy, the course of management in general, both regarding the organization of the Bank and the Bank's business and provide advice to the Board of Directors. Each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but rather based on the decision of the Board of Commissioners.*

### **Functions, Duties, and Authorities of the Board of Commissioners**

*Based on the Policies and Guidelines of the Bank's Board of Commissioners, the functions, duties and authorities of the Board of Commissioners are as follows:*

1. *Duties of the Board of Commissioners*
  - a. *The Board of Commissioners shall conduct supervision over the management policy, the implementation of the management in general, either regarding the Bank or the Bank's business, and provides advice to the Board of Directors.*
  - b. *Under certain conditions, the Board of Commissioners shall conduct the annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the applicable law and regulations and corporate articles of association.*
  - c. *Board of Commissioners must ensure that Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors as well as the results of the supervision of OJK/Bank Indonesia and/or other regulators/authorities.*
  - d. *Board of Commissioners must inform OJK and/or Bank Indonesia upon the finding of any violations against financial and banking laws and regulations; and any conditions or potential conditions that can endanger the Bank's business continuity.*
  - e. *Board of Commissioners must establish the Committees in order to support the effective implementation of their duties and responsibilities, among others:*
    1. *Audit Committee*
    2. *Risk Monitoring Committee*
    3. *Nomination and Remuneration Committee*

- f. Bersama dengan Direksi menyusun Pedoman dan Kode Etik yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank.
2. Wewenang Dewan Komisaris
- Memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  - Meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Bank kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
  - Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
  - Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar Bank atau keputusan RUPS.
  - Menerima penjelasan dari Direksi mengenai perubahan atas Kebijakan Strategis Bank.
3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
  - Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  - Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  - Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
  - Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
    - » Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
    - » Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. *The Board of Commissioners and Board of Directors should formulate a guideline and Code of Conduct that binds each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as drafting a code of conduct applicable to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees, and supporters of organs owned by the Bank.*
2. *Authorities of the Board of Commissioners*
- Check all books, letters and other evidence, check and match the state of cash and others and have the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.*
  - Request an explanation of all matters concerning the Bank to the Board of Directors and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation of all matters asked by the Board of Commissioners.*
  - Temporarily dismiss members of the Board of Directors by stating the reason.*
  - Perform bank management actions under certain circumstances for a certain period of time stipulated based on the Bank's Articles of Association or GMS resolutions.*
  - Receive an explanation from the Board of Directors regarding changes to the Bank's Strategic Policy.*
3. *Responsibilities of the Board of Commissioners*
- Board of Commissioners shall carry out its duties and responsibilities independently.*
  - Board of Commissioners shall ensure the implementation of GCG principles in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.*
  - Board of Commissioners shall supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as provide advice to the Board of Directors.*
  - In conducting supervision, the Board of Commissioners shall direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.*
  - In conducting supervision, the Board of Commissioners is prohibited from engaging in decision making of the Bank's operational activities, unless:*
    - » Provision of funds to related parties as stipulated in the OJK provisions on the Legal Lending Limit for Commercial Bank.*
    - » Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.*

- |   |   |
|---|---|
| <p>f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>g. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>h. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</li> <li>» Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;</li> <li>» Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</li> <li>» Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</li> </ul> | <p>f. <i>Decision making by the Board of Commissioners does not negate the Board of Directors' responsibility for the management of the Bank.</i></p> <p>g. <i>Each member of the Board of Commissioners is responsible jointly for the Bank's losses caused by the fault or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.</i></p> <p>h. <i>Members of Board of Directors shall not be liable for any loss suffered by the bank if they can prove that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>The loss is not due to their error or negligence.</i></li> <li>» <i>They have prudently managed the bank in good faith and responsibly for the interest in accordance with the objectives and goals of the bank.</i></li> <li>» <i>They do not have any conflicts of interest either directly or indirectly related to management actions resulting the loss; and</i></li> <li>» <i>They have taken necessary actions to prevent or curb the loss.</i></li> </ul> |
|---|---|

### Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Bank menyatakan para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya atau dengan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan BWS.

### Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter)

Dalam menjalankan tugas dan menunjang efektifitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris, diperlukan suatu Kebijakan dan Pedoman Kerja sebagai Pedoman Bagi Dewan Komisaris. Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tertanggal 18 Februari 2020.

### Term of Office of the Board of Commissioners

*The Bank's Articles of Association state that members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The GMS decision on the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners also stipulates the validity period of such appointment and dismissal. In the event that the GMS does not determine, the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall be effective as of the closing of the GMS with due observance to applicable laws and regulations.*

*The term of office of a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years and may be reappointed pursuant to the resolutions of the GMS with due observance to applicable laws and regulations. The Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the Resolutions of the GMS by stating the reason or due to other reasons considered appropriate by the GMS for the benefit and purpose of BWS.*

### Board of Commissioners Charter

*In carrying out its duties and supporting effectiveness in the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners, a Policy and Work Guidelines are required as guidelines for the Board of Commissioners. The Policies and Guidelines of the Board of Commissioners of the Bank shall be stipulated through the Decree of the Board of Commissioners No. 007/KEP-DEKOM/A-13/II/20 dated February 18, 2020.*

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris memuat hal-hal yang terkait dengan organisasi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, keterbukaan, pembentukan komite dan tata tertib rapat Dewan Komisaris serta Komite Dewan Komisaris, serta mengatur hal-hal yang terkait dengan panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Best Practices* serta ditinjau secara berkala serta mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

*The Board of Commissioners Charter contain matters related to the organization, duties and responsibilities, authority, work ethics, openness, the establishment of committees and the procedures of the Board of Commissioners and the Committee of the Board of Commissioners meetings, as well as regulate matters related to the guidance on the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners based on applicable regulations including the Regulation of the OJK and best practices and is reviewed periodically and binding for each member of the Board of Commissioners.*

### Komposisi Dewan Komisaris Bank Tahun 2021

### Composition of the Bank's Board of Commissioners in 2021

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor 49 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut disampaikan kronologi perubahan susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2021.

*As of December 31, 2021, the Board of Commissioners Composition as stipulated in the Deed of Annual GMS Resolutions of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 49 on August 30, 2021 made before Ashoya Ratam, Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the South Jakarta). The following is the chronology of changes in the Board of Commissioners composition throughout 2021.*

### Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Tahun 2021

*Chronological Changes in The Composition of the Board of Commissioners in 2021*

Periode 1 Januari - 27 Agustus 2021 <i>Period January 1 – August 27, 2021</i>	Periode 28 Agustus - 31 Desember 2021 <i>Period August 28 – December 31, 2021</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Arief Budiman (Presiden Komisaris) <i>(President Commissioner)</i>	Arief Budiman (Presiden Komisaris) <i>(President Commissioner)</i>	-
Park Tae Yong (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>		RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2021 menyetujui pemberhentian Park Tae Yong dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2021 <i>The Annual GMS dated March 30, 2021 approved the resignation Park Tae Yong from his positions as the Company's Commissioner as of August 28, 2021</i>
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>	Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>	-
Adi Haryadi (Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>	Adi Haryadi (Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>	-

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 di mana jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit adalah 3 (tiga) namun tidak melebihi jumlah anggota Direksi dan paling sedikit 50% anggotanya adalah Komisaris Independen.

*All members of Board of Commissioners domiciled in Indonesia and the Board of Commissioners composition is in accordance with OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 where the number of members of Board of Commissioners is at least 3 (three) but not exceeds of the number of Board of Directors and at least 50% members are Independent Commissioner.*



Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2021 dapat dilihat di bawah ini.

Thus, the composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2021 can be seen below.

### Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021

Board of Commissioners Composition as of December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Masa Akhir Jabatan Term of Office
Arief Budiman	Presiden Komisaris President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Maret 2020 Resolution of the Annual GMS dated March 29, 2020	Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2022 yang diselenggarakan di tahun 2023
Ahmad Fajarprana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020 Resolution of the 2019 Extraordinary GMS dated December 17, 2020	Until the closing of the 2022 Annual GMS held in 2023
Adi Haryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner		

### Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris wajib dinyatakan lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penjelasan status Uji Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris yang menjabat di akhir tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

### Fit and Proper Test of the Board of Commissioners

All prospective members of the Board of Commissioners must be declared to pass the *Fit & Proper Test* conducted by the OJK. The explanation of the status for *Fit and Proper Test* of the Board of Commissioners who held office at the end of 2021 can be explained in the table below

Nama Name	Jabatan Position	Status Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Description of Fit and Proper Test
Arief Budiman	Presiden Komisaris President Commissioner	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) tanggal 29 Agustus 2019. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the <i>Fit and Proper Test</i> decision dated August 29, 2019.
Ahmad Fajarprana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) tanggal 19 Desember 2014. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the <i>Fit and Proper Test</i> decision dated December 19, 2014.
Adi Haryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) tanggal 9 Februari 2021. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the <i>Fit and Proper Test</i> decision dated February 9, 2021.

### Komisaris Independen

Mengacu kepada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

### Independent Commissioner

Referring to OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016, the Board of Commissioners shall consist of Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners, Independent Commissioners shall amount to at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners. An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial relationship, management, share ownership and/or family relationship with members of the Board of

keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Komisaris Independen diharapkan menjadi penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas untuk mewakili pemegang saham minoritas.

*Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or relationships with the Bank that may affect the relevant ability to act independently. The Independent Commissioner is expected to be a counterweight to decisions made by majority shareholders to represent minority shareholders.*

Komposisi keanggotaan dalam susunan Dewan Komisaris Bank telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

*The composition of membership in the composition of the Bank's Board of Commissioners has fulfilled the number, composition, criteria and independence in accordance with OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.*

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

*The Criteria of Independent Commissioners refers to the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The criteria of independent commissioners are as follows:*

Kriteria Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioners	
	Ahmad Fajarprana	Adi Haryadi
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. <i>An individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Issuer of Public Company within the last 6 (six) month, unless in the context of reappointment as the Independent Commissioner of Issuer or Public Company for the following period.</i>	✘	✘
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. <i>An individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Issuer of Public Company within the last 6 (six) month, unless in the context of reappointment as the Independent Commissioner of Issuer or Public Company for the following period.</i>	✘	✘
Mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. <i>Does directly or indirectly own shares at the Issuer or Public Company.</i>	✘	✘
Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. <i>Does have an affiliation with the Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the main shareholders of the Issuer or Public Company.</i>	✘	✘
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. <i>Does have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Issuer or Public Company.</i>	✘	✘

✓ = ya | ✘ = tidak  
✓ = yes | ✘ = no

Masing-masing Komisaris Independen Bank telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK.

*Each Independent Commissioner of the Bank has made an Independent Statement letter and has been submitted to the OJK.*

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adi Haryadi  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Nomor Telepon Rumah :  
Alamat Domisili :  
Jabatan : Calon Komisaris Independen  
Nama Perusahaan : PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk  
Nomor Telepon Perusahaan : 021-50871906

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau Pemegang Saham Pengendali bank;
2. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 9 November 2020

Mengetahui:



**Choi Jung Hoon**  
Presiden Direktur  
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk



**Adi Haryadi**

### SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fajarprana

Alamat :

No. Identitas (KTP) :

Sehubungan dengan pencalonan diri saya sebagai Komisaris Independen PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Perseroan”) dan mengingat bahwa saya telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali dalam tugas saya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
2. tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian Surat Pernyataan Independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 29 April 2020.

Jakarta, 29 April 2020



Ahmad Fajarprana

## Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat oleh Sekretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan.

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria rapat yang dipersyaratkan, yang telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat Dewan Komisaris serta rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat di tahun 2021.

## Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners may conduct the meeting at any time upon the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners or request of the Board of Directors, by stating the agenda of meetings. In each meeting, the Board of Commissioners shall make a minutes of meeting which made by the Corporate Secretary and signed by the chairman of the meeting and all members of the Board of Commissioners who attended the meeting. The minutes of the meeting contain the materials discussed and decided.

During 2021, the Board of Commissioners has been met with the meeting requirements, which held 10 (ten) times. The following agenda and minutes of the Board of Commissioners Meetings and the recapitulation of Board of Commissioners attendance in the meeting in 2021.

### Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris

Recapitulation of the Board of Commissioners Attendance Level at the Meeting

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Attendances	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri Number of Absences	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Arief Budiman (Presiden Komisaris) (President Commissioner)	10	10	-	100%
Park Tae Yong (Komisaris) (Commissioner)	6	2	4	33%
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	10	10	-	100%
Adi Haryadi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	10	10	-	100%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris Average Attendance of the Board of Commissioners				83%

### Risalah Rapat Dewan Komisaris

Minutes of Meeting of the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	16 Februari 2021 February 16, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian Gaji Direktur Korporat</li> <li>Penyesuaian Rentang Gaji Direksi</li> <li>Penyesuaian Benefit Pengurus</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adjustment of Corporate Director Salary</li> <li>Adjustment of Directors' Salary Range</li> <li>Adjustment of Management Benefit</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Park Tae Yong</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>



No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
2	23 Maret 2021 March 23, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberhentian dengan hormat Sdr. Choi Jung Hoon sebagai Presiden Direktur</li> <li>Penilaian Internal Calon Presiden Direktur Sdr. Hwang Gyusoon</li> <li>Pembahasan Rekomendasi Perubahan Presiden Direktur</li> <li>Penunjukan Sdr. Kang Bong Joo (Direktur Korporat) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur</li> <li>Pemberhentian dengan hormat Sdr. Park Tae Yong sebagai Komisaris</li> <li>Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>Perubahan Susunan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>
3	30 Maret 2021 March 30, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insentif/Bonus berdasarkan kinerja 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris</li> <li>Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021</li> <li>Insentif/Bonus Kinerja Tahun 2021 bagi Presiden Direktur yang berakhir masa bakti tahun 2021</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>
4	27 Mei 2021 May 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Profil Risiko</li> <li>Persetujuan Peningkatan Gaji Karyawan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Park Tae Yong</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>
5	22 Juni 2021 June 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Profil Risiko</li> <li>Penanganan COVID-19</li> <li>Progress Tindak Lanjut Temuan OJK Tahun 2020</li> <li>Progress Penyelesaian Kasus Fraud</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>
6	16 Agustus 2021 August 16, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Kepala Divisi Audit Internal</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>
7	30 Agustus 2021 August 30, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan Penunjukan KAP Shine Wing untuk kebutuhan Audit PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk yang akan dimulai pada tanggal 15 September 2021</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>
8	24 September 2021 September 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2021</li> <li>Penerapan APU &amp; PPT</li> <li>Right Issue</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
9	19 Oktober 2021 October 19, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan <i>dormant account</i> yang belum memiliki kebijakan</li> <li>Risiko operasional beberapa kantor cabang</li> <li>Masukan dari Komite Audit untuk menilai cabang secara lebih <i>comprehensive</i></li> <li><i>Whistleblower</i></li> <li>Risiko Kredit, Risiko operasional, dan Risiko Strategik</li> <li>Pembentukan TFT pada Divisi Remedial</li> <li>Usulan Dekom kepada Divisi Remedial untuk pembuatan dokumen analisa untuk menghindari kelalaian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>
10	27 Desember 2021 December 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Hapus Buku Kredit &amp; Tagihan Klaim Asuransi</li> <li>Persetujuan Hapus Buku oleh Dewan Komisaris</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> <li>Profil risiko Oktober dan November 2021</li> <li>Overview Rencana Kerja 2021 vs Realisasi</li> <li>Komparasi Audit Plan 2021 – 2022</li> <li>Tindak Lanjut Temuan OJK 2021 - Terkait Pengawasan Komisaris</li> <li>Posisi Portofolio Kredit, Risiko Likuiditas dan Pasar, Risiko Strategik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arief Budiman</li> <li>Adi Haryadi</li> <li>Ahmad Fajarprana</li> </ul>

### Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selain rapat internal, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat gabungan dengan pembahasan berbagai hal yang membutuhkan koordinasi diantara kedua organ tersebut. Di tahun 2021 Dewan Komisaris dan Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat gabungan tersebut.

### Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners and Board of Directors may held a joint meeting with agendas on various matters that require coordination between the two organs. In 2021 the Board of Commissioners and Board of Directors has held meetings 3 (three) times. The following agenda and minutes of the joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the recapitulation of the presence of the Board of Commissioners and Board of Directors in these meetings.

## Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan dengan Direksi

Recapitulation of the Board of Commissioners and Board of Directors Attendances Level at the Joint Meeting

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Attendances	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri Number of Absences	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Arief Budiman (Presiden Komisaris) (President Commissioner)	3	3	-	100%
Park Tae Yong <sup>1)</sup> (Komisaris) (Commissioner)	2	1	1	50%
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	3	3	-	100%
Adi Haryadi <sup>2)</sup> (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	3	3	-	100%
Choi Jung Hoon <sup>3)</sup> (Presiden Direktur) (President Director)	1	1	-	100%
Hwang Gyusoon <sup>4)</sup> (Presiden Direktur) (President Director)	2	2	-	100%
Kang Bong Joo (Direktur) (Director)	3	3	-	100%
Sadhana Priatmadja (Direktur) (Director)	3	3	-	100%
M. Tri Budiono (Direktur) (Director)	3	3	-	100%
Benny Sudarsono Tan (Direktur) (Director)	3	3	-	100%
Edwin Sulaeman (Direktur) (Director)	3	3	-	100%
				95%

1) Sejak tanggal 28 Agustus 2021, Park Tae Yong tidak lagi menjabat sebagai Komisaris. sesuai Keputusan RUPS tanggal 30 Maret 2021

2) Sejak tanggal 9 Februari 2021, Adi Haryadi efektif menjabat sebagai Komisaris Independen

3) Sejak tanggal 30 Maret 2021, Choi jung Hoon tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur

4) Sejak tanggal 18 Juni 2021, Hwang Gyusoon efektif menjabat sebagai Presiden Direktur

1) Since August 28, 2021, Park Tae Yong has no longer to serve as Commissioner

2) Since February 9, 2021 Adi Haryadi has been effective to serve as Independent Commissioner

3) As of March 30, 2021, Choi jung Hoon has no longer to serve as President Director

4) Since June 18, 2021, Hwang Gyusoon has been effective to serve as President Director

## Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham *Board of Commissioners Attendance in the GMS*

Di sepanjang tahun 2021, Bank melakukan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2020 yang diselenggarakan tanggal 30 Maret 2021 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 14 Juli 2021. Berikut disampaikan kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS tersebut.

*During 2021, Bank conducted 2 (two) GMS, namely the Annual GMS for the 2020 performance accountable held on March 30, 2021 and the Extraordinary GMS held on July 14, 2021. The following is the Board of Commissioners attendance in the GMS.*

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Kehadiran Dewan Komisaris pada <i>Board of Commissioners Attendance</i>	
	RUPS Tahunan tahun buku 2020 tanggal 30 Maret 2021 <i>The 2020 Annual GMS on March 30, 2021</i>	RUPS Luar Biasa tanggal 14 Juli 2021 <i>The Extraordinary GMS on July 14, 2021</i>
Arief Budiman (Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i> )	✓	✓
Park Tae Yong (Komisaris / <i>Commissioner</i> )	✗	✗
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> )	✓	✓ <sup>**)</sup>
Adi Haryadi (Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> )	✓ <sup>**)</sup>	✓ <sup>**)</sup>

✓ = hadir | ✗ = tidak hadir  
✓ = present | ✗ = not present

\*) Sejak 28 Agustus 2021, Park Tae Yong tidak lagi menjabat Komisaris.

\*\*\*) Hadir melalui media video teleconference

\*) Since August 28, 2021, Park Tae Yong has no longer to serve as Commissioner.

\*\*) Present via video teleconference

## Pelatihan Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

## *Trainings, Education and/or Competency Development for Board of Commissioners*

Bank memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan workshop.

*Bank provides an opportunity for Board of Commissioners to develop and improve its self-competence through training and certification, as well as other competency development programs such as seminars and workshops.*

Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2021.

*The following is the educational training and/or competency development for Board of Commissioners in 2021.*

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pelatihan <i>Types of Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Materials of Education and Training</i>	Tempat dan Waktu <i>Place and Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Arief Budiman Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Pelatihan <i>Training</i>	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based Supervisory Effectiveness of Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation	Webinar, 25 Maret 2021 <i>Webinar, March 25, 2021</i>	FKDKP

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Arief Budiman Presiden Komisaris President Commissioner	Pelatihan Training	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)	Webinar, 21 Juli 2021 Webinar, July 21, 2021	BWS & PT Efektifpro Knowledge Source
Ahmad Fajarprana Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based Supervisory Effectiveness of Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation	Webinar, 25 Maret 2021 Webinar, March 25, 2021	FKDKP
Ahmad Fajarprana Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)	Webinar, 21 Juli 2021 Webinar, July 21, 2021	BWS & PT Efektifpro Knowledge Source
Adi Haryadi Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based Supervisory Effectiveness of Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation	Webinar, 25 Maret 2021 Webinar, March 25, 2021	FKDKP
Adi Haryadi Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)	Webinar, 21 Juli 2021 Webinar, July 21, 2021	BWS & PT Efektifpro Knowledge Source

### Program Orientasi bagi Dewan Komisaris Baru

Program orientasi bagi Komisaris baru diselenggarakan dengan tujuan agar Komisaris baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Program orientasi meliputi antara lain program sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi yang diwajibkan oleh OJK dan/atau BI.

Di tahun 2021 BWS mengangkat Bapak Adi Haryadi sebagai Komisaris. Program orientasi dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021 yang dihadiri oleh jajaran Komisaris dan Direksi untuk menyampaikan gambaran atas kegiatan bisnis yang telah berjalan, rencana Bank kedepan, dan hal lainnya yang Komisaris perlu ketahui.

Berikutnya beliau juga telah mengikuti pelatihan Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based (tanggal 25 Maret 2021 oleh FKDKP) dan pelatihan Implementasi Risk Based Bank Rating (tanggal 21 Juli 2021 oleh BWS dan rekanan lembaga pelatihan PT Efektifpro Knowledge Source).

### Orientation Program for New Board of Commissioners

The orientation program for new Commissioners is held with the aim that new Commissioners are able to carry out their duties and responsibilities well. The orientation program includes, socialization, training and certification programs required by OJK and/or BI.

In 2021, BWS appointed Mr. Adi Haryadi as Commissioner. The orientation program was held on March 23, 2021, which was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors to convey an overview of the ongoing business activities, the Bank's future plans, and other matters that the Commissioners need to know.

Next, he also attended training on the Effectiveness of Supervision of the Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation (dated March 25, 2021 by FKDKP) and training on Implementation of Risk Based Bank Rating (July 21, 2021 by BWS and partner training institution, PT Effectivepro Knowledge sources).



## Penilaian atas Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

- Evaluasi dan Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham, berdasarkan kinerja yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya pengelolaan Bank yang dilakukan Direksi. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi:

- » Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja  
Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun, dengan menggunakan indikator *Self Assessment*.
- » Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja:
  - Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi Bank dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Bank.
  - Memonitoring untuk terciptanya GCG.
- » Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja  
Pihak-pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham. Penilaian terhadap pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPS. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja Dewan Komisaris selama periode 2021.

- Penilaian atas Kinerja Direksi  
Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut.
  - » Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan kajian terhadap sistem penilaian kinerja Direksi.

## Assessment for Board of Commissioners and Board of Directors Performances

- *Evaluation and Assessment for Board of Commissioners Performances*

*Evaluation on the Board of Commissioners performance is conducted by the Shareholders, based on the performance of Board of Commissioners in overseeing the management of Bank by the Board of Directors. In general, the Board of Commissioners performance is determined based on the duties and obligations contained in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association and mandates of shareholders. Formal evaluation criteria are submitted publicly to members of the Board of Commissioners from the date of appointment.*

*The evaluation of the overall performance of the Board of Commissioners and the performance of each Member of the Board of Commissioners individually are an integral part of the compensation scheme and incentives for Members of the Board of Commissioners.*

*The performance assessment of the Board of Commissioners and its implementation shall include at least:*

- » *Performance Assessment Implementation Procedure*  
*The performance evaluation procedure of the Board of Commissioners is carried out once every year, using the Self Assessment indicator.*
- » *Criteria used in Performance Assessment*
  - *Contribution and support of the Board of Commissioners in implementing the Bank's vision and mission for the current year's work program, and still upholding the Bank's values.*
  - *Monitor GCG creation.*
- » *Performance Assessor*  
*The performance assessors of the Board of Commissioners are shareholders carried out in the GMS. The Board of Commissioners will responsible for the performance of the Board of Commissioners during the period 2021.*

- *Assessment for Board of Directors Performances*  
*Performance evaluation is conducted in a comprehensive, tiered, and periodic manner. The performance assessment of the Board of Directors is as follows:*
  - » *The Board of Commissioners requests the Nomination and Remuneration Committee to review the Board of Directors' performance assessment system.*

- » Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan koordinasi dengan *Human Capital Division* dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan rekomendasi tentang sistem penilaian kinerja Direksi.
  - » Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun rekomendasi penilaian kinerja Direksi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
  - » Dewan Komisaris membahas rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tentang penilaian kinerja Direksi dan kemudian memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi untuk dapat disampaikan dalam RUPS.
  - » Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan usulan persetujuan atas pencapaian kinerja Direksi dalam RUPS dan RUPS akan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- Penilaian Penerapan GCG untuk Organ Dewan Komisaris dan Direksi  
BWS melakukan penilaian penerapan GCG berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi Bank Umum, penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Pada *governance structure* terdapat penilaian untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat dilihat pada bagian Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG Bank di awal bab ini.
- » *The Nomination and Remuneration Committee coordinates with the Human Capital Division and related Divisions to prepare recommendations for the Board of Directors' performance assessment system.*
  - » *Nomination and Remuneration Committee prepares recommendations for performance assessment of the Board of Directors and submitted to the Board of Commissioners.*
  - » *The Board of Commissioners discusses the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee on the performance assessment of the Board of Directors and provides an assessment of the performance of the Board of Directors to be delivered at the GMS.*
  - » *The Board of Commissioners and Board of Directors submit a proposal for approval of the achievement of the Board of Directors' performance in the GMS and GMS will granting full release and discharge to members of the Board of Directors for the management and supervision implemented during the past financial year, as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements except for embezzlement, fraud and other criminal acts.*
  - *Assessment of GCG Implementation for The Organs of the Board of Commissioners and Board of Directors*  
*BWS conducts an assessment of the GCG implementation based on the provisions of the OJK on the GCG implementation for Commercial Bank, an assessment of the GCG implementation based on 5 (five) basic principles classified in a governance system consisting of 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome. In the governance structure there is an assessment for aspects of the Board of Commissioners and Board of Directors, which can be seen in the Assessment and Evaluation section of GCG Bank Implementation at the beginning of this chapter.*

### Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.

Atas kinerja di tahun 2021, Dewan Komisaris memandang bahwa seluruh komite tersebut telah bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

### Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

*To support the effectiveness of duties and monitoring functions, Board of Commissioners is assisted by Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee.*

*For the performance in 2021, Board of Commissioners considers that all committees have worked by upholding good quality and competency standards.*

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di tahun 2021 Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2021 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan bagi Bank. Di tahun 2021 Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2021 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Di tahun 2021 Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.

### **Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2021**

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya melalui penyampaian saran dan arahan kepada Direksi, baik dalam bentuk surat menyurat maupun penyampaian pandangan serta berbagai rekomendasi yang mencakup pengelolaan operasional maupun hal-hal lain sesuai tugas dan kewajibannya. Rekomendasi Dewan Komisaris juga disampaikan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, diantaranya adalah rekomendasi dalam rangka pembenahan proses audit, rekomendasi terkait fokus dan perbaikan di sumber daya manusia, proses bisnis dan hal-hal fundamental lainnya.

*The Audit Committee has duties and responsibilities to assist and facilitate the Board of Commissioners in carrying out the duties and functions of supervision on matters related to the quality of financial information, internal control systems, effectiveness of external and internal auditor examination, effectiveness of risk management implementation and compliance with applicable laws and regulations. In 2021 the Board of Commissioners considers that the Audit Committee has performed its duties and responsibilities well. Throughout 2021 the Audit Committee has held meetings 13 (thirteen) times.*

*The Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities in carrying out supervision and advising the Board of Directors to obtain adequate confidence so that the implementation of risk management of the Bank continues to meet the elements of adequacy of risk management procedures and methodologies, so that the Bank's business activities can still be controlled at acceptable and profitable limits for the Bank. In 2021 the Board of Commissioners considers that the Risk Monitoring Committee has performed its duties and responsibilities well. Throughout 2021 the Risk Monitoring Committee has held meetings 12 (twelve) times.*

*Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities to assist in carrying out its functions and duties in the field related to remuneration and nomination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In 2021 the Board of Commissioners considers that the Nomination and Remuneration Committee has performed its duties and responsibilities well. Throughout 2021 the Nomination and Remuneration Committee has held meetings 8 (eight) times.*

### **Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2021**

*The Board of Commissioners carries out its supervisory functions through the delivery of advice and direction to the Board of Directors, both in the form of correspondence and the delivery of views and various recommendations that include operational management and other matters in accordance with their duties and obligations. The Recommendations of the Board of Commissioners are also delivered in a joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, among which are recommendations in order to improve the audit process, recommendations related to focus and improvement in human resources, business processes and other fundamental matters.*

Jumlah surat keputusan Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebanyak 14 (empat belas) keputusan, antara lain adalah sebagai berikut:

*The number of decisions of the Board of Commissioners during 2021 is as many as 14 (fourteen) decisions, among others are as follows:*

No Surat Letter Number	Tanggal Dated	Perihal Subject
003/BWS-DEKOM/II/2021	19 Februari 2021 February 19, 2021	Permintaan Penilaian Internal Pengurus Baru dan Rekomendasi atas Perubahan Pengurus PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk <i>Request for Internal Assessment of the New Management and Recommendation for Changes in the Management of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk</i>
004/BWS-DEKOM/III/2021	15 Maret 2021 March 15, 2021	Perubahan Remunerasi BOD <i>Changes in BOD Remunerations</i>
005/KEP.DEKOM/III/2021	15 Maret 2021 March 15, 2021	Keputusan Dewan Komisaris atas Remunerasi BOD <i>Board of Commissioners Decision on BOD Remunerations</i>
006/BWS-DEKOM/RUPS/III/2021	29 Maret 2021 March 29, 2021	Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk <i>Proposed Changes in the Management Composition of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk</i>
007/KEP.DEKOM/XI/2021	30 Maret 2021 March 30, 2021	Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Nomor: 014/KEP.DEKOM/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 Tentang Keanggotaan Komite Komite Dibawah Dewan Komisaris <i>Changes in Board of Commissioners of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Decision Letter No. 014/KEP.DEKOM/XI/2020 dated November 17, regarding membership of committees under Board of Commissioners</i>
009/KEP.DEKOM/III/2021	30 Maret 2021 March 30, 2021	Remunerasi BOD dan BOC <i>BOD and BOC Remunerations</i>
010/BWS-DEKOM/VI/2021	10 Juni 2021 June 10, 2021	Persetujuan Penunjukan KAP Right Issue <i>Approval in Appointment of Public Accountant Firm Right Issue</i>
011/BWS-DEKOM/VI/2021	17 Juni 2021 June 17, 2021	Revisi Rencana Bisnis PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Periode 2021-2023 <i>Revised Business Plan of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Period 2021-2023</i>
013/BWS-DEKOM/VII/2021	31 Agustus 2021 August 31, 2021	Surat Persetujuan Penunjukan KAP <i>Letter of Approval for Appointment of Public Accountant Firm</i>
014/BWS-DEKOM/VIII/2021	16 Agustus 2021 August 16, 2021	Persetujuan Perubahan Kepala Divisi Audit Internal <i>Approval of Change of Head of Internal Audit Division</i>
015/BWS-DEKOM/VIII/2021	16 Agustus 2021 August 16, 2021	Persetujuan Harga Exercise Saham Right Issue <i>Approval for the Exercise Price of Right Issue Shares</i>
016/BWS-DEKOM/IX/2021	08 September 2021 September 08, 2021	Rekomendasi Komite Audit Terkait Kasus KC Kediri <i>Audit Committee Recommendation Regarding Kediri Branch Office Cases</i>
017/KEP.DEKOM/IX/2021	21 September 2021 September 21, 2021	Surat Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit Konsumtif Umum <i>Application Letter for Approval of General Consumptive Loan Facility</i>
018/KEP.DEKOM/XI/2021	21 September 2021 September 21, 2021	Persetujuan RBB 2022-2024 <i>Approval for 2022-2024 Bank's Business Plan</i>

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK di setiap semester.

*Based on OJK Regulation No. 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plan, the Board of Commissioners shall carry out supervision on the implementation of the Bank's Business Plan which includes, among others, policies and management strategies. The results of the supervision are set forth in the Supervisory Report on the Implementation of the Bank's Business Plan submitted to the OJK in each semester.*

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

*In 2021, the Board of Commissioners has made and submitted a Report on the Implementation of the Bank's Business Plan as follows:*

No Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
064/BWS-DEKOM/OJK/ II/2021	26 Februari 2021 February 26, 2021	Penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Periode Semester II/2020 Submit the Monitoring Report on PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Business Plan for period of Semester II/2020
262/BWS-DEKOM/OJK/ VIII/2021	31 Agustus 2021 August 31, 2021	Penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Periode Semester I/2021 Submit the Monitoring Report on PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Business Plan for period of Semester I/2021



## Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ tata kelola yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Bank melalui RUPS. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan kepentingan dan tujuan Bank dan diatur dalam Anggaran Dasar yang merujuk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia, OJK dan ketentuan terkait lainnya. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab juga mengacu kepada Kebijakan Direksi yang senantiasa ditingkatkan secara berkala.

Prinsip dasar Direksi sebagai organ tata kelola Bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Bank agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Dasar hukum keberadaan Direksi adalah sebagai berikut:

- Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Bank.

Tugas utama Direksi adalah bertanggung jawab menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank. Direksi juga mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan keterbatasannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

The Board of Directors is a governance organ that is fully authorized and responsible for managing the Bank's management through the GMS. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is in accordance with the interests and objectives of the Bank and is stipulated in the Articles of Association which refers to the Law of Limited Liability Companies, the provisions of Bank Indonesia, OJK and other related provisions. The Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities also refers to the Board of Directors Policy which is constantly improved periodically.

The basic principles of the Board of Directors as the Bank's governance organ that is in charge and responsible collectively in managing the Bank in order to generate added value and ensure business continuity. Each member of the Board of Directors may carry out the task of making decisions in accordance with the allocation of duties and authorities. The legal basis for the existence of the Board of Directors is as follows:

- Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
- OJK Regulation No. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Bank.
- OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Bank's Articles of Association.

The main task of the Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to the management of the Bank. The Board of Directors also represents the Bank both inside and outside the Court with its limitations as stipulated in the laws and regulations.



## Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
- Membentuk komite.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- Menyusun:
  - » Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - » Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menjaga citra Bank serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan yang ditetapkan dalam RUPS, Rapat Direksi dan peraturan Bank.

## Wewenang Direksi

Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

- Menjalankan pengurusan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.
- Melakukan perbuatan hukum dalam hal:
  - » Mengalihkan atau melepaskan hak.
  - » Menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta bank yang besaran nilainya diatur dalam anggaran dasar.
  - » Pelaksanaan transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

- The Board of Directors shall be obliged to carry out and be responsible for the management of the Bank for the interest of the Bank pursuant to the purposes and objective of the Bank as determined in the articles of association.
- Board of Directors must hold annual GMS and the other GMS as regulated in the laws and regulations and the articles of association.
- Board of Directors must carry out its duties and responsibilities with good faith, full of responsibility and prudently.
- Board of Directors must carry out GCG principles in every business activity of the Bank at all levels or levels of organization in the Bank.
- Board of Directors may establish a committee.
- Board of Directors must conduct evaluation toward the performance of the committee every end of financial year.
- Board of Directors must Prepare:
  - » A guidance binding each member of the Board of Directors pursuant to the prevailing provisions of laws and regulations.
  - » The code of conduct prevails to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/officers and organ support of the Bank pursuant to the applicable laws and regulations.
- Board of Directors shall to maintaining the Bank's reputation and establishing relationships with all stakeholders.
- Board of Directors must carry out other duties and responsibilities stipulated in the Articles of Association, Laws and Regulations stipulated in the GMS, Meeting of The Board of Directors and Bank internal regulations.

## Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors has the following authorities:

- Carry out management Bank in accordance with appropriate policies, and the objectives and goals set forth in the corporate articles of association.
- Represent the Bank inside or outside the court.
- Take legal action in the case:
  - » Transfer or release the right.
  - » Placing as security of loan, all or substantial part of the assets of the bank which the amount is stipulated in the articles of association.
  - » Conduct material transaction, affiliate transaction and conflict of interest transaction as stipulated in the laws and regulations in the capital market sector.

- Mengatur pembagian wewenang pengurusan di antara anggota Direksi.

- *Regulates the distribution of management authority among members of the Board of Directors.*

### Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

### Term of Office of the Board of Directors

*The term of office of a member of the Board of Directors is 3 (three) years and may be reappointed pursuant to the resolutions of the GMS without prejudice to the rights of GMS to dismiss at any time by stating the reason.*

### Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, Direksi senantiasa merujuk pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan dijabarkan pada Kebijakan Direksi No. 070/KEP-DIR/A-13/ IX/20 tanggal 21 September 2020. Dalam kebijakan tersebut, dijelaskan mengenai tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

### Board of Directors Charter

*In carrying out its duties and obligations, the Board of Directors always refers to the Board of Commissioners and Board of Directors Charter as contained to the Bank's Articles of Association and is outlined in the Board of Directors Policy No. 070/KEP-DIR/A-13/IX/20 dated September 21, 2020. In the policy, it is explained about the stages of activity in a structured, systematic, easy to understand, and can be carried out consistently in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of the Bank, so that it is expected that high standards of work will be achieved in line with GCG principles.*

### Komposisi Direksi Bank Tahun 2021

Komposisi Direksi per 31 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor 44 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kronologi perubahan susunan Direksi di tahun 2021 tercantum sebagaimana di bawah ini.

### Composition of the Bank's Board of Directors in 2021

*As of December 31, 2021, the Board of Directors Composition is in accordance with the Annual GMS Resolutions on March 30, 2021. Under the Annual GMS, has no addition in the number of Board of Directors. The number of Board of Directors is still 6 (six), which one is President Director. Chronology of Changes in the Board of Directors composition in 2021 as stipulated in this table below.*

### Kronologis Perubahan Susunan Direksi di Tahun 2021

*Chronology of Changes in the Board of Directors composition in 2021*

Periode 1 Januari - 29 Maret 2021 <i>Period January 1 – March 29, 2021</i>	Periode 30 Maret - 17 Juni 2021 <i>Period March 30 - June 17, 2021</i>	Periode 18 Juni - 31 Desember 2021 <i>Period June 18 - December 31, 2021</i>	Keterangan <i>Description</i>
Choi Jung Hoon (Presiden Direktur) <i>(President Director)</i>			RUPS Tahunan Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 menyetujui pemberhentian Choi Jung Hoon dari jabatannya selaku Presiden Direktur. <i>The 2021 Annual GMS on March 30, 2021 was approved the resignation Choi Jung Hoon from his position as President Director.</i>

Periode 1 Januari - 29 Maret 2021 <i>Period January 1 - March 29, 2021</i>	Periode 30 Maret - 17 Juni 2021 <i>Period March 30 - June 17, 2021</i>	Periode 18 Juni - 31 Desember 2021 <i>Period June 18 - December 31, 2021</i>	Keterangan <i>Description</i>
Kang Bong Joo (Direktur) <i>(Director)</i>	Kang Bong Joo (Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur) <i>(Act. President Director concurrently Director)</i>	Kang Bong Joo (Direktur) <i>(Director)</i>	RUPS Tahunan Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 menyetujui pengangkatan Hwang Gyusoon selaku Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam RUPS Tahunan tersebut juga memberikan keputusan bahwa selama Hwang Gyusoon belum efektif menjabat sebagai Presiden Direktur, Perseroan menunjuk Kang Bong Joo yang saat itu menjabat sebagai Direktur merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur Perseroan. <i>The 2021 Annual GMS dated March 30, 2021 approved the appointment of Hwang Gyusoon as President Director effective as of the closing of the Meeting, which will be effective after obtaining approval from the OJK on the fit and proper test and has complied with all provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia. The Annual GMS also gave a decision that as long as Hwang Gyusoon has not effectively served as President Director, the Company appointed Kang Bong Joo, who at that time served as Director and Acting President Director of the Company.</i>
Sadhana Priatmadja (Direktur Kepatuhan) <i>(Compliance Director)</i>	Sadhana Priatmadja (Direktur Kepatuhan) <i>(Compliance Director)</i>	Sadhana Priatmadja (Direktur Kepatuhan) <i>(Compliance Director)</i>	
M. Tri Budiono (Direktur) <i>(Director)</i>	M. Tri Budiono (Direktur) <i>(Director)</i>	M. Tri Budiono (Direktur) <i>(Director)</i>	
Benny Sudarsono Tan (Direktur) <i>(Director)</i>	Benny Sudarsono Tan (Direktur) <i>(Director)</i>	Benny Sudarsono Tan (Direktur) <i>(Director)</i>	
Edwin Sulaeman (Direktur) <i>(Director)</i>	Edwin Sulaeman (Direktur) <i>(Director)</i>	Edwin Sulaeman (Direktur) <i>(Director)</i>	
	Hwang Gyusoon (Presiden Direktur) <i>(President Director)</i>	Hwang Gyusoon (Presiden Direktur) <i>(President Director)</i>	Hwang Gyusoon telah efektif menjabat sebagai Presiden Direktur terhitung sejak tanggal 18 Juni 2021 <i>Hwang Gyusoon has been effective to serve as President Director as of June 18, 2021</i>

Dengan demikian, susunan Direksi Bank per 31 Desember 2021 dapat dilihat di bawah ini.

*Thus, the composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2021 can be seen below.*

### Susunan Direksi per 31 Desember 2021

*Board of Directors Composition per December 31, 2021*

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Penunjukan <i>Basis of Appointment</i>	Masa Akhir Jabatan <i>Term of Office</i>
Hwang Gyusoon	Presiden Direktur <i>President Director</i>	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2021 <i>Resolution of the Annual GMS dated March 30, 2021</i>	
Sadhana Priatmadja	Direktur <i>Director</i>		Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023
Mochamad Tri Budiono	Direktur <i>Director</i>		
Benny Sudarsono Tan	Direktur <i>Director</i>	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 <i>Resolution of the Annual GMS dated April 29, 2020</i>	Until the closing of the 2022 Annual GMS held in 2023
Edwin Sulaeman	Direktur <i>Director</i>		
Kang Bong Joo	Direktur <i>Director</i>		

## Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Seluruh calon anggota Direksi wajib dinyatakan lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penjelasan status Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi yang menjabat di akhir tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

## Board of Director's Fit and Proper Test

All prospective members of the Board of Directors must be declared to pass the *Fit & Proper Test* conducted by the OJK. The explanation of the status for *Fit and Proper Test* of the Board of Directors who held office at the end of 2020 can be explained in the table below.

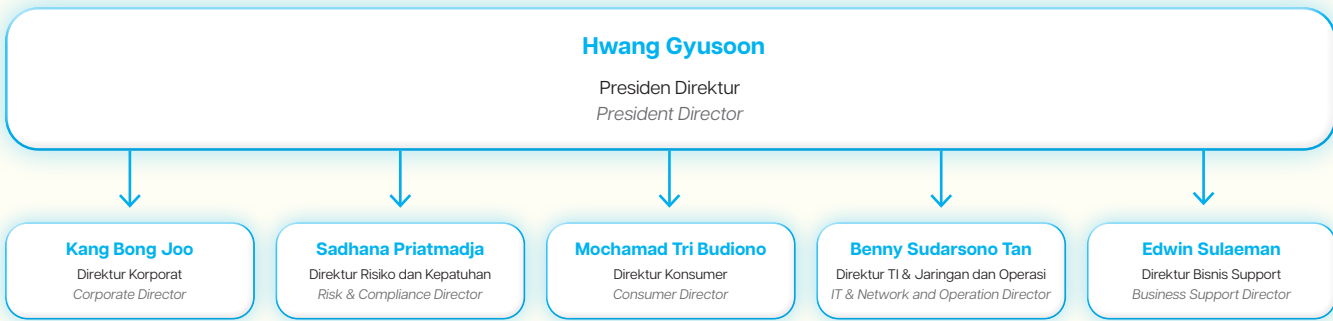
Nama Name	Jabatan Position	Status Status	Keterangan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Description of Fit and Proper Test
Hwang Gyusoon	Presiden Direktur President Director	Lulus Pass	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Utama pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-71/D.03/2021 tertanggal 19 Mei 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hwang Gyusoon Selaku Direktur Utama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk <i>Has been declared to meet the requirements to become Bank's President Director under the OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-71/D.03/2021 dated May 19, 2021 regarding the Result of Fit and Proper Test for Mr. Hwang Gyusoon as President Director of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk</i>
Sadhana Priatmadja	Direktur Director	Lulus Pass	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur Risiko & Kepatuhan pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-101/D.03/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Sadhana Priatmadja Selaku Direktur Risiko & Kepatuhan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk <i>Has been declared to meet the requirements and get Approval to become Bank's Risk and Compliance Director under the OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-101/D.03/2020 dated August 7, 2020 regarding the Result of Fit and Proper Test for Mr. Sadhana Priatmadja as Risk and Compliance Director of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk</i>
Mochamad Tri Budiono	Direktur Director	Lulus Pass	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur Konsumer pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-119/D.03/2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Mochamad Tri Budiono Selaku Direktur Konsumer PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk <i>Has been declared to meet the requirements and get Approval to become Bank's Consumer Director under the OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-119/D.03/2018 dated July 31, 2018 regarding the Result of Fit and Proper Test for Mr. Mochamad Tri Budiono as Consumer Director of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk</i>
Benny Sudarsono Tan	Direktur Director	Lulus Pass	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur TI & Jaringan dan Operasi pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-130/D.03/2019 tertanggal 25 Juli 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Benny Sudarsono Tan Selaku Direktur TI & Jaringan dan Operasi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. <i>Has been declared to meet the requirements and get Approval to become Bank's IT &amp; Network and Operations Director under the OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-130/D.03/2019 dated July 25, 2019 regarding the Result of Fit and Proper Test for Mr. Benny Sudarsono as IT &amp; Network and Operations Director of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk</i>
Edwin Sulaeman	Direktur Director	Lulus Pass	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur Business Support pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-102/D.03/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Edwin Sulaeman Selaku Direktur Business Support PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk <i>Has been declared to meet the requirements and get Approval to become Bank's Business Support Director under the OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-102/D.03/2020 dated August 7, 2020 regarding the Result of Fit and Proper Test for Mr. Edwin Sulaeman as Business Support Director of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk</i>
Kang Bong Joo	Direktur Director	Lulus Pass	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur Korporat pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-103/D.03/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kang Bong Joo Selaku Direktur Korporat PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. <i>Has been declared to meet the requirements and get Approval to become Bank's Corporate Director under the OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-103/D.03/2020 dated August 7, 2020 regarding the Result of Fit and Proper Test for Mr. Kang Bong Joo as Corporate Director of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk</i>

## Pembagian Tugas Antar Direksi

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 039/KEP.DIR/HC.III/VIII/2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat sebagaimana diubah dalam Keputusan Direksi Nomor 055/KEP.DIR/HC.III/X/2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi Direktorat Risiko & Kepatuhan, Direktorat Konsumer, Direktorat IT dan Jaringan & Operasi dan Direktorat Korporat Kantor Pusat, Direksi melakukan pembagian lingkup tugas sebagai berikut ini.

## Segregation of Duties Between the Board of Directors

Under Board of Director Decree No. 039/KEP.DIR/HC.III/VIII/2021 concerning Changes in the Organizational Structure of Head Office as amended in the Board of Directors Decree Number 055/KEP.DIR/HC.III/X/2021 concerning Changes in the Organizational Structure of Risk & Compliance Directorate, Consumers Directorate, IT and Network & Operations Directorate and Corporate Directorate of Head Office, the Board of Directors segregates the duties are as follows:



### Presiden Direktur, Hwang Gyusoon President Director, Hwang Gyusoon

- Audit Internal
- Perencanaan Strategi dan Keuangan
- Internal Audit
- Strategic and Financial Planning

### Direktur Korporat, Kang Bong Joo Corporate Director, Kang Bong Joo

- Pemasaran Korporat
- Pemasaran Korporat Global
- Corporate Investment Banking
- Corporate Business Support
- Manajemen Treasury
- Corporate Marketing
- Global Corporate Marketing
- Corporate Investment Banking
- Corporate Business Support
- Treasury Management

### Direktur Risiko dan Kepatuhan, Sadhana Priatmadja Risk and Compliance Director, Sadhana Priatmadja

- Manajemen Risiko
- Kepatuhan
- Loan Review
- Corporate & Business Legal
- Corporate Secretary & Communications
- Risk Management
- Compliance
- Loan Review
- Corporate & Business Legal
- Corporate Secretary & Communications

### Direktur Konsumer, Mochamad Tri Budiono Consumer Director, Mochamad Tri Budiono

- Produk dan Layanan
- Kredit Konsumer
- Unit Bisnis
- Products and Services
- Consumer Loan
- Business Unit

### Direktur TI & Jaringan dan Operasi, Benny Sudarsono Tan IT & Network and Operation Director, Benny Sudarsono Tan

- Satuan Kerja Teknologi Informasi
- Jaringan dan Operasi
- Digital Banking
- Information Technology Division
- Network and Operation
- Digital Banking

### Direktur Bisnis Support, Edwin Sulaeman Business Support Director, Edwin Sulaeman

- Human Capital
- Remedial & Special Asset Management Division
- General Affairs & Tax
- Manajemen Kredit
- Manajemen Asuransi
- Human Capital
- Remedial & Special Asset Management Division
- General Affairs & Tax
- Credit Management
- Insurance Management



## Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang pejabat setingkat di bawah direksi. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk bertugas untuk membuat serta mendistribusikan risalah rapat Direksi.

Sepanjang tahun 2021 Direksi telah memenuhi kriteria rapat yang dipersyaratkan, yang telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat Direksi serta rekapitulasi kehadiran Direksi dalam rapat di tahun 2021.

## Board of Directors Meeting

The Board of Directors Meeting held periodically, at least once every month and in such meetings, the Board of Directors may invite the officials under the Board of Directors. In each meeting, the Board of Directors shall make a minutes of meetings signed by the chairman of the Board of Directors and all members of the Board of Directors who attended the meeting. The minutes of the meeting contain the materials discussed and decided. Corporate Secretary or appointed officials are tasked to create and distribute minutes of meetings of the Board of Directors.

Throughout 2021 the Board of Directors has met the required meeting criteria, which have been held 12 (twelve) times. The following agenda and minutes of the Board of Directors meeting and recapitulation of the presence of the Board of Directors in the meeting in 2021.

### Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Recapitulation of the Board of Directors Attendance Level at the Meeting

Dewan Komisaris Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Attendances	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri Number of Absences	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Hwang Gyusoon <sup>1)</sup> (Presiden Direktur-menggantikan) (President Director-substituer)	6	6	-	100%
Choi Jung Hoon <sup>2)</sup> (Presiden Direktur-digantikan) (President Director-substituted)	3	3	-	100%
Kang Bong Joo (Direktur/ Director)	12	12	-	100%
Sadhana Priatmadja (Direktur/ Director)	12	12	-	100%
M. Tri Budiono (Direktur/ Director)	12	12	-	100%
Benny Sudarsono Tan (Direktur/ Director)	12	12	-	100%
Edwin Sulaeman (Direktur/ Director)	12	12	-	100%
Rata-rata Kehadiran Direksi Average Attendance of the Board of Directors				100%

1) Sejak tanggal 18 Juni 2021, Hwang Gyusoon efektif menjabat sebagai Presiden Direktur

2) Sejak 30 Maret 2021, Choi Jung Hoon tidak lagi menjabat Presiden Direktur. Posisinya digantikan oleh Hwang Gyusoon.

1) Since June 18, 2021, Hwang Gyusoon has been effective to serve as President Director

2) Since March 30, 2021, Choi Jung Hoon has no longer to serve as President Director. His position was replaced by Hwang Gyusoon.

## Risalah Rapat Direksi

### Minutes of Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	11 Januari 2021 January 11, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan Tahun 2020</li> <li>Kondisi dan Proyeksi NPL di Tahun 2021</li> <li>Kondisi Likuiditas Bank</li> <li>Progress Project SPAN</li> <li>Strategi utama fokus pada Digitalisasi Perbankan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance in 2020</li> <li>NPL Conditions and Projections in 2021</li> <li>Bank Liquidity Condition</li> <li>Progress of SPAN Project</li> <li>The main strategy focused on Banking Digitization</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choi Jung Hoon</li> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
2	2 Februari 2021 February 2, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d Januari 2021</li> <li>Penanganan COVID-19 di BWS</li> <li>Perpanjangan Sewa Kantor</li> <li>Progress Project SPAN</li> <li>Penilaian Kinerja Karyawan Tahun 2020</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance until January 2021</li> <li>COVID-19 Handling in BWS</li> <li>Office Lease Extension</li> <li>Progress of SPAN Project</li> <li>Assessment of Employee Performance in 2020</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choi Jung Hoon</li> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
3	15 Maret 2021 March 15, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d Februari 2021</li> <li>Penanganan COVID-19 di BWS</li> <li>Pengembangan BWS Mobile Banking</li> <li>Penanganan Kasus Fraud Take Over Kredit di KC Ampera</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance until February 2021</li> <li>COVID-19 Handling in BWS</li> <li>BWS Mobile Banking Developments</li> <li>Handling of Loan Take Over Fraud Cases at Ampera Branch Offices</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choi Jung Hoon</li> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
4	26 April 2021 April 26, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d Maret 2021</li> <li>Penanganan COVID-19 di BWS</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance until March 2021</li> <li>COVID-19 Handling in BWS</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
5	04 Mei 2021 May 4, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d April 2021</li> <li>Penanganan COVID-19 di BWS</li> <li>Financial Performance until April 2021</li> <li>COVID-19 Handling in BWS</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
6	14 Juni 2021 June 14, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d Mei 2021</li> <li>Penanganan COVID-19 di BWS</li> <li>Realisasi dan Rencana Kerja Tahun 2021 per masing-masing Direktorat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance until May 2021</li> <li>COVID-19 Handling in BWS</li> <li>2021 Realization and Work Plan per each Directorate</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
7	26 Juli 2021 July 26, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d Juni 2021</li> <li>Klaim Asuransi</li> <li>KUPEG</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance until June 2021</li> <li>Insurance Claims</li> <li>KUPEG</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hwang Gyusoon</li> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
8	16 Agustus 2021 August 16, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d Juli 2021</li> <li>Perubahan Status KK Dalem Kaum menjadi KCP Dalem Kaum</li> <li>Update perekrutan RM untuk Corporate Banking</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance until July 2021</li> <li>Changes in Dalem Kaum Cash Offices Status to be Dalem Kaum Sub-Branch Offices</li> <li>Update of RM recruitment for Corporate Banking</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hwang Gyusoon</li> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
9	21 September 2021 September 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d Agustus 2021</li> <li>Relokasi KC Kediri</li> <li>Program Promosi Aktivitas Baru untuk meningkatkan nasabah berbasis digital</li> <li>CEO Award</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hwang Gyusoon</li> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
10	12 Oktober 2021 October 12, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d September 2021</li> <li>Peningkatan Transaksi Exim</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hwang Gyusoon</li> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
11	15 November 2021 November 15, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan s.d Oktober 2021</li> <li>Pemeliharaan Gedung Canag secara Rutin</li> <li>BI-FAST</li> <li>Pelaksanaan Training mengenai antifraud dan sanksi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hwang Gyusoon</li> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>
12	31 Desember 2021 December 31, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Internal Kontrol</li> <li>Peningkatan Pertumbuhan Aset</li> <li>Ekspansi Digital Banking</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hwang Gyusoon</li> <li>Kang Bong Joo</li> <li>M. Tri Budiono</li> <li>Edwin Sulaeman</li> <li>Sadhana Priatmadja</li> <li>Benny Sudarsono Tan</li> </ul>

### Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris

Selain rapat internal, Direksi melakukan rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris dengan pembahasan berbagai hal yang membutuhkan koordinasi diantara kedua organ tersebut. Di tahun 2021 Dewan Komisaris dan Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Tentang risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada pembahasan Rapat Dewan Komisaris pada bagian sebelumnya.

Berikut disampaikan rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat gabungan tersebut.

### Joint Meetings with Board of Commissioners and Board of Directors

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners and Board of Directors may held a joint meeting with agendas on various matters that require coordination between the two organs. In 2021 the Board of Commissioners and Board of Directors has held meetings 3 (three) times. Regarding the minutes of Joint Meeting with Board of Commissioners and Board of Directors can be seen the Board of Commissioners meeting discussions in the previous chapters.

The following is recapitulation of the Board of Commissioners and Board of Directors attendances in the joint meetings.

### Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Recapitulation of the Board of Commissioners and Board of Directors Attendances Level at the Joint Meeting

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total of Mandatory Meetings	Jumlah Rapat yang Dihadiri Total of Attendances	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri Total of Absences	Persentase Kehadiran Percentage of Attendances
Arief Budiman Presiden Komisaris / President Commissioner	3	3	-	100%
Ahmad Fajarprana Komisaris Independen / Independent Commissioner	2	1	1	50%

Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Total of Mandatory Meetings</i>	Jumlah Rapat yang Dihadiri <i>Total of Attendances</i>	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri <i>Total of Absences</i>	Persentase Kehadiran <i>Percentage of Attendances</i>
Park Tae Yong *) Komisaris / Commissioner	3	3	-	100%
Adi Haryadi Komisaris Independen / Independent Commissioner	3	3	-	100%
Hwang Gyusoon <sup>1)</sup> (Presiden Direktur-menggantikan) <i>(President Director-substituer)</i>	1	1	-	100%
Choi Jung Hoon <sup>2)</sup> (Presiden Direktur-digantikan) <i>(President Director-substituted)</i>	2	2	-	100%
Kang Bong Joo (Direktur / Director)	3	3	-	100%
Sadhana Priatmadja (Direktur / Director)	3	3	-	100%
M. Tri Budiono (Direktur / Director)	3	3	-	100%
Benny Sudarsono Tan (Direktur / Director)	3	3	-	100%
Edwin Sulaeman (Direktur / Director)	3	3	-	100%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi <i>Average Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>				95%

- 1) Sejak tanggal 28 Agustus 2021, Park Tae Yong tidak lagi menjabat sebagai Komisaris  
2) Sejak tanggal 9 Februari 2021, Adi Haryadi efektif menjabat sebagai Komisaris Independen  
3) Sejak tanggal 30 Maret 2021, Choi jung Hoon tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur  
4) Sejak tanggal 18 Juni 2021, Hwang Gyusoon. efektif menjabat sebagai Presiden Direktur

- 1) Since August 28, 2021, Park Tae Yong has no longer to serve as Commissioner  
2) Since February 9, 2021, Adi Haryadi has been effective to serve as Independent Commissioner  
3) As of March 30, 2021, Choi jung Hoon has no longer to serve as President Director  
4) Since June 18, 2021, Hwang Gyusoon has been effective to serve as President Director

### Kehadiran Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham

### Board of Directors Attendance in the GMS

Di sepanjang tahun 2021, Bank melakukan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2020 yang diselenggarakan tanggal 30 Maret 2021 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 14 Juli 2021. Berikut disampaikan kehadiran Direksi dalam RUPS tersebut.

During 2021, Bank conducted 2 (two) GMS, namely the Annual GMS for the 2020 performance accountable held on March 30, 2021 and the Extraordinary GMS held on July 14, 2021. The following is the Board of Commissioners attendance in the GMS.

Direksi <i>Board of Directors</i>	Kehadiran Direksi pada <i>Board of Directors Attendance</i>	
	RUPS Tahunan tahun buku 2020 tanggal 30 Maret 2021 <i>The 2020 Annual GMS on March 30, 2021</i>	RUPS Luar Biasa tanggal 14 Juli 2021 <i>Extraordinary GMS on July 14, 2021</i>
Hwang Gyusoon <sup>1)</sup> (Presiden Direktur-menggantikan) <i>(President Director-substituer)</i>	Belum menjabat <i>Still not serve</i>	✓*)
Choi Jung Hoon <sup>1)</sup> (Presiden Direktur-digantikan) <i>(President Director-substituted)</i>	✘	Tidak lagi menjabat <i>No longer to serve</i>

Direksi Board of Directors	Kehadiran Direksi pada Board of Directors Attendance	
	RUPS Tahunan tahun buku 2020 tanggal 30 Maret 2021 The 2020 Annual GMS on March 30, 2021	RUPS Luar Biasa tanggal 14 Juli 2021 Extraordinary GMS on July 14, 2021
Kang Bong Joo (Direktur/ Director)	✓ **)	✓ **)
Sadhana Priatmadja (Direktur/ Director)	✓	✓
M. Tri Budiono (Direktur/ Director)	✓ **)	✓ **)
Benny Sudarsono Tan (Direktur/ Director)	✓ **)	✓ **)
Edwin Sulaeman (Direktur/ Director)	✓ **)	✓ **)

✓ = hadir | ✗ = tidak hadir  
✓ = present | ✗ = absent

\*) Sejak 30 Maret 2021, Choi Jung Hoon tidak lagi menjabat Presiden Direktur. Posisinya digantikan oleh Hwang Gyusoon.

\*\*) Hadir melalui media video teleconference

\*) As of March 30, 2021, Choi Jung Hoon has no longer to serve as President Director. His position was replaced by Hwang Gyusoon

\*\*) Present by video teleconference

## Pelatihan Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi

## Trainings, Education and/or Competency Development for Board of Directors

Bank memberikan kesempatan kepada Direksi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan workshop.

Bank provides an opportunity for Board of Directors to develop and improve its self-competence through training and certification, as well as other competency development programs such as seminars and workshops.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Hwang Gyusoon Presiden Direktur President Director	Sertifikasi Certification	Risk Management Level 5	Webinar, 19 Februari 2021 Webinar, February 19, 2021	LSPP
Hwang Gyusoon Presiden Direktur President Director	Pelatihan Training	Bahasa Indonesia Indonesian Language	Jakarta, 21 Juni s/d 7 September 2021 Jakarta, June 21 to September 7, 2021	BWS & Hana Language Center
Hwang Gyusoon Presiden Direktur President Director	Pelatihan Training	Sosialisasi Anti Money Laundering (AML) & Sanction Socialization on Anti Money Laundering (AML) & Sanction	Jakarta, 21 Juni 2021 Jakarta, June 21, 2021	Bank Woori Saudara
Hwang Gyusoon Presiden Direktur President Director	E-Learning	Digital Banking Knowledge & Awareness: POJK NO. 12 /POJK.03/2018	E-Learning, 25 Juni 2021 E-Learning, June 25, 2021	Bank Woori Saudara
Hwang Gyusoon Presiden Direktur President Director	Workshop	Membangun Optimisme Baru Untuk Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Build New Optimism to Accelerate National Economy Recovery	Jakarta, 26 November 2021 Jakarta, November 26, 2021	OJK
Kang Bong Joo Direktur Korporat Corporate Director	Pelatihan Training	Bahasa Indonesia Indonesian Language	Jakarta, 25 Januari s/d 25 Februari 2021 Jakarta, January 25 to February 25, 2021	BWS & Hana Language Center



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Kang Bong Joo Direktur Korporat Corporate Director	Pelatihan Training	Sosialisasi Anti Money Laundering (AML) & Sanction <i>Socialization on Anti Money Laundering (AML) &amp; Sanction</i>	Jakarta, 21 Juni 2021 <i>Jakarta, June 21, 2021</i>	Bank Woori Saudara
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Workshop	Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden Republik Indonesia Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 <i>Annual Coordination and Presidential Directive of Republic of Indonesia Regarding Prevention and Eradication of Anti Money Laundering Money (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) 2021</i>	Webinar, 14 Januari 2021 <i>Webinar, January 14, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Pelatihan Training	Undangan Webinar Launching Implementasi Aplikasi Pelaporan goAML <i>Webinar Invitation: Launching of goAML Reporting App</i>	Webinar, 1 Februari 2021 <i>Webinar, February 1, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Pelatihan Training	Undangan Pertemuan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan - OJK dengan Direktur Kepatuhan Bank Umum <i>Meeting Invitation between Department of Research and Banking Regulations - OJK with Compliance Director of Commercial Bank</i>	Webinar, 4 Februari 2021 <i>Webinar, February 4, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Workshop	Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK dengan CEO Perbankan - Program Pemulihan Ekonomi <i>Dialogue between the Chairman of the OJK Board of Commissioners and Banking CEO - Economic Recovery Program</i>	Webinar, 16 Februari 2021 <i>Webinar, February 16, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Pelatihan Training	Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap Perbankan <i>Banking Gratification Control and Anti-Bribery</i>	Webinar, 22 Februari 2021 <i>Webinar, February 22, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Workshop	Undangan Pertemuan Dalam Rangka Pembahasan Program Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2021 <i>Meeting Invitation: Discussion of Finance Literacy and Education Programs 2021</i>	Webinar, 8 Maret 2021 <i>Webinar, March 8, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Perubahan PMK bersama PERBANAS <i>Socialization of PMK Changes with PERBANAS</i>	Webinar, 27 April 2021 <i>Webinar, April 27, 2021</i>	PERBANAS
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan <i>Dissemination of the Blueprint for Human Resource Development for the Financial Services Sector</i>	Webinar, 25 Mei 2021 <i>Webinar, May 25, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Workshop	Memaknai Semangat Kebangkitan Nasional di Sektor Jasa Keuangan <i>Interpreting the Spirit of National Awakening in Financial Services Sector</i>	Webinar, 27 Mei 2021 <i>Webinar, May 27, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Implementasi Pedoman Iklan Jasa Keuangan dan Pedoman Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan - Perbankan <i>Socialization of the Implementation of Advertising Guidelines for Financial Services and Standard Agreement Guidelines Financial Services Sector - Banking</i>	Webinar, 11 Juni 2021 <i>Webinar, June 11, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan <i>Risk &amp; Compliance Director</i>	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021 - 2025 <i>Dissemination of the Blueprint for Human Resource Development for the Financial Services Sector</i>	Webinar, 16 Juni 2021 <i>Webinar, June 16, 2021</i>	OJK

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan Training	Perbanas Sosialisasi BI - FAST Perbanas Socialization BI - FAST	Webinar, 17 Juni 2021 Webinar, June 17, 2021	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan Training	Peran ETP Multimatching System dalam Pengembangan Pasar Uang di Indonesia ETP Multimatching System contribution in Money Market Development in Indonesia	Webinar, 21 Juni 2021 Webinar, June 21, 2021	BI
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan Training	Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 - 2025: Transformasi Digital Perbankan Indonesia Banking Development Roadmap (RP2I) 2020 - 2025: Transformation Digital Banking	Webinar, 15 Juli 2021 Webinar, July 15, 2021	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan Training	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)	Webinar, 21 Juli 2021 Webinar, July 21, 2021	BWS & PT Efektifpro Knowledge Source
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Workshop	FGD dengan tema Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti - Tipping Off dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang FGD with the theme of Legal Review Regarding Anti-Tipping Off Provisions in prevention and eradication of Money Laundering	Webinar, 21 Juli 2021 Webinar, July 21, 2021	PPATK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Sosialisasi Socialization	Launching & Registrasi Aplikasi SIPENDAR Launching & FGD with the theme of Legal Review Regarding Anti-Tipping Off Provisions in prevention and eradication of Money Laundering	Webinar, 2 Agustus 2021 Webinar, August 2, 2021	PPATK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Workshop	PERBANAS ASEAN Workshop	Webinar, 5 Agustus 2021 Webinar, August 5, 2021	PERBANAS
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan Training	Launching Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2021 kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank Launching Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) 2021 to Bank Financial Services Providers	Webinar, 5 Agustus 2021 Webinar, August 5, 2021	PPATK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi terkait Tanggung Jawab Industri Jasa Keuangan terhadap Aksi Fraud Pegawai Socialization regarding Responsibility in Financial Services Industry against Employee Fraud	Webinar, 12 Agustus 2021 Webinar, August 12, 2021	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan Training	Optimalisasi Penanganan Pencucian Uang Optimization of Money Laundering Handling	Webinar, 16 Agustus 2021 Webinar, August 16, 2021	PPATK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Sosialisasi Socialization	Peluncuran Naskah NRA Launching of NRA Manuscript	Webinar, 19 Agustus 2021 Webinar, August 19, 2021	PPATK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan Training	Perkembangan Teknologi di Indonesia dan Visi Digitalisasi Nasional Kepada Seluruh Pelaku Sektor Jasa Keuangan Technology Development in Indonesia and National Digitization Vision To All Actors of Financial Services Sector	Webinar, 27 Agustus 2021 Webinar, August 27, 2021	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Workshop	Forum Diskusi Makroprudensial terkait Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Macroprudential Discussion Forum: Policy on Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM)	Webinar, 30 Agustus 2021 Webinar, August 30, 2021	BI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Workshop	Koordinasi Pembahasan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan Skema Business Email Compromise (BEC) <i>Coordination of Discussion on Prevention and Eradication of Money Laundering with the Scheme Business Email Compromise (BEC)</i>	Webinar, 30 Agustus 2021 <i>Webinar, August 30, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan <i>Training</i>	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum <i>Socialization on Commercial Bank Provisions</i>	Webinar, 1-2 September 2021 <i>Webinar, September 1-2, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Workshop	Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan dan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Sektor Jasa Keuangan <i>Focus Group Discussion (FGD) Arrangement and Use of Electronic Signatures in the Financial Services Sector</i>	Webinar, 7 September 2021 <i>Webinar, September 7, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan <i>Training</i>	Pengendalian Gratifikasi - Sesi 1 <i>Gratification Control - Session 1</i>	Webinar, 9 September 2021 <i>Webinar, September 9, 2021</i>	BWS & Mahardika Gemilang
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Workshop	Diskusi Lanjutan Kebijakan Makroprudensial terkait Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) <i>Continued Discussion on Macroprudential Policy related to Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM)</i>	Webinar, 10 September 2021 <i>Webinar, September 10, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan <i>Training</i>	Pengendalian Gratifikasi - Sesi 2 <i>Gratification Control - Session 2</i>	Webinar, 17 September 2021 <i>Webinar, September 17, 2021</i>	Bank Woori Saudara
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan <i>Training</i>	Pencegahan Anti Suap melalui Implementasi Sistem Anti Suap berdasarkan SNI ISO 37001 <i>Anti-Bribery Prevention through Anti-Bribery System Implementation based on SNI ISO 37001</i>	Webinar, 21 September 2021 <i>Webinar, September 21, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan <i>Training</i>	Peran dan Fungsi Kepatuhan Dalam Penerapan APU PPT Ekspektasi PPATK sebagai Regulator <i>Role and Function of Compliance in APU PPT Implementation and PPATK Expectations as Regulator</i>	Webinar, 23 September 2021 <i>Webinar, September 23, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan <i>Training</i>	Konvensi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) bidang Manajemen Risiko <i>National Convention: Draft of Indonesian National Qualifications Framework (RKKNI) in Risk management</i>	Webinar, 28 September 2021 <i>Webinar, September 28, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Pelatihan <i>Training</i>	Bank Members of PERBANAS (CEO Forum) : The Future of Banking - How Bank Stay Relevant <i>Bank Members of PERBANAS (CEO Forum) : The Future of Banking - How Bank Stay Relevant</i>	Webinar, 30 September 2021 <i>Webinar, September 30, 2021</i>	PERBANAS
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Workshop	Workshop Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) <i>Workshop on Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM)</i>	Webinar, 19 Oktober 2021 <i>Webinar, October 19, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Sosialisasi <i>Socialization</i>	Launching Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan <i>Launching of Blueprint for Digital Banking Transformation</i>	Webinar, 26 Oktober 2021 <i>Webinar, October 26, 2021</i>	OJK

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Workshop	Dengar Pendapat dan Tanggapan Rancangan Surat Edaran OJK tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional <i>Hearing and Feedback on OJK Circular Letter Draft on Banking Accounting Guideliness Book for Conventional and Commercial Banks</i>	Webinar, 29 Oktober 2021 <i>Webinar, October 29, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Seminar	CEO Networking 2021: Stepping up to Regain the Economic Growth <i>CEO Networking 2021: Stepping up to Regain the Economic Growth</i>	Webinar, 16 November 2021 <i>Webinar, November 16, 2021</i>	IDX
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Seminar	The 2021 Annual Meeting of Bank Indonesia : Rise and be Optimistic: Synergy & Innovation for Economic Recovery and Remarks from the President of The Republic of Indonesia	Webinar, 24 November 2021 <i>Webinar, November 24, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Sosialisasi <i>Socialization</i>	Peluncuran Infrastruktur Standar Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SLNKI) <i>Infrastructure Launching National Standard for Indonesian Financial Literacy (SLNKI)</i>	Webinar, 14 Desember 2021 <i>Webinar, December 14, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Sosialisasi <i>Socialization</i>	Peluncuran BI-FAST <i>BI-FAST Launching</i>	Webinar, 21 Desember 2021 <i>Webinar, December 21, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Sosialisasi <i>Socialization</i>	Sosialisasi Penerbitan Penyempurnaan Ketentuan GWM dan RIM & PLM seiring Implementasi BI-FAST <i>Publishing Socialization on Improvement of Statutory Reserves and RIM &amp; PLM along with BI-FAST Implementation</i>	Webinar, 30 Desember 2021 <i>Webinar, December 30, 2021</i>	BI
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Workshop	Workshop SPAN BWS & Kemenkeu <i>Workshop SPAN BWS &amp; the Ministry of Finance</i>	Webinar, 20 Januari 2021 <i>Webinar, January 20, 2021</i>	Bank Woori Saudara & Kemenkeu
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Workshop	Taspen Authentication Workshop	Jakarta, 7 April 2021 <i>Jakarta, April 7, 2021</i>	Bank Woori Saudara & Taspen
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Certification	AAJl	Webinar, 26 April 2021 <i>Webinar, April 26, 2021</i>	Bank Woori Saudara & Equity
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Sosialisasi <i>Socialization</i>	Perbanas Sosialisasi BI - FAST <i>Perbanas Socialization BI - FAST</i>	Webinar, 17 Juni 2021 <i>Webinar, June 17, 2021</i>	OJK
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Pelatihan <i>Training</i>	AML & Sanction	Jakarta, 21 Juni 2021 <i>Jakarta, June 21, 2021</i>	BWS
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Workshop	ASEAN Workshop	Webinar, 5 Agustus 2021 <i>Webinar, August 5, 2021</i>	ASEAN
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Sertifikasi <i>Certification</i>	WPPE Pemasaran (Wakil perantara Pedangan Efek Pemasaran) <i>Marketing of WPPE (Marketing of Broker-Dealer Representative)</i>	E-learning, 1 September 2021 <i>E-learning, September 1, 2021</i>	TICMI
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Pelatihan <i>Training</i>	Pengendalian Gratifikasi-Sesi 1 <i>Gratification Control - Session 1</i>	Webinar, 9 September 2021 <i>Webinar, September 9, 2021</i>	BWS & Mahardika Gemilang
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Pelatihan <i>Training</i>	Pengendalian Gratifikasi-Sesi 2 <i>Gratification Control - Session 2</i>	Webinar, 17 September 2021 <i>Webinar, September 17, 2021</i>	Bank Woori Saudara
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Sosialisasi <i>Socialization</i>	OJK Sosialisasi Aktivasi Kredit <i>OJK Loan Activation</i>	Webinar, 29 September 2021 <i>Webinar, September 29, 2021</i>	OJK

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Workshop	Workshop Asuransi Insurance Workshop	Jakarta, 3 November 2021 Jakarta, November 3, 2021	Bank Woori Saudara
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Sosialisasi Socialization	OJK Launching Roadmap	Webinar, 30 November 2021 Webinar, November 30, 2021	OJK
Mochamad Tri Budiono Direktur Konsumer Consumer Director	Sosialisasi Socialization	Sosialisai Peluncuran BI - Fast Socialization of BI-FAST Launching	Webinar, 21 Desember 2021 Webinar, December 21 2021	BI
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Workshop	Sinergi Otoritas dan Perbankan Synergy of Authority and Banking	Webinar, 4 April 2021 Webinar, April 4, 2021	OJK
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Pelatihan Training	FKDKP	Webinar, 29 April 2021 Webinar, April 29, 2021	PPATK
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Perbanas BI - Fast BI-FAST Perbanas Socialization	Webinar, 17 Juni 2021 Webinar, June 17, 2021	PERBANAS
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Pelatihan Training	AML & Sanction	Jakarta, 21 Juni 2021 Jakarta, June 21, 2021	Bank Woori Saudara
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Pelatihan Training	Webinar PPATK	Webinar, 2 Agustus 2021 Webinar, August 2, 2021	PPATK
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Workshop	OJK Diskusi Virtual Techonogy OJK Discussion on Virtual Technology	Webinar, 28 Agustus 2021 Webinar, August 28, 2021	OJK
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Pelatihan Training	Pengendalian Gratifikasi-Sesi 1 Gratification Control - Session 1	Webinar, 9 September 2021 Webinar, September 9, 2021	BWS & Mahardika Gemilang
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Pelatihan Training	Pengendalian Gratifikasi-Sesi 2 Gratification Control - Session 2	Webinar, 17 September 2021 Webinar, September 17, 2021	Bank Woori Saudara
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi BI Fast Socialization on BI Fast	Webinar, 1 November 2021 Webinar, November 1, 2021	BI
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Workshop	Workshop Asuransi Insurance Workshop	Jakarta, 3 November 2021 Jakarta, November 3, 2021	Bank Woori Saudara



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Sosialisasi Socialization	OJK Aktivasi Operasional OJK Operational Activation	Webinar, 25 November 2021 Webinar, November 25, 2021	OJK
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Cetak Biru Socialization on Blueprint	Webinar, 13 Desember 2021 Webinar, December 13, 2021	BI
Benny Sudarsono Tan Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Peluncuran BI - Fast Socialization on BI-Fast Launching	Webinar, 21 Desember 2021 Webinar, December 21, 2021	BI
Edwin Sulaeman Direktur Bisnis Support Business Support Director	Pelatihan Training	AML & Sanction	Jakarta, 21 Juni 2021 Jakarta, June 21, 2021	Bank Woori Saudara
Edwin Sulaeman Direktur Bisnis Support Business Support Director	Pelatihan Training	Pengendalian Gratifikasi-Sesi 1 Gratification Control - Session 1	Webinar, 9 September 2021 Webinar, September 9, 2021	BWS & Mahardika Gemilang
Edwin Sulaeman Direktur Bisnis Support Business Support Director	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi BIK OJK Socialization on BIK OJK	Webinar, 12 September 2021 Webinar, September 12, 2021	OJK
Edwin Sulaeman Direktur Bisnis Support Business Support Director	Pelatihan Training	Pengendalian Gratifikasi-Sesi 2 Gratification Control - Session 2	Webinar, 17 September 2021 Webinar, September 17, 2021	Bank Woori Saudara
Edwin Sulaeman Direktur Bisnis Support Business Support Director	Workshop	Workshop Asuransi Insurance Workshop	Jakarta, 3 November 2021 Jakarta, November 3, 2021	Bank Woori Saudara
Edwin Sulaeman Direktur Bisnis Support Business Support Director	Pelatihan Training	Webinar Local Currency Statement	Webinar, 10 November 2021 Webinar, November 10, 2021	BI
Edwin Sulaeman Direktur Bisnis Support Business Support Director	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Peluncuran Infrastruktur Literasi Keuangan Socialization of Infrastructure Launching Financial Literacy	Webinar, 20 Desember 2021 Webinar, December 20, 2021	OJK
Edwin Sulaeman Direktur Bisnis Support Business Support Director	Sosialisasi Socialization	Sosialisai Peluncuran BI - Fast Socialization on BI-Fast Launching	Webinar, 21 Desember 2021 Webinar, December 21, 2021	BI

### Program Orientasi bagi Direksi Baru

Program orientasi bagi Direksi baru diselenggarakan dengan tujuan agar Direksi baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Program orientasi meliputi antara lain program sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi yang diwajibkan oleh OJK dan/atau BI.

Di tahun 2021 BWS mengangkat Hwang Gyusoon sebagai Presiden Direktur baru. Program orientasi dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021 di Ruang Jirisan yang dihadiri oleh jajaran

### Orientation Program for New Board of Directors

The orientation program for new Directors is intended for new Directors to carry out their duties and responsibilities well. Orientation program includes outreach programs, training, and certification required by OJK and/or BI.

In 2021 BWS appointed Hwang Gyusoon as New President Director. Orientation program is conducted on July 26, 2021 in the Jirisan Room which was attended by all Directors to

Direksi untuk menyampaikan gambaran atas kegiatan bisnis yang telah berjalan, rencana Bank ke depan, dan hal lainnya yang Presiden Direktur perlu ketahui.

*describe ongoing business activities, the Bank's future plans, and other matters*

Sebelumnya Presiden Direktur juga telah mendapatkan pelatihan Bahasa Indonesia (tanggal 21 Juni s/d 7 September 2021) dan pelatihan Anti Pencucian Uang dan Sanksi (tanggal 21 Juni 2021), serta belajar secara mandiri melalui *e-learning* ketentuan pengembangan Digital Banking yaitu POJK No. 12/POJK.03/2018 mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

*Previously, the President Director had also received Indonesian language training (on June 21 to September 7, 2021) and Anti-Money Laundering and Sanctions training (on June 21, 2021), as well as conducting independent e-learning regarding provisions of Digital Banking Service implementation, namely POJK No. 12/POJK.03/2018 regarding Implementation of Digital Banking Service by Commercial Banks.*

Presiden Direktur juga telah memiliki sertifikasi manajemen risiko level 5 dari LSPP di bulan Februari 2021.

*The President Director also has risk management certification level 5 from LSPP in February 2021.*

### Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

### Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan operasional Bank, Direksi dibantu oleh beberapa komite dan/atau organ lainnya yang dibentuk Direksi.

*In order to support the effectiveness of the Bank's operational implementation, Bank is assisted by several committees and/or other organs which formed by Board of Directors*

Atas kinerja di tahun 2021, Direksi memandang bahwa seluruh komite dan/atau organ lainnya yang dibentuk Direksi telah bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik. Berikut komite dan/atau organ lainnya yang dibentuk Direksi beserta pelaksanaan tugas dan penilaiannya:

*For the performance in 2021, the Board of Directors considers that the entire committees and/or other organs which formed by Board of Directors has worked by upholding the standards of competence and good quality. The following is committees and/or other organs under Board of Directors with their duties and assessment:*

- Komite Kode Etik merupakan komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direksi dalam rangka melakukan kajian atas suatu Pelanggaran Peraturan. Sepanjang tahun 2021, Komite Kode Etik telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Komite Manajemen Risiko bertugas untuk membantu Direksi dalam memberikan informasi tentang risiko yang dihadapi Bank melalui laporan profil risiko agar Direksi dapat menentukan mitigasi risiko yang dapat diterapkan. Sepanjang tahun 2021, kinerja Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Komite *Asset Liability Management* (ALMA) bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank. Sepanjang tahun 2021, Komite ALMA telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Komite Informasi Teknologi merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam proses

- *The Code of Conducts Committee is a committee which is formed and responsible to Board of Directors in order to conduct a study on a Violation. Throughout 2021, the Code of Conducts Committee has conducted 7 (seven) meetings and has carried out its duties well.*
- *The Risk Management Committee is responsible for assisting the Board of Directors in providing information on the risks faced by the Bank through risk profile report so that the Board of Directors can determine the risk mitigation may be applied. Throughout 2021, the performance of the Risk Management Committee has conducted 6 (six) meetings and has performed its duties well.*
- *The Asset Liability Management Committee (ALMA) is tasked to assist the Board of Directors in carrying out the functions of determining strategy of managing assets and liabilities, setting interest rates and liquidity, and other matters related to the management of assets and liabilities of the Bank. Throughout 2021, ALMA committee has conducted 12 (twelve) meetings and has performed its duties well.*
- *The Information Technology Steering Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in*

pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan operasional BWS pada bidang Teknologi Informasi.

Sepanjang tahun 2021, Komite Informasi Teknologi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat pembahasan teknologi informasi Bank dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

- Komite Kebijakan Perkreditan merupakan komite yang membantu direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran atau langkah perbaikan.

Sepanjang tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah memberikan rekomendasi atas usulan revisi beberapa kebijakan terkait perkreditan, meliputi revisi pedoman stimulus perekonomian dan penetapan *soft limit* batas maksimum pemberian kredit.

- Komite Kredit merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan atas persetujuan pemberian kredit.

Sepanjang tahun 2021, Komite Kredit telah melaksanakan proses pengambilan keputusan atas persetujuan pemberian kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

- Komite Pembelian Barang dan Jasa dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam pengelolaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa; memastikan efektivitas atas aktivitas kegiatan Pembelian Barang dan Jasa; dan memastikan pelaksanaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku di Bank Woori Saudara.

Sepanjang tahun 2021, Komite Pembelian Barang dan Jasa telah memberikan rekomendasi atas penetapan pihak ketiga vendor, khususnya terkait pembelian barang dan jasa yang memerlukan persetujuan dari Direktur.

- Komite Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bertugas untuk membantu Direksi dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di lingkup BWS, termasuk dalam hal ini evaluasi atas kebijakan, prosedur dan standar.

Sepanjang tahun 2021, Komite Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat pembahasan terkait tindak lanjut temuan OJK di bidang APU & PPT, pengembangan sistem APU & PPT dan isu-isu lainnya terkait penerapan program APU & PPT.

- Gugus Tugas Anti *Fraud* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris dalam penanganan penerapan strategi anti-*fraud*.

*the decision-making process related to BWS operational management policy in the field of Information Technology. Throughout 2021, the Information Technology Steering Committee has conducted 4 (four) meetings discussing information technology of the Bank and has carried out its duties well.*

- *Loan Policy Committee is a committee for assisting the Board of Directors in formulating policies, oversee the implementation of policies, monitoring the development and condition of loan portfolio as well as provide suggestions or corrective measures.*

*Throughout 2021, the Loan Policy Committee has provide recommendations on the proposed revision of several policies related to loan, including revision of guidelines economic stimulus and determining soft limits of legal lending limit.*

- *The Loan Committee is a committee which is formed to assist the Board of Directors in the decision-making process upon approval of loan.*

*Throughout 2021, the Loan Committee has implemented decision-making process on approval granting loan by implementing the precautionary principle and good governance.*

- *Procurement Committee was formed and responsible to the Board of Directors for assisting the Board of Directors in managing the Procurement activities; ensure the effectiveness of procurement activities and its implementations has accordance with the applicable Policies and Procedures at the BWS.*

*Throughout 2021, the Procurement Committee has provided recommendations in determine the third-party vendors, particularly in relation to the purchase of goods and services that require approval from the Board of Director.*

- *The Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Committee is tasked to assist the Board of Directors in the implementation of evaluation of the implementation of anti-money laundering programs and the prevention of terrorism financing (AML & CFT) at BWS, including in this case evaluation of policies, procedures and standards.*

*Throughout 2021, the Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Committee has implemented 4 (four) discussion meetings related to follow-up the OJK findings in AML & CFT sector, develop the system of AML & CFT and other issues related to AML & CFT program implementation.*

- *The Anti Fraud Task Force is directly responsible to the President Director and have directly relationship in communication and reports to Board of Commissioners in handling the implementation of anti-fraud strategies.*

## Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2021

## Brief Report on the Implementation of Board of Directors Duties and Responsibilities in 2021

Di tahun 2021 Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan, sebagai berikut:

In 2021, Board of Directors has issued various decisions in operational, financial, and several business supporting with many policies such as Decision, is as follows:

No Surat Letter Number	Tanggal Dated	Perihal Subject
001/KEP.DIR/HC.II/1/2020	27 Januari 2021 January 27, 2021	Surat Keputusan Definitif Definitive Decree
002/KEP.DIR/HC.II/1/2020	09 Februari 2021 February 9, 2021	Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat Changes in Head Office Organizational Structure
003/KEP.DIR/HC.II/1/2020	22 Februari 2021 February 22, 2021	Perubahan Cluster Unit Bisnis Business Unit Cluster Changes
004/KEP.DIR/HC.II/1/2020	26 Februari 2021 February 26, 2021	Penonaktifan Pejabat Eksekutif Executive Officer Dismissal
004/KEP-DIR/A-03/1/21	26 Februari 2021 February 26, 2021	Kebijakan Likuiditas dan Permodalan Dalam Rangka Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Liquidity and Capital Policy to Stimulate Economic Growth
005/KEP.DIR/HC.III/1/2021	09 Maret 2021 March 09, 2021	TFT GNNT TFT GNNT
005/KEP-DEKOM/A-13/1/21	12 Maret 2021 March 12, 2021	Pemberian Wewenang Kepada Direksi Dalam Menjalankan Tindakan Kepengurusan Maupun Kepemilikan Granting Authority to the Board of Directors in Carrying out Management and Ownership Actions
006/KEP.DIR/HC.III/1/2021	16 Maret 2021 March 16, 2021	PA Tahun 2020 PA 2020
007/KEP.DIR/HC.II/1/2021	07 Maret 2021 March 07, 2021	Perpanjangan PKWT PKWT Extension
008/KEP.DIR/HC.II/1/2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Promosi Karyawan Employee Promotion
009/KEP.DIR/HC.II/1/2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Promosi Karyawan Employee Promotion
010/KEP.DIR/HC.II/1/2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Mutasi Karyawan Employee Mutations
011/KEP.DIR/HC.II/1/2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Mutasi Karyawan Employee Mutations
012/KEP.DIR/HC.II/1/2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Mutasi Karyawan Employee Mutations
013/KEP.DIR/HC.II/1/2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Mutasi Karyawan Employee Mutations
014/KEP.DIR/HC.II/1/2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Mutasi Karyawan Employee Mutations
015/KEP.DIR/HC.II/1/2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Mutasi Karyawan Employee Mutations
016/KEP.DIR/HC.II/1/2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Promosi Grade Grade Promotion
017/KEP.DIR/HC.II/1/2021	22 Maret 2021 March 22, 2021	Penunjukan Kepala Divisi Division Head Appointment
006/KEP-DIR/A-03/1/21	31 Maret 2021 March 31, 2021	Kebijakan Penetapan HQLA dan Penggolongan Simpanan (Revisi 1) HQLA Determination Policy and Deposit Classification (Revision 1)
007/KEP-DIR/A-05/1/21	31 Maret 2021 March 31, 2021	Pedoman Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book (Interest Rate Risk In The Banking Book) (Revisi 1) Standard Approach Risk Measurement Guidelines for Interest Rate Risk In The Banking Book (Revised 1)
018/KEP.DIR/HC.II/1/2021	7 April 2021 April 7, 2021	SK Pensiun Retirement Decree

No Surat Letter Number	Tanggal Dated	Perihal Subject
008/KEP-DIR/A-16/IV/21	8 April 2021 April 8, 2021	Kebijakan dan Pedoman Pembelian Barang dan Jasa (Revisi 6) Policies and Guidelines for Procurement (Revised 6)
009/KEP-DIR/A-16/IV/21	8 April 2021 April 8, 2021	Pedoman & Tata Tertib Komite Pembelian Barang dan Jasa Guidelines & Rules of the Procurement Committee
010/KEP-DIR/A-05/IV/21	8 April 2021 April 8, 2021	Wewenang Persetujuan Pembelian Barang dan Jasa serta Pengeluaran Biaya Authority for Approval of Procurement and Expenses
019/KEP.DIR/HC.III/IV/2021	14 April 2021 April 14, 2021	Perubahan Penunjukkan TKI Pendamping TKA Changes in Appointment of Local Workers Companion for Foreign Workers
020/KEP.DIR/HC.III/IV/2021	20 April 2021 April 20, 2021	Memo THR 2021 Holiday Allowance Memo 2021
021/KEP.DIR/HC.III/IV/2021	20 April 2021 April 20, 2021	SK Pembentukan TIM Proyek BI-FAST BI-FAST Project TEAM Establishment Decree
022/KEP.DIR/HC.II/IV/2021	30 April 2021 April 30, 2021	SK Pengangkatan Tetap Permanent Appointment Decree
011/KEP-DIR/A-08/IV/21	3 Mei 2021 May 3, 2021	Kebijakan Umum Bancassurance (Revisi 4) Bancassurance General Policy (Revised 4)
023/KEP.DIR/HC.III/V/2021	5 Mei 2021 May 5, 2021	Penetapan Insentif Khusus Determination of Special Incentives
024/KEP.DIR/HC.II/V/2021	6 Mei 2021 May 6, 2021	SK Pensiun Retirement Decree
025/KEP.DIR/HC.III/V/2021	11 Mei 2021 May 11, 2021	Insentif kinerja bagi Pemimpin Cabang Unit Bisnis dan Karyawan KP dengan Jabatan Tertentu Performance incentives for Business Unit Branch Managers and HO Employees with Certain Positions
026/KEP.DIR/HC.III/V/2021	11 Mei 2021 May 11, 2021	Tunjangan Kemahalan Bagi Karyawan Expensive Benefits for Employees
027/KEP.DIR/HC.III/V/2021	11 Mei 2021 May 11, 2021	Tunjangan Bagi Pemimpin Cabang Benefits for Branch Leaders
028/KEP.DIR/HC.III/V/2021	11 Mei 2021 May 11, 2021	Tunjangan bagi Karyawan Kantor Pusat yang berlokasi di Treasury Tower Benefits for Head Office Employees located at Treasury Tower
029/KEP.DIR/HC.III/V/2021	18 Mei 2021 May 18, 2021	Penetapan Penyesuaian Gaji dan Skala Gaji Tahun 2021 Determination of Salary Adjustment and Salary Scale for 2021
030/KEP.DIR/HC.II/IV/2021	19 Mei 2021 May 19, 2021	SK Rangkap Jabatan Concurrent Position Decree
031/KEP.DIR/HC.III/V/2021	19 Mei 2021 May 19, 2021	Penetapan Penyesuaian Gaji 2021 2021 Salary Adjustment Determination
012/KEP-DIR/A-09/V/21	24 Mei 2021 May 24, 2021	Pedoman Pengendalian Khasanah (Revisi 6) Retention Control Guidelines (Revised 6)
032/KEP.DIR/HC.III/V/2021	25 Mei 2021 May 25, 2021	TFT Asuransi TFT Insurance
033/KEP.DIR/HC.II/V/2021	24 Mei 2021 May 24, 2021	SK Pengangkatan Kim Bum Su Kim Bum Su's Appointment Decree
034/KEP.DIR/HC.II/V/2021	24 Mei 2021 May 24, 2021	SK Pengangkatan Lee Jong Ho Lee Jong Ho's Appointment Decree
035/KEP.DIR/HC.III/V/2021	25 Mei 2021 May 25, 2021	SK Pembentukan Tim Task Force Right Issue Decree of the Establishment of the Task Force Right Issue Team
036/KEP.DIR/HC.II/VI/2021	7 Juni 2021 June 7, 2021	SK Pensiun Retirement Decree
013/KEP-DIR/A-14/VI/21	17 Juni 2021 June 17, 2021	Kebijakan dan Prosedur Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Layanan SLIK Policies and Procedures for Reporting and Requesting Debtor Information Through the SLIK Service
014/KEP-DIR/A-14/VI/21	25 Juni 2021 June 25, 2021	Kebijakan Akuntansi Perkreditan (Revisi 5) Loan Accounting Policy (Revised 5)
037/KEP.DIR/HC.II/VI/2021	28 Juni 2021 June 28, 2021	SK Penugasan Alternate Kepala Divisi Human Capital SK Assignment of Alternate Head of Human Capital Division
038/KEP.DIR/HC.III/VII/2021	15 Juli 2021 July 15, 2021	Task Force Asuransi Insurance Task Force
039/KEP.DIR/HC.III/VIII/2021	5 Agustus 2021 August 5, 2021	Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat Changes in Head Office Organizational Structure



No Surat Letter Number	Tanggal Dated	Perihal Subject
040/KEP.DIR/HC.II/VIII/2021	10 Agustus 2021 August 10, 2021	SK Pensiun Retirement Decree
041/KEP.DIR/HC.III/VIII/2021	10 Agustus 2021 August 10, 2021	Gugus Tugas Anti Fraud Anti-Fraud Task Force
015/KEP-DIR/A-13/VIII/21	13 Agustus 2021 August 13, 2021	Pembentukan Gugus Tugas Anti Fraud (Revisi 3) Formation of Anti-Fraud Task Force (Revised 3)
042/KEP.DIR/HC.III/VIII/2021	18 Agustus 2021 August 18, 2021	Peningkatan Status KK Gading Serpong Status Improvement of CO Gading Serpong
043/KEP.DIR/HC.III/VIII/2021	18 Agustus 2021 August 18, 2021	Peningkatan Status KK Gading Dalem Kaum Status Improvement of CO Gading Dalem Kaum
044/KEP.DIR/HC.II/VIII/2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Surat Keputusan Mutasi Karyawan Employee Mutation Decree
045/KEP.DIR/HC.II/VIII/2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Surat Keputusan Mutasi Karyawan Employee Mutation Decree
046/KEP.DIR/HC.II/VIII/2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Surat Keputusan Mutasi Karyawan Employee Mutation Decree
047/KEP.DIR/HC.II/VIII/2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Surat Keputusan Mutasi Karyawan Employee Mutation Decree
048/KEP.DIR/HC.II/VIII/2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Surat Keputusan Mutasi Karyawan Employee Mutation Decree
049/KEP.DIR/HC.II/VIII/2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Surat Keputusan Mutasi Karyawan Employee Mutation Decree
050/KEP.DIR/HC.II/VIII/2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Surat Keputusan Pengangkatan Definitif Karyawan Employee Definitive Appointment Decree
051/KEP.DIR/HC.II/IX/2021	13 September 2021 September 13, 2021	Surat Keputusan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Fixed-term employment agreement (PKWT) Extension Decree
016/KEP-DIR/A-16/IX/21	20 September 2021 September 20, 2021	Kebijakan Aset Tetap dan Rupa-Rupa Aset (Revisi 3) Fixed Assets and Miscellaneous Assets Policy (Revised 3)
052/KEP.DIR/HC.II/IX/2021	20 September 2021 September 20, 2021	Surat Keputusan Pengangkatan Definitif Karyawan Employee Definitive Appointment Decree
053/KEP.DIR/HC.II/IX/2021	22 September 2021 September 22, 2021	Surat Keputusan Pengangkatan Definitif Karyawan Employee Definitive Appointment Decree
054/KEP.DIR/HC.II/IX/2021	22 September 2021 September 22, 2021	Penunjukan Project Officer KC Lampung Appointment of KC Lampung Project Officer
055/KEP.DIR/HC.III/X/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021	Struktur Organisasi Kantor Pusat Head Office Organizational Structure
017/KEP-DIR/A-03/X/21	6 Oktober 2021 October 6, 2021	Kebijakan Likuiditas dan Permodalan Dalam Rangka Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Liquidity and Capital Policy to Stimulate Economic Growth
056/KEP.DIR/HC.II/X/2021	15 Oktober 2021 October 15, 2021	Surat Keputusan Rangkap Jabatan Karyawan Employee Concurrent Position Decree
057/KEP.DIR/HC.II/X/2021	15 Oktober 2021 October 15, 2021	SK Penonaktifkan Karyawan Employee Dismissal Decree
058/KEP.DIR/HC.III/X/2021	28 Oktober 2021 October 28, 2021	Task Force Asuransi Insurance Task Force
059/KEP.DIR/HC.II/XII/2021	4 November 2021 November 4, 2021	Surat Keputusan Pensiun Karyawan Employee Retirement Decree
060/KEP.DIR/HC.III/XII/2021	3 Desember 2021 December 3, 2021	Struktur Organisasi Unit Bisnis Business Unit Organizational Structure
061/KEP.DIR/HC.II/XII/2021	6 Desember 2021 December 6, 2021	Surat Keputusan Pensiun Karyawan Employee Retirement Decree
062/KEP.DIR/HC.II/XII/2021	17 Desember 2021 December 17, 2021	Penugasan Alternate Kepala Divisi Manajemen Kredit Alternate Assignment of Head of Loan Management Division
063/KEP.DIR/HC.II/XII/2021	22 Desember 2021 December 22, 2021	Pengangkatan sebagai Kepala Divisi Manajemen Kredit Appointment as Head of Loan Management Division
064/KEP.DIR/HC.III/XII/2021	22 Desember 2021 December 22, 2021	Perubahan Penunjukkan TKI Pendamping TKA Changes in Appointment of Local Workers Companion for Foreign Workers



## Transparansi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Board of Commissioners and Board of Directors Transparency in 2021



### Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of Composition of The Board of Commissioners and Board of Directors

Bank memiliki kebijakan dan ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dimuat dalam dalam Kebijakan Dewan Komisaris dan Kebijakan Direksi, yaitu:

- Hal-hal yang terkait dengan komposisi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
  - » Komposisi Dewan Komisaris sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.
  - » Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
  - » Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
  - » Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Hal-hal yang terkait dengan komposisi Direksi diatur sebagai berikut:
  - » Komposisi Direksi sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
  - » Direksi terdiri atas setidaknya 4 (empat) orang anggota Direktur yang dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
  - » Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
  - » Salah seorang anggota Direksi harus menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - » Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan antara lain adalah keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal dan hukum perundang-undangan, yang berkaitan dengan bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan.

The Bank has policies and provisions on the diversity in composition for the Board of Commissioners and Board of Directors contained in the Policies of the Board of Commissioners and Board of Directors, namely:

- Matters related to the composition of the Board of Commissioners are regulated as follows:
  - » The diverse composition of the Board of Commissioners may to make effective, precisely and quickly decision and can act independently.
  - » The number of Members of the Board of Commissioners shall be at least 3 (three) persons led by the President Commissioner and at most equal to the number of Directors.
  - » At least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.
  - » At least 1 (one) member of the Board of Commissioners shall be domiciled in Indonesia.
- Matters related to the composition of the Board of Directors are regulated as follows:
  - » The diverse composition of the Board of Directors may to make effective, precisely and quickly decision and can act independently, has no interest that could interfere his ability to carry out its duties independently and critically.
  - » The Board of Directors consists of at least 4 (four) members of the Director led by the President Director.
  - » The majority of members of the Board of Directors have the least experience in the field of operations as Executive Officers of the Bank.
  - » One member of the Board of Directors shall serve as Director of Compliance in accordance with the provisions of OJK.
  - » Have experience and expertise in the field of banking and or financial institutions, among others are expertise in the field of operations, marketing, bookkeeping, funding, loan, money market, capital market and statutory law, relating to banking and/ or financial institutions.

Berikut disampaikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021.

The following diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021.

Nama dan Jabatan Name and Position	Usia (tahun) Age (years old)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Terakhir Last Education	Pengalaman Kerja (tahun) Working Experience (year)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Arief Budiman (Presiden Komisaris / President Commissioner)	65	Laki-laki Male	S1	36
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen / Independent Commissioner)	63	Laki-laki Male	S2	37
Adi Haryadi (Komisaris Independen / Independent Commissioner)	58	Laki-laki Male	S2	29
Direksi Board of Directors				
Hwang Gyusoon (Presiden Direktur / President Director)	57	Laki-laki Male	S1	30
Kang Bong Joo (Direktur / Director)	56	Laki-laki Male	S1	30
Sadhana Priatmadja (Direktur / Director)	59	Laki-laki Male	S2	35
M. Tri Budiono (Direktur / Director)	58	Laki-laki Male	S1	31
Benny Sudarsono Tan (Direktur / Director)	51	Laki-laki Male	S2	27
Edwin Sulaeman (Direktur / Director)	53	Laki-laki Male	S1	31



## Tata Kelola Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

### Governance in The Board of Commissioners and Board of Directors Nominations

Pedoman Board Manual yang dimiliki BWS mengatur kriteria bagi pihak yang menjabat Dewan Komisaris dan Direksi serta prosedur nominasi hingga pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.

BWS has Board Manual which regulates the requirements for Board of Commissioners and Board of Directors candidates and nomination procedures until the appointment and resignation.

#### Kriteria Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang diputuskan sesuai dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

#### Board of Commissioners Criteria

Members of Board of Commissioners are individuals who meet the following qualifications at the time of appointment and during the tenure:

1. Having good characters, morals and good integrity.
2. Legally competent.
3. Within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>» Tidak pernah dinyatakan pailit.</li> <li>» Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.</li> <li>» Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</li> <li>» Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.</li> <li>• Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.</li> <li>• Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</li> </ul> </li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dengan persyaratan sebagai berikut:             <ul style="list-style-type: none"> <li>» Dalam 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan.</li> <li>» Selama menjabat sebagai Dewan Komisaris.</li> </ul> </li> <li>5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat.</li> <li>7. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dan pengalaman di bidang Perbankan dan bidang Keuangan.</li> <li>8. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>9. Tidak termasuk dalam pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.</li> <li>10. Wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sekurang-kurangnya Tingkat 1.</li> <li>11. Tidak memiliki kredit bermasalah.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Never been declared bankrupt.</li> <li>» Never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of causing a company being declared bankrupt.</li> <li>» Never being convicted of criminal offenses resulting in state financial loss and/or related to the financial sector.</li> <li>» Never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Failed to conduct an annual GMS.</li> <li>• Their accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or failed to provide accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and</li> <li>• Caused a company that had the license and approval from or registered at the OJK failed to meet its obligation to submit the annual report and/or financial reports to the OJK.</li> </ul> </li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Never being convicted of criminal offenses resulting in state financial loss and/or related to the financial sector by the following requirements             <ul style="list-style-type: none"> <li>» Within 20 (twenty) years prior to being nominated.</li> <li>» While serving as a member of the Board of Commissioners</li> </ul> </li> <li>5. Committed to complying with the laws and regulations.</li> <li>6. Has a commitment to the development of a healthy bank.</li> <li>7. Have the knowledge and/or expertise in the Banking and Financial fields.</li> <li>8. Members of the Board of Commissioners must meet the requirements for competency and compliance assessment in accordance with the OJK Regulations.</li> <li>9. Not one of the parties prohibited from becoming a member of the Board of Commissioners.</li> <li>10. Must have a Risk Management Certificate at least Level 1.</li> <li>11. Doesn't have non-performing loans.</li> </ol> |
|--|---|

### Kriteria Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

### Board of Directors Criteria

Those who may be appointed as a member of the Board of Directors are individuals who meet the following qualifications upon the appointment and during the tenure:

1. Having good characters, morals and good integrity.
2. Legally competent.

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Tidak pernah dinyatakan pailit</li> <li>» Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit</li> <li>» Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan</li> <li>» Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan</li> <li>• Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS</li> <li>• Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan</li> </ul> </li> </ul> <p>4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Dalam 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan</li> <li>» Selama menjabat sebagai Direksi</li> </ul> <p>5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat</p> <p>7. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau perusahaan publik</p> <p>8. Mayoritas anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank</p> <p>9. Setiap anggota direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas jasa keuangan</p> <p>10. Tidak termasuk dalam pihak yang dilarang untuk menjadi direksi</p> <p>11. Wajib memiliki sertifikat manajemen risiko tingkat 5</p> <p>12. Tidak memiliki kredit bermasalah</p> | <p>3. <i>Within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Never been declared bankrupt</i></li> <li>» <i>Never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of causing a company being declared bankrupt</i></li> <li>» <i>Never being convicted of criminal offenses resulting in state financial loss and/or related to the financial sector</i></li> <li>» <i>Never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Failed to conduct an annual GMS</i></li> <li>• <i>Their accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or failed to provide accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS</i></li> <li>• <i>Caused a company that had the license and approval from or registered at the OJK failed to meet its obligation to submit the annual report and/or financial reports to the OJK</i></li> </ul> </li> </ul> <p>4. <i>Never being convicted of criminal offenses resulting in state financial loss and/or related to the financial sector by the following requirements:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Within 20 (twenty) years prior to being nominated</i></li> <li>» <i>While serving as a member of the Board of Directors</i></li> </ul> <p>5. <i>Committed to complying with the laws and regulations</i></p> <p>6. <i>Has a commitment to the development of a healthy bank</i></p> <p>7. <i>Have the knowledge and/or expertise in the Banking and Financial fields</i></p> <p>8. <i>The majority of members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in the operational field as bank Executive Officers</i></p> <p>9. <i>Each member of the Board of Directors must meet the requirements for competency and compliance assessment in accordance with the OJK Regulations</i></p> <p>10. <i>Not one of the parties prohibited from becoming a member of the Board of Directors</i></p> <p>11. <i>Must have a Risk Management Certificate at least Level 5</i></p> <p>12. <i>Doesn't have non-performing loans</i></p> |
|--|---|



## Kebijakan Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran khusus terkait suksesi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

## Succession Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

The Nomination and Remuneration Committee has a special role related to the succession of the Board of Commissioners and Board of Directors, as seen in the chart below.

### Pemegang Saham Pengendali

Controlling Shareholders

Menyampaikan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris

Conveying prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners

### Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi & Remunerasi untuk mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners may request the Nomination & Remuneration Committee to review, evaluate and provide recommendations on prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners

### Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee

- Melakukan Kajian dan Penilaian Internal terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi pada Dewan Komisaris
- Melakukan interview kepada calon Direksi dan Dewan Komisaris jika diperlukan

- Conducting Internal Review and Assessment to prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners and providing recommendations to the Board of Commissioners
- Conduct interviews to prospective Board of Directors and Board of Commissioners if necessary

### Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- Mengkaji dan mengevaluasi hasil rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham melalui untuk dapat ditetapkan di Rapat Umum Pemegang Saham

- Reviewing and evaluating the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee
- Provide recommendations to Shareholders through the General Meeting of Shareholders

### Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan catatan akan efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Determining members of the Board of Directors and Board of Commissioners with a notification will be effective after passing the Fit & Proper Test conducted by the OJK

## Prosedur Pengangkatan, Pengunduran Diri serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Dalam satu periode masa jabatan Dewan Komisaris adalah tiga tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Bank untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, tepat, dan independen.

## Procedures for Appointment, Resignation and Dismissal of the Board of Commissioners

In accordance with the Bank's Articles of Association, the Board of Commissioners shall be appointed for a certain term of office and may be reappointed. In one term of office of the Board of Commissioners is three years or up to the closing of the Annual GMS at the end of one term of office, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to at any time dismiss members of the Board of Commissioners who are in office.

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS with due regard to the Bank's vision, mission, and strategic plan to enable effective, fast, precise, and independent decision making.

Tata cara pengunduran diri dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Kebijakan Bank tentang Dewan Komisaris yang telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

A. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
2. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
3. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a) Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris; dan
  - b) Hasil penyelenggaraan RUPS terkait permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya.
6. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a) Meninggal dunia
  - b) Ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan
  - c) Diberhentikan karena keputusan RUPS
  - d) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku

B. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang

*Procedures for resignation and dismissal of the Board of Commissioners member stipulated in the Bank's Policy on the Board of Commissioners that have been adjusted to the applicable laws and regulations, are as follows:*

A. *Resignation*

1. *A Member of Board of Commissioners can resign from his/her positions before the tenure ends by notifying the Bank in writing of its intentions.*
2. *The Bank must conduct a GMS to decide on the resignation of the member of Board of Commissioners not later than 90 (ninety) days after the resignation is received.*
3. *The Bank must disclose information to the public and notify the OJK within 2 (two) working days after:*
  - a) *Received the resignation of the member of Board of Commissioners; and*
  - b) *The results of the GMS related to the request for resignation of members of the Board of Commissioners.*
4. *Before the resignation is effective, the concerned members of Board of Commissioners are still obliged to complete their duties and responsibilities in accordance with the provisions in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
5. *To Members of the Board of Commissioners who resign can still be held accountable as members of the Board of Commissioners from the date of their appointment until the date of approval of his resignation at the GMS. The release of responsibility of members of the Board of Commissioners who resigned was granted after the GMS released him.*
6. *The term of office of a member of the Board of Commissioners shall automatically end, if such member of the Board of Commissioners:*
  - a) *Passed away*
  - b) *Is placed under curatele based on a court decision*
  - c) *Dismissed due to GMS decision*
  - d) *Doesn't longer fulfill the requirements of the applicable laws and regulations*

B. *Dismissal of The Board of Commissioners Member*

1. *dismissed at anytime based on the GMS Resolution by stating the reasons. The reason of dismissal of members of the Board of Commissioners may be conducted if the concerned member of the Board of Commissioners is no longer meet the requirements*

bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Bank atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, namun pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

2. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (satu) di atas berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Setiap pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:

- a) Situs web penyedia e-RUPS
- b) Situs web Bursa Efek
- c) Situs web Bank

Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

### Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan saat RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Tata cara pengunduran diri diatur dalam Kebijakan Direksi yang mengacu kepada Undang-undang No 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum:

*as a member of the Board of Commissioners, which among other things, have committed an actions which causes loss to the Bank or due to other reasons considered correct by the GMS. The resolution of the dismissal of such member of the Board of Commissioners shall be adopted after the concerned member is given opportunity to defend themselves in the GMS, but the giving of opportunity to defend themselves is not necessary in the concerned member has not objection toward such dismissal.*

2. *The dismissal of members of the Board of Commissioners as referred to in the provisions of number 1 (one) above shall be effective as of the closing of the GMS or another date as stipulated in the GMS resolution.*

*Any appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Commissioners as stated in the Summary of the Minutes of GMS shall be announced to the public at least through:*

- a) *e-GMS provider website*
- b) *Stock Exchange website*
- c) *The Bank's website,*

*In Bahasa Indonesia and foreign languages, with the provisions that the foreign languages used shall be at least English language.*

### Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Directors

*The members of the Board of Directors are appointed by the GMS in accordance with the applicable provisions, each for a period of time from the date specified when the GMS appoints them until the close of the third annual GMS after the date of their appointment, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss them at any time by stating the reason after the concerned member of the Board of Directors is given opportunity to defend their self in the GMS. Such termination shall be effective as of the closing of the GMS which decides its termination or another date as determined in the resolution of the GMS. The members of the Board of Directors whose end of their term of office may be reappointed pursuant to the resolutions of the GMS.*

*The procedure for resignation is stipulated in the Bank's Policy on The Board of Directors which refers to Law No. 40 of 2007, the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks:*

- Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
- Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
- Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

Setiap pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:

- Situs web penyedia e-RUPS
- Situs web Bursa Efek
- Situs web Bank

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

- *A Member of Board of Commissioners can resign from his/her positions before the tenure ends by notifying the Bank in writing of its intention.*
- *The Bank must conduct a GMS to decide on the resignation of the member of Board of Directors not later than 90 (ninety) days after the resignation is received.*
- *Before the resignation is effective, the concerned members of Board of Directors are still obliged to complete their duties and responsibilities in accordance with the provisions in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations.*

*To Members of the Board of Directors who resign can still be held accountable as members of the Board of Directors from the date of their appointment until the date of approval of his resignation at the GMS.*

*Any appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors as stated in the Summary of the Minutes of GMS shall be announced to the public at least through:*

- *e-GMS provider website*
- *Stock Exchange website*
- *The Bank's website,*

*in Bahasa Indonesia and foreign languages, with the provisions that the foreign languages used shall be at least English language.*



## Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

*Governance in The Board of Commissioners and Board of Directors Remunerations*

### Dasar Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

BWS telah menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan/wati BWS baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat tetap terjaga.

### Basic Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

*BWS has implemented a remuneration policy based on OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 and OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations. Remuneration is a reward that is determined and given to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or Employees of BWS both fixed and variable in the form of cash or non-cash in accordance with their duties, authorities, and responsibilities. The implementation of remuneration policy aims to encourage prudent risk taking so that the business continuity of Bank can be maintained.*

## Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Bank.

## Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi BWS dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi karyawan, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank.

Remunerasi BWS disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan karyawan agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank.

## Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors obtain a number of remuneration and other facilities. Remuneration policy and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors refer to the decision of Shareholders as stipulated in the GMS with due regard to the Bank's review.

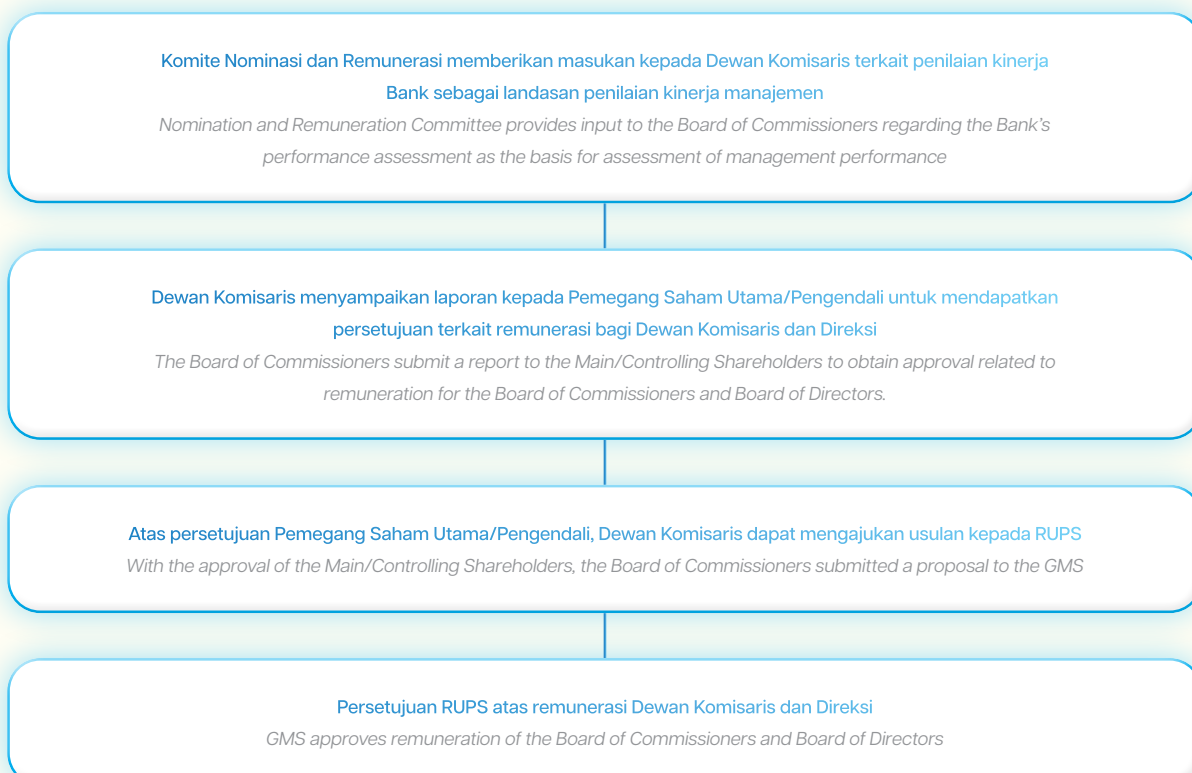
## Remuneration Policy Procedure

Remuneration policy is one of the important factors to obtain and/or maintain competent and qualified employees, executive officers, Board of Directors and Board of Commissioners. Remuneration policy is BWS's strategy in providing rewards tailored to BWS ability to accommodate changes in employee demographics, management of labor costs, and to encourage the achievement of business objectives of Bank.

BWS Remuneration is prepared to attract, maintain, motivate, and improve employee attachment in order to continuously provide optimal performance, support the vision, mission, and strategy of BWS.

### Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Chart of Remuneration Determination Procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors





## Cakupan Kebijakan Remunerasi

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, BWS telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 077/KEP-DIR/A-04/IX/20 tanggal 24 September 2020. Kebijakan Remunerasi BWS berisi mengenai pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, termasuk dalam hal ini penetapan *material risk taker* untuk beberapa posisi tertentu. Penetapan *material risk taker* dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Dalam melakukan menetapkan remunerasi yang bersifat tetap, BWS memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Skala usaha
2. Kompleksitas usaha
3. *Peer group*
4. Tingkat inflasi
5. Kondisi dan kemampuan keuangan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
7. Perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti *fraud* atau risiko operasional lain.

Sedangkan dalam menetapkan remunerasi yang bersifat variabel, selain pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 s.d. 7 di atas, BWS juga mempertimbangkan pelaksanaan *prudent risk taking*.

- Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko  
Dalam memberikan remunerasi BWS memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha BWS. BWS menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha BWS. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi BWS memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.
- Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi  
Dalam pemberian remunerasi, BWS melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja BWS,

## Scope of Remuneration Policy

*In connection with the enactment of OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 and OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations, BWS has had a Remuneration Policy based on Decision of the Board of Directors No. 077/KEP-DIR/A-04/IX/20 dated September 24, 2020. BWS's Remuneration Policy contains the provision of remuneration to the Board of Commissioners, Directors and Employees, including the determination of risk taker material for certain positions. Determination of risk taker material is carried out by qualitative and quantitative approach.*

*In determining a fixed remuneration, BWS considering the following:*

1. *Business scale*
2. *Business complexity*
3. *Peer group*
4. *Inflation rate*
5. *Financial condition and capability*
6. *Not contrary to the Laws and Regulations*
7. *Differences (gaps) of remuneration between position levels so as to reduce the potential for internal conflicts and operational risks such as fraud or other operational risks.*

*While to determine the variable remuneration, in addition to considering points 1 to 7 above, BWS also considers the implementation of prudent risk taking.*

- *Remuneration Associated with Risk*  
*In providing remuneration, BWS gives attention to the principles of prudence that aims to encourage prudent risk taking to maintain the continuity of BWS business. BWS determines the method of measuring performance and type of risk in providing the Variable Remuneration according to the scale and complexity of BWS business activities. In determining the remuneration policy, BWS considering to the type, criteria, impact and changes in determining the main types of risks in remuneration.*
- *Performance Measurement Associated with Remuneration*  
*In remuneration, BWS conducts performance measurements associated with remuneration including review of remuneration policies associated with performance assessment, individual remuneration measurement methods with BWS performance, work*

kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode yang digunakan BWS untuk menyatakan bahwa kinerja (Key Performance Indicator) yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (based on performance), kinerja unit kerja dan kinerja BWS secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan.

- **Penentuan Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko**  
BWS memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh BWS.  
Berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham, khusus bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.
- **Jasa Konsultan Eksternal**  
Di tahun 2021, BWS tidak menggunakan konsultan eksternal dalam merumuskan kebijakan terkait remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan.

unit performance and individual performance as well as Key Performance Indicators so that remuneration can be adjusted if performance targets are not achieved. The implementation of remuneration strategy is also implemented by giving attention to the performance of each individual employee (based on performance), work unit performance and overall BWS performance, but still within the budget set.

- **Determination of Remuneration Associated with Performance and Risk**  
BWS provides variable remuneration namely remuneration associated with performance and risk, among others Bonuses, performance incentives or other forms as similar with it. Remuneration in the form of bonuses, tantiem, incentives can be given in the form of cash, shares or stock based instruments issued by BWS.  
  
Based on POJK No. 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations, variable remuneration in the form of shares or stock-based instruments, specifically for Independent Commissioners is converted and given in cash.
- **External Consulting Services**  
In 2021, BWS does not use external consultants in formulating policies related to remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors or employees.

### Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

### Remuneration and Facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

The remuneration package and facilities received by the Board of Directors and The Board of Commissioners include the structure of remuneration and the details of nominal amounts, as in the table below:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah yang Diterima Direksi dalam 1 Tahun Total Remunerations for Board of Directors in 1 Year				Jumlah yang Diterima Dewan Komisaris dalam 1 Tahun Total Remunerations for Board of Commissioners in 1 Year			
	2021		2020		2021		2020	
	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)
Gaji, bonus, tunjangan, rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura Salaries, bonuses, allowances, routines, tantiem, and other facilities in the form of non natura	8*)	14.631,18	8	12.824,76	4	2.867,20	4	2.956,20

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah yang Diterima Direksi dalam 1 Tahun Total Remunerations for Board of Directors in 1 Year				Jumlah yang Diterima Dewan Komisaris dalam 1 Tahun Total Remunerations for Board of Commissioners in 1 Year			
	2021		2020		2021		2020	
	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi, kesehatan, dan sebagainya) Other facilities in the form of natura (housing, insurance, health, and others)	8*)	9.257,97	8	8.797,85	4	1.537,61	4	1.497,11
Jumlah Total		23.889,15		21.622,61		4.404,81		4.453,31

\*) Terdapat remunerasi Bpk. Park Young Man yang dibayarkan pada tahun 2021

\*) There was remuneration for Mr. Park Young Man paid in 2021

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Remuneration in one year is classified in the range of income levels are as follows.

Jumlah Remunerasi Total Remunerations	Jumlah Direksi Total Board of Directors		Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners	
	2021	2020	2021	2020
Diatas Rp2 miliar Above IDR2 billion	6	3	-	-
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar Above IDR1 billion to IDR2 billion	1	3	2	3
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above IDR500 million to IDR1 billion	-	1	2	1
Rp500 juta ke bawah IDR500 million and below	1	1	-	-

\*) Terdapat remunerasi Bpk. Park Young Man yang dibayarkan pada tahun 2021

\*) There was remuneration for Mr. Park Young Man paid in 2021

Remunerasi yang Bersifat Variabel:

- Bentuk remunerasi yang bersifat variabel  
Remunerasi bersifat variabel diberikan dengan berbasis kinerja dalam bentuk tunai dan saham, implementasi pemberian remunerasi bersifat variabel dalam bentuk saham tertuang dalam Keputusan Direksi No. 23/KEP.DIR/HC.III/III/19.
- Terdapat perbedaan pemberian remunerasi bersifat variabel dengan penjelasan sebagai berikut:

Variable Remuneration:

- Variable remuneration forms  
Variable Remuneration is given by performance-based in the form of cash and shares, the implementation of remuneration is variable in the form of shares contained in the Decision of the Board of Directors No. 23/KEPDIR/HC. III/III/19.
- There are differences in the provision of variable remuneration with the following explanations:

Jabatan Position	Dasar Remunerasi Variabel Basic Variable Remuneration	Pertimbangan Consideration
Direksi Board of Directors	Berdasarkan pencapaian nilai KPI (Key Performance Indicator), dikalikan gaji selama 1 tahun. Based on the achievement of KPI (Key Performance Indicator) value, multiplied by salary for 1 year.	Direksi memiliki fungsi untuk mengelola Bank dan bertanggung jawab terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank. The Board of Directors has a function to manage the Bank and is responsible for the achievement of the Bank's Business Plan.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Maksimal 1 (satu) kali Gaji sebulan. Maximum 1 (one) time Salary a month.	Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam operasional bank. The Board of Commissioners has a supervisory function on the duties and responsibilities of the Board of Directors. The Board of Commissioners is not involved in the bank's operations.
Pegawai Employees	Berdasarkan pencapaian KPI Individu dan KPI Bank, sehingga ditetapkan besaran persentase masing-masing remunerasi variabel. Based on the achievement of Individual KPIs and Bank KPIs, the percentage of each variable remuneration is determined.	Bertanggung jawab secara keseluruhan sesuai dengan uraian pekerjaan masing-masing. Overall responsibility according to the description of each job.

### Jumlah Direksi, Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Number of Variable Remuneration Recipients

Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun Total Variable Remuneration for 1 (one) Year			
2021		2020	
Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)
1.642	16.128,58	1.613	12.426,26

### Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Taker Position and Number of Material Risk Taker

Jabatan Position	2021 (orang) 2021 (person)	2020 (orang) 2020 (person)
Presiden Direktur President Director	1	1
Direktur Director	5	5
Jumlah Total	6	6

Tidak terdapat opsi saham untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2021.

BWS does not have stock options for The Board of Directors, Board of Commissioners and/or Executive Officers during 2021.

## Rasio Gaji

Berikut disampaikan rasio gaji yang berlaku di BWS.

## Salary Ratio

The following is the applicable salary ratio in BWS.

Perbandingan Comparison	Rasio Ratio	
	2021	2020
Karyawan Tertinggi dengan Karyawan Terendah <i>Highest Employee with Lowest Employee</i>	18:1	19:1
Direktur Utama dengan Direktur <i>President Director with Director</i>	2.2:1	3:1
Komisaris Utama dengan Anggota Komisaris <i>President Commissioner with Members of the Board of Commissioners</i>	1.3:1	1.3:1
Direksi Tertinggi dengan Karyawan Tertinggi <i>Supreme Board of Directors with The Highest Employees</i>	1.8:1	2.4:1

Yang dimaksud karyawan tertinggi adalah karyawan yang secara struktur organisasi berada di bawah jajaran direksi yang memperoleh penghasilan tertinggi dalam 1 (satu) tahun, sedangkan karyawan terendah adalah karyawan yang secara struktur organisasi berada di bawah jajaran direksi yang memperoleh penghasilan terendah dalam 1 (satu) tahun.

The highest employees are employees who are structurally organizational under the Board of Directors who earn the highest income in 1 (one) year, while the lowest employees are employees who are structurally under the Board of Directors who earn the lowest income in 1 (one) year.

## Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Dijamin Tanpa Syarat

Selama tahun 2021 tidak terdapat penerima remunerasi yang dijamin tanpa syarat.

## Number of Recipients and Total Unconditional Remuneration

During 2021 there will be no unconditional remuneration recipients.

## Jumlah Pegawai yang Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan dalam tabel di bawah ini:

## Number of Employees Affected by Layoffs and Total Severance Paid

The number of Employees affected by layoffs and the total severance paid in the table below:

### Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan Orang dalam 1 (Satu) Tahun

Total of Severance Paid by Persons in 1 (One) Year

Rentang Range	Jumlah Pegawai Total Employees	
	2021	2020
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar <i>Above IDR1 billion to IDR2 billion</i>	-	-
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar <i>Above IDR500 million to IDR1 billion</i>	-	-
Rp500 juta ke bawah <i>IDR500 million and below</i>	-	-



### Jumlah Total Remunerasi yang bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BWS adalah sebesar Rp269.069.332, dimana terdiri dari uang tunai sebesar Rp107.627.733 dan saham sebesar Rp161.441.599.

### Total Deferred Variable Remuneration

Total deferred variable remuneration consisting of cash and/or shares or stock-based instruments issued by BWS amounting to IDR269,069,332, consisting of cash amounting to IDR107,627,733, and shares amounting to IDR161,441,599.

### Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama Satu Tahun

Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah Rp29.917.324.

### Total Deferred Variable Remuneration Paid at One Year

Total deferred variable remuneration paid for 1 (one) year is IDR29,917,324.

### Rincian jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun (dalam jutaan rupiah) meliputi:

### Details of Total Remuneration Paid in One Year

Details of Total Remuneration paid in 1 (one) year (in millions of rupiah) include:

Remunerasi yang Bersifat Tetap Fixed Remuneration				
	2021		2020	
Tunai Cash	18,508.15		17,135	
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/stock-based instruments issued by the Bank	0		-	
Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration				
	2021		2020	
	Tidak Ditangguhkan Not Deferred	Ditangguhkan Deferred	Tidak Ditangguhkan Not Deferred	Ditangguhkan Deferred
Tunai Cash	5,112	108	4,263	89
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/stock-based instruments issued by the Bank	0	161	-	135

\*) Hanya untuk MRT (Material Risk Taker) diungkapkan dalam jutaan Rupiah.

\*) Only for MRT (Material Risk Taker) is expressed in millions of Rupiah

## Informasi Kuantitatif

- Total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit adalah sebesar Rp624.973.535.
- Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

## Quantitative Information

- *The total remaining deferred remuneration of both implicit and explicit adjustments is IDR624,973,535*
- *Total reduction in remuneration caused by explicit adjustments during the report period.*
- *Total reduction in remuneration caused by implicit adjustments during the reporting period.*



## Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

### *Transparency on Concurrent Positions of The Board of Commissioners and Board of Directors*

Ketentuan rangkap jabatan diatur dalam Kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

*Provision of concurrent positions are stipulated in the Charter of Board of Commissioners and the Policies of the Board of Directors.*

- Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris  
Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
  - » Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
  - » Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
- Ketentuan Rangkap Jabatan Direksi
  1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
  2. Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
  3. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi yang melakukan pengambilan keputusan pada bidang-bidang:
    - » Bisnis dan operasional
    - » Fungsi-fungsi pada kegiatan usaha bank
    - » *Treasury*
    - » Keuangan dan akuntansi
    - » Logistik dan pengadaan barang/jasa
    - » Teknologi informasi
    - » Satuan Kerja Audit Intern

- *Terms of Concurrent Position of the Board of Commissioners Members of the Board of Commissioners may concurrently positions as:*
  - » *Members of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officers at 1 (one) institution/ company not a financial institution.*
  - » *Members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers who carry out supervisory functions at 1 (one) non-Bank subsidiaries controlled by the Bank*
- *Terms of Dual Position of The Board of Directors*
  1. *Members of the Board of Directors are prohibited from concurrently serving as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers of banks, companies and/or other institutions.*
  2. *The President Director and/or Vice President Director are prohibited from concurrently serving as Directors carrying compliance functions*
  3. *Directors who was in charge the Compliance Function are prohibited from carrying out decision making functions in the areas of:*
    - » *Business and operational*
    - » *Functions in the Bank's business activities*
    - » *Treasury*
    - » *Finance and accounting*
    - » *Logistics and procurement of goods/services*
    - » *Information technology*
    - » *Internal Audit Unit*

- » Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Direksi pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

- » *Excluding concurrent positions, if the Board of Directors is responsible for supervision upon investments in a subsidiaries, carrying out functional duties as a member of the Board of Directors in a non-bank subsidiaries controlled by the Bank, as long as the concurrent position does not neglect its duties and responsibilities as a member of the Board of Directors of the Bank.*

### Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

*Transparency on Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors*

Nama dan Jabatan Name and Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position at Other Companies/ Institutions	Nama Perusahaan/Instansi Lain dan Periode Menjabat Company Name/Other Institution and Tenure
<b>Dewan Komisaris</b> <i>Board of Commissioners</i>		
Arief Budiman (Presiden Komisaris / President Commissioner)	-	-
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen / Independent Commissioner)	-	-
Adi Haryadi (Komisaris Independen / Independent Commissioner)	-	-
<b>Direksi</b> <i>Board of Directors</i>		
Hwang Gyusoon (Presiden Direktur / President Director)	-	-
Kang Bong Joo (Direktur / Director)	-	-
Sadhana Priatmadja (Direktur / Director)	-	-
M. Tri Budiono (Direktur / Director)	-	-
Benny Sudarsono Tan (Direktur / Director)	-	-
Edwin Sulaeman (Direktur / Director)	-	-

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomi Bank berbenturan dengan kepentingan ekonomi pribadi. Atas Hal tersebut maka anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuangan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.

*In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers of the Bank are prohibited from taking actions that may cause losses to the Bank or reduce the Bank's profits and shall disclose the conflict of interest as referred to in each decision. A conflict of interest is a condition in which the Bank's economic interests are contrary to personal economic interests. Therefore, members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers of the Bank should always:*

1. *Prioritize the Interests of the Bank and not reduce the Bank's finances in the event of a conflict of interest.*
2. *Avoiding decision making in situations and conditions of conflict of interest.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank.</p> <p>4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.</p> | <p>3. Disclose family relationships, financial relationships, management relationships, ownership relationships with other Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank and/or other parties in order to the Bank's business.</p> <p>4. Expressing the course of professionally decision making in which decisions must still be taken in conflict of interest conditions.</p> |
|---|--|



## Transparansi Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Transparency of Affiliated Relationships to The Board of Commissioners, Board of Directors and Main/Controlling Shareholders

Hubungan afiliasi merupakan hubungan istimewa yang terjadi akibat adanya hubungan keluarga maupun hubungan keuangan. Untuk memberikan transparansi tentang potensi benturan kepentingan, berikut disampaikan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Woori Bank Korea sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali Bank.

Affiliate relationships are special relationships that occur due to family relationships and financial relationships. To provide transparency about potential conflicts of interest, following the affiliate relationship between the Board of Commissioners, Board of Directors, and Woori Bank Korea as the Major Shareholder/Bank Controllers.

Nama dan Jabatan Name and Position	Hubungan Afiliasi dengan Affiliate Relationship with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Director	Pemegang Saham Utama/Pengendali Major Shareholders/ Controllers
<b>Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners			
Arief Budiman (Presiden Komisaris / President Commissioner)	✘	✘	✘
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen / Independent Commissioner)	✘	✘	✘
Adi Haryadi (Komisaris Independen / Independent Commissioner)	✘	✘	✘
<b>Direksi</b> Board of Directors			
Hwang Gyusoon (Presiden Direktur / President Director)	✘	✘	✘
Kang Bong Joo (Direktur / Director)	✘	✘	✘
Sadhana Priatmadja (Direktur / Director)	✘	✘	✘
M. Tri Budiono (Direktur / Director)	✘	✘	✘
Benny Sudarsono Tan (Direktur / Director)	✘	✘	✘
Edwin Sulaeman (Direktur / Director)	✘	✘	✘



## Transparansi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

### Transparency of Share Ownership for The Board of Commissioners and Board of Directors

Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang telah dilaporkan Bank kepada regulator per 31 Desember 2021.

*The following is the transparency of share ownership by Board of Commissioners and Board of Directors which has been reported by the Bank to regulator as of December 31, 2021.*

Nama dan Jabatan Name and Position	Kepemilikan Saham BWS (kode saham: SDRA) BWS ShareHolding (stock code: SDRA)	Persentase Kepemilikan Saham BWS BWS' Stock Ownership Percentage (%)	Kepemilikan Saham Perusahaan Lain yang Lebih dari 5% More Than 5% Shareholding of Other Companies
<b>Dewan Komisaris</b> <i>Board of Commissioners</i>			
Arief Budiman (Presiden Komisaris / President Commissioner)	2.302.500	0,03%	-
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen / Independent Commissioner)	-	-	-
Adi Haryadi (Komisaris Independen / Independent Commissioner)	-	-	-
<b>Direksi</b> <i>Board of Directors</i>			
Hwang Gyusoon (Presiden Direktur / President Director)	-	-	-
Kang Bong Joo (Direktur / Director)	3.100	0,00%	-
Sadhana Priatmadja (Direktur / Director)	59.800	0,00%	-
M. Tri Budiono (Direktur / Director)	37.500	0,00%	-
Benny Sudarsono Tan (Direktur / Director)	23.900	0,00%	-
Edwin Sulaeman (Direktur / Director)	5.000	0,00%	-

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Bank mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, Bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas transaksi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

*In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Reporting of Share Ownership or Every Changes in the Company's Share Ownership for Public Company, where is the member of Board of Commissioners and Board of Directors shall be required to submit the information to the Bank regarding the ownership and every changes in the ownership of the Bank's shares at least 3 (three) working days after transaction occurred. Then, the Bank shall be required to submit the report to OJK for those transactions, no later than 10 (ten) days from the date of transactions.*

Berkenaan dengan hal tersebut, di sepanjang tahun 2021, Bank telah melaporkan 6 (enam) kali transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BWS yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut.

*In connection with this regulation, in 2021, Bank has been reported 6 (six) transaction of purchases and/or sales of BWS shares which conducted by Board of Directors and Board of Commissioners, with the following details.*



No	Tanggal Date		Jumlah Pembelian Saham Total of Share Purchased	Keterangan Remarks
	Transaksi Transaction	Laporan Statement		
1	18 Mei 2021 May 18, 2021	19 Mei 2021 May 19, 2021	3100	Pembelian Saham a.n Kang Bong Joo Share Purchased on behalf of Kang Bong Joo
2	18 Mei 2021 May 18, 2021	19 Mei 2021 May 19, 2021	4200	Pembelian Saham a.n Arief Budiman Share Purchased on behalf of Arief Budiman
3	19 Mei 2021 May 19, 2021	20 Mei 2021 May 20, 2021	18.300	Pembelian Saham a.n M Tri Budiono Share Purchased on behalf of M Tri Budiono
4	19 Mei 2021 May 19, 2021	20 Mei 2021 May 20, 2021	18.200	Pembelian Saham a.n Benny Sudarsono Tan Share Purchased on behalf of Benny Sudarsono Tan
5	19 Mei 2021 May 19, 2021	20 Mei 2021 May 20, 2021	5000	Pembelian Saham a.n Edwin Sulaeman Share Purchased on behalf of Edwin Sulaeman
6	20 Mei 2021 May 20, 2021	21 Mei 2021 May 21, 2021	24200	Pembelian Saham a.n Sadhana Priatmadja Share Purchased on behalf of Sadhana Priatmadja

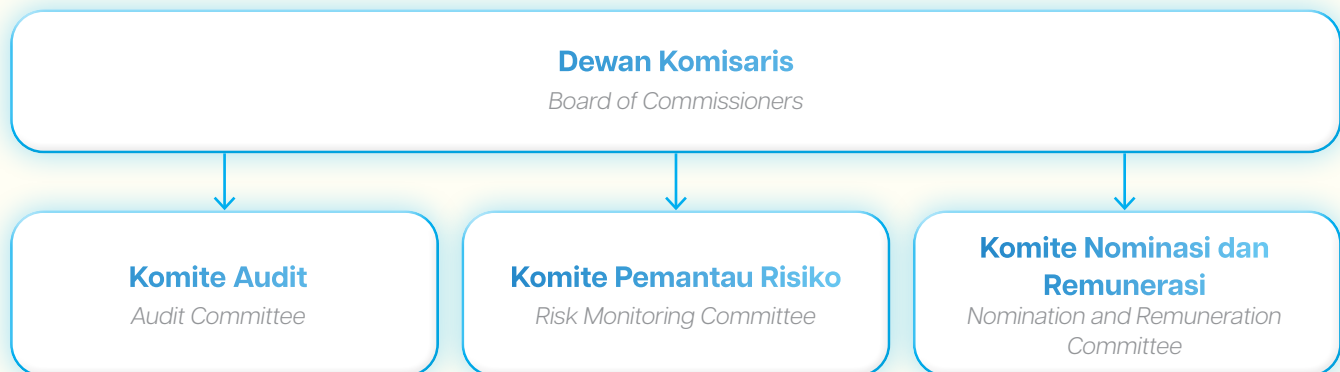


## Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of The Board of Commissioners

Dalam melakukan pengawasan atas beroperasinya Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko.

In supervising the operation of the Bank, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners. The committees under the Board of Commissioners consist of the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee.



### Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dengan merujuk kepada:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

The Audit Committee is a committee under the Board of Commissioners established by referring to:

1. OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 9, 2016 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks.
2. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks.

3. Peraturan OJK No 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Agar pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan optimal, Bank mengesahkan Piagam Komite Audit yang merupakan acuan pelaksanaan tugas Komite Audit. Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Bank memiliki pedoman dan tata tertib komite yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Pedoman dan Tata Tertib Komite merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit. Pedoman ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Bank. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit diberikan wewenang untuk menyelidiki semua temuan yang dipandang perlu sebagai upaya menjamin bahwa pengendalian internal, praktek akuntansi dan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

- Membuat kajian atas dan menyetujui rencana kegiatan tahunan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya serta meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Menganalisis atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- Mengevaluasi dan menganalisis rencana audit Bank dan implementasinya. Memastikan bahwa audit telah dilaksanakan dalam frekuensi dan lingkup yang sesuai dan mengawasi tindak lanjut dari laporan audit.

3. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee

### Guidelines and Code of Conduct for Audit Committees

To optimize the implementation of the Audit Committee's duties, Bank ratified the Audit Committee Charter to be a reference in carrying out the duties of Audit Committee. The Audit Committee Charter is determined by the Board of Commissioners and evaluated periodically and, if deemed necessary, amendments will be made to ensure the Bank's compliance with OJK regulations and other relevant regulations. Bank has guidelines and charter for the committee as stipulated in the Board of Commissioners Decree No. 009/KEP-DEKOM/A-13/II/20 dated February 18, 2020 concerning Guidelines and Charter of the Audit Committee.

Guidelines and Charter of the Committee is a written document that regulates primarily the position, authority, duties, and responsibilities of the Audit Committee. This Guideline also provides limitations and regulates the working relationship between the Audit Committee and the Board of Commissioners, Board of Directors, Internal Auditors, and External Auditors.

### Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee has duties and responsibilities in supervising financial reporting, internal control, and governance of the Bank. To carry out these duties, the audit committee is authorized to investigate all findings deemed necessary in an effort to ensure that the Bank's internal controls, accounting practices and governance have been well.

The duties and responsibilities of the Audit Committee include:

- Review and approve the annual activity plan of the Internal Audit.
- Review the financial information that will be issued by the Bank such as financial statements, projections and other financial information and ensure that the financial statements are in accordance with applicable accounting standards.
- Analyze the Bank's adherence to the Laws and Regulations in the capital market and other laws and regulations related to the Bank's activities.
- Evaluate and analyze the Bank's audit plan and its implementation. Ensure audits have been conducted within the appropriate frequency and scope and supervise the follow-up of audit reports.

- Menganalisis independensi dan obyektivitas Akuntan Publik serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
- Menganalisis kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua resiko penting telah dipertimbangkan.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, KAP dan Hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan di RUPS.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.
- Membuat, mengkaji dan memperbarui Piagam Komite Audit.
- Menyelenggarakan maupun memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.
- Menggunakan jasa konsultan, akuntan atau pihak eksternal lain yang memberikan nasehat atau pelaksanaan suatu investigasi dan pengumpulan informasi yang diperlukan oleh Komite dan karyawan.
- Melaksanakan tugas lain yang sewaktu-waktu diberikan oleh Dewan Komisaris.
- *Analyze the independence and objectivity of the Public Accountant and the suitability of the audit implementation by the Public Accounting Firm with the applicable audit standards.*
- *Analyze the adequacy of inspections conducted by Public Accountant Firm to ensure all important risks have been considered.*
- *Monitor and evaluate the implementation of the Board of Directors' follow-up on the findings of Internal Audit, Public Accountant Firm and OJK Supervision Results in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*
- *Provide recommendations on the appointment of Public Accountants and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be submitted at the GMS.*
- *Review and report to the Board of Commissioners for complaints related to the Bank.*
- *Maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Bank.*
- *Create, review and update the Audit Committee Charter.*
- *Conducting or giving authority to conduct investigations within the scope of their duties.*
- *Use the services of consultants, accountants or other external parties to provide advice or carry out an investigation and collection information required by the Committee and its employees.*
- *Carry out other duties that are at any time given by the Board of Commissioners.*

### **Wewenang Komite Audit**

Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite wajib bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

### **Kode Etik Komite Audit**

Kode etik Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Integritas
  - » Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mempertahankan integritasnya yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan dan tanggung jawab.
  - » Dilarang dengan sengaja menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau terlibat dalam perbuatan yang merusak kredibilitas Komite Audit.

### **Authorities of the Audit Committee**

*The Committee has authority to obtain full, free and unrestricted access to information about the Bank's employees, funds, assets and other resources relating to the performance of its duties. In exercising its authority, the Committee shall cooperate with the Internal Audit, and other units deemed necessary.*

### **Code of Conduct for Audit Committees**

*Code of Conduct for Audit Committee is as follows:*

1. Integrity
  - » *Members of the Audit Committee in carrying out their duties and responsibilities, shall maintain their integrity based on the principles of honesty, fairness, wisdom and responsibility.*
  - » *Prohibited from knowingly being part of illegal activities, or engaging in acts that undermine the credibility of the Audit Committee.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Objektif dan Independen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Anggota Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi ataupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun.</li><li>» Wajib memperhatikan keseimbangan dan menempatkan kepentingan <i>stakeholders</i> diatas kepentingan lainnya.</li><li>» Dilarang menerima sesuatu yang dapat atau berpotensi mempengaruhi penilaian yang profesional.</li></ul> <p>3. Kerahasiaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Anggota Komite Audit yang masih, dan yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib bersikap prudent dalam menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.</li><li>» Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perseroan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya.</li></ul> <p>4. Kompetensi</p> <p>Anggota Komite Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya.</li><li>» Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.</li><li>» Memelihara kompetensi profesionalnya dengan mengikuti perkembangan dan praktek-praktek terbaik dalam bidang akunting, pengauditan dan pengendalian internal.</li></ul> | <p>2. <i>Objective and Independent</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» <i>Members of the Audit Committee carry out their duties and responsibilities professionally without the influence of personal interests or influence/ pressure from any party.</i></li><li>» <i>Must pay attention to the balance and put the interests of stakeholders above other interests.</i></li><li>» <i>It is forbidden to accept anything that could or could potentially affect a professional judgment.</i></li></ul> <p>3. <i>Confidentiality</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» <i>Members of the Audit Committee who are still, and who no longer serve as members of the Committee, must be prudent in maintaining the confidentiality of documents, data, and information obtained while serving as members of the Committee, both from internal and external parties and only used for the purposes of carrying out their duties.</i></li><li>» <i>Committee members are prohibited from misusing important information relating to the company for personal or other.</i></li></ul> <p>4. <i>Competency</i></p> <p><i>Members of the Audit Committee:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» <i>Carry out their duties and responsibilities professionally by applying their knowledge, expertise, and experience.</i></li><li>» <i>Follow the development of laws and regulations in the field of banking, Capital Market and laws and regulations related to the Company's business activities.</i></li><li>» <i>Maintain their professional competencies by keeping up to date with developments and best practices in the areas of accounting, auditing and internal control.</i></li></ul> |
|--|---|

### Kedudukan Komite Audit

Kedudukan Komite Audit berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Komite Audit bekerja secara kolektif dan diketuai oleh Komisaris Independen.
- Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.

### Position of Audit Committee

The position of the Audit Committee based on the Guidelines and Charter of the Audit Committee is as follows:

- The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners.
- The Audit Committee works collectively and is chaired by an independent Commissioner.
- The Audit Committee shall report the results of its evaluation to the Board of Commissioners.

## Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit Bank sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

## Susunan Komite Audit Tahun 2021 dan Profil Anggota Komite Audit

Dengan demikian, susunan Komite Audit per 31 Desember 2021 dapat dilihat di bawah ini.

## Structure, Membership and Expertise of the Audit Committee

The structure and membership of the Audit Committee are as follows:

1. The Bank's Audit Committee consists of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and Independent Parties.
2. The composition of the membership of the Audit Committee is at least 1 (one) Independent Commissioner as Chairman concurrently a member, 1 (one) Independent Party who has expertise in finance or accounting and 1 (one) Independent Party who has expertise in the field of law or banking.
3. Must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance.
4. The Chairman of the Audit Committee may only hold concurrent positions as chairman of the committee at most 1 (one) other committee.

## Composition of Audit Committee in 2021 and Profile of Audit Committee Members

Thus, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2021 can be seen below.

### Susunan Komite Audit per 31 Desember 2021

Composition of Audit Committee as of December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Masa Akhir Jabatan Tenure
Ahmad Fajarprana	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP.DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.DEKOM/ III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022
Waldy Gutama	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP.DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.DEKOM/ III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022
Agus Setiadjaja	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP.DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.DEKOM/ III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022
Bambang Sutidjo	Anggota (Sekretaris)/Pihak Independen Member (Secretary)/ Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP.DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.DEKOM/ III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022



Profil Ketua Komite Audit Sdr. Ahmad Fajarprana dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Profil anggota Komite Audit non Komisaris per 31 Desember 2021 dapat dilihat di bawah ini.

#### **Waldy Utama**

Berusia 64 tahun, pendidikan terakhir Magister Manajemen bidang keuangan di sekolah tinggi swasta di Jakarta, pensiun dari Bank Indonesia tahun 2011 terakhir sebagai Pengawas Bank Madya, memiliki sertifikat dari Bank Indonesia sebagai Pemeriksa dan Analis Bank, menjadi peserta di berbagai seminar di dalam dan luar negeri (a.l London dan USA), mengikuti pelatihan International Finance Corporation (IFC) Audit Committee Master Program di Bangkok Thailand tahun 2017, pernah menjadi Komite Audit di Bank Woori Indonesia, saat ini juga sebagai anggota Komite Audit di BTN dan saat ini bergabung dengan BWS sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

#### **Agus Setiadjaja**

Lahir di Bandung tahun 1956, berusia 65 tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai staff Ahli atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalem Kaum PT Bank HS 1906 sejak 12 September 1994, sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank HS 1906 sejak 3 Mei 1999, sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906 sejak 10 Juli 2000 dan menjadi Komisaris BWS sejak 26 Mei 2011.

#### **Bambang Sutidjo**

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun, pendidikan terakhir sarjana teknik di Institut Teknologi Bandung. Merintis karir di Bank Woori Saudara dari tahun 2003 – 2011 sebagai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 2011 – 2016 sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal. Semenjak Januari 2019 ditunjuk sebagai anggota Komite Audit.

#### **Independensi Komite Audit**

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

*Profile of the Chairman of the Audit Committee Mr. Ahmad Fajarprana can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report. The profiles of non-Commissioner Audit Committee members as of 31 December 2021 can be seen below.*

#### **Waldy Utama**

*64 years old, with the last education is Master of Management in finance at a private college in Jakarta, retired from Bank Indonesia in 2011 with his last position as Middle Supervisor of Bank, has a certificate from Bank Indonesia as Bank Examiners and Analysts, become participants in various seminars at domestic and abroad (eg London and USA), attended the International Finance Corporation (IFC) training Audit Committee Master Program in Bangkok Thailand in 2017, has served as the Audit Committee at Bank Woori Indonesia, currently also has concurrent position as a member of Audit Committee at BTN and joined with BWS as a Member of Risk Monitoring Committee.*

#### **Agus Setiadjaja**

*Born in Bandung in 1956, aged 65 years old, completed his education at the Faculty of Economics and Master of Science in Accounting Studies at the Faculty of Post-Graduate University of Padjajaran, Bandung Indonesia, started his banking career at BWS as an Expert staff or Bureau of Directors in 1989, as Dalem Kaum Sub-Branch Head of PT Bank HS 1906 since September 12, 1994, as Corporate Secretary of PT Bank HS 1906 since May 3, 1999, as Internal Audit Unit Division Head of PT Bank HS 1906 since July 10, 2000 and became Commissioner of BWS since May 26, 2011.*

#### **Bambang Sutidjo**

*Indonesian citizen, aged 60 years old, with last education as engineering degree at Bandung Institute of Technology. He started his career at BWS from 2003 – 2011 as Head of Risk Management Task Force and 2011 – 2016 as Head of Internal Audit Task Force Division. Since January 2019 was appointed as a member of the Audit Committee.*

#### **Independence of the Audit Committee**

*All Members of the Audit Committee from independent parties do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company, which may affect its ability to act independently.*

## Rapat Komite Audit

Komite menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris, yaitu 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam isalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2021 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Audit pada rapat serta risalah rapat.

## Audit Committee Meeting

The Committee conducts meetings in accordance with the needs or at least equal to the provisions that are at least equal to the meeting of the Board of Commissioners, namely 4 (four) times a year. Committee Meetings can only be held if attended by at least 51% of all members including one Independent Commissioner and one Independent Party.

The Committee conducts meetings in accordance with the needs or at least equal to the provisions that are at least equal to the meeting of the Board of Commissioners, namely 4 (four) times a year. Committee Meetings can only be held if attended by at least 51% of all members including one Independent Commissioner and one Independent Party.

Throughout 2021 the Audit Committee held meetings 13 (thirteen) times. The following are the frequency and attendance of the Audit Committee at meetings and minutes of meetings.

### Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Komite Audit pada Rapat Komite Audit

Recapitulation of Audit Committee Attendance Level at Audit Committee Meeting

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Attendances	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri Number of Absences	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Ahmad Fajarprana Ketua / Chairman	13	13	-	100%
Park Tae Yong Anggota / Member	8	3	5	38%
Nanny Dewi *) Anggota / Member	3	3	-	100%
Waldy Gutama*) Anggota / Member	10	10	-	100%
Bambang Sutidjo Anggota / Member	13	13	-	100%
Agus Setiadjaja Anggota / Member	13	13	-	100%
Rata-rata Kehadiran Komite Audit Average Attendance of Audit Committees				90%

\*) Nanny Dewi berganti posisi dengan Waldy Gutama sejak tanggal 31 Maret 2021.

\*) Nanny Dewi has changed positions with Waldy Gutama since March 31, 2021.

## Risalah Rapat Komite Audit

### Minutes of Meeting for Audit Committee

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	21 Januari 2021 January 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Tindak lanjut temuan PWC 2019</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020</li> <li>Hasil pemeriksaan IT Audit</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up on OJK 2020 findings</li> <li>Follow-up on PWC 2019 findings</li> <li>2020 fraud settlement progress</li> <li>IT Audit results</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Park Tae Yong</li> <li>Nanny Dewi</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
2	16 Februari 2021 February 16, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020</li> <li>Pembahasan kasus <i>fraud</i> 2021</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up on OJK 2020 findings</li> <li>2020 fraud settlement progress</li> <li>Discussion on the 2021 fraud case</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Park Tae Yong</li> <li>Nanny Dewi</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
3	23 Maret 2021 March 23, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Pembahasan kasus <i>fraud</i> 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> <li>Realisasi strategi anti <i>fraud</i> 2020 dan perbandingan dengan strategi anti <i>fraud</i> 2021</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up on OJK 2020 findings</li> <li>Discussion of the 2021 fraud case</li> <li>The results of the IT and Inspectorate Audit</li> <li>Realization of anti-fraud strategy 2020 and comparison with anti-fraud strategy 2021</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Nanny Dewi</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
4	20 April 2021 April 20, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Pembahasan kasus <i>fraud</i> 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> <li>Pembahasan cakupan pemeriksaan sesuai dengan Audit Plan 2021 untuk Audit TI, Audit Inspektorat dan Audit Residen</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up on OJK 2020 findings</li> <li>2020 and 2021 fraud settlement progress</li> <li>Discussion on the 2021 fraud case</li> <li>The results of the IT and Inspectorate Audit</li> <li>Discussion on the scope of audits in accordance with the 2021 Audit Plan for IT Audits, Inspectorate Audits and Resident Audits</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
5	21 Mei 2021 May 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Pembahasan kasus <i>fraud</i> 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up on OJK 2020 findings</li> <li>2020 and 2021 fraud settlement progress</li> <li>Discussion on the 2021 fraud case</li> <li>The results of the IT and Inspectorate Audit</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Park Tae Yong</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
6	22 Juni 2021 June 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit Inspektorat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Follow-up on OJK 2020 findings</li> <li>2020 and 2021 fraud settlement progress</li> <li>Inspectorate audit results</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
7	27 Juli 2021 July 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> <li>Profil Risiko unit bisnis Mei dan Juni 2021</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
8	16 Agustus 2021 August 16, 2021	Penggantian Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal <i>Replacement of Head of Internal Audit Division</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Agus Setiadjaja</li> <li>Bambang Sutidjo</li> </ul>
9	25 Agustus 2021 August 25, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> <li>Profil risiko unit bisnis Juni dan Juli 2021</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
10	24 September 2021 September 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> <li>Profil risiko unit bisnis Juli dan Agustus 2021</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
11	19 Oktober 2021 October 19, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> <li>Profil risiko unit bisnis Agustus dan September 2021</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
12	29 November 2021 November 29, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020</li> <li>Komparasi Temuan Hasil Pemeriksaan OJK Periode 2020 dan 2021</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> <li>Profil risiko unit bisnis September dan Oktober 2021</li> <li>Rencana Kaji Ulang Kinerja Divisi Audit Internal oleh KAP</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>
13	24 Desember 2021 December 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan OJK 2020 dan 2021</li> <li>Progress penyelesaian kasus <i>fraud</i> 2020 dan 2021</li> <li>Hasil pemeriksaan Audit IT dan Inspektorat</li> <li>Profil risiko unit bisnis Oktober dan November 2021</li> <li>Overview Rencana Kerja 2021 vs Realisasi</li> <li>Komparasi Audit Plan 2021 - 2022</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Waldy Gutama</li> <li>Bambang Sutidjo</li> <li>Agus Setiadjaja</li> </ul>

## Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Sepanjang tahun 2021 Komite Audit mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Ahmad Fajarprana – Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based Supervisory Effectiveness of Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation	Webinar, 25 Maret 2021 Webinar, March 25, 2021	FKDKP
Ahmad Fajarprana – Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)	Webinar, 21 Juli 2021 Webinar, July 21, 2021	PT Efektifpro Knowledge Source

## Competency Development for Audit Committee

During 2021, Audit Committee has participated in the following competency development program:

## Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021

Selama tahun 2021 Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang dimiliki BWS, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelaahan laporan dan hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain laporan realisasi rencana bisnis, laporan pelaksanaan fungsi audit.
2. Review dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan dari eksternal dan internal, termasuk dalam hal ini evaluasi atas penyelesaian kasus *fraud*.
3. Review dan evaluasi rencana kerja audit tahun 2021 dan implementasinya.
4. Evaluasi pelaksanaan audit laporan tahunan 2020 oleh Kantor Akuntan Publik.
5. Evaluasi rencana kaji ulang Satuan Kerja Audit Internal oleh Kantor Akuntan Publik.
6. Evaluasi penerapan standar akuntansi perbankan, PSAK 71 dan PSAK 73.
7. Evaluasi pemeriksaan (mandatory BI) terkait pelaksanaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) untuk BI-RTGS, BI-SSSS, SKN-BI, BI-ETP dan DHBI.
8. Penyusunan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.

## Remunerasi Komite Audit

Besarnya honorarium untuk anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank, dan dibebankan kepada anggaran Bank. Dalam realisasinya, besaran remunerasi disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha serta kebijakan Bank.

## Report on the Implementation of Audit Committee Duties in 2021

During 2021 the Audit Committee has carried out their duties and function which stipulated in Audit Committee Charter owned by BWS, is as follows:

1. Implementation of the review of the report and things that need to get the approval of the Board of Commissioners, among others, the report on the realization of the business plan, the report on the implementation of the audit function.
2. Review and evaluation of follow-up examination from external and internal, including in this case evaluation of fraud case resolution.
3. Review and evaluation of audit work plan in 2021 and its implementation.
4. Evaluation of the audit implementation of the 2020 annual report by the Public Accounting Firm.
5. Evaluation of Internal Audit Unit review plan by Public Accounting Firm.
6. Evaluation of the implementation of banking accounting standards, IFRS 9 and IFRS 16.
7. Examination evaluation (mandatory BI) related to implementation of Bank Indonesia (BI) Payment System for BI-RTGS, BI-SSSS, BI-Clearing System, BI-ETP and BI-Blacklist.
8. Preparation of recommendations for the appointment of Public Accounting Firm for Financial Statements for Fiscal Year 2021.

## Audit Committee Remuneration

The amount of honorarium for members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners is determined based on the Bank's policy, and is charged to the Bank's budget. In its realization, the amount of remuneration is adjusted in accordance with business development and bank policy.



## Komite Nominasi dan Remunerasi *Nomination and Remuneration Committee*

Bank membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai organ pendukung bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merujuk kepada:

- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

*Bank established the Nomination and Remuneration Committee as a supporting organ for the Board of Commissioners in carrying out the nomination and remuneration functions. The establishment of the Nomination and Remuneration Committee refers to:*

- *OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 9, 2016 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks.*
- *OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning The Implementation of Governance in The Provision of Remuneration for Commercial Banks.*
- *OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*

### **Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi**

Agar pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi berjalan optimal, Bank mengesahkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan acuan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 010/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

### **Guidelines and Code of Conduct for Nomination and Remunerartion Committees**

*To optimize the duties of Nomination and Remuneration Committee, Bank ratified the Nomination and Remuneration Committee Charter which is a reference for the Nomination and Remuneration Committee in implementing its duties . The Nomination and Remuneration Committee Charter is determined by the Board of Commissioners and evaluated periodically and, if deemed necessary, amendments will be made to ensure the Bank's compliance with The OJK and other relevant regulations. The Nomination and Remuneration Committee Charter shall be stipulated by the Decision of Board of Commissioners No. 010/KEP-DEKOM/A-13/II/20 dated February 18, 2020 concerning Guidelines and Charter of the Nomination and Remuneration Committee.*

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan fungsi remunerasi
  - » Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
  - » Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan, struktur, dan besaran atas remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.
    - Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

### **Duties and Responsibilities**

*Duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:*

- *Related to the remuneration function*
  - » *Evaluate the remuneration policy.*
  - » *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
    - *Policy, structure, and amount of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners, to be submitted to the GMS.*
    - *Performance assessment with the appropriateness of remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*

- Opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan (apabila ada), antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
- » Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
- » Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- » Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- Terkait dengan fungsi nominasi
  - » Menyusun komposisi, proses nominasi, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan serta memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - » Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS.
  - » Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
  - » Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Options to the Board of Commissioners, Board of Directors and employees (if any), among others stock options and supervision of their implementation.
- » Assisting the Board of Commissioners in proposing an appropriate remuneration system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in the form of payroll/honorarium system, provision of facilities, benefits, bonuses/incentives/tantiem, pension system, assessment or evaluation of the system and options provided.
- » Ensure that the remuneration policy is in accordance with applicable regulations.
- » Periodically evaluate the implementation of remuneration policy.
- Related to nomination function
  - » Develop the composition, nomination process, policies and criteria required and provide recommendations on the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
  - » Provide recommendations on prospective members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the GMS.
  - » Provide recommendations on Independent Parties who will be members of the Audit Committee and Members of the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.
  - » Prepare competency development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

### Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

### Kedudukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Kedudukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan diketuai oleh Komisaris Independen.
- Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.

### Authorities of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is authorized to gain full, free and unrestricted access to information regarding the Bank's employees, funds, assets and other resources relating to the performance of its duties.

### Position of Nomination and Remuneration Committee

Position of the Nomination and Remuneration Committee based on the Guidelines and Charter of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

- Nomination and Remuneration Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners.
- Nomination and Remuneration Committee works collectively and is chaired by the Independent Commissioner.
- Nomination and Remuneration Committee shall report the results of its evaluation to the Board of Commissioners.

## Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - » Seorang Komisaris Independen
  - » Seorang Komisaris
  - » Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan Karyawan
- Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi.
- Dalam hal anggota Komite Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

## Structure, Membership and Expertise of the Nomination and Remuneration Committee

The structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

- Nomination and Remuneration Committee consists of at least:
  - » An Independent Commissioner
  - » A Commissioner
  - » An Executive Officer who carries Human Resources or an Employee representative
- The Remuneration Committee is chaired by an Independent Commissioner.
- Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Remuneration Committee.
- In the event that members of the Remuneration Committee are determined by more than 3 (three) persons, the members of the Independent Commissioner shall be at least 2 (two) persons.
- The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee may only hold concurrent positions as chairman of the Committee at most 1 (one) other Committee.

### Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2021

Composition of Nomination and Remuneration committee as of December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Masa Akhir Jabatan Tenure
Ahmad Fajarprana	Ketua/Komisaris Independen(*) Chairman/Independent Commissioner(*)	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP. DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No. 007/KEP. DEKOM/III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022
Arief Budiman	Anggota/Presiden Komisaris(*) Member/President Commissioner(*)	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP. DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No. 007/KEP. DEKOM/III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022
Akhmad Syailendra	Anggota Tetap (Sekretaris)/Kepala Divisi Human Capital Permanent Member (Secretary)/ Human Capital Division Head	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP. DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No. 007/KEP. DEKOM/III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Sdr. Ahmad Fajarprana dan profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Sdr. Arief Budiman dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi non Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

Profile of the Chairman of Nomination and Remuneration, Ahmad Fajarprana, and the Member of Nomination and Remuneration Committee Arief Budiman can be seen in the Profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report. The profile of non Commissioner Nomination and Remuneration Committee members can be seen below.

### **Akhmad Syailendra**

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun. Lulusan Universitas Pajajaran Bandung Fakultas Ekonomi Manajemen. Bergabung dengan Bank Saudara pada bulan Maret 2001 dan terhitung sejak 17 Februari 2017 menjabat sebagai Kepala Divisi *Human Capital* dan menjadi Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi pada bulan Mei 2017.

### **Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi**

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Hingga akhir tahun 2021 BWS tidak memiliki anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen diluar Komisaris Independen, pihak independen berasal dari Komisaris Independen.

### **Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris, yaitu 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada rapat serta risalah rapat.

### **Akhmad Syailendra**

Indonesian citizen, aged 43 years old. Graduated from Pajajaran University Bandung on Faculty of Management Economics. Joined to Bank Saudara in March 2001 and since February 17, 2017 served as Human Capital Division Head and became Secretary of the Nomination and Remuneration Committee in May 2017.

### **Independence of the Nomination and Remuneration Committee**

All members of the Nomination and Remuneration Committee who comes from independent parties do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or any relationship with Banks that can influence their ability to act independently.

Until the end of 2021, BWS does not have members of the Nomination and Remuneration Committee from independent parties. Independent party comes from the Chairman/Independent Commissioner.

### **Nomination and Remuneration Committee Meeting**

The Committee conducts meetings in accordance with the needs or at least equal to the provisions that are at least equal to the meeting of the Board of Commissioners, namely 4 (four) times a year. Committee Meetings may only be held if attended by at least 51% of all members including one Independent Commissioner and one Independent Party.

The decision of the Committee meeting is taken based on consensual deliberations. In the event of no consensus deliberations, decision-making will be made by votes. The results of the Committee meetings must be set forth in the minutes of the meeting and well documented. Dissenting opinions that occur in committee meetings, must be clearly included in the minutes of the meeting along with its reasons.

Throughout 2021 the Nomination and Remuneration Committee held 8 (eight) meetings. The following is the frequency and attendance of the Nomination and Remuneration Committee at meetings and minutes of meetings.

## Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Recapitulation of Nomination and Remuneration Committee Attendance Level at Nomination and Remuneration Committee Meeting

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Attendances	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri Number of Absences	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Ahmad Fajarprana	8	8	-	100%
Arief Budiman	8	8	-	100%
Akhmad Syailendra	8	8	-	100%
Rata-rata Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi Average Attendance of Nomination and Remuneration Committees				100%

## Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Minutes of Meeting for Nomination and Remuneration Committee

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	21 Januari 2021 January 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian Gaji Direktor Korporat</li> <li>Penyesuaian Rentang Gaji Direksi</li> <li>Penyesuaian Benefit Pengurus</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adjustment of Corporate Director Salary</li> <li>Adjustment of Directors' Salary Range</li> <li>Adjustment of Management Benefit</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Akhmad Syailendra</li> </ul>
2	24 Februari 2021 February 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberhentian dengan hormat Sdr. Choi Jung Hoon sebagai Presiden Direktur</li> <li>Penilaian Internal Calon Presiden Direktur Sdr. Hwang Gyusoon</li> <li>Pembahasan Rekomendasi Perubahan Presiden Direktur</li> <li>Penunjukan Sdr. Kang Bong Joo (Direktur Korporat) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur</li> <li>Pemberhentian dengan hormat Sdr. Park Tae Yong sebagai Komisaris</li> <li>Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Honorable dismissal of Mr. Choi Jung Hoon from his position as President Director</li> <li>Internal Assessment of President Director Candidate Mr. Hwang Gyusoon</li> <li>Discussion of Recommendations for replacement of President Director</li> <li>Appointment of Mr. Kang Bong Joo (Corporate Director) as Acting (Plt) President Director</li> <li>Honorable dismissal of Mr. Park Tae Yong from his position as Commissioner</li> <li>Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Akhmad Syailendra</li> </ul>
3	02 Maret 2021 March 2, 2021	<p>Pembayaran Insentif /Bonus tahun 2020 dan 2021 bagi Presiden Direktur yang Berakhir masa bakti tahun 2021</p> <p>Payment of Incentives/Bonuses in 2020 and 2021 for President Director whose term of office ends in 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Akhmad Syailendra</li> </ul>
4	22 Maret 2021 March 22, 2021	<p>Perubahan Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris</p> <p>Changes in Committee Members under the Board of Commissioners</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Akhmad Syailendra</li> </ul>
5	30 Maret 2021 March 30, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insentif/Bonus Berdasarkan Kinerja 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris</li> <li>Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2021</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Incentives/Bonuses Based on Performance in 2020 for the Board of Directors and Board of Commissioners</li> <li>Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners in 2021</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Akhmad Syailendra</li> </ul>
6	06 Mei 2021 May 6, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian Gaji Karyawan 2021</li> <li>Insentif Kinerja Karyawan tahun 2020</li> <li>Penyesuaian Remunerasi Karyawan tahun 2021</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adjustment of Employee Salary in 2021</li> <li>Employee Performance Incentives in 2020</li> <li>Adjustment of Employee Remuneration in 2021</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Akhmad Syailendra</li> </ul>
7	08 September 2021 September 8, 2021	<p>Pembahasan Benefit Direktur Tenaga Kerja Asing</p> <p>Discussion on the Benefits of the Director of Foreign Workers</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Akhmad Syailendra</li> </ul>
8	29 November 2021 November 29, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Organisasi 2022</li> <li>Kajian Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing 2022</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Organizational Changes in 2022</li> <li>Study on the Utilization of Foreign Workers in 2022</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Fajarprana</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Akhmad Syailendra</li> </ul>



## Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi *Competency Development for Nomination and Remuneration Committee*

Sepanjang tahun 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

*Throughout 2021 the Nomination and Remuneration Committee participated in competency improvement programs, as follows:*

<b>Nama dan Jabatan</b> <i>Name and Position</i>	<b>Jenis Pelatihan</b> <i>Types of Education and Training</i>	<b>Materi Pendidikan dan Pelatihan</b> <i>Materials of Education and Training</i>	<b>Tempat dan Tanggal</b> <i>Place and Date</i>	<b>Penyelenggara</b> <i>Organizer</i>
Arief Budiman Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Pelatihan <i>Training</i>	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based <i>Supervisory Effectiveness of Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation</i>	Webinar, 25 Maret 2021 <i>Webinar, March 25, 2021</i>	FKDKP
Arief Budiman Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Pelatihan <i>Training</i>	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) <i>Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)</i>	Webinar, 21 Juli 2021 <i>Webinar, July 21, 2021</i>	BWS & PT Efektifpro Knowledge Source
Ahmad Fajarprana – Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Pelatihan <i>Training</i>	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based <i>Supervisory Effectiveness of Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation</i>	Webinar, 25 Maret 2021 <i>Webinar, March 25, 2021</i>	FKDKP
Ahmad Fajarprana – Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Pelatihan <i>Training</i>	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) <i>Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)</i>	Webinar, 21 Juli 2021 <i>Webinar, July 21, 2021</i>	PT Efektifpro Knowledge Source
Akhmad Syailendra	E-Learning	Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Program Pendukung Kesehatan <i>Socialization of Occupational Health and Safety and Health Support Program</i>	9 Maret 2021 <i>March 9, 2021</i>	BWS
Akhmad Syailendra	Pelatihan <i>Training</i>	Great start 2021 with Drastic Action Leadership <i>Great start 2021 with Drastic Action Leadership</i>	5 Maret 2021 <i>March 5, 2021</i>	FHCPI
Akhmad Syailendra	Pelatihan <i>Training</i>	HC Summit 2021-Solving Scarcity of Leader To Face The Era of VUCA <i>HC Summit 2021-Solving Scarcity of Leader To Face The Era of VUCA</i>	8 April 2021 <i>April 8, 2021</i>	Infobank
Akhmad Syailendra	Pelatihan <i>Training</i>	Peluncuran Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 <i>Launch of the Blueprint for Human Resource Development in the Financial Services Sector 2021-2025</i>	25 Mei 2021 <i>May 25, 2021</i>	OJK
Akhmad Syailendra	Pelatihan <i>Training</i>	Tindak Pidana Perbankan <i>Banking Crime</i>	26 Juni 2021 <i>June 26, 2021</i>	MEG
Akhmad Syailendra	E-Learning	Time Management <i>Time Management</i>	31 Mei 2021 <i>May 31, 2021</i>	BWS
Akhmad Syailendra	E-Learning	Digital Banking Knowledge & Awareness <i>Digital Banking Knowledge &amp; Awareness</i>	25 Juni 2021 <i>June 25, 2021</i>	BWS
Akhmad Syailendra	E-Learning	Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Program Pendukung Kesehatan <i>Socialization of Occupational Health and Safety and Health Support Program</i>	26 Juli 2021 <i>July 26, 2021</i>	BWS
Akhmad Syailendra	Pelatihan <i>Training</i>	Pengendalian Gratifikasi-Sesi 1 <i>Gratification Control - Session 1</i>	9 September 2021 <i>September 9, 2021</i>	Mahardika Gemilang
Akhmad Syailendra	Pelatihan <i>Training</i>	Pengendalian Gratifikasi-Sesi 2 <i>Gratification Control - Session 2</i>	17 September 2021 <i>September 17, 2021</i>	Adnan Pandu Praja

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Akhmad Syailendra	Pelatihan Training	Antifraud Awareness & Sanction Antifraud Awareness & Sanction	6 Oktober 2021 October 6, 2021	Bpk. Galura & Indra
Akhmad Syailendra	Pelatihan Training	Pengembangan SDM di Era Digital HR Development in Era Digital	2 Desember 2021 December 2, 2021	OJK

## Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Selama tahun 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang dimiliki BWS, sebagai berikut:

1. Review dan evaluasi rencana kerja SDM, pemanfaatan tenaga kerja asing, struktur organisasi.
2. Review dan evaluasi pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
3. Rekomendasi penunjukan anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.
4. Review dan evaluasi kebijakan terkait SDM dan remunerasi.

### Remunerasi

Besarnya honorarium untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank, dan dibebankan kepada anggaran Bank. Dalam realisasinya, besaran remunerasi disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha serta kebijakan Bank.

## Report on the Implementation of Nomination and Remuneration Committee Duties in 2021

During 2021 the Nomination and Remuneration Committee has carried out their duties and function which stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter owned by BWS, is as follows:

1. Review and evaluation of HR work plan, utilization of foreign workers, organizational structure.
2. Review and evaluation of remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees.
3. Recommendations for the appointment of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.
4. Review and evaluation of policies related to human resources and remuneration.

### Remuneration

The amount of honorarium for members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners is determined at the Bank's policy, and is charged to the Bank's budget. In its realization, the amount of remuneration is adjusted in accordance with business development and bank policy.



## Komite Pemantau Risiko

### Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Dasar pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

#### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Agar pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Bank telah membuat Piagam Komite Pemantau Risiko yang merupakan acuan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko. Piagam ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 008/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas mengevaluasi dan memastikan padanan antara kebijakan manajemen risiko di lingkup Bank dan pelaksanaannya, serta memantau, mengevaluasi penerapan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko yaitu:

- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.
- Mendiskusikan dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, menguji pelaksanaan kebijakan

*The Risk Monitoring Committee was established by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities in supervising and advising the Board of Directors to obtain adequate confidence in the implementation of risk management. The Bank continues to meet the adequacy elements of risk management procedures and methodologies, so that the Bank's business activities can remain under control at acceptable limits and benefit the Bank.*

*Basis for establishment of the Risk Monitoring Committee is OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 and OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*

#### Guidelines and Code of Conduct for Risk Monitoring Committees

*To optimize the duties of Risk Monitoring Committee and in accordance with the principles of GCG, Bank has established Charter of the Risk Monitoring Committee which is a reference to implementing its duties. This Charter is ratified by the Board of Commissioners and evaluated periodically, if deemed necessary, amendments will be made to ensure the Bank's compliance with the provisions of the OJK and other relevant regulations. The Charter of Risk Monitoring Committee shall be stipulated by the Decision of the Board of Commissioners No. 008/KEP-DEKOM/A-13/II/20 dated February 18, 2020 concerning Guidelines and Charter of the Risk Monitoring Committee.*

#### Duties and Responsibilities of the Monitoring Committee

*The Risk Monitoring Committee is tasked with evaluating and ensuring the equivalent of risk management policies within the Bank and its implementation, as well as monitoring, evaluating the implementation of the duties and functions of the Risk Management Committee and the Risk Management Task Force.*

*The following are the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee as described in Guidelines and manual of Risk Monitoring Committee, namely:*

- *Provide input to the Board of Commissioners in drafting and improving risk management policies.*
- *Discuss with the Board of Directors or Divisions related to risk management, test the implementation of risk*

manajemen risiko dan memahasnya dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

- Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko korporasi dan menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Direksi.

### **Wewenang Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

### **Kedudukan Komite Pemantau Risiko**

Kedudukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Komite Pemantau Risiko wajib melaporkan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.

### **Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko**

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
  - » Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
  - » Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.

*management policies and discuss it in the Board of Commissioners meeting or a joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.*

- *Review and discuss internal policies and regulations on risk management policies.*
- *Evaluate the quarterly report of the corporate risk profile and submit input to the Board of Commissioners on matters that need to be discussed further with the Board of Directors.*

### **Authorities of the Risk Monitoring Committee**

*The Risk Monitoring Committee is authorized to gain full, free and unrestricted access to information regarding the Bank's employees, funds, assets and other resources relating to the performance of its duties.*

### **Position of Risk Monitoring Committee**

*Position of the Risk Monitoring Committee based on the Guidelines and Charter of the Risk Monitoring Committee is as follows:*

1. *The Risk Monitoring Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
2. *The Risk Monitoring Committee works collectively and is chaired by the Independent Commissioner.*
3. *The Risk Monitoring Committee shall report the results of its evaluation to the Board of Commissioners.*

### **Structure, Membership and Expertise of the Risk Monitoring Committee**

*The structure and membership of the Risk Monitoring Committee are as follows:*

- *Risk Monitoring Committee consists of at least 3 (three) persons from Independent Commissioners and Independent Parties.*
- *The composition of the membership of the Risk Monitoring Committee is at least 1 (one) Independent Commissioner as chairman concurrently as a member, 1 (one) Independent Party who has expertise in finance, and 1 (one) Independent Party who has expertise in the field of risk management.*
- *Members of the Risk Monitoring Committee from independent parties are considered to have expertise in finance to meet the criteria:*
  - » *Have knowledge in economics, finance and/or banking.*
  - » *Have at least 5 (five) years of work experience in economics, finance, and/or banking.*

- Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
    - » Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko
    - » Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko
  - Anggota Direksi BWS maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
  - Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
  - Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
- *Members of the Risk Monitoring Committee from Independent Parties are considered to have expertise in the field of risk management to meet the criteria:
 
    - » *Have knowledge in the field of risk management*
    - » *Have at least 2 (two) years of work experience in the field of risk management.**
  - *Members of the Board of Directors of BWS and other banks are prohibited from becoming members of the Risk Monitoring Committee.*
  - *Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the Risk Monitoring Committee amount to at least 51% (fifty-one percent) of the number of members of the Risk Monitoring Committee.*
  - *The Chairman of the Risk Monitoring Committee can only concurrently serve as chairman of the Committee at most 1 (one) other Committee.*

### Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2021

Composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Masa Akhir Jabatan Tenure
Adi Haryadi	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP. DEKOM/III/2021 Board of Directors Decree No. 007/KEP.DEKOM/ III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022
Arief Budiman	Anggota/Presiden Komisaris(*) Member/President Commissioner	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP. DEKOM/III/2021 Board of Directors Decree No. 007/KEP.DEKOM/ III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022
Agus Setiadjaja	Anggota/Pihak Independen(*) Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP. DEKOM/III/2021 Board of Directors Decree No. 007/KEP.DEKOM/ III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022
Nanny Dewi	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP. DEKOM/III/2021 Board of Directors Decree No. 007/KEP.DEKOM/ III/2021	Sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada Tahun 2022 Until the annual GMS in 2022

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko Sdr. Adi Haryadi dan profil anggota Komite Pemantau Risiko Sdr. Arief Budiman dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Profil anggota Komite Pemantau Risiko non Komisaris per 31 Desember 2021 dapat dilihat di bawah ini.

*Profile of the Chairman of Risk Monitoring Committee Adi Haryadi can be seen in the Profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report. The profile of non-commissioner/independent risk monitoring committee members can be seen in the explanation below.*

#### Agus Setiadjaja

Lahir di Bandung tahun 1956, berusia 65 Tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai staff Ahli atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalem Kaum PT Bank HS

#### Agus Setiadjaja

*Born in Bandung in 1956, aged 65 years old, completed his education at the Faculty of Economics and Master of Science in Accounting Studies at the Faculty of Post-Graduate University of Padjajaran, Bandung Indonesia, started his banking career at BWS as an Expert staff or Bureau of Directors in 1989, as Dalem Kaum Sub-Branch Head of PT Bank HS 1906 since September*



1906 sejak 12 September 1994, sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank HS 1906 sejak 3 Mei 1999, sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906 sejak 10 Juli 2000 dan menjadi Komisaris BWS sejak 26 Mei 2011.

### Nanny Dewi

Berusia 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran sejak tahun 1989 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan Master di University of Wollongong, Australia pada tahun 1992 dan pendidikan Doktoral di Universitas Padjajaran pada tahun 2006. Berpengalaman sebagai anggota Komite Audit pada PT Rabobank Indonesia dan PT Energi Mega Persada, Tbk. Bergabung sebagai Anggota Komite Audit BWS pada bulan Maret 2015.

### Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris, yaitu 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2021 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Pemantau Risiko pada rapat serta risalah rapat.

12, 1994, as Corporate Secretary of PT Bank HS 1906 since May 3, 1999, as Internal Audit Unit Division Head of PT Bank HS 1906 since July 10, 2000 and became Commissioner of BWS since May 26, 2011.

### Nanny Dewi

58 years old, Indonesian citizen, has profession as a Lecturer at Faculty of Economics and Business at Padjadjaran University since 1989 until now. Completed his Master's degree at the University of Wollongong, Australia in 1992 and a Doctoral degree at Padjajaran University in 2006. Experienced as a member of Audit Committee at PT Rabobank Indonesia and PT Energi Mega Persada, Tbk. Joined as a Member of BWS Audit Committee in March 2015.

### Independence of the Risk Monitoring Committee

All members of the Risk Monitoring Committee from independent parties do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank that may affect its ability to act independently.

### Risk Monitoring Committee Meeting

The Committee conducts meetings in accordance with the needs or at least equal to the provisions that are at least equal to the meeting of the Board of Commissioners, namely 4 (four) times a year. Committee Meetings may only be held if attended by at least 51% of all members including one Independent Commissioner and one Independent Party.

The decision of the Committee meeting is taken based on consensual deliberations. In the event of no consensus deliberations, decision-making will be made by votes. The results of the Committee meetings must be set forth in the minutes of the meeting and well documented. Dissenting opinions that occur in committee meetings, must be clearly included in the minutes of the meeting along with its reasons.

Throughout 2021 the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings. The following is the frequency and attendance of the Risk Monitoring Committee at meetings and minutes of meetings.

## Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat Komite Pemantau Risiko

Recapitulation of Risk Monitoring Committee Attendance Level at Risk Monitoring Committee Meeting

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Attendances	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri Number of Absences	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Adi Haryadi Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	12	12	-	100%
Arief Budiman Anggota/Presiden Komisaris(*) Member/President Commissioner	12	12	-	100%
Waldy Gutama*) Anggota/Pihak Independen(*) Member/Independent Party	3	3	-	100%
Nanny Dewi*) Anggota/Pihak Independen(*) Member/Independent Party	9	9	-	100%
Agus Setiadjaja Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	12	12	-	100%
Rata-rata Kehadiran Komite Pemantau Risiko Average of the Risk Monitoring Committee Attendances				100%

\*) Waldy Gutama berganti posisi dengan Nanny Dewi sejak tanggal 31 Maret 2021.

\*) Waldy Gutama has changed positions with Nanny Dewi since March 31, 2021.

## Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko

Minutes of Meeting for Risk Monitoring Committee

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	21 Januari 2021 January 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Profil Risiko</li> <li>Indikator Pemantau Risiko</li> <li>COVID-19 BCM Response Report</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adi Haryadi</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Agus Setiadjaja</li> <li>Waldy Gutama</li> </ul>
2	16 Februari 2021 February 16, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Quarterly Agenda – IT Division</li> <li>Laporan Profil Risiko</li> <li>Key Issues Risk – Januari 2021</li> <li>Indikator Pemantau Risiko</li> <li>Portofolio Kredit</li> <li>Posisi Risiko Likuiditas, Pasar, Kepatuhan dan Stratejik</li> <li>BCM Dashboard</li> <li>Dampak Penetapan BWS menjadi BUKU 3</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adi Haryadi</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Agus Setiadjaja</li> <li>Waldy Gutama</li> </ul>

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
3	23 Maret 2021 March 23, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Profil Risiko</li> <li>2. Indikator Pemantau Risiko dan Portofolio Kredit</li> <li>3. COVID-19 BCM Response Report</li> <li>4. Portofolio Kredit</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risk Profile Report</li> <li>2. Risk Monitoring Indicators and Loan Portfolio</li> <li>3. COVID-19 BCM Response Report</li> <li>4. Loan Portfolio</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adi Haryadi</li> <li>• Arief Budiman</li> <li>• Agus Setiadjaja</li> <li>• Waldy Gutama</li> </ul>
4	24 April 2021 April 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Profil Risiko</li> <li>2. Key Issues Risk – Januari 2021</li> <li>3. Indikator Pemantau Risiko</li> <li>4. Portofolio Kredit</li> <li>5. Posisi Risiko Likuiditas, Pasar, Kepatuhan dan Strategik</li> <li>6. BCM Dashboard</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risk Profile Report</li> <li>2. Key Issues Risk – January 2021</li> <li>3. Risk Monitoring Indicator</li> <li>4. Loan Portfolio</li> <li>5. Liquidity, Market, Compliance and Strategic Risk Position</li> <li>6. BCM Dashboard</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adi Haryadi</li> <li>• Arief Budiman</li> <li>• Agus Setiadjaja</li> <li>• Nanny Dewi</li> </ul>
5	20 Mei 2021 May 20, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenda Triwulan – Update Condition IT BWS</li> <li>2. Laporan Profil Risiko April 2021</li> <li>3. Key Issues Risk – April 2021</li> <li>4. Indikator Pemantau Risiko</li> <li>5. Portofolio Kredit</li> <li>6. Posisi Risiko Likuiditas dan Pasar</li> <li>7. Posisi Risiko Strategik</li> <li>8. BCM Dashboard</li> <li>9. Agenda Tambahan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quarterly Agenda – Update Condition IT BWS</li> <li>2. Risk Profile Report April 2021</li> <li>3. Key Issues Risk – April 2021</li> <li>4. Risk Monitoring Indicator</li> <li>5. Loan Portfolio</li> <li>6. Liquidity and Market Risk Position</li> <li>7. Strategic Risk Position</li> <li>8. BCM Dashboard</li> <li>9. Additional Agenda</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adi Haryadi</li> <li>• Arief Budiman</li> <li>• Agus Setiadjaja</li> <li>• Nanny Dewi</li> </ul>
6	22 Juni 2021 June 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Profil Risiko</li> <li>2. Key Issues Risk – May 2021</li> <li>3. Indikator Pemantau Risiko</li> <li>4. Portofolio Kredit</li> <li>5. Posisi Risiko Likuiditas, Pasar, Kepatuhan dan Strategik</li> <li>6. BCM Dashboard</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risk Profile Report</li> <li>2. Key Issues Risk – May 2021</li> <li>3. Risk Monitoring Indicator</li> <li>4. Loan Portfolio</li> <li>5. Liquidity, Market, Compliance and Strategic Risk Position</li> <li>6. BCM Dashboard</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adi Haryadi</li> <li>• Arief Budiman</li> <li>• Agus Setiadjaja</li> <li>• Nanny Dewi</li> </ul>

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
7	27 Juli 2021 July 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Profil Risiko Juni 2021</li> <li>Key Issues Risk - Juni 2021</li> <li>Indikator Pemantau Risiko</li> <li>Portofolio Kredit</li> <li>Tagihan Klaim Asuransi</li> <li>Capital Adequacy Ratio (KPMM)</li> <li>Posisi Risiko Likuiditas dan Pasar</li> <li>Posisi Risiko Strategik</li> <li>BCM Dashboard</li> <li>Loan Review Monitoring</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adi Haryadi</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Agus Setiadjaja</li> <li>Nanny Dewi</li> </ul>
8	24 Agustus 2021 August 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Agenda Triwulan – Update Condition IT BWS</li> <li>Laporan tingkat Kesehatan Bank Juni 2021</li> <li>Laporan Profil risiko Juli 2021</li> <li>Key Issues Risk – Juli 2021</li> <li>Indikator Pemantau Risiko</li> <li>ATMR-Capital Adequacy Ratio (KPMM)</li> <li>Posisi Portofolio Kredit, Risiko Likuiditas dan Pasar, Risiko Strategik</li> <li>BCM Dashboard</li> <li>Kebijakan Risk Appetite dan Risk Tolerance</li> <li>Loan Review Monitoring</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adi Haryadi</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Agus Setiadjaja</li> <li>Nanny Dewi</li> </ul>
9	23 September 2021 September 23, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Compliance Update Section</li> <li>Laporan Profil Risiko Juni 2021- After OJK Review [prudential meeting OJK]</li> <li>Laporan Profil Risiko Agustus 2021</li> <li>Indikator Pemantau Risiko</li> <li>Capital Adequacy Ratio (KPMM)</li> <li>Portofolio Kredit, Posisi Risiko Likuiditas dan Pasar, Posisi Risiko Strategik</li> <li>BCM Dashboard</li> <li>Loan Review Monitoring"</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adi Haryadi</li> <li>Arief Budiman</li> <li>Agus Setiadjaja</li> <li>Nanny Dewi</li> </ul>

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
10	19 Oktober 2021 October 19, 2021	1. Prudential Meeting OJK - Laporan Profil Risiko Bank vs OJK Juni 2021	
		2. Laporan Profil risiko - September (Q3) 2021	
		3. Key Issues Risk – September (Q3) 2021	
		4. Indikator Pemantau Risiko	
		5. ATMR-Capital Adequacy Ratio (KPMM)	
		6. Posisi Portofolio Kredit, Risiko Likuiditas dan Pasar,Risiko Strategik	
		7. BCM Dashboard	
		8. Kajian Industry Risk Rating	• Adi Haryadi
		9. Loan Review Monitoring	• Arief Budiman
11	25 November 2021 November 25, 2021	1. OJK Prudential Meeting - Bank Risk Profile Report vs OJK June 2021	• Agus Setiadjaja
		2. Risk Profile Report - September (Q3) 2021	• Nanny Dewi
		3. Key Issues Risk – September (Q3) 2021	
		4. Risk Monitoring Indicator	
		5. RWA-Capital Adequacy Ratio (CAR)	
		6. Loan Portfolio Position, Liquidity and Market Risk, Strategic Risk	
		7. BCM Dashboard	
		8. Industry Risk Rating Study	
		9. Loan Review Monitoring	
12	27 Desember 2021 December 27, 2021	1. Loan Review Monitoring	
		2. Laporan Profil risiko - October 2021	
		3. Key Issues Risk – October 2021	
		4. Indikator Pemantau Risiko	
		5. ATMR-Capital Adequacy Ratio (KPMM)	
		6. Posisi Portofolio Kredit, Risiko Likuiditas dan Pasar,Risiko Strategik	• Adi Haryadi
		7. BCM Dashboard	• Arief Budiman
		8. Loan Review Monitoring	• Agus Setiadjaja
		9. Loan Review Monitoring	• Nanny Dewi
12	27 Desember 2021 December 27, 2021	1. Tindak Lanjut Temuan OJK 2021 - Terkait Pengawasan Komisaris	
		2. Laporan Profil risiko - October 2021	
		3. Key Issues Risk – October 2021	
		4. Indikator Pemantau Risiko	
		5. ATMR-Capital Adequacy Ratio (KPMM)	
		6. Posisi Portofolio Kredit, Risiko Likuiditas dan Pasar,Risiko Strategik	
		7. BCM Dashboard	• Adi Haryadi
		8. Loan Review Monitoring	• Arief Budiman
		9. Loan Review Monitoring	• Agus Setiadjaja
12	27 Desember 2021 December 27, 2021	1. Follow-up on OJK 2021 Findings - Related to Commissioner Supervision	• Nanny Dewi
		2. Risk Profile Report - October 2021	
		3. Key Issues Risk – October 2021	
		4. Risk Monitoring Indicator	
		5. RWA-Capital Adequacy Ratio (CAR)	
		6. Loan Portfolio Position, Liquidity and Market Risk, Strategic Risk	
		7. BCM Dashboard	
		8. Loan Review Monitoring	
		9. Loan Review Monitoring	



## Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2021 Komite Pemantau Risiko mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

## Competency Development for Risk Monitoring Committee

Throughout 2021 the Risk Monitoring Committee participated in competency improvement programs, as follows:

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Adi Haryadi Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based Supervisory Effectiveness of Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation	Webinar, 25 Maret 2021 Webinar, March 25, 2021	FKDKP
Adi Haryadi Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)	Webinar, 21 Juli 2021 Webinar, July 21, 2021	PT Efektifpro Knowledge Source
Arief Budiman Presiden Komisaris President Commissioner	Pelatihan Training	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based Supervisory Effectiveness of Board of Commissioners in Maintaining Bank Compliance Towards the Era of Principle Based Regulation	Webinar, 25 Maret 2021 Webinar, March 25, 2021	FKDKP
Arief Budiman Presiden Komisaris President Commissioner	Pelatihan Training	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)	Webinar, 21 Juli 2021 Webinar, July 21, 2021	PT Efektifpro Knowledge Source

## Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Selama tahun 2021 Komite Pemantau Risiko telah melakukan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yang dimiliki BWS, sebagai berikut:

1. Review dan evaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko, meliputi Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan *Stress Test*.
2. Review usulan re-organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko di BWS.
3. Review dan evaluasi hasil pemeriksaan OJK tahun 2021.
4. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur terkait Produk Bank Baru serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
5. Review usulan hapus buku kredit.

## Remunerasi

Besarnya honorarium untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank, dan dibebankan kepada anggaran Bank. Dalam realisasinya, besaran remunerasi disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha serta kebijakan Bank.

## Report on the Implementation of Risk Monitoring Committee Duties in 2021

During 2021 the Risk Monitoring Committee has carried out their duties and function which stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter owned by BWS, is as follows:

1. Review and evaluation of reports related to risk management, including Risk Profile Report, Report on Bank Soundness Level, Stress Test Report.
2. Review of proposed re-organization of Risk Management Task Force at Bank Woori Saudara.
3. Review and evaluation of OJK inspection results in 2020.
4. Evaluation of Risk Management Policy, Procedures related to New Products and/or Activities as well as the implementation of the Risk Management Committee's duties.
5. Review the proposed for loan write-off.

## Remuneration

The amount of honorarium for members of the Risk Monitoring Committee who are not members of the Board of Commissioners is determined at the Bank's policy, and is charged to the Bank's budget. In its realization, the amount of remuneration is adjusted in accordance with business development and bank policy.



## Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of The Board of Directors



### Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees Under The Board of Directors



#### Komite Kode Etik

Code of Conducts Committee

Komite Kode Etik merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam hal pemberian sanksi dan/atau ganti rugi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran ketentuan. Penunjukan anggota Komite Kode Etik ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 045/KEP-DIR/A-04/VI/20 tentang Komite Kode Etik tertanggal 18 Juni 2020.

The Code of Conducts Committee is a committee which is tasked to assist the Board of Directors in providing the sanctions and/or compensation to employees who commit violation of the provisions. Appointment of the Code of Conducts Committee members determined by the Board of Directors Decree No. 045/KEP-DIR/A-04/VI/20 on the Code of Conducts Committee dated June 18, 2020.

#### Struktur dan Keanggotaan Komite Kode Etik

#### The Code of Conduct Committee Structure and Membership

Ketua Chairman	:	Direktur yang membawahi Human Capital Director in charge of Human Capital
Anggota Tetap Permanent Member	:	1. Direktur yang membawahi Risiko & Kepatuhan 2. Direktur yang membawahi Corporate Legal 3. Kepala Divisi Internal Audit 1. Director in charge of Risk & Compliance 2. Director in charge of Corporate Legal 3. Internal Audit Division Head
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Member	:	Direktur Terkait The relevant Director
Sekretaris Secretary	:	Kepala Divisi Human Capital Human Capital Division Head

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kode Etik

#### The Code of Conducts Committee Duties and Responsibilities

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Kode Etik memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

In carrying out its functions, the Code of Conducts Committee has the following duties and responsibilities:

1. Melakukan *review* dan mengajukan usulan perubahan atas Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Sanksi dan Pengenaan Ganti Rugi.
2. Melakukan *monitoring* terkait penerapan Sanksi dan Ganti Rugi.
3. Menetapkan pemberatan Sanksi atau peringanan Sanksi.
4. Menetapkan pengenaan Ganti Rugi dan besarnya.
5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengenaan Sanksi Kekaryawan, meliputi:
  - a. Penundaan promosi dalam kurun waktu 1 tahun periode penilaian
  - b. Penurunan jabatan dan/atau grade
  - c. Penurunan gaji pokok maksimal tidak melebihi 50%
  - d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

1. Review and propose changes to the Policies and Guidelines for the Implementation of Sanctions and Imposition of Indemnity.
2. Monitoring related to the implementation of Sanctions and Indemnity.
3. Determine the weight of Sanctions or concession.
4. Determine the amount of Indemnity.
5. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the imposition of Employment Sanctions, including:
  - a. Postponement of promotion within 1 year of the assessment period
  - b. Demotion and/or grade
  - c. The maximum reduction in basic salary does not exceed 50%
  - d. Termination of Employment (PHK)

## Pelaksanaan Tugas Komite Kode Etik Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 Komite Kode Etik telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Internal
2. Permohonan banding atas penetapan sanksi Karyawan.
3. Permohonan keringanan serta peninjauan kembali atas putusan Komite Kode Etik.
4. Permohonan penundaan penyelesaian kewajiban pinjaman Karyawan (Karyawan yang dikenakan sanksi PHK).

## Implementation of Code of Conducts Committee Duties in 2021

During 2021 the Code of Conducts Committee has implemented 7 (seven) meetings with the following discussion agenda:

1. Discussion of Internal Audit Division Report
2. Application for an appeal against the determination of employee sanctions
3. Application for waivers and reconsideration of the Code of Ethics Committee's decision.
4. Application for postponement regarding settlement of Employee loans (Employees who gets sanctions layoffs).



## Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memberikan informasi tentang risiko yang dihadapi BWS melalui laporan profil risiko agar Direksi dapat menentukan mitigasi risiko yang dapat diterapkan. Penunjukan anggota Komite Manajemen Risiko ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 080/KEP-DIR/A-05/IX/2020 tertanggal 25 September 2020.

The Risk Management Committee is tasked to assist the Board of Directors in providing information regarding the risks faced by BWS through the risk profile report so that the Board of Directors can determine the risk mitigation to be applied. The appointment of members of the Risk Management Committee shall be determined by the Decision of the Board of Directors No. 080/KEP-DIR/A-05/IX/2020 dated September 25, 2020.

## Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

## Structure and Membership of the Risk Management Committee

Ketua Chairman	:	Direktur Manajemen Risiko/Kepatuhan Risk Management/Compliance Director
Anggota Tetap Permanent Member	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi Manajemen Risiko</li> <li>• Kepala Divisi Kepatuhan</li> <li>• Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern</li> <li>• Risk Management Division Head</li> <li>• Compliance Division Head</li> <li>• Internal Audit Unit Division Head</li> </ul>
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Member	:	Pejabat Eksekutif Executive Officers

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

## Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan manajemen risiko serta setiap perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka kerja manajemen risiko serta kemungkinan rencana untuk mengantisipasi terjadinya kondisi abnormal.

In carrying out its functions, the Risk Management Committee has duties and responsibilities, among others, as follows:

1. Establish risk management policies and any changes, including Risk Management strategies, risk levels taken and risk tolerance, risk management frameworks and plans to anticipate abnormal conditions.

2. Perbaiki proses manajemen risiko secara teratur serta insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan modal Bank, profil risiko Bank, dan penerapan Manajemen Risiko secara efektif berdasarkan hasil evaluasi.

2. Regular and incidental improvement of risk management processes as a result of changes in external and internal conditions affecting the Bank's capital adequacy, bank risk profile, and effective implementation of Risk Management based on evaluation results.

### Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2021

### Implementation of Risk Management Committee Duties in 2021

Sepanjang tahun 2021 Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Throughout 2021 the Risk Management Committee has held 6 (six) meetings with the following discussion agenda :

1. Laporan Profil Risiko.
2. Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Usulan produk dan/atau aktivitas baru.
4. Pembahasan Evaluasi Monitoring Indicator yang perlu dipantau secara berkala yaitu BMPK, LCR, NSFR, Ratio Training dan Ratio Turnover Karyawan.
5. Pembahasan PSAK 71.
6. Pelaksanaan Stress Test.

1. Risk Profile Report.
2. Risk Management Policy.
3. Proposed new products and/or activities.
4. Discussion on Evaluation of Monitoring Indicators that need to be monitored periodically, namely LLL, LCR, NSFR, Training Ratio and Turn Over Ratio of Employees.
5. Discussion of IFRS 9.
6. Implementation of stress test.



## Komite Asset Liability Management (ALMA)

Asset Liability Management Committee (ALMA)

Komite Asset Liability Management (ALMA) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank. Penunjukan anggota Komite ALMA ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 020/KEP-DIR/A-03/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020.

The Asset Liability Management Committee (ALMA) is tasked to assist the Board of Directors in carrying out the functions of determining the Bank's asset and liability management strategy, setting interest rates and liquidity, as well as other matters related to the management of the Bank's assets and liabilities. The appointment of ALMA Committee members shall be determined by The Board of Directors Decree No. 020/KEP-DIR/A-03/III/20 dated March 20, 2020.

### Struktur dan Keanggotaan Komite ALMA

### Structure and Membership of the ALMA Committee

Ketua Chairman	:	Direktur yang membawahi Treasuri Director in charge of Treasury
Wakil Ketua Deputy Chairman	:	Direktur yang membawahi Kredit dan Pendanaan Director in charge of Loan and Funding
Anggota Tetap Permanent Member	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anggota Direksi, kecuali Presiden Direktur</li> <li>2. Kepala Divisi yang membawahi Perencanaan Strategi &amp; Keuangan</li> <li>3. Kepala Divisi yang membawahi Treasuri</li> <li>4. Kepala Divisi yang membawahi Funding</li> <li>5. Kepala Divisi yang membawahi Kredit</li> <li>6. Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit</li> <li>7. Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. All members of the Board of Directors, except the President Director</li> <li>2. Division Head in charge of Strategic &amp; Financial Planning</li> <li>3. Division Head in charge of Treasury</li> <li>4. Division Head in charge of Funding</li> <li>5. Division Head in charge of Loan</li> <li>6. Division Head in charge of Loan Management</li> <li>7. Division Head in charge of Risk Management</li> </ol>
Sekretaris Secretary	:	Divisi yang membawahi Manajemen Risiko Division in charge of Risk Management

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALMA

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALMA memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi ALMA.
2. Pelaksanaan evaluasi (identifikasi & pengukuran), pemantauan dan pengendalian pada risiko suku bunga Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga.
3. Pelaksanaan kaji ulang (identifikasi & pengukuran), pemantauan dan pengendalian pada penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank.
4. Pelaksanaan kaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
5. Melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dari butir 2 dan 3 tersebut di atas.
6. Penyampaian informasi kepada Direksi (sistem informasi *management*) mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
7. Melakukan *stress testing* dengan menggunakan skenario yang bersifat historis, skenario yang bersifat spesifik dan skenario pada pasar (*general market stress scenario*).

## Pelaksanaan Tugas Komite ALMA Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 Komite ALMA telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Kondisi makro ekonomi di Indonesia dan luar negeri.
2. Laporan struktur dana pihak ketiga.
3. Pembahasan biaya dana (*cost of fund*).
4. Laporan pemenuhan rasio likuiditas.
5. Penetapan suku bunga dasar kredit.
6. Penetapan suku bunga produk dana (*counter rate*).
7. Penentuan besaran suku bunga rekening antar kantor (RAK).

## Duties and Responsibilities of the ALMA Committee

In carrying out its functions, ALMA committee has duties and responsibilities, among others as follows:

1. Development, review and modification of ALMA's strategy.
2. Implementation of evaluation (identification & measurement), monitoring and control on bank interest rate risk and ALMA strategy to ensure that the Bank's risk taking position results have been consistent with the objectives of interest rate risk management.
3. Implementation of review (identification & measurement), monitoring and control on pricing of assets and pasiva to ensure that the pricing can optimize the results of investment, minimize the cost of funds and maintain the balance sheet structure of the Bank.
4. Implementation of a review of the deviation between the actual results and the projected budget and business plan of the Bank.
5. Make the necessary policy and strategy adjustments based on the evaluation results of items 2 and 3 above.
6. Submission of information to the Board of Directors (information management system) regarding any development of relevant provisions and regulations that affect ALMA's strategy and policies.
7. Conduct stress testing using historical scenarios, specific scenarios and general market stress scenarios.

## Implementation of ALMA Committee Duties in 2021

Throughout 2021 the ALMA Committee held 12 (twelve) meetings with the following discussion agenda:

1. Macroeconomic conditions in Indonesia and abroad.
2. Report on the structure of third party funds.
3. Discussion of cost of funds.
4. Liquidity ratio fulfillment report.
5. Determination of the basic interest rate of the loan.
6. Determination of the interest rate of the fund product (*counter rate*).
7. Determination of the interest rate of inter-office accounts (RAK).





## Komite Informasi Teknologi IT Steering Committee

Komite Informasi Teknologi merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan operasional BWS pada bidang Teknologi Informasi. Penunjukan anggota Komite Informasi Teknologi ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 025/KEP-DIR/A-10/IV/2020 tertanggal 20 April 2020.

*The IT Steering Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in the decision-making process related to BWS operational management policy in the field of Information Technology. The appointment of members of the IT Steering Committee shall be determined by The Board of Directors Decree No. 025/KEP-DIR/A-10/IV/2020 dated April 20, 2020.*

### Struktur Kedudukan dan Keanggotaan Komite Informasi Teknologi

### Structure, Position and Membership of IT Steering Committee

Ketua Chairman	: Direktur yang membawahi Satuan Kerja Teknologi Informasi <i>Director in charge of Information Technology Division</i>
Anggota Member	: 1. Direktur yang membawahi Risiko & Kepatuhan 2. Direktur yang membawahi Bisnis dan/atau Pendukung Operasional 3. Kepala Divisi yang membawahi Satuan Kerja Teknologi Informasi 4. Kepala Divisi yang membawahi Perencanaan Strategi & Keuangan <i>1. Director in charge of Risk Functions 2. Director in charge of Business and/or Operational Support 3. Head of Division in charge of Information Technology Division 4. Head of Division in charge of Strategic &amp; Financial Planning</i>

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Informasi Teknologi

### Duties and Responsibilities of the IT Steering Committee

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Informasi Teknologi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

*In carrying out its functions, the IT Steering Committee has duties and responsibilities, among others:*

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite Informasi Teknologi harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain, yaitu:
    - Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai
    - Sumber daya yang dibutuhkan
    - Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan
    - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI
  - b. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama, misalnya kebijakan TI yang utama yaitu kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank

1. *Provide recommendations to the Board of Directors on the following matters:*
  - a. *IT Strategic Plan in line with the Strategic Plan of the Bank's business activities. In providing recommendations, the IT steering committee should pay attention to the factors of efficiency, effectiveness, and other matters, namely:*
    - *Roadmap to achieve IT needs that support the Bank's business strategy. The roadmap consists of the current state, the future state, and the steps that will be taken to achieve the conditions to be achieved*
    - *Required resources*
    - *Benefits that will be obtained when the IT Strategic Plan is implemented*
    - *Obstacles that may arise in the implementation of the IT Strategic Plan*
  - b. *Formulation of key IT policies, standards, and procedures, such as key IT policies, namely IT security and management policies risks associated with the use of IT in the Bank*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Informasi Teknologi juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian <i>core banking application</i>, <i>server production</i>, dan topologi jaringan</li> <li>d. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (<i>project charter</i>). Komite Informasi Teknologi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien</li> <li>e. Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank</li> <li>f. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank</li> <li>g. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur TI dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI</li> <li>h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu</li> <li>i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Informasi Teknologi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan</li> </ul> <p>2. Bertindak sebagai fasilitator antara Pengguna Utama TI dengan Divisi yang membawahi Satuan Kerja Teknologi Informasi dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait bidang TI</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. <i>Conformity between approved IT projects and IT Strategic Plans. The IT steering committee also sets out the priority status of IT projects that are critical impact on the Bank's operational activities, such as the change of core banking application, server production, and network topology</i></li> <li>d. <i>Conformity between the implementation of IT projects and the agreed project plan (project charter). The IT steering committee should supplement the recommendations with the analysis results of key IT projects so as to enable the Board of Directors to make decisions efficiently</i></li> <li>e. <i>Conformity between IT and the needs of management information systems as well as the needs of the Bank's business activities;</i></li> <li>f. <i>The effectiveness of measures to minimize risks to the Bank's investment in the IT sector so that the Bank's investment in the IT sector contributes to the achievement of the Bank's business objectives;</i></li> <li>g. <i>Monitoring of IT performance and efforts to improve IT performance, such as detection of IT infrastructure wear and measurement of the effectiveness and efficiency of its security policy implementation;</i></li> <li>h. <i>Efforts to resolve IT-related issues that cannot be resolved by the user work unit and organizer IT task force effectively, efficiently, and in a timely manner</i></li> <li>i. <i>Adequacy and allocation of resources owned by the Bank. In the event that the resources are inadequate and the Bank will use the services of other parties in the implementation of IT, the IT steering committee must ensure that the Bank has the necessary policies and procedures</i></li> </ul> <p>2. <i>Act as a facilitator between the Main Users of IT and the Division that oversees the Information Technology Task Force in order to solve problems related to IT</i></p> |
|---|--|

### Pelaksanaan Tugas Komite Informasi Teknologi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 Komite Informasi Teknologi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Teknologi Informasi
2. Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi
3. Pemenuhan Temuan Audit Teknologi Informasi
4. *Disaster Recovery Center (DRC) Improvement*
5. Jaringan dan Keamanan Teknologi Informasi
6. Proyek Teknologi Informasi Tahun 2021

### Implementation of IT Steering Committee Duties in 2021

Throughout 2021 the Information Technology Steering Committee has held 4 (four) meetings with the following discussion agenda:

1. *Realization of Information Technology budget*
2. *Information Technology Policies and Procedures*
3. *Fulfillment of Information Technology Audit Findings*
4. *Disaster Recovery Center (DRC) Improvement*
5. *Network and security of Information Technology*
6. *Information Technology Project 2021*

7. IT Strategic Plan 2017-2021 (Review & Evaluasi)
8. Rencana Strategis untuk Single Middleware
9. Pencapaian Teknologi Informasi 2021 dalam mendukung Unit Bisnis
10. Strategi Utama Kinerja Teknologi Informasi di tahun 2022
11. Skenario Akhir Tahun
12. Pelaksanaan Pengujian Disaster Recovery Plan (DRP) dan End of Day (EoD)
13. Pelaporan ke Regulator
14. Isu terkait Teknologi Informasi

7. IT Strategic Plan 2017 - 2021 (Review & Evaluation)
8. Strategic Plan for Single Middleware
9. Achievement of Information Technology 2021 in supporting Business Units
10. Key Strategies for Information Technology Performance in 2022
11. Year-End Scenario
12. Implementation of Disaster Recovery Plan (DRP) and End of Day (EOD) Testing
13. Reporting to Regulators
14. Issues related to Information Technology



## Komite Kebijakan Kredit

Loan Policy Committee

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran atau langkah perbaikan. Penunjukan anggota Komite Kebijakan Perkreditan ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 041/ KEP-DIR/A-07/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020.

Loan Policy Committee is a committee that assists directors in formulating policies, supervising policy implementation, monitoring the development and condition of loan portfolios and providing advice or improvement measures. Appointment of loan policy committee members is determined through the Board of Directors Decree No. 041/KEP-DIR/A-07/VI/20 dated June 17, 2020.

### Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Kredit

### Structure and Membership of the Loan Policy Committee

Ketua Chairman	: Direktur yang membawahi Manajemen Kredit Director in charge of Loan Management Functions
Anggota Tetap Permanent Member	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur yang membawahi Kredit</li> <li>2. Direktur yang membawahi Risiko &amp; Kepatuhan</li> <li>3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Kredit</li> <li>4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Kredit</li> <li>5. Kepala Divisi yang membawahi Operasional Perkreditan</li> <li>6. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko</li> <li>7. Kepala Satuan Kerja Audit Internal</li> </ol>
Sekretaris Secretary	: Kepala Divisi Loan Review Loan Review Division Head

### Functions and Responsibilities of the Loan Policy Committee

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Kebijakan Perkreditan (KPB) memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

The functions of Loan Policy Committee include at least the following:

1. Memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

1. Provide input to the board of directors in the preparation of Loan Policy, especially related to the formulation of prudential principles in loan

2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB.
  3. Memantau dan mengevaluasi:
    - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan
    - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit atau Pembiayaan
    - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu
    - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK
    - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan
    - f. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB
    - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.
  4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai:
    - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB
    - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi KKP poin 3
  5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 4
2. Supervise that Loan Policy can be applied and implemented consequently and consistently and formulate solutions in the event of obstacles or constraints in the implementation of Loan Policy. Furthermore, Loan Policy Committee also conducts periodic reviews of Loan Policy and provides advice to the board of directors in the event of necessary changes or improvements to Loan Policy;
  3. Monitor and evaluate:
    - a. Development and quality of the loan or financing portfolio comprehensively
    - b. The correctness on the implementation of authority to terminate loan or financing
    - c. The correctness on the process of granting, development, and quality of Loan or Financing provided to parties related to the Bank and the debtor with the certain amount
    - d. The correctness on the implementation of LLL provisions
    - e. Adherence to the provisions of laws and regulations and other regulations in the implementation of loan or financing
    - f. Non-Performing Loan handling in accordance with the Loan Policy
    - g. The Bank's efforts to meet the adequacy of the allowance for loan write off.
  4. Submit a written report periodically to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:
    - a. The results of supervision on the application and implementation of Loan Policy
    - b. The results of monitoring and evaluation on the matters referred to the Loan Policy Committee function in point 3
  5. Provide suggestions for improvement measures to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners on matters related to point 4

### **Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2021**

Sepanjang tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal memberikan masukan terkait penyusunan revisi atas kebijakan dan prosedur Bank terkait perkreditan.

### **Implementation of Loan Policy Committee Duties in 2021**

*During 2021, the Loan Policy Committee has performed its duties well in terms of providing input on the preparation of revisions to the Bank's policies and procedures related to loan.*



## Komite Kredit Loan Committee

Komite Kredit merupakan komite yang bertugas membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan atas persetujuan pemberian kredit. Penunjukan anggota Komite Kredit ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 102/KEP-DIR/A-07/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

*Loan Committee is responsible for assisting the Board of Directors in the decision-making process on the approval of loan granting. The appointment of Loan Committee members is determined by The Board of Directors Decree No. 102/KEP-DIR/A-07/X/20 dated October 26, 2020.*

### Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

### Structure and Membership of the Loan Committee

Komite Kredit Direksi <i>Loan Committee for Board of Directors</i>																	
Anggota <i>Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur yang membidangi Korporat</li> <li>2. Direktur yang membidangi Konsumer</li> <li>3. Direktur yang membidangi Business Support dan/atau Remedial &amp; SAM</li> <li>4. Direktur yang membidangi Operasional</li> <li>5. Kepala Divisi yang membawahi Perencanaan Korporat</li> <li>6. Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Director in charge of Corporate</i></li> <li>2. <i>Director in charge of Consumer</i></li> <li>3. <i>Director in charge of Business Support and/or Remedial &amp; SAM</i></li> <li>4. <i>Director in charge of Operational</i></li> <li>5. <i>Division Head in charge of Corporate Planning</i></li> <li>6. <i>Division Head in charge of Loan Management</i></li> </ol>																
Anggota Independen <i>Independent Member</i>	<p>: Direktur yang membidangi Risiko &amp; Kepatuhan <i>Director in charge of Risk &amp; Compliance</i></p>																
Pemenuhan Kuota <i>Quota Fulfillment</i>	<p>: Disetujui sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota <i>Approved by at least 5 (five) members</i></p>																
Komite Kredit Manajemen <i>Loan Committee for Management</i>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kategori A <i>Category A</i></th> <th>Kategori B <i>Category B</i></th> <th>Kategori C <i>Category C</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anggota <i>Member</i></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua)</li> <li>• 3 (tiga) dari 4 (empat) orang Team Leader</li> <li>• <i>Division Head in charge of Loan Management (Chairman)</i></li> <li>• 3 (three) of 4 (four) Team Leaders</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Kredit Konsumer (Ketua)</li> <li>• Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Pensiunan</li> <li>• Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Konsumer</li> <li>• <i>Division Head in charge of Consumer Loan (Chairman)</i></li> <li>• <i>Department Head in charge of pension loan function</i></li> <li>• <i>Department Head in charge of consumer loan function</i></li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua)</li> <li>• 3 (tiga) dari 4 (empat) orang Team Leader</li> <li>• <i>Division Head in charge of Loan Management (Chairman)</i></li> <li>• 3 (three) of 4 (four) Team Leaders</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Anggota Independen <i>Independent Member</i></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Departemen yang menjalankan fungsi <i>Corporate Legal</i></li> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko &amp; Kepatuhan</li> <li>• <i>Department Head in charge of Corporate Legal Functions</i></li> <li>• <i>Division Head in charge of Risk Management &amp; Compliance</i></li> </ul> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pemenuhan Kuota <i>Quota Fulfillment</i></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori "A" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan</li> <li>2. Kategori "B" harus disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan</li> <li>3. Kategori "C" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Category "A" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision</i></li> <li>2. <i>Category "B" shall be approved by at least 2 (two) committee members and the chairman of the committee shall give a decision</i></li> <li>3. <i>Category "C" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision</i></li> </ol> </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kategori A <i>Category A</i>	Kategori B <i>Category B</i>	Kategori C <i>Category C</i>	Anggota <i>Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua)</li> <li>• 3 (tiga) dari 4 (empat) orang Team Leader</li> <li>• <i>Division Head in charge of Loan Management (Chairman)</i></li> <li>• 3 (three) of 4 (four) Team Leaders</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Kredit Konsumer (Ketua)</li> <li>• Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Pensiunan</li> <li>• Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Konsumer</li> <li>• <i>Division Head in charge of Consumer Loan (Chairman)</i></li> <li>• <i>Department Head in charge of pension loan function</i></li> <li>• <i>Department Head in charge of consumer loan function</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua)</li> <li>• 3 (tiga) dari 4 (empat) orang Team Leader</li> <li>• <i>Division Head in charge of Loan Management (Chairman)</i></li> <li>• 3 (three) of 4 (four) Team Leaders</li> </ul>	Anggota Independen <i>Independent Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Departemen yang menjalankan fungsi <i>Corporate Legal</i></li> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko &amp; Kepatuhan</li> <li>• <i>Department Head in charge of Corporate Legal Functions</i></li> <li>• <i>Division Head in charge of Risk Management &amp; Compliance</i></li> </ul>			Pemenuhan Kuota <i>Quota Fulfillment</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori "A" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan</li> <li>2. Kategori "B" harus disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan</li> <li>3. Kategori "C" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Category "A" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision</i></li> <li>2. <i>Category "B" shall be approved by at least 2 (two) committee members and the chairman of the committee shall give a decision</i></li> <li>3. <i>Category "C" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision</i></li> </ol>		
	Kategori A <i>Category A</i>	Kategori B <i>Category B</i>	Kategori C <i>Category C</i>														
Anggota <i>Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua)</li> <li>• 3 (tiga) dari 4 (empat) orang Team Leader</li> <li>• <i>Division Head in charge of Loan Management (Chairman)</i></li> <li>• 3 (three) of 4 (four) Team Leaders</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Kredit Konsumer (Ketua)</li> <li>• Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Pensiunan</li> <li>• Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Konsumer</li> <li>• <i>Division Head in charge of Consumer Loan (Chairman)</i></li> <li>• <i>Department Head in charge of pension loan function</i></li> <li>• <i>Department Head in charge of consumer loan function</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua)</li> <li>• 3 (tiga) dari 4 (empat) orang Team Leader</li> <li>• <i>Division Head in charge of Loan Management (Chairman)</i></li> <li>• 3 (three) of 4 (four) Team Leaders</li> </ul>														
Anggota Independen <i>Independent Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Departemen yang menjalankan fungsi <i>Corporate Legal</i></li> <li>• Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko &amp; Kepatuhan</li> <li>• <i>Department Head in charge of Corporate Legal Functions</i></li> <li>• <i>Division Head in charge of Risk Management &amp; Compliance</i></li> </ul>																
Pemenuhan Kuota <i>Quota Fulfillment</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori "A" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan</li> <li>2. Kategori "B" harus disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan</li> <li>3. Kategori "C" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Category "A" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision</i></li> <li>2. <i>Category "B" shall be approved by at least 2 (two) committee members and the chairman of the committee shall give a decision</i></li> <li>3. <i>Category "C" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision</i></li> </ol>																



## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Setiap individu yang ditunjuk menjadi pejabat pemutus kredit bersifat independen dalam memberikan pendapat menyetujui atau menolak suatu permohonan kredit. Berkaitan dengan kedudukannya tersebut, anggota pemutus kredit bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
2. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank, Prosedur Perkreditan dan peraturan terkait lainnya.
3. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
4. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
5. Melaksanakan prinsip/sikap profesionalisme dan memiliki integritas.
6. Mengawasi *watchlist* dan semua pinjaman bermasalah serta memberikan rekomendasi mengenai cara penanganannya.

## Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Kredit telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang ditunjukkan dengan adanya modul/prosedur pemberian persetujuan kredit melalui *core banking system* oleh anggota komite.



## Komite Pembelian Barang dan Jasa Procurement Committee

Komite Pembelian Barang dan Jasa dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dengan tujuan untuk:

1. Membantu Direksi dalam pengelolaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa
2. Memastikan efektivitas atas aktivitas kegiatan Pembelian Barang dan Jasa
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku di BWS

## Duties and Responsibilities of the Loan Committee

*Each individual appointed as a Loan Committee is independently in giving an opinion approving or rejecting a loan application. In connection with its position, members of the Loan Committee are responsible for:*

1. *Ensure that every granting of loan had meet the general norms of banking and is in accordance with sound loan principles.*
2. *Ensure that the implementation of loan is in accordance with the Bank's Loan Policy, Loan Procedure and other relevant regulations.*
3. *Ensuring that the granting of loan has been based on an honest, objective, careful, and prudence assessment and regardless of the influence of the parties concerned with the loan applicant.*
4. *Believe that the granting of loan can be repaid in time manner and will not develop into non-performing loans.*
5. *Implement principles/attitudes of professionalism and have integrity.*
6. *Supervise the watchlist and all non-performing loans and provide recommendations on how to handle it.*

## Implementation of Loan Committee Duties in 2021

*During 2021, the Loan Committee has performed its duties well indicated by the module/procedure of granting loan approval through the core banking system by the committee member user.*

*Procurement Committee is established by and responsible to the Board of Directors with the aim of:*

1. *Assist the Board of Directors in the management of goods and services purchase activities*
2. *Ensure the effectiveness of the Purchase of Goods and Services activities*
3. *Ensure the implementation of the purchase of goods and services activities in accordance with the applicable policies and procedures in BWS*

## Struktur dan Keanggotaan Komite Pembelian Barang dan Jasa *Structure and Membership of the Procurement Committee*

Ketua <i>Chairman</i>	: Direktur yang membawahi Manajemen Kredit <i>Director in charge of Loan Management</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	: 1. Kepala Divisi yang membawahi General Affair; 2. Kepala Divisi yang membawahi Pembukaan Kantor; 3. Kepala Divisi yang membawahi Teknologi Informasi; 4. Kepala Divisi yang membawahi Perencanaan Korporasi. <i>1. Division Head in charge of General Affair; 2. Division Head in charge of Office Opening; 3. Division Head in charge of Information Technology; and 4. Division Head in charge of Corporate Planning.</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	: Kepala Divisi yang berhubungan dengan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa (memiliki pengetahuan dan kepentingan tertentu) <i>Division Head related to The Purchase of Goods and Services (has certain knowledge and interests).</i>

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembelian Barang dan Jasa *Duties and Responsibilities of the Procurement Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pembelian Barang dan Jasa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Direksi terkait penyusunan Kebijakan, Prosedur, Limit dan Strategi Pembelian Barang dan Jasa.
2. Melakukan evaluasi atas usulan perubahan Kebijakan, Prosedur, Limit dan Strategi Pembelian Barang dan Jasa.
3. Secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terkait kegiatan Pembelian Barang dan Jasa dibandingkan dengan Kebijakan, Prosedur dan Limit yang berlaku di BWS.
4. Memberikan persetujuan atas rekanan/vendor/supplier sebagai rekanan/vendor/supplier yang resmi dapat digunakan.
5. Melakukan evaluasi atas Daftar Rekanan.
6. Memberikan persetujuan rekomendasi kepada Direktur dan/atau Direksi atas pelaksanaan Pembelian Barang dan Jasa yang merupakan kewenangan Direktur dan/atau Direksi serta nominal Pembelian Barang dan Jasa lebih dari Rp50 juta kepada Direktur dan/atau Direksi sebelum dilakukan persetujuan.

*In carrying out its functions, the Procurement Committee has the following duties and responsibilities:*

1. *Assisting the Board of Directors in the preparation of Policies, Procedures, Limits and Strategies for Purchasing Goods and Services.*
2. *Evaluate the proposed changes to the Policy, Procedure, Limit and Strategy of Purchasing Goods and Services.*
3. *Periodically evaluate the implementation of compliance related to the activities of Purchasing Goods and Services compared to the applicable Policies, Procedures and Limits at BWS.*
4. *Provide approval to partners/vendors/suppliers as partners/vendors/suppliers that can be officially used.*
5. *Evaluate the Associate List of Vendor.*
6. *Provide approval of recommendations to the Director and/or Board of Directors on the implementation of the Purchase of Goods and Services which is the authority of the Director and/or Board of Directors and the nominal purchase of Goods and Services more than IDR50 million to the Director and/or Board of Directors before approval.*

## Pelaksanaan Tugas Komite Pembelian Barang dan Jasa Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Pembelian Barang dan Jasa telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal memberikan rekomendasi atas persetujuan rekanan/vendor/supplier dan rekomendasi kepada Direktur dan/atau Direksi.

## *Implementation of Procurement Committee Duties in 2021*

*During 2021, the Procurement Committee has performed its duties well in terms of providing recommendations on the approval of partners/vendors/suppliers and recommendations to the Director and/or Board of Directors.*



## Komite Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

*Committee for Anti-Money Laundering & Combating The Financing of Terrorism*

Komite Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (Komite APU & PPT) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi dengan tujuan untuk memastikan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU & PPT) di BWS sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau *standard best practice*.

*Committee for Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism ("AML & CFT Committee") was formed based on the Decision of the Board of Directors with aim to ensuring the implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program (AML & CFT Program) at BWS in accordance with the applicable laws and/or best practice standards.*

### Struktur dan Keanggotaan Komite APU & PPT

Ketua <i>Ketua</i>	: Direktur yang membawahi Kepatuhan <i>Director in charge of compliance function.</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	: 1. Kepala Departemen yang membawahi APU & PPT 2. Kepala Departemen yang membawahi Business Legal 3. Kepala Departemen yang membawahi Kepatuhan <i>1. Head in charge of AML &amp; CFT function 2. Department Head in charge of business legal functions 3. Department Head in charge of Compliance function.</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	: Kepala Divisi dan/atau Pemimpin Cabang. <i>Division Heads and/or Branch Heads.</i>

### Structure and Membership of the AML & CFT Committee

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite APU & PPT

Komite APU & PPT bertugas dan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kebijakan dan prosedur terkait penerapan Program APU & PPT
2. Perbaikan proses kerja penerapan Program APU & PPT
3. Rencana kerja pelatihan terkait penerapan Program APU & PPT
4. Permasalahan-permasalahan terkait penerapan Program APU & PPT

### Duties and Responsibilities of the AML & CFT Committee

*The AML & CFT Committee is responsible for evaluating and providing recommendations to the Board of Directors which at least include:*

1. *Policies and procedures related to the implementation of AML & CFT Program*
2. *Improvement of the work process in implementing AML & CFT Program*
3. *Training plan related to the implementation of AML & CFT Program*
4. *Problems related to the implementation of AML & CFT Program.*

### Pelaksanaan Tugas Komite APU & PPT Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite APU & PPT telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Latar belakang dibentuknya Komite APU & PPT
2. Tugas dan tanggung jawab Komite APU & PPT
3. Usulan perubahan kebijakan dan prosedur terkait penerapan program APU & PPT
4. Usulan perubahan struktur organisasi di Departemen APU & PPT
5. Progres proyek goAML

### Implementation of AML & CFT Committee Duties in 2021

*During 2021, AML & CFT Committee has held 4 (four) meeting with the following discussions:*

1. *Background of the establishment of AML & CFT Committee*
2. *Duties and responsibilities of AML & CFT Committee*
3. *Proposed changes in policies and procedures related to the implementation of AML & CFT programs*
4. *Proposed changes in organizational structure in AML & CFT Department*
5. *Progress of goAML project*



## Gugus Tugas Anti Fraud

Anti Fraud Task Force

Gugus Tugas Anti *Fraud* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi dengan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

*The Anti Fraud Task Force is directly responsible to President Director and has directly relationship in communication and report to the Board of Commissioners.*

### Struktur dan Keanggotaan Gugus Tugas Anti Fraud

### Anti Fraud Task Force Structure and Membership

Ketua <i>Chairman</i>	: Kepala Divisi yang membawahi Satuan Kerja Audit Internal <i>Head of Division in charge of the Internal Audit Unit</i>
Wakil Ketua <i>Vice Chairman</i>	: Kepala Divisi yang membawahi Kepatuhan <i>Division Head in charge of Compliance</i>
Anggota <i>Member</i>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Divisi yang membawahi <i>Human Capital</i></li> <li>2. Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko</li> <li>3. Kepala Departemen yang membawahi Audit Inspectorate</li> <li>4. Kepala Departemen yang membawahi Corporate &amp; Business Legal</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Division Head in charge of Human Capital</i></li> <li>2. <i>Division Head in charge of Risk Management</i></li> <li>3. <i>Department Head in charge of Audit Inspection</i></li> <li>4. <i>Department Head in charge of Corporate &amp; Business Legal</i></li> </ol>

### Tugas dan Tanggung Jawab Gugus Tugas Anti Fraud

### Anti Fraud Task Force Duties and Responsibilities

Dalam menjalankan fungsinya, Gugus Tugas Anti *Fraud* memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

*In carrying out its functions, the Anti-Fraud Task Force has the following duties and responsibilities:*

1. Memantau dan memastikan kesesuaian penerapan strategi anti *Fraud* yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
  2. Mendukung upaya penumbuhkembangan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi.
  3. Menyusun rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugas tahunan serta menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Penyusunan rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan kerja tahunan dikoordinasikan dengan Divisi/Satuan Kerja/Unit Bisnis terkait.
  4. Menyusun uraian tugas dan pedoman kerja internal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas Anti *Fraud* dalam implementasi strategi anti *Fraud*.
  5. Melakukan evaluasi dan/atau pengkinian strategi anti *Fraud* yang diterapkan, dengan memperhatikan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, *best practice* dan perkembangan perusahaan.
1. *Monitor and ensure the appropriateness of pre-determined anti-fraud strategy implementation with the General Policy Implementation of Anti Fraud Strategy.*
  2. *Support the culture and anti-fraud awareness at all levels of organization.*
  3. *Prepare annual work plans and annual report of duties implementation which coordinated with the relevant Division/Work Unit/Business Unit and submit it to the President Director and Board of Commissioners.*
  4. *Prepare job descriptions and internal work guidelines in carrying out its duties and responsibilities in the implementation of anti-fraud strategies.*
  5. *Evaluate and/or update the pre-determined anti fraud strategy, by considering the Bank Indonesia regulations and other laws and regulations, best practice and the company's development.*

## Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Anti Fraud Tahun 2021

Selama tahun 2021, Gugus tugas Anti Fraud telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal memberikan rekomendasi atas penanganan kasus fraud serta tindakan lainnya terkait penerapan strategi anti-fraud di BWS.

## Implementation of the Anti-Fraud Task Force in 2021

*During 2021, Anti Fraud Task Force has carried out its duties properly in order to provide the recommendation in handling the fraud cases and other actions related to implementation of anti-fraud strategy in BWS*



## Sekretaris Perusahaan

### Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung (*Compliance Officer*) yang menjembatani kepentingan antara BWS dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Bank. Sebagai salah satu organ pendukung, Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam membantu Bank memenuhi peraturan pasar modal, yaitu dengan menyediakan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai seperti GCG, Anggaran Dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Corporate Secretary is a liaison (Compliance Officer) that bridges the interests between the BWS and external parties, especially in maintaining public perception of the Bank's image. As one of the supporting organs, the Corporate Secretary plays an important role in helping the Bank meet capital market regulations, namely by providing guidelines to the Board of Commissioners and Directors regarding GCG, the Bank's Articles of Association, and applicable laws and regulations.*

Sekretaris Perusahaan Bank berfungsi sebagai penghubung antara Bank dengan lembaga/instansi terkait (Bank Indonesia), otoritas pasar modal, komunitas pemodal, dan masyarakat umum. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan investor yang berhubungan dengan kinerja Bank secara tepat waktu, akurat dan transparan sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi bank maupun bagi perusahaan publik.

*The Bank's Corporate Secretary functions as a liaison between the Bank and related institutions / agencies (Bank Indonesia), capital market authorities, the investor community, and the general public. The Corporate Secretary is responsible for providing and conveying information to the general public as well as to the interests of investors relating to the Bank's performance in a timely, accurate and transparent manner in accordance with the provisions and laws applicable to banks and to public companies.*

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

*Requirements and procedures for appointing a Corporate Secretary refer to the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.*

## Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Bank. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan profesional serta integritasnya di masyarakat dan bisnis.

## Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

*The Corporate Secretary is directly responsible to the Directors and is appointed and dismissed based on the Directors' Decree based on the Bank's internal mechanism. Appointment of the Corporate Secretary by considering his professional abilities and integrity in the community and business*



## Pejabat Sekretaris Perusahaan

Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 035/KEP.DIR/HC.III/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang mengangkat Sadhana Priatmadja sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2020 dengan nomor surat 121/BWSDIR/OJK/IV/2020 untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil Sadhana Priatmadja dapat dilihat pada Profil Direksi dalam bab Profil Perusahaan di laporan tahunan ini.

## Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG yang meliputi:
  - » Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten
  - » Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu
  - » Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS
  - » Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
  - » Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Emiten dengan Pemegang Saham, OJK dan Pemangku Kepentingan lainnya.

## Corporate Secretary

*Determination of Corporate Secretary in accordance with Directors Decree No. 035/KEP.DIR/HC.III/IV/2020 dated April 29, 2020 which appointed Sadhana Priatmadja as Corporate Secretary and has received the approval of the Board of Commissioners. This appointment was reported to the OJK and the Indonesia Stock Exchange on April 30, 2020 under letter number 121/BWS-Dir/OJK/IV/2020 to meet OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.*

*Profile of Sadhana Priatmadja can be seen in the Board of Director's Profile in the Company Profile Chapter in this Annual Report*

## Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

*Referring to Article 5 OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, Corporate Secretary function is carrying out its duties include at least:*

- *Closely monitoring the development of Capital Market sector, particularly with regard to relevant Capital Market laws and regulations.*
- *Providing inputs to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company in order to comply with laws and regulations in the Capital Market sector.*
- *Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing good corporate governance, which includes:*
  - » *Disclosure of information to the public, including availability of information on the Website of the Issuer or Public Company*
  - » *Timely submission of report to the OJK*
  - » *Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders*
  - » *Organizing and documenting the Meetings of Board of Directors and/or Board of Commissioners*
  - » *Organizing corporate orientation programs for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
- *As a liaison between the Issuer or Public Company and its shareholders, the OJK, and other stakeholders.*

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan BWS membagi tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:

- Memimpin penyusunan strategi dan rencana kerja Sekretaris Perusahaan, termasuk di dalamnya *Corporate Action* dan *Corporate Social Responsibility Program*.
- Memimpin penyusunan & pengembangan kebijakan dan prosedur terkait pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.
- Memastikan terselenggaranya *corporate agenda* (RUPS, RUPSLB, dsb.) dengan baik.
- Memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Pasar Modal dan patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan operasionalisasi kegiatan usaha Bank dan pengembangan usaha Bank.
- Memimpin proses fasilitasi penyusunan Sasaran Mutu/*Goal Setting* dan Prosedur Mutu Unit Kerja.
- Memimpin proses fasilitasi dalam mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Mutu/*Goal Setting* dan Prosedur Mutu Unit Kerja sampai disahkan oleh Direksi.
- Memimpin kegiatan Sekretaris Perusahaan untuk anak usaha Bank dan memastikan kebenaran informasi/data yang dikeluarkan oleh masing-masing anak usaha tersebut.
- Memastikan terselenggaranya hubungan yang baik antara Bank dengan Pemangku Kepentingan (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Pemegang Saham Pengendali dan masyarakat).
- Memastikan terselenggaranya layanan informasi kepada masyarakat, terkait dengan informasi CSR, kondisi Bank selaku emiten atau perusahaan publik, dan informasi lainnya baik melalui internet maupun media lainnya.
- Memastikan komunikasi informasi kebijakan Bank dan/atau Pemerintah kepada pihak internal dan eksternal berlangsung dengan baik.
- Memastikan tersedianya Daftar Khusus dan memelihara dokumen Daftar Pemegang Saham.
- Memimpin kegiatan pelaksanaan tindak lanjut setiap temuan auditor/pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
- Memastikan bahwa karyawan di unit kerjanya kompeten dalam menjalankan tugas.
- Melaksanakan evaluasi kinerja dan *coaching & counselling* kepada *subordinate*.
- Memberikan rekomendasi bagi penerimaan, penilaian prestasi kerja, promosi, rekomendasi gaji, pemindahan (mutasi) dan pemberhentian karyawan di unit kerjanya.

*In line with the OJK regulation, Corporate Secretary of BWS divide the task and responsibility is as follows:*

- *Lead the preparation of strategies and work plans of the Corporate Secretary, including the Corporate Action and Corporate Social Responsibility Program.*
- *Lead the preparation & development of Corporate Secretary policies and procedures.*
- *Ensuring the implementation of the corporate agenda (GMS, EGMS, etc.) properly.*
- *Ensuring that the Bank has complied with Capital Market regulations and complies with regulations relating to the operation of the Bank's business activities and business development of the Bank.*
- *Lead the facilitation process for the preparation of Quality Goals / Goal Settings and Work Unit Quality Procedures.*
- *Lead the facilitation process in preparing report materials for Directors' Meetings, Board of Commissioners Meetings and General Meeting of Shareholders (GMS).*
- *Coordinate the preparation of the Quality Goals/Goal Setting and Quality Procedures of the Work Unit until it is approved by the Directors.*
- *Lead the activities of the Corporate Secretary for the Bank's subsidiaries and ensure the correctness of information/data issued by each of these subsidiaries.*
- *Ensuring good relations between the Bank and the Stakeholders (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, the Indonesia Stock Exchange, Controlling Shareholders and the public).*
- *Ensuring the implementation of information services to the public, related to CSR information, the condition of the Bank as an issuer or public company, and other information both through the internet and other media.*
- *Ensuring communication of Bank and or government policy information to internal and external parties takes place properly.*
- *Ensuring the availability of the Special Register and maintaining the Register of Shareholders documents.*
- *Lead the follow up activities for every Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia auditor/examiner findings.*
- *Ensuring that employees in their work units are competent in carrying out tasks.*
- *Carry out performance evaluations and coaching & counseling to subordinates.*
- *Provide recommendations for recruitment, performance appraisal, promotions, salary recommendations, transfers and dismissal of employees in their work units.*

## Program Peningkatan Kompetensi

Bank memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank. Berikut adalah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2021.

## Competency Improvement Program

Bank has a policy related to development and improvement of the competencies for Corporate Secretary, which is carried out through various training and education programs with funding entirely the responsibility of the Bank. Following are the floating and training programs that were followed by the Corporate Secretary throughout 2021.

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Nama Pelatihan Training Names	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Sadhana Priatmadja	Workshop	Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden Republik Indonesia Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 <i>Annual Coordination and Presidential Directive of Republic of Indonesia Regarding Prevention and Eradication of Anti Money Laundering Money (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) 2021</i>	Webinar, 14 Januari 2021 <i>Webinar, January 14, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Undangan Webinar Launching Implementasi Aplikasi Pelaporan goAML <i>Webinar Invitation: Launching of goAML Reporting App</i>	Webinar, 1 Februari 2021 <i>Webinar, February 1, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Undangan Pertemuan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan - OJK dengan Direktur Kepatuhan Bank Umum <i>Meeting Invitation between Department of Research and Banking Regulations - OJK with Compliance Director of Commercial Bank</i>	Webinar, 4 Februari 2021 <i>Webinar, February 4, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Workshop	Dialog Ketua Dewan Komisiner OJK dengan CEO Perbankan - Program Pemulihan Ekonomi <i>Dialogue between the Chairman of the OJK Board of Commissioners and Banking CEO - Economic Recovery Program</i>	Webinar, 16 Februari 2021 <i>Webinar, February 16, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap Perbankan <i>Banking Gratification Control and Anti-Bribery</i>	Webinar, 22 Februari 2021 <i>Webinar, February 22, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Workshop	Undangan Pertemuan Dalam Rangka Pembahasan Program Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2021 <i>Meeting Invitation: Discussion of Finance Literacy and Education Programs 2021</i>	Webinar, 8 Maret 2021 <i>Webinar, March 8, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Perubahan PMK bersama PERBANAS <i>Socialization of PMK Changes with PERBANAS</i>	Webinar, 27 April 2021 <i>Webinar, April 27, 2021</i>	PERBANAS
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan <i>Dissemination of the Blueprint for Human Resource Development for the Financial Services Sector</i>	Webinar, 25 Mei 2021 <i>Webinar, May 25, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Workshop	Memaknai Semangat Kebangkitan Nasional di Sektor Jasa Keuangan <i>Interpreting the Spirit of National Awakening in Financial Services Sector</i>	Webinar, 27 Mei 2021 <i>Webinar, May 27, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Implementasi Pedoman Iklan Jasa Keuangan dan Pedoman Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan - Perbankan <i>Socialization of the Implementation of Advertising Guidelines for Financial Services and Standard Agreement Guidelines Financial Services Sector - Banking</i>	Webinar, 11 Juni 2021 <i>Webinar, June 11, 2021</i>	OJK

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Nama Pelatihan Training Names	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021 - 2025 <i>Dissemination of the Blueprint for Human Resource Development for the Financial Services Sector in 2021-2025</i>	Webinar, 16 Juni 2021 <i>Webinar, June 16, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Perbanas Sosialisasi BI - FAST <i>Perbanas Socialization BI - FAST</i>	Webinar, 17 Juni 2021 <i>Webinar, June 17, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Peran ETP Multimatching System dalam Pengembangan Pasar Uang di Indonesia <i>ETP Multimatching System contribution in Money Market Development in Indonesia</i>	Webinar, 21 Juni 2021 <i>Webinar, June 21, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 - 2025: Transformasi Digital Perbankan <i>Indonesia Banking Development Roadmap (RP2I) 2020 - 2025: Transformation Digital Banking</i>	Webinar, 15 Juli 2021 <i>Webinar, July 15, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Implementasi Risk Based Bank Rating (RBBR) <i>Implementation of Risk Based Bank Rating (RBBR)</i>	Webinar, 21 Juli 2021 <i>Webinar, July 21, 2021</i>	PT Efektifpro Knowledge Source
Sadhana Priatmadja	Workshop	FGD dengan tema Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti - Tipping Off dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang <i>FGD with the theme of Legal Review Regarding Anti-Tipping Off Provisions in prevention and eradication of Money Laundering</i>	Webinar, 21 Juli 2021 <i>Webinar, July 21, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Launching & Registrasi Aplikasi SIPENDAR <i>Launching &amp; Registration on SIPENDAR Applications</i>	Webinar, 2 Agustus 2021 <i>Webinar, August 2, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja	Workshop	PERBANAS ASEAN Workshop	Webinar, 5 Agustus 2021 <i>Webinar, August 5, 2021</i>	PERBANAS
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Launching Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2021 kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank <i>Launching Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2021 to Bank Financial Services Providers</i>	Webinar, 5 Agustus 2021 <i>Webinar, August 5, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi terkait Tanggung Jawab Industri Jasa Keuangan terhadap Aksi Fraud Pegawai <i>Socialization regarding Responsibility in Financial Services Industry against Employee Fraud</i>	Webinar, 12 Agustus 2021 <i>Webinar, August 12, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Optimalisasi Penanganan Pencucian Uang <i>Optimization of Money Laundering Handling</i>	Webinar, 16 Agustus 2021 <i>Webinar, August 16, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Peluncuran Naskah NRA <i>Launching of NRA Manuscript</i>	Webinar, 19 Agustus 2021 <i>Webinar, August 19, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Perkembangan Teknologi di Indonesia dan Visi Digitalisasi Nasional Kepada Seluruh Pelaku Sektor Jasa Keuangan <i>Technology Development in Indonesia and National Digitization Vision To All Actors of Financial Services Sector</i>	Webinar, 27 Agustus 2021 <i>Webinar, August 27, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Workshop	Forum Diskusi Makroprudensial terkait Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) <i>Macroprudential Discussion Forum: Policy on Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM)</i>	Webinar, 30 Agustus 2021 <i>Webinar, August 30, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja	Workshop	Koordinasi Pembahasan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan Skema Business Email Compromise (BEC) <i>Coordination of Discussion on Prevention and Eradication of Money Laundering with the Scheme Business Email Compromise (BEC)</i>	Webinar, 30 Agustus 2021 <i>Webinar, August 30, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum <i>Socialization on Commercial Bank Provisions</i>	Webinar, 1-2 September 2021 <i>Webinar, September 1-2, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Workshop	Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan dan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Sektor Jasa Keuangan <i>Focus Group Discussion (FGD): Regulations and Use of Electronic Signatures in Financial Services Sector</i>	Webinar, 7 September 2021 <i>Webinar, September 7, 2021</i>	OJK

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Nama Pelatihan Training Names	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Pengendalian Gratifikasi - Sesi 1 <i>Gratification Control - Session 1</i>	Webinar, 9 September 2021 <i>Webinar, September 9, 2021</i>	Mahardika Gemilang
Sadhana Priatmadja	Workshop	Diskusi Lanjutan Kebijakan Makroprudensial terkait Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) <i>Continued Discussion on Macroprudential Policy related to Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM)</i>	Webinar, 10 September 2021 <i>Webinar, September 10, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Pengendalian Gratifikasi - Sesi 2 <i>Gratification Control - Session 2</i>	Webinar, 17 September 2021 <i>Webinar, September 17, 2021</i>	Adnan Pandu Praja
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Pencegahan Anti Suap melalui Implementasi Sistem Anti Suap berdasarkan SNI ISO 37001 <i>Anti-Bribery Prevention through Anti-Bribery System Implementation based on SNI ISO 37001</i>	Webinar, 21 September 2021 <i>Webinar, September 21, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Peran dan Fungsi Kepatuhan Dalam Penerapan APU PPT Ekspektasi PPATK sebagai Regulator PPATK <i>Role and Function of Compliance in APU PPT Implementation and PPATK Expectations as Regulator</i>	Webinar, 23 September 2021 <i>Webinar, September 23, 2021</i>	PPATK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Konvensi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) bidang Manajemen Risiko <i>Bank Members of PERBANAS (CEO Forum) : The Future of Banking - How Bank Stay Relevant</i>	Webinar, 28 September 2021 <i>Webinar, September 28, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Pelatihan Training	Bank Members of PERBANAS (CEO Forum) : The Future of Banking - How Bank Stay Relevant <i>Bank Members of PERBANAS (CEO Forum) : The Future of Banking - How Bank Stay Relevant</i>	Webinar, 30 September 2021 <i>Webinar, September 30, 2021</i>	PERBANAS
Sadhana Priatmadja	Workshop	Workshop Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) <i>Workshop on Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM)</i>	Webinar, 19 Oktober 2021 <i>Webinar, October 19, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Launching Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan <i>Launching of Blueprint for Digital Banking Transformation</i>	Webinar, 26 Oktober 2021 <i>Webinar, October 26, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Workshop	Undangan Dengar Pendapat dan Tanggapan Rancangan Surat Edaran OJK tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional <i>Hearing Invitation and Feedback on OJK Circular Letter Draft on Banking Accounting Guideliness Book for Conventional and Commercial Banks</i>	Webinar, 29 Oktober 2021 <i>Webinar, October 29, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Seminar	CEO Networking 2021: Stepping up to Regain the Economic Growth	Webinar, 16 November 2021 <i>Webinar, November 16, 2021</i>	IDX
Sadhana Priatmadja	Seminar	The 2021 Annual Meeting of Bank Indonesia : Rise and be Optimistic: Synergy & Innovation for Economic Recovery and Remarks from the President of The Republic of Indonesia	Webinar, 24 November 2021 <i>Webinar, November 24, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Undangan Peluncuran Infrastruktur Standar Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SLNKI) <i>Invitation of Infrastructure Launching National Standard for Indonesian Financial Literacy (SLNKI)</i>	Webinar, 14 Desember 2021 <i>Webinar, December 14, 2021</i>	OJK
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Peluncuran BI-FAST <i>BI-FAST Launching</i>	Webinar, 21 Desember 2021 <i>Webinar, December 21, 2021</i>	BI
Sadhana Priatmadja	Sosialisasi Socialization	Undangan Sosialisasi Penerbitan Penyempurnaan Ketentuan GWM dan RIM & PLM seiring Implementasi BI-FAST <i>Publishing Socialization on Improvement of Statutory Reserves and RIM &amp; PLM along with BI-FAST Implementation</i>	Webinar, 30 Desember 2021 <i>Webinar, December 30, 2021</i>	BI



## Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Sekretaris Perusahaan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh pihak eksternal
- Menghadiri acara pemberian penghargaan sebagai perwakilan perusahaan.
- Melaporkan seluruh kejadian terkait COVID-19 yang terjadi di perusahaan kepada pihak-pihak baik eksternal maupun internal.
- Melaksanakan seluruh fungsi & kegiatan Sekretaris Perusahaan.

## Akses Informasi dan Data Bank serta Pengelolaan Relasi Investor

## Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Corporate Secretary in 2021

The activities carried out by Corporate Secretary Department during 2021 are as follows:

- Attending activities held by external parties
- Attend the awarding ceremony as a representative of the Company.
- Report all COVID-19 cases within the Company to relevant parties both externally and internally.
- Carry out all functions and activities of the corporate secretary.

## Bank Information and Data Access serta Pengelolaan Relasi Investor

### **BWS memandang keterbukaan informasi dan penyampaian informasi yang komprehensif merupakan bagian dari hak pemangku kepentingan.**

*BWS considers that disclosure of information and delivery of comprehensive information is part of stakeholder rights.*

Bank senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan data Bank melalui melalui situs web [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com) maupun melalui:

Telepon	+6221 5087 1906
Fax.	+6221 5087 1900
Email	<a href="mailto:saudara@bankwoorisaudara.com">saudara@bankwoorisaudara.com</a> <a href="mailto:customer.care@bankwoorisaudara.com">customer.care@bankwoorisaudara.com</a>

The Bank always makes it easy for stakeholders to access Bank information and data through the website [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com) or through:

Telephone	+6221 5087 1906
Fax.	+6221 5087 1900
Email	<a href="mailto:saudara@bankwoorisaudara.com">saudara@bankwoorisaudara.com</a> <a href="mailto:customer.care@bankwoorisaudara.com">customer.care@bankwoorisaudara.com</a>

## Komunikasi Internal

Sebagai pemangku kepentingan internal yang berhubungan langsung dengan kinerja Bank, karyawan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait kinerja dan kemajuan Bank. Berikut disampaikan beberapa saluran yang digunakan Bank untuk menyampaikan informasi kepada karyawan dan pihak internal lainnya.

- **CM Site (Corporate Management Site)**  
Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi Internal, Bank telah menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk juga mengenai program, kebijakan manajemen, aktivitas cabang dan divisi melalui CM Site yang secara digital dapat diakses oleh seluruh karyawan Bank.
- **Agenda Kegiatan**  
Bank memiliki berbagai kegiatan yang bersifat berkala maupun tertentu, diselenggarakan dan dipromotori oleh *Departemen Corporate Communication* yang mengelola alur kegiatan setiap event dari awal hingga akhir. Di mana event yang diselenggarakan dihadiri oleh internal karyawan Bank maupun pihak eksternal seperti pemegang saham dan nasabah. Event-event yang dilaksanakan oleh Internal Komunikasi yang berlangsung selama tahun 2021 diantaranya:

## Internal Communication

As internal stakeholders who are directly related to the Bank's performance, employees have the right to obtain comprehensive information related to the Bank's performance and progress. Following are some channels that are used by the Bank to convey information to employees and other internal parties.

- **CM Site (Corporate Management Site)**  
In carrying out activities related to internal communication, the Bank has disseminated information relating to the activities carried out including the programs, management policies, branch and division activities through the CM Site that can be digitally accessed by all Bank employees.
- **Agenda of Activities**  
The Bank has various activities that are periodic or certain, organized by Corporate Communication and related divisions that manage the flow of activities of each event from beginning to end. Where the event is held, attended by internal Bank employees and external parties such as shareholders and customers. Events carried out by BWS' internal that will take place during 2021 include:

Tempat dan Tanggal Place and Date	Tema Kegiatan Theme of Activity
Jakarta, 22 Januari 2021 Jakarta, January 22, 2021	BWS Business Strategic Meeting 2021 "Digital First, To The Next Level"
Jakarta, 30 Maret 2021 Jakarta, March 30, 2021	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 BWS BWS Annual GMS in 2021
Jakarta, 14 Juli 2021 Jakarta, July 14, 2021	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BWS Th 2021 BWS Extraordinary GMS in 2021
Jakarta, 25 November 2021 Jakarta, November 25, 2021	Penandatanganan kerjasama antara BWS dengan Chubb Life Insurance Signed MoU between BWS and Chubb Life Insurance

## Komunikasi Eksternal

Departemen Komunikasi Eksternal berfungsi untuk memastikan komunikasi Bank dengan pihak eksternal berjalan dengan baik sehingga meningkatkan reputasi dan citra korporat Bank. Berikut adalah tugas dari Departemen Komunikasi Eksternal antara lain:

- **Media Internet**  
Media internet yang digunakan adalah situs web dengan alamat [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com) yang dapat diakses pengguna jaringan internet. Situs ini menyajikan beragam informasi Bank seperti produk dan layanan, laporan keuangan, jaringan, dan berita.
- **Media Sosial**  
Bank juga memperhatikan perkembangan media sosial sebagai fasilitas komunikasi interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Bank membuka kanal komunikasi daring melalui Facebook, Instagram dan YouTube.



@bankbws



Bank Woori Saudara



BWS Official

- **Media Monitoring & Analisis**  
Untuk memberikan informasi terkait dengan berbagai macam pemberitaan di media massa baik itu pemberitaan mengenai Bank ataupun lingkup hal yang berkaitan dengan Bank. *Media monitoring* berperan bagi Internal Bank dalam mengetahui seputar informasi atau kegiatan yang sedang hangat seperti halnya Kenaikan pemberitaan *signing* MOU, *merger* bank, dana pensiun, dan lainnya. Media monitoring juga berperan dalam perhitungan *PR Value* dan *Advertorial value* dimana setiap kegiatan tersebut akan diliput oleh media cetak maupun elektronik yang pemberitaan Bank telah diekspos.
- **Media Relation**  
Dalam rangka membangun kerjasama yang baik dengan pihak media, Departemen Komunikasi Eksternal mempunyai tugas untuk bagian *Media Relations* agar menjaga hubungan baik antara Bank dengan wartawan media. Sepanjang tahun 2021 komunikasi eksternal melakukan serangkaian kegiatan mengundang wartawan dalam acara *Public Expose* untuk kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di bulan Juli 2021.

## External Communication

The External Communication Department functions to ensure that the Bank's communication with external parties runs well, thereby enhancing the Bank's reputation and corporate image. The following are the tasks of the External Communications Department, including:

- **Internet Media**  
Internet media used are websites with the address [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com) which can be accessed by internet network users. This site presents a variety of Bank information such as products and services, financial reports, networks, and news.
- **Social Media**  
The Bank also pays attention to the development of social media as a communication facility for interaction with all stakeholders. To that end, the Bank opens online communication channels through Facebook, Instagram and YouTube.

- **Media Monitoring & Analysis**  
To provide information related to various kinds of news in the mass media both news about the Bank or the scope of matters relating to the Bank. *Media monitoring* plays a role for the Internal Bank in knowing about information or activities that are hot like the increase in the signing of MOU signing, bank mergers, pension funds, and others. *Media monitoring* also plays a role in calculating *PR Value* and *Advertorial Value* where each of these activities will be covered by print and electronic media which the Bank's news has been exposed.
- **Media Relations**  
In order to establish good cooperation with the media, the External Communication Department has the task of the *Media Relations* department to maintain good relations between the Bank and media reporters. Throughout 2021 external communications carried out a series of activities inviting journalists to *Public Expose* event for the 2021 Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders in July 2021.

• Publikasi dan Iklan

Publikasi dilakukan oleh Komunikasi Eksternal dalam penyebaran informasi baik berupa iklan produk atau keterbukaan informasi yang harus dipublikasikan menggunakan media cetak dan elektronik. Sasaran penyebaran informasi yaitu kepada masyarakat umum dengan komunikasi yang disampaikan berupa publikasi cetak dan elektronik sebagai alat promosi kepada masyarakat. Penyampaian informasi dengan media tersebut dapat berupa iklan cetak koran selama tahun 2021.

• *Publication and Advertisement*

*Publication is carried out by External Communications in the dissemination of information in the form of product advertisements or information disclosure that must be published using print and electronic media. The goal of disseminating information is to the general public by communicating in the form of printed and electronic publications as a promotional tool to the public. Submission of information with the media can be in the form of newspaper print advertisements during 2021.*

### Eksposur Media Tahun 2021

*Media Exposures in 2021*

Tanggal Terbit <i>Date of issue</i>	Nama Media <i>Media Name</i>	Judul Artikel <i>Article Title</i>
31 Maret 2021 <i>March 31, 2021</i>	Koran Media Indonesia	Bank Woori Resmi Sandang BUKU III <i>Bank Woori Officially Becomes BUKU III</i>
30 Maret 2021 <i>March 30, 2021</i>	Infobanknews.com	Di Tengah Pandemi, BWS Naik Kelas ke Buku III <i>Amid the Pandemic, BWS Upgrades to Buku III</i>
30 Maret 2021 <i>March 30, 2021</i>	Infobanknews.com	RUPST BWS, Angkat Hwang Gyusoon Jadi Presiden Direktur <i>BWS Annual GMS, Appointed Hwang Gyusoon as President Director</i>
30 Maret 2021 <i>March 30, 2021</i>	Kontan.co.id	Bank Woori Saudara (SDRA) Bidik Pertumbuhan Kredit 10,84% di 2021 <i>Bank Woori Saudara (SDRA) Target 10.84% Loan Growth in 2021</i>
30 Maret 2021 <i>March 30, 2021</i>	Kontan.co.id	Masuk kelompok BUKU III, Begini Strategi Bank Woori Saudara (SDRA) di 2021 <i>Becomes BUKU III Group, This is Bank Woori Saudara (SDRA) Strategy in 2021</i>
30 Maret 2021 <i>March 30, 2021</i>	Investor.id	BWS Naik Kelas ke BUKU III di Tengah Pandemi <i>BWS Upgrades to BUKU III Amids of Pandemic</i>
30 Maret 2021 <i>March 30, 2021</i>	Sindonews.com	Dihantam Pandemi, BWS Sukses Raup Laba hingga Masuk Buku III <i>Hiting by Pandemic, BWS Managed to Earn Profits and Becomes Buku III</i>
28 Oktober 2021 <i>October 28, 2021</i>	Mediaindonesia.com	Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2021, BWS Kampanyekan Inklusi Keuangan <i>Support the Financial Inclusion Month 2021, BWS Campaigns for Financial Inclusion</i>
29 Oktober 2021 <i>October 29, 2021</i>	Sindonews.com	BWS Kampanye Inklusi Keuangan Melalui Webinar di Daerah <i>BWS Campaigns for Financial Inclusion in the Regions Through Webinars</i>
29 Oktober 2021 <i>October 29, 2021</i>	Investor.id	Sambut BIK 2021, BWS Gelar Webinar Inklusi Keuangan <i>Welcoming BIK 2021, BWS Holds Financial Inclusion Webinar</i>

- Media Luar Ruang  
Selain melalui media internet, cetak, elektronik, Bank juga menggunakan media luar ruang sebagai sarana penyampaian informasi dan bentuk promosi berupa iklan Billboard terpasang di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Radio Dalam yang beralamat di Jl. Radio Dalam No. 4, Kel. Gandaria Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.



- Outdoor Media  
In addition to using the internet, print, electronic media, the Bank also uses outdoor media as a means of delivering information and forms of promotion in Billboard advertisement which is installed at Radio Dalam Sub-Branch Office (KCP) which is located at Jl. Radio Dalam No. 4, Gandaria, Kebayoran Baru, South Jakarta.



- Korespondensi  
Sepanjang tahun 2021 Bank telah melaksanakan korespondensi terkait keterbukaan informasi kepada berbagai pihak. Penyampaian transparansi laporan adalah sebagai berikut:

- Correspondence  
Throughout 2021 the Bank has conducted correspondence related to the disclosure of information to various parties. Submission of report transparency is as follows:

### Korespondensi Kepada OJK

Correspondence with OJK

Perihal Subject	Frekuensi Frequency
Laporan Umum Pemegang Saham Bulanan Shareholder Monthly Report	12 kali 12 times
Laporan Perubahan Pengurus Report on Management Change	2 kali 2 times
Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya Request for Issuers and Other Public Companies Explanations	12 kali 12 times
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Terbuka Report of share ownership or each changes in share ownership for public companies	10 kali 10 times
Laporan Akuntan Publik Independen atas PUT III Independent Public Accountant Report on LPO III	2 kali 2 times



Perihal Subject	Frekuensi Frequency
Laporan Informasi atau Fakta Material <i>Report of Material Information or Facts</i>	10 kali 10 times
Laporan Penjatahan Penawaran Umum Terbatas <i>Scheduling Report of Limited Public Offering</i>	2 kali 2 times
Keterbukaan Informasi Terkait Aksi Korporasi <i>Information Disclosure Related to Corporate Action</i>	3 kali 3 times
Pelaporan terkait penyelenggaraan kegiatan RUPS <i>Report related to the GMS Implementation</i>	17 kali 17 times
Informasi Hutang atau Pinjaman Dalam Valuta Asing <i>Information on Debt or Loans in Foreign Exchange</i>	1 kali 1 times
Laporan terkait penyelenggaraan Public Expose <i>Report related to Public Expose</i>	4 kali 4 times
Penyampaian Laporan Tahunan <i>Submission of Annual Report</i>	2 kali 2 times

## Pengelolaan Informasi

Bank memastikan sifat data, informasi, dan pengetahuan organisasi sebagai berikut:

- Untuk memastikan keakuratan data dan informasi, BWS menggunakan *software* aplikasi dan penunjukkan penanggungjawab unit yang bertugas menjaga keakuratan data dan informasi di unit masing-masing.
- Untuk memastikan integritas dan reliabilitas berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja.
- Untuk memastikan data dan informasi tepat waktu, dilakukan dengan cara bagian keuangan *me-review* ketepatan data informasi dan juga dilakukan *internal assessment* dan audit IT setiap tahunnya.
- Untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, maka di buat *username*, *password* dan anti virus di jaringan dalam mengakses ke jaringan LAN BWS.

## Ketersediaan Data dan Akses Informasi bagi Investor

Bank membuat ketersediaan data dan informasi berdasarkan data center yang dapat diakses oleh setiap karyawan. Bank juga menyediakan data dan informasi melalui situs web, webmail yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait misalnya pelanggan, mitra, dan umum.

## Information Management

The Bank ensures the nature of the organization's data, information and knowledge as follows:

- To ensure the accuracy of data and information, BWS uses application software and the appointment of a person in charge of the unit responsible for maintaining the accuracy of the data and information in each unit.
- To ensure integrity and reliability based on the results of verification carried out by each work unit.
- To ensure timely data and information, the financial department reviews the accuracy of information data and also conducts an internal IT assessment and audit annually.
- To ensure the security and confidentiality of data and information, a user name, password and anti-virus are made in the network to access the BWS LAN network.

## Data Availability and Information Access

The Bank makes the availability of data and information based on a data center that can be accessed by every employee. The Bank also provides data and information through a website, webmail that can be accessed by related parties such as customers, partners, and the public.

Bank berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan, untuk itu Bank selalu menyampaikan informasi melalui situs web Bank, yaitu [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com). Selain itu, Bank juga menyampaikan perkembangan dan kemajuan mengenai Informasi Material dan Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik secara teratur kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, seperti yang telah disampaikan di atas.

*The Bank is committed to implementing the principle of openness, therefore the Bank always submits information through the Bank's website, namely [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com). In addition, the Bank also conveys developments and progress regarding Material Information and Information Disclosure that Needs to Be Publicly Known to the Indonesian Stock Exchange regularly and The Otoritas Jasa Keuangan is in accordance with the applicable capital market regulations, as stated above.*

#### **Kontak Relasi Investor**

Sadhana Priatmadja  
Sekretaris Perusahaan  
Telepon : +6221 5087 1906  
Email : [saudara@bankwoorisaudara.com](mailto:saudara@bankwoorisaudara.com)  
Alamat : Treasury Tower Lantai 26 dan 27  
District 8 SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

#### **Contact Investor Relations**

Sadhana Priatmadja  
Corporate Secretary  
Phone : +6221 5087 1906  
Email : [saudara@bankwoorisaudara.com](mailto:saudara@bankwoorisaudara.com)  
Address : Treasury Tower 26<sup>th</sup> and 27<sup>th</sup> floor  
District 8 SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

#### **Ragam Media Bank Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan**

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Bank untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Bank.

#### **Variety of Bank Media to Shareholders and Stakeholders**

*Below is a table that illustrates the various communication media used by the Bank to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements achieved by the Bank.*

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk-bentuk Media Media Forms
Regulator <i>Regulator</i>	Aplikasi spe.ojk.go.id/idxnet, surat menyurat (termasuk surat elektronik) <i>Application spe.ojk.go.id/idxnet, email, correspondence (include electronic mail)</i>
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Surat-menyurat (termasuk surat elektronik) <i>Correspondence</i>
Investor <i>Investor</i>	Surat menyurat dan berita koran <i>Correspondence and newspaper news</i>
Lembaga Publik <i>Public Institution</i>	Surat menyurat , termasuk surat elektronik <i>Correspondence &amp; email</i>
Konsumen <i>Consumer</i>	SMS Blast, email blast, brosur <i>SMS Blast, email blast, brochure</i>
Karyawan <i>Employee</i>	Situs web internal (CM Site), Internal Memo, dan email <i>Internal Website (CM Site), Internal Memos &amp; emails</i>
Perusahaan Sejenis Lainnya <i>Other Similar Companies</i>	Surat menyurat , termasuk surat elektronik <i>Correspondence &amp; email</i>
Mitra Kerja dan Rekanan <i>Partners and Partners</i>	Surat menyurat , termasuk surat elektronik <i>Correspondence &amp; email</i>
Organisasi Profesi <i>Professional Organization</i>	Surat menyurat , termasuk surat elektronik <i>Correspondence &amp; email</i>
Masyarakat/Umum <i>General Public</i>	Flyer, Brosur <i>Flyers, Brochures</i>

\* Situs web Bank tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

\* *The Bank's website is not included in the various media above, because it is open, unlimited and can be accessed by anyone.*



## Audit Internal

### Internal Audit

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dengan Sistem Pengendalian Intern Bank turut berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan. SKAI berperan dalam memberikan keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan operasional, akuntansi, manajemen risiko dan kegiatan Bank lainnya telah terselenggara dengan baik dan mampu menjamin kepentingan Bank serta *stakeholder*.

Untuk itu, pelaksanaan audit intern harus didukung oleh tenaga auditor yang independen dan berkompeten, khususnya dalam praktik dan penerapan penilaian risiko dengan jumlah tenaga auditor yang memadai. Pada tahun 2021, personil SKAI telah menjalani sertifikasi auditor dengan harapan SKAI dapat terus meningkatkan kapabilitas fungsi audit intern berikut kompetensi baik *technical* maupun *behavior*. Selain itu, setiap awal tahun juga diselenggarakan *workshop* SKAI untuk mengoptimalkan peran dan fungsi sebagai auditor.

Pada dasarnya, dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup tugasnya, SKAI berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dengan melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Penyusunan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang ditandatangani Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris telah dilakukan revisi keempat yang efektif berlaku tanggal yang efektif berlaku tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Pembentukan Fungsi Satuan Kerja Audit Intern sesuai Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Unit Audit Internal

Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

*The Internal Audit as one of the parties concerned with the Bank's Internal Control System plays an active role in increasing the effectiveness of the Internal Control System on an ongoing basis. The Internal Audit Unit has a role in providing confidence based on the results of the examination that internal control and implementation of operational, accounting, risk management and other Bank activities have been carried out properly and are able to guarantee the interests of the Bank and its stakeholders.*

*Therefore, internal audit must be supported by independent and competent auditors, particularly in the practice and application of risk assessments with an adequate number of auditors. In 2021, Internal Audit personnel have undergone auditor certification in the hope that Internal Audit can continue to improve the capabilities of the internal audit function along with technical and behavioral competencies. In addition, the Internal Audit conducts workshop every year to optimize the role and function as an auditor.*

*Generally, in determining the position, authorities, responsibilities, professionalism, organization, and scope of tasks, Internal Audit guided to the prevailing OJK Regulation by conducting the following activities:*

1. *The preparation of Internal Audit Charter signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners has been conducted for the fourth revision effective on May 27, 2019, in accordance with the OJK Regulation No.56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for the Drafting of Charter for internal audit units and OJK Regulation No.1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks.*
2. *Establishment of Internal Audit Task Force Function in accordance with the OJK Regulation No.1/POJK.03/2019 concerning Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.*

### Appointment and Dismissal of Internal Audit Unit Head

*The Internal Audit Division Head is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to OJK.*

## Kepala Unit Audit Internal

Kepala Unit Audit Internal Bank dijabat oleh Galura Wibhawa Bratawijaya yang diangkat pada tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 045/KEP-DIR.HC-II/VIII/2021 dan efektif pada 23 Agustus 2021.

## Internal Audit Unit Head

The Bank's Internal Audit Unit Head is held by Galura Wibhawa Bratawijaya who was appointed on August 20, 2021 based on the Decree of the President Director No. 045/KEP-DIR.HC-II/VIII/2021 and effective on August 23, 2021.

**Galura Wibhawa Bratawijaya**  
Kepala Divisi Audit Internal / Internal Audit Division Head  
Efektif Menjabat sejak 23 Agustus 2021 / Served since August 23, 2021

### Data Pribadi

Warga Negara Indonesia  
Usia 39 tahun  
Kelahiran Stockholm, 1 April 1982

### Personal Data

Indonesia citizen  
39 years old  
Born in Stockholm April 1, 1982

### Domisili

Tangerang, Banten, Indonesia

### Domicile

Tangerang, Banten, Indonesia

### Pendidikan

Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran (2005)

### Education

Bachelor of Economic from Padjajaran University (2005)

### Pengalaman Kerja

Kepala Divisi Audit Internal (2021 s.d saat ini)  
Kepala Divisi Loan Review (2019-2021)  
Team Leader Kredit Manajemen 1 (2017-2019)  
Kepala Departemen Kredit Wholesale – AN & APP.I (2014-2017)  
Manager (2012-2014)  
Senior Officer (2009-2011)

### Career Path

Internal Audit Division Head (2021 to the day)  
Loan Review Division Head (2019-2021)  
Team Leader of Management Loan (2017-2019)  
Wholesale Loan Department Head - AN & APP.I (2014-2017)  
Manager (2012-2014)  
Senior Officer (2009-2011)

### Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (2015)  
Serifikasi Audit Level 2 (2021)  
Anti Fraud Certification (2021)

### Applicable Education and/or Professional Certification

Risk Management Certification Level 3 (2015)  
Audit Certification Level 2 (2021)  
Anti Fraud Certification (2021)

## Struktur dan Kedudukan Audit Internal

SKAI pertama kali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 180/KEP. DIR/SDM/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang selanjutnya telah mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 055/KEP.DIR/HC.III/X/2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi Direktorat Risiko & Kepatuhan, Direktorat Konsumer, Direktorat IT dan Jaringan & Operasi dan Direktorat Korporat Kantor Pusat.

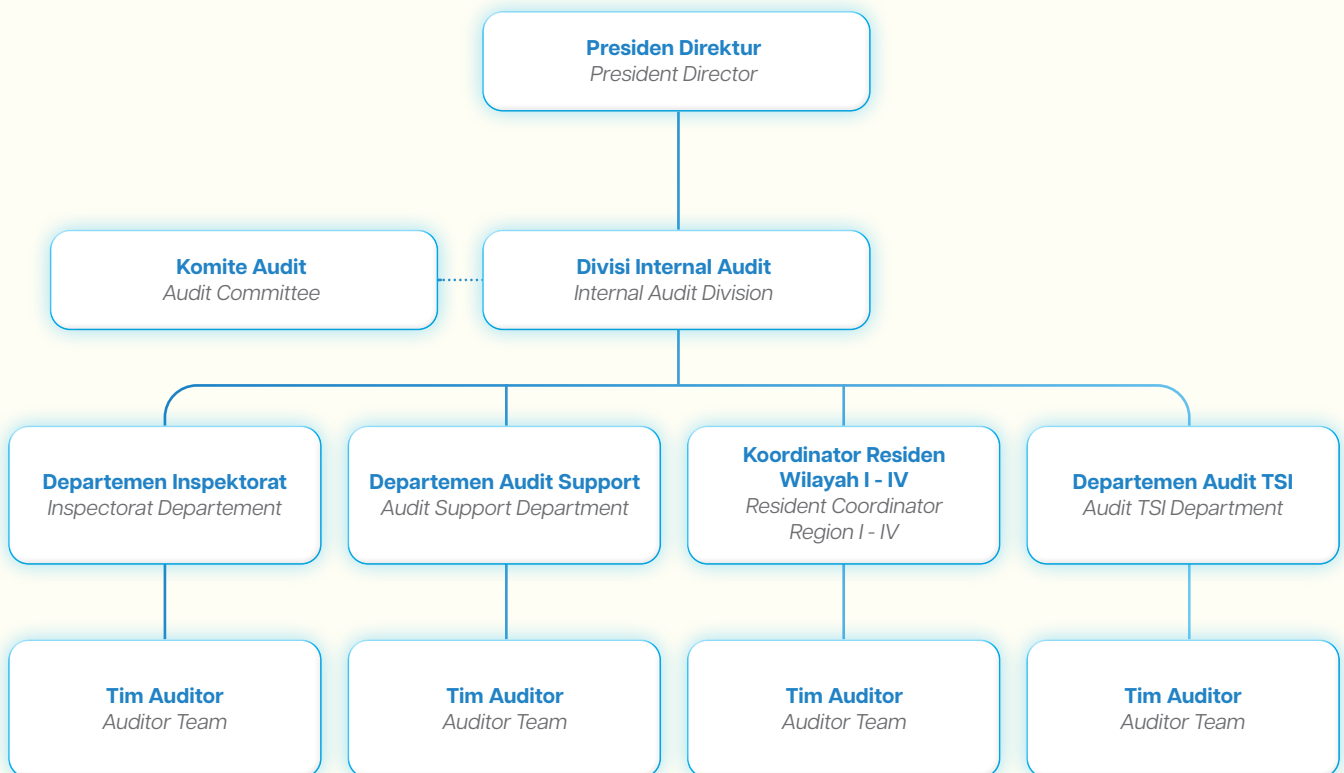
## Structure and Position of Internal Audit

Internal Audit was firstly formed based on Directors Decree of PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk No. 180/KEP.DIR/SDM/X/2006 date October 16, 2006, and has revised for several times and adjustmen in line with the Letter Decision of Directors Number 055/KEP.DIR/HC.III/X/2021 regarding The Change of Structural Organization of Risk & Compliance Directorate, Consumers Directorate, IT and Network & Operations Directorate and Corporate Directorate of Head Office.



Berikut adalah struktur dan kedudukan SKAI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi di atas.

The following is the structure and position of Internal Audit according to the Decision Letter of the Board of Directors above.



Berdasarkan struktur dan kedudukan SKAI di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Divisi SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
2. Auditor SKAI bertanggung jawab kepada Kepala Divisi SKAI sesuai dengan struktur organisasi SKAI.
3. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah tenaga pemeriksa pada Divisi SKAI adalah 33 orang, termasuk Kepala Divisi dan Kepala Departemen.

### Kualifikasi Auditor Internal

Bank mendorong SKAI untuk memiliki sertifikasi profesi yang diharapkan mampu memberikan fondasi bagi pengembangan audit internal yang sesuai dengan yang diharapkan. Per 31 Desember 2021, kualifikasi Auditor Internal Bank dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Based on the structure and position of Internal Audit above, it can be described that:

1. Internal Audit Division Head is responsible directly to the President Director.
2. The auditor of Internal Audit is responsible to Internal Audit Division Head regarding the Internal Audit's structural organization.
3. On December 31, 2021, the number of inspectors on the Internal Audit Division were 33 persons, including The Division Head and Department Head.

### Internal Auditor Qualification

Bank encourages Internal Audit to have professional certification which is expected to be able to provide a foundation for the development of internal audits that are as expected. As of December 31, 2021, the qualifications of the Bank's Internal Auditors can be seen in the table below.

Nama dan Jenis Sertifikasi Name and Type of Certification	Jumlah Auditor Internal yang Memiliki Number of Certification Recipients
Sertifikasi Auditor Auditor Certification	21
Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	32
Certified Information Systems Auditor (CISA)	2
Anti Fraud Certification	1

## Piagam Audit Internal

Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang telah ditandatangani Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris, yang terakhir diperbarui pada Mei 2019. Piagam Audit Internal disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank, dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit internal atas pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan auditee pada Bank, pemeriksaan aktivitas Bank dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.

Piagam Audit Internal BWS mencakup:

- Visi, Misi, dan Fungsi dari Audit Internal
- Struktur dan Kedudukan Audit Internal
- Tugas dan Tanggung Jawab serta hubungan dengan unit kerja lain yang melakukan fungsi pengendalian intern
- Wewenang Satuan Kerja Audit Internal
- Kode Etik Audit Intern (kompetensi, independensi, objektivitas, integritas, kerahasiaan)
- Persyaratan Auditor Intern
- Pertanggungjawaban Divisi Audit Internal
- Ketentuan Rangkap Tugas dan Jabatan
- Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern
- Independensi terkait layanan konsultasi atau tugas khusus lain
- Tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala Divisi Audit Internal
- Persyaratan mematuhi standar profesional audit intern
- Koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern

## Internal Audit Charter

*In carrying out its duties, Internal Audit is guided by the Internal Audit Charter which was signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners on May, 2019. The Internal Audit Charter was compiled based on the OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter and OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Banks, with the purpose is to guide the implementation of the internal audit function for conducting audits, initiating communication with the auditee at the Bank, checking the Bank's activities and the authority to access records, documents, data and physical assets of the Bank, including information management systems and minutes of management meetings.*

*BWS Internal Audit Charter includes:*

- *Vision, Mission, and Function of Internal Audit*
- *Internal Audit Structure and Position*
- *Duties and responsibilities, and also relationships with other units that perform internal control functions*
- *Authority of the Internal Audit Division*
- *Internal Audit Code of Ethics (competence, independence, objectivity, integrity, confidentiality)*
- *Internal Auditor Requirements*
- *Accountability of the Internal Audit Division*
- *Terms of Dual Duties and Positions*
- *Criteria for the use of external experts in supporting the internal audit function*
- *Independence regarding consulting services or other special tasks*
- *Responsibility and accountability of the Head of the Internal Audit Division*
- *Requirements to comply with professional internal audit standards*
- *Coordination of internal audit functions with legal experts or external auditors*

- Kebijakan pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling off period*)
- Pengendalian mutu

- *Policy on assignment restrictions and waiting periods (cooling off period)*
- *Quality Control*

### Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup kerja audit internal mencakup seluruh kegiatan operasional Bank. Unit Audit Internal melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi terhadap unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG.

### Internal Audit Scope

*The scope of work of internal audit covers all operational activities of the Bank. The Internal Audit Unit carries out audit activities and provides consultations to work units in the Head Office and Branch Offices to ensure the adequacy and effectiveness of internal control, risk management and GCG.*

### Metode Audit

Bank menerapkan metodologi *Risk Based Internal Audit* (RBIA) dengan pendekatan proses bisnis. Dimana RBIA tersebut diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat. Dengan metodologi tersebut, maka proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan usaha lebih diprioritaskan untuk diaudit, sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan.

### Audit Method

*The Bank applies a Risk Based Internal Audit (RBIA) methodology with a business process approach. Where the RBIA is implemented in stages in accordance with the level of corporate risk management maturity. With this methodology, business processes and business units that are estimated to have significant risks in achieving business objectives are prioritized for auditing, so it can be believed that all potential risks can be minimized in accordance with established risk tolerance.*

### Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Tugas utama Satuan Kerja Audit Internal sebagai berikut:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen termasuk perbaikan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
- Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan.
- Satuan Kerja Audit Internal bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan dan mengembangkan fungsi pengendalian pada Bank. Fungsi pengendalian dilaksanakan dengan konsep pertahanan atau lini, yaitu:
  - » Lini pertahanan pertama (*first line*) yaitu pengawasan melekat pada unit bisnis yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bisnis.

### Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

*The main tasks of Internal Audit Unit are as follows:*

- *Assisting the duties of President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by outlining operational aspects both planning, implementation and monitoring of audit results.*
- *Providing an analysis and assessment in the fields of finance, accounting, operations, and other activities through auditing.*
- *Identify all possibilities to improve and improve the efficient use of resources and funds.*
- *Provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management including repairs to ensure that similar incidents do not recur.*
- *Carry out checks and evaluations of activities.*
- *The Internal Audit Division cooperates with work units that carry out and develop control functions at the Bank. The control function is carried out with the concept of defense or line, namely:*
  - » *First line of defense, namely supervision attached to the business unit responsible for identifying, assessing and controlling business risk.*

- » Lini pertahanan kedua (*second line*) mencakup fungsi pendukung yaitu manajemen risiko dan kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.
- » Lini pertahanan ketiga (*third line*) yaitu Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif.

- » *The second line of defense, includes supporting functions, namely risk management and compliance, which is responsible for ensuring that risks in the business unit are properly identified and managed.*
- » *The third line of defense, namely the Internal Audit Division which is responsible for assessing the effectiveness of the processes carried out in the first line of defense and the second line of defense to provide independent assurance to the Bank that the system of internal control, risk management, and governance processes and systems have been implemented effectively.*

### Program Peningkatan Kompetensi

Bank memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi SKAI, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank. Berikut adalah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh SKAI sepanjang tahun 2021.

### Competency Development Program

*The Bank has policies related to the development and improvement of Internal Audit competencies, which are carried out through various training and education programs with funding entirely the responsibility of the Bank. Following are the floating and training programs that were followed by Internal Audit throughout 2021.*

Nama Pelatihan <i>Training Name</i>	Peserta <i>Participants</i>	Waktu <i>Time</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Kompetensi, Satuan Pengawas Internal Dalam Mencegah Penyalahgunaan Aset dan Laporan Keuangan <i>Internal Audit Unit Competency in preventing Abuse Assets and Financial Statements</i>	1	25 Februari 2021 <i>February 25, 2021</i>	LPSI
IRRBB <i>IRRBB</i>	3	8-9 Maret 2021 <i>March 8-9, 2021</i>	Mahaka Institute
Fraud Risk Management <i>Fraud Risk Management</i>	1	10 Maret 2021 <i>March 19, 2021</i>	Risk Corner Consulting
Refreshment Sertifikasi Audit <i>Refreshment Sertifikasi Audit</i>	1	19 Maret 2021 <i>March 19, 2021</i>	IAIB
FGD Take Over Kredit <i>FGD Take Over Kredit</i>	1	8 April 2021 <i>April 8, 2021</i>	BWS
Certified Information Systems Auditor (CISA) <i>Certified Information Systems Auditor (CISA)</i>	1	12-15 April 2021 <i>April 12-15, 2021</i>	Brain Matics
Risk Manajemen Certification Lv 1 <i>Risk Manajemen Certification Lv 1</i>	1	5 Juni 2021 <i>June 5, 2021</i>	Efektifpro
Digital Banking Knowledge & Awareness <i>Digital Banking Knowledge &amp; Awareness</i>	34	25-29 Juni 2021 <i>June 25-29, 2021</i>	BWS
Tindak Pidana Perbankan <i>Banking Crime</i>	1	26 Juni 2021 <i>June 26, 2021</i>	MEG
Sertifikasi Audit Lv 2 <i>Audit Certification Lv 2</i>	6	3-4 Juli 2021 <i>July 3-4, 2021</i>	Efektifpro
Refreshment CISA Certification <i>Refreshment CISA Certification</i>	1	13-14 Juli 2021 <i>July 13-14, 2021</i>	CISA
Sertifikasi Audit Lv 1 <i>Audit Certification Lv 1</i>	13	10-11 Juli 2021 <i>July 10-11, 2021</i>	Efektifpro
Risk Management Refreshment Program <i>Risk Management Refreshment Program</i>	9	31 Juli 2021 <i>July 31, 2021</i>	Efektifpro

Nama Pelatihan Training Name	Peserta Participants	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Risk Manajemen Certification Lv 2 <i>Risk Management Certification Lv 2</i>	1	28-29 Agustus 2021 <i>August 28-29, 2021</i>	Efektifpro
Sosialisasi Ketentuan Bank Umum dengan OJK <i>Socialization on Commercial Bank Provisions with OJK</i>	1	1-2 September 2021 <i>September 1-2, 2021</i>	OJK
Pengendalian Gratifikasi-Sesi 1 <i>Gratification Control - Session 1</i>	1	9 September 2021 <i>September 9, 2021</i>	Mahardika Gemilang
Pengendalian Gratifikasi-Sesi 2 <i>Gratification Control - Session 2</i>	1	17 September 2021 <i>September 17, 2021</i>	Adnan Pandu Praja
Anti Fraud Certification <i>Anti Fraud Certification</i>	1	27-28 September 2021 <i>September 27-28, 2021</i>	AAIJ
Trade Finance-Product, Peraturan, Operasional & Proses Audit <i>Trade Finance-Product, Regulation, Operational &amp; Audit Process</i>	6	27-28 September 2021 <i>September 27-28, 2021</i>	IAIB
Antifraud Awareness & Sanction <i>Antifraud Awareness &amp; Sanction</i>	34	6 Oktober - 23 November 2021 <i>October 6 - November 23, 2021</i>	BWS
Effective Coaching Skill <i>Effective Coaching Skill</i>	23	23 November - 6 Desember 2021 <i>November 23 - December 6, 2021</i>	BWS

### Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Audit Internal Tahun 2021

Kegiatan audit internal yang dilakukan Bank sepanjang tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian secara sistematis dan objektif terhadap efektivitas dan efisiensi serta kontrol yang ada dalam perusahaan untuk menjamin keakuratan dan kebenaran informasi keuangan dan operasi.
2. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam Standar Operasional Perusahaan (SOP).
3. Memastikan bahwa perusahaan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti dengan benar dan efektif.
4. Membuat laporan hasil temuan audit dan rekomendasi perbaikan ke depan serta menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
5. Memantau, menganalisa dan melaporkan kepada Direktur Utama tentang pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan kepada manajemen unit operasional. Hal ini demi tercapainya peningkatan tujuan perusahaan.
6. Melakukan pemeriksaan (audit) khusus apabila diperlukan atau sesuai dengan permintaan Direktur Utama, Komisaris Utama, dan atau Komite Audit.

### Brief Report on the Implementation of Duties and Activities Internal Audit in 2021

Internal audit activities conducted by the Bank throughout 2021 can be described as follows:

1. Conduct a systematic and objective assessment of the effectiveness and efficiency as well as existing controls in the company to ensure the accuracy and correctness of financial and operating information.
2. Evaluating the implementation of internal control in accordance with company policy in the SOP.
3. Ensure that external companies and acceptable internal policies and procedures are correctly and effectively complied.
4. Make a report on the audit findings and recommendations for future improvements to deliver the report to the President Director and the Board of Commissioners.
5. Monitor, analyze and report to the President Director regarding the implementation of the follow-up improvements that have been suggested to the operational unit management. This is in order to achieve the company's goals.
6. Perform special audits if necessary or in accordance with the request of the President Director, the President Commissioner, and or the Audit Committee.



Pada tahun 2021, Divisi Satuan Kerja Audit Internal telah melaksanakan audit operasional dengan rencana kerja audit dengan mengacu pada Peraturan Perusahaan dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Laporan hasil audit beserta rekomendasi perbaikannya telah disampaikan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan unit bisnis/unit kerja yang di audit yang selanjutnya dikomunikasikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

*In 2021, the Internal Audit Division has carried out operational audits with audit work plans which refers to the Company's Regulations and Standards Operating Procedures (SOPs). Audit result report along with recommendations for improvement have been submitted to the President Directors, Board of Commissioners through Audit Committee and audited business units/work unit which is then communicated to be followed up properly*

Laporan hasil kegiatan Satuan Kerja Audit Internal disampaikan langsung kepada Direktur Utama yang selanjutnya akan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit serta auditee untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Ketua Komite Audit akan melakukan peninjauan secara berkala terhadap laporan dan kegiatan Audit Internal untuk memastikan terpenuhinya standar mutu audit dan memonitor efektivitas atas tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi Audit Internal.

*Internal Audit Report is directly submitted to the President Director then will be communicated to Board of Commissioners and Audit Committee and auditees to be followed up appropriately. The Chairman of Audit Committee will conduct an entire review in periodic on Internal Audit reports and activities to ensure appropriateness of audit quality standards and monitor the effectiveness of follow-up on Internal Audit findings and recommendations.*

Audit Internal berperan sebagai konsultan internal yang berperan sebagai mitra manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, audit internal perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap nilai tambahan perusahaan.

*Internal Audit acts as an internal consultant whoplay a role as a management partner in improving the company's performance. Thus, the company's internal audit may contribute to the company's added value.*

Kegiatan audit tahun 2021 pada dasarnya dapat berjalan sesuai dengan digariskan dalam rencana kerja dengan beberapa penyesuaian waktu sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan di bawah Supervisi Kepala Departemen dan Koordinator audit Residen per Wilayah meliputi :

*Basically, the audit activities in 2021 can proceed according to work plan with several adjustment of time and development of conditions in the field under the Supervision of Department Head and Resident audit coordinators per Region include*

No	Aktivitas Activities	Plan Plan	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Remarks Remarks
1	Audit Umum oleh Audit Inspektorat *) <i>General Audit by Inspectorate Audit *)</i>	19	15	79%	Rencana Audit tidak terealisasi dikarenakan pembatasan perjalanan bisnis (pencegahan COVID-19) <i>The Audit Plan was not realized due to business trip restrictions (COVID-19 prevention)</i>
2	Telaahan wajib BI-SKN & RTGS Next G & KPDHN & Telaahan wajib BI-ETP & SSSS Next G *) <i>Review Mandatory BI-SKN &amp; RTGS Next G &amp; KPDHN &amp; Review Mandatory BI-ETP &amp; SSSS Next G *)</i>	1	1	100%	Wajib dari Regulator <i>Mandatory regulator</i>
3	Tinjauan Divisi Strategi & Manajemen TI (termasuk tinjauan setelah implementasi WGSS*) <i>Review of IT Strategy &amp; Management Division (includes review of post WGSS implementation) *)</i>	1	1	100%	Wajib dari Regulator <i>Mandatory regulator</i>
4	Pemeriksaan Aplikasi IT di Unit Bisnis, Review DRC, Audit Keamanan Sistem Pembayaran, Audit SLIK, Sistem Pembayaran Kartu *) <i>Examination of IT Application in Business Units, Review DRC, Security Audit of Payment System, SLIK Audit, Card Payment System *)</i>	12	9	75%	Rencana Audit tidak terealisasi dikarenakan pembatasan perjalanan bisnis (pencegahan COVID19) - khususnya pemeriksaan aplikasi TI di unit bisnis <i>The Audit Plan was not realized due to business trip restrictions (COVID-19 prevention) - especially for examintaion of IT application in business unit</i>
5	Audit Khusus/Tematik *) <i>Special/Thematic Audit *)</i>	11	11	100%	

No	Aktivitas Activities	Plan Plan	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Remarks Remarks
6	Audit/Investigasi Khusus *) Special Audit/Investigation *)	-	20	100%	Audit yang tidak terencana/penugasan khusus (Audit TI:3 Pemeriksaan, Audit Inspektorat:7 pemeriksaan, dan Audit Residen : 10 pemeriksaan) Unplanned audit/special assignment (IT Audit:3 examinations, Inspectorate Audit:7 examinations, and Resident Audit : 10 examinations)
7	Audit tentang cuti wajib *) Audit Mandatory Leave *)	28	37	132%	Dilaksanakan di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu pada bulan Maret sampai Oktober 2021 Carried out (in branch and sub branch) on March to October 2021
8	Audit bulanan oleh Audit Residen *) Monthly Audit by Resident Audit *)	703	706	100%	Audit bulanan (audit onsite/offsite ke unit bisnis) oleh Audit Resident Monthly audit (onsite/offsite audit to business unit) by Resident Audit
9	Audit Harian dan berkesinambungan melalui WGSS oleh Audit Residen Daily & Continuous Audit through WGSS by Resident Audit	100	98.71	99%	Rata-rata harian/audit berkesinambungan (melalui WGSS) oleh audit residen Average daily/continuous audit (through WGSS) by Audit Resident
<b>Pelaporan Wajib ke Regulator</b> Mandatory Regulator Reporting					
1	Pokok-pokok Laporan Hasil Audit di Semester 2 tahun 2020 & Semester 1 tahun 2021 (Wajib OJK) Principles of Audit Results Report for 2020 2nd semester & 2021 1st semester (Mandatory OJK)	2	2	100%	-
2	Laporan BI-RTGS, BI-SSSS, SKN-BI, BI-ETP, DHBI Report of BI-RTGS, BI-SSSS, BI-Clearing System, BI-ETP, BI Blacklist	1	1	100%	-
3	Tinjauan Divisi Strategi & Manajemen TI Review of IT Strategy & Management Division	1	1	100%	-
<b>Lainnya</b> Others					
1	Pelatihan Training	9	14	156%	Pelatihan tambahan sesuai dengan program/ penunjukkan dari Divisi SDM Additional training in accordance with the program/appointment from the HC Division
2	Auditor Certification Sertifikasi Auditor	3	3	100%	-
3	User Acceptance Test Pengujian penerimaan pengguna	-	9	100%	sesuai dengan pengembangan aplikasi BWS according to BWS's application development
4	Sosialisasi Pengendalian Internal dan Kesadaran Fraud Socialization of internal control and fraud awareness	153	153	100%	Conducted by Inspectorate Audit, Resident Audit, and Audit Support during September to December 2021 to all business unit Conducted by Inspectorate Audit, Resident Audit, and Audit Support during September to December 2021 to all business unit
Pencapaian Achievement				102%	

Setiap akhir tahun buku, SKAI melakukan pemeriksaan data dan transaksi beberapa perkiraan/pos laporan keuangan untuk memastikan semua transaksi telah dilakukan sesuai kebijakan yang berlaku. SKAI juga memastikan kebenaran setiap saldo dan transaksi sebelum tutup buku tahun 2021.

At the end of each financial year, Internal Audit checks data and transactions of several estimates/financial statement items to ensure all transactions have been carried out according to applicable policy. Internal Audit also confirms the truth in every balance and transaction before the book closed in 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SKAI, risiko utama yang dihadapi Bank selama pemeriksaan 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

*Based on the Internal Audit examination results, the main risks faced by the Bank during the 2021 examination can be concluded as follows :*

Risiko Kredit	: Pemalsuan dokumen kredit
Risiko Operasional	: Pengelolaan dormant account
Risiko Kepatuhan	: Perbaikan terhadap proses pelaporan kepada regulator

Loan Risk	: Falsification of Loan document
Operational Risk	: Management of dormant account
Compliance Risk	: Improvements on the reporting process to regulator

Dalam menjalankan usahanya, BWS menghadapi berbagai risiko kerugian, termasuk yang ditimbulkan karena *fraud*. Untuk dapat meminimalisir dampak kerugian akibat *fraud*, Bank perlu memiliki dan mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan semakin meningkatnya kasus *fraud* perbankan saat ini, baik skala maupun modus operandinya, BWS telah menyusun strategi anti *fraud* yang komprehensif dan rinci untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik seperti yang tertuang dalam Strategi Anti *Fraud* sesuai SK Dir.No.011/KEP-DIR/A-13/III/20 tanggal 13 Maret 2020.

*In carrying out its business, BWS faced various risk of loss, including by fraud. To minimize the impact of losses due to fraud, the Bank needs to develop a stronger internal control system in accordance with the company's needs. By increasing the number of banking fraud cases, in scale and operating modus, BWS has compiled a comprehensive and detailed anti-fraud strategy to strengthen the internal control system and improve the quality of the Good Corporate Governance implementation as stated in the Anti-Fraud Strategy in accordance with SK Dir.No.011/KEPDIR/A-13/III/20 dated March 13, 2020.*

## Akuntan Publik/Audit Eksternal

Public Accountant / External Audit

Akuntan Publik ditunjuk oleh Pemegang Saham melalui forum RUPS. Oleh RUPS, penunjukan Akuntan Publik dipercayakan kepada Dewan Komisaris yang akan memutuskan berdasarkan usulan dari Direksi dengan alasan dan besarnya kompensasi yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut. Auditor Eksternal harus independen dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris dan pihak yang berkepentingan di Bank. Bank wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi Audit Independen sehingga memungkinkan Audit Independen memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Audit Independen wajib memberitahu Bank bila ada kejadian dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Public Accountant appointed by shareholders through GMS forum. By the GMS, the appointment of a Public Accountant is entrusted to the Board of Commissioners who will decide based on a proposal from the Board of Directors on the grounds and amount of compensation proposed for the External Auditor. The External Auditor must be independent from the influence of the Board of Directors, the Board of Commissioners and interested parties in the Bank. Banks are required to provide all accounting records and supporting data needed for an Independent Audit to enable the Independent Audit to give its opinion on the reasonableness, compliance and suitability of the Bank's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The Independent Audit must notify the Bank if there are incidents in the company that are not in accordance with the applicable laws and regulations.*

## Independensi

Tim Audit yang ditugaskan adalah independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Pasar Modal sehubungan dengan audit Bank. Tidak terdapat hubungan personal, pemberian jasa profesional lain atau hubungan bisnis antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi KAP sebagai auditor independen.

## Fungsi Audit Ekstern

Laporan keuangan bank setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai audit eksternal yang independen. Pemilihan KAP didasarkan atas ketentuan yang berlaku antara lain bahwa KAP yang ditunjuk merupakan entitas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP yang ditunjuk tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan bank lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

Akuntan publik merupakan organ eksternal Bank yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

## Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Bank dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

- Audit atas laporan keuangan Bank dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.

## Independence

*Audit Team Assignment is independent in accordance with the Public Accountant Inspection Standards (SPAP) and Capital Market Regulations in connection with the Bank audits. There is no personal relationship, the provision of other professional services or business relations between the Public Accounting Firm with the Company that can affect the independence of the Public Accountant Firm as an independent auditor.*

## External Audit Function

*The Bank's financial statements are audited annually by the Public Accountant Firm as an independent external audit. The selection of Public Accountant Firm is based on the applicable provisions, among others, that the appointed Public Accountant Firm is an entity registered with the OJK, and the appointed Public Accountant Firm does not conduct audit work on the Bank's Financial Statements for more than 5 (five) consecutive years.*

*A public accountant is an external organ of the Bank whose function is to provide an opinion regarding the suitability of the presentation of the Bank's financial statements to the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.*

## Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

*Management is responsible for the presentation of the Bank's financial statements and is in compliance with Indonesian Institute of Accountants as determined by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the applicable laws and regulations.*

## External Audit Procedures and Audit Standards

- *Audits of the Bank's financial statements are conducted in accordance with the professional standards of the Public Accountant which covers all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.*
- *The audit includes testing and evaluating the internal control system, as well as checking, on the basis of testing, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an evaluation of the presentation of the overall financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards issued by IAI.*

- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Bank untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

### Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan dan merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek:

- Kapasitas KAP
- Legalitas perjanjian kerja
- Ruang lingkup audit
- Standar Profesional Akuntan Publik
- Komunikasi antara KAP dengan pihak terkait

### Akuntan Publik Tahun 2021

Berdasarkan RUPS Tahunan pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2020 yang diselenggarakan tanggal 30 Maret 2021, Pemegang Saham memutuskan terkait Mata Acara ke-3 tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

- *As part of the audit process, the Public Accounting Firm also conducts questions and answers to management regarding management statements presented in the financial statements.*
- *Audit carries an inherent risk that if there are material errors and irregularities. If there is such thing, Public Accountant Firm will submit to management.*
- *Management approves the Public Accountant Firm examination work paper on the Bank for review by the relevant agency or authority.*

*The audit was conducted based on the Professional Standards of Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, the audit is carried out based on the State Financial Examination Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency (BPK).*

### Mechanism for Appointing a Public Accountant

*Financial statements must be audited by a public accountant registered with the OJK. The appointment of a public accountant who will provide audit services on annual historical financial information must have obtained approval from the Board of Commissioners.*

*The appointment of the Public Accountant Firm is in accordance with the decision of the Annual GMS and is a Public Accounting Firm and Public Accountant (partner in-charge) registered with OJK.*

*Audit assignments to Public Accountants and Public Accountant Firm have fulfilled the following aspects:*

- *Public Accountant Firm capacity*
- *The legality of the employment agreement*
- *The scope of the audit*
- *Professional Standards for Public Accountants*
- *Communication between Public Accountant Firm and related parties*

### Public Accountant in 2021

*Under the 2020 Annual GMS for performance accountable held on March 30, 2021, shareholders decided the 3<sup>rd</sup> Agenda related to the appointment of Public Accopuntant Firm to audit Bank Financial Statements in the 2021 financial year is as follows:*



- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan BWS untuk Tahun Buku 2021.</p> <p>2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</p> | <p>1. Approve and grant the authority to Board of Commissioners to appoint Public Accountant to audit BWS Financial Statements for the 2021 financial year.</p> <p>2. Approve and grant the authority to Board of Commissioners to determine the honorarium for Public Accountant and other requirements, and appoint the replacement of Public Accountant when the appointed Accountant Public can not complete their duties to audit the Company's Financial Statements for the 2021 financial year due to any reasons, with the provision that in appointing the Public Accountant, Board of Commissioners consider to the Audit Committee recommendations and meet with the criteria as stipulated in the OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.</p> |
|--|---|

Menindaklanjuti keputusan tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 013/BWS-DEKOM/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 dan Surat Perikatan Audit No. 195/SSR-HO/BWS-A21/MS/IX-2021 tertanggal 15 September 2021, menyetujui penunjukkan KAP Suharli, Sugiharto & Rekan (Shinewing Indonesia) sebagai Akuntan Eksternal Bank Woori Saudara untuk tahun buku 2021.

Following up on the decision based on Approval Letter of the Board of Commissioners No. 013/BWS-DEKOM/VIII/2021 dated August 31, 2021 and Audit Engagement Letter No. 195/SSR-HO/BWS-A21/MS/IX-2021 dated September 15, 2021, the appointment of Public Accountant Firm Suharli, Sugiharto & Partners (Shinewing Indonesia) as the External Accountant of BWS for the fiscal year 2021 was approved.

### Akuntan Publik Tahun 2021

Public Accountant in 2021

Nama KAP Public Accountant Firm Name	: Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugihartio & Rekan (Shinewing Indonesia) Suharli, Sugihartio & Partners Public Accounting Firm (Shinewing Indonesia)
Akuntan Accountant	: Michell Suharli, CPA
Jasa Service	: Audit umum atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 General audit of the Bank's Financial Statements for the year ended December 31, 2021
Jasa Lain yang Diberikan Other Services Provided	: -
Periode Penugasan Assignmnet Period	: 31 Desember 2021 December 31, 2021
Opini Opinion	: Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tanpa modifikasi Financial Statements presented fairly unmodified
Biaya Fee	: Rp1.000.000.000 IDR1,000,000,000

### Daftar Akuntan Publik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, Auditor Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, di mana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

### List of Public Accountants

Based on Government Regulation No. 20 of 2015 concerning Public Accountant Practices, Public Auditors are limited to a maximum of 5 (five) consecutive financial years, in which the Public Auditor may provide audit services after 2 (two) consecutive financial years do not provide audit services to the same company.

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service
2021	Suharli, Sugiharto & Rekan No. 614/KM.1/2020 Suharli, Sugiharto & Partners No. 614/KM.1/2020	Michell Suharli , CPA STTD.AP-364/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2021 <i>Audit for financial statements at December 31, 2021</i>
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/ PB.122/2015	Jimmy Pangestu, S.E. STTD.AP-393/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2020 <i>Audit for financial statements at December 31, 2020</i>
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/ PB.122/2015	Jimmy Pangestu, S.E. STTD.AP-393/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2019 <i>Audit for financial statements at December 31, 2019</i>
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/ PB.122/2015	Jimmy Pangestu, S.E. STTD.AP-393/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2018 <i>Audit for financial statements at December 31, 2018</i>
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/ PB.122/2015	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA 208/BL/STTD-AP/2012	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2018 <i>Audit for financial statements at December 31, 2017</i>
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/ PB.122/2015	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA 208/BL/STTD-AP/2012	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2018 <i>Audit for financial statements at December 31, 2016</i>

# Sistem Pengendalian Internal

## Internal Control System

### Pengendalian Internal di Lingkungan Bank

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*) yang kualitas disain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
2. Menjamin tersedianya laporan yang akurat
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. Mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Pedoman Sistem Pengendalian Internal BWS telah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum tanggal 7 Juli 2017 mencakup 5 (lima) elemen pokok yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Tujuan Sistem Pengendalian Internal BWS adalah untuk memastikan:

1. Semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya.

### Internal Control within the Bank

*The Internal Control System is a monitoring process mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis whose quality of design and implementation is influenced by the Board of Commissioners, Directors and all Bank officials and employees, designed to be able to provide adequate confidence in:*

1. *Safeguard and secure Bank assets*
2. *Ensuring the availability of accurate reports;*
3. *Improve compliance with applicable regulations*
4. *Reducing the impact of financial losses, irregularities including fraud and violations of prudential aspects*
5. *Increase organizational effectiveness and increase cost efficiency.*

*Standard Guidelines for Internal Control Systems are an important component in bank management and form the basis for sound and safe bank operations. The Guidelines for BWS Internal Control System have referred to the Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No.35/SEOJK.03/2017 Concerning the Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks dated July 7, 2017, covering 5 (five) interrelated key elements, namely:*

1. *Supervision by Management and Control Culture*
2. *Risk Identification and Assessment*
3. *Activity Control and Separation of Functions*
4. *Accounting, Information and Communication Systems*
5. *Monitoring Activities and Deviation Corrective Actions*

*The purpose of BWS Internal Control Systems is to ensure:*

1. *All business activities of the Bank have been carried out in accordance with the provisions and regulations in force, both the provisions issued by the government, the Bank's supervisory authority and internal policies, regulations, and procedures determined by the Bank.*
2. *The availability of true, complete, timely and relevant reports needed in order to make the right and accountable decision.*
3. *Increasing effectiveness and efficiency in using assets and other resources.*

4. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

4. *Identifying weaknesses and assessing irregularities early and reassessing the fairness of the existing policies and procedures at the Bank by continuously.*

Unsur-unsur lingkungan pengendalian di Bank dapat disampaikan bahwa lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah dari Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Sikap terhadap pentingnya pengendalian intern ini terdiri atas unsur-unsur lingkungan pengendalian yang meliputi:

*The elements of the control environment at the Bank can be conveyed that the control environment reflects the overall attitude, commitment, behavior, concern and steps of the Commissioners and Directors, in carrying out the Bank's operational control activities. Attitudes towards the importance of internal control consist of elements of the control environment which include:*

- Struktur organisasi yang memadai.
- Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bank.
- Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai.
- Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank.
- Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko.
- Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

- *Adequate organizational structure.*
- *The leadership style and philosophy of the Bank's management.*
- *Integrity and ethical values and competence of all employees.*
- *Bank's human resources policies and procedures.*
- *Attention and direction of the Bank's management and other committees, such as the Risk Management Committee.*
- *External factors that affect the Bank's operations and the application of risk management.*

Secara garis besar tentang kegiatan pengendalian BWS dapat disampaikan bahwa sistem pengendalian melibatkan seluruh pegawai dan pejabat Bank, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian terlebih dahulu direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Bank sehari-hari.

*In general, BWS control activities can be conveyed that the control system involves all Bank employees and officials, including the Board of Commissioners and Directors. Therefore, control activities are planned and applied in advance to control risks that can affect performance or cause bank losses. Control activities also include the establishment of control policies and procedures and an early verification process to ensure that the policies and procedures are consistently adhered to, and are activities that are inseparable from every function or every day-to-day activities of the Bank.*

### Aktivitas Pengendalian

### Control Activities

BWS melaksanakan kegiatan aktivitas pengendalian dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Internal:

*BWS carries out control activities in the context of implementing the Internal Control System:*

- Kaji ulang manajemen (*Top Level Reviews*)  
Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

- *Management review (Top Level Reviews)*  
*The Board of Directors of the Bank periodically requests explanations (information) and operational performance reports from officials and employees to make it possible to review the progress (realization) compared to the targets to be achieved, such as financial statements compared to established budget plans. Based on the review, the Directors immediately detected problems such as control weaknesses, financial reporting errors or other irregularities (fraud).*

- Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)  
Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Internal Audit Division dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan maupun bulanan.
  - » Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko.
  - » Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko.
  - » Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
    - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
    - Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).
- *Operational Performance Review (Functional Review)*  
*This review is carried out by the Internal Audit Division with a higher frequency, both daily, weekly and monthly reviews.*
  - » *Reviewing the risk assessment (risk profile report) produced by the risk management Division.*
  - » *Analyzing operational data, both data related to risk and financial data, that is verifying details and transaction activities compared to the outputs (reports) produced by the risk management Division.*
  - » *Reviewing the realization of the implementation of the work plan and budget, in order to:*
    - *Identify the cause of significant deviations.*
    - *Establish requirements for corrective action.*

### Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi

- Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan intern.
- Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
  - » Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan software, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal - eksternal.
  - » Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

### Pengendalian Aset Fisik

Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank.

- Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai Aset dan kewajiban Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.

### Control of Information Systems and Technology

- *The bank verifies the accuracy and completeness of the transaction and carries out the authorization procedure, in accordance with internal regulations.*
- *Information system control activities can be classified into two criteria, namely general control and application control.*
  - » *General control includes (general control) over data center operations, software procurement and maintenance systems, security of access, and development and maintenance of existing application systems. This general control is applied to mainframes, servers, and users workstations, as well as internal - external networks.*
  - » *Application controls are applied to the program used by the Bank in processing transactions and to ensure that all transactions are correct, accurate and have been properly authorized. In addition, application control must be able to ensure the availability of an effective audit process and to check the correctness of the audit process*

### Physical Asset Control

*Control of physical assets is carried out to ensure the implementation of physical security of the Bank's assets.*

- *This activity includes safeguarding assets, records and limited access to computer programs and data files, as well as comparing the value of the Bank's assets and liabilities with the values listed in the control notes, specifically checking asset values periodically.*



## Dokumentasi

- Bank sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.
- Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai.
- Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern, akuntan publik dan otoritas pengawasan Bank.
- Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor intern ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

Selain berbagai hal di atas, dapat disampaikan juga aktivitas pemisahan fungsi yang merupakan bagian dalam aktifitas pengendalian yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional yaitu sebagai berikut:

- Mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "Dual Control".
- Menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
- Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut diidentifikasi, diminimalisir, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen.
- Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank melakukan langkah-langkah, antara lain:
  - » Menetapkan fungsi dan tugas tertentu pada Bank yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadi manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Bank;
  - » Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
    - Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran
    - Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank
    - Transaksi dalam pembukuan Bank
    - Pemberian informasi kepada nasabah Bank
    - Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit

## Documentation

- *The Bank should at least formalize and adequately document the policies, procedures, systems and accounting standards and audit processes.*
- *The document must be updated periodically to describe the Bank's actual operational activities, and be informed to officials and employees.*
- *Upon request, documents must always be available for the benefit of internal auditors, public accountants and the Bank's supervisory authority.*
- *The accuracy and availability of documents must be assessed by internal auditors when conducting routine or non-routine audits.*

*In addition to the above matters, it can also be conveyed that the function of segregation of functions as part of control activities is intended so that each person in his office does not have the opportunity to commit and hide mistakes or irregularities in carrying out his duties at all levels of the organization and all steps of operational activities, namely as follows:*

- *Comply with the principle of separation of this function, known as "Dual Control";*
- *Establish procedures (authority), including the establishment of a list of officers who can access a transaction or high-risk business activity;*
- *Avoid giving authority and responsibility that can lead to various conflicts of interest. All aspects that can cause conflicting interests are identified, minimized and monitored carefully by other independent parties;*
- *In implementing the separation of these functions, the Bank undertakes measures, including:*
  - » *Assign certain functions and tasks to the Bank that are separated or allocated to several people in order to reduce the risk of manipulation of financial data or misuse of Bank assets;*
  - » *Separation of functions is not limited to front and back office activities, but also in the context of controlling:*
    - *Approval of disbursement of funds and realization of expenditures*
    - *Customer accounts and bank owner accounts;*
    - *Transactions in the books of the Bank*
    - *Providing information to Bank customers*
    - *Assessment of the adequacy of loan documentation and debtor monitoring after loan disbursement*

- Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan
- Independensi fungsi manajemen risiko pada Bank

- Other business activities that may cause significant conflicts of interest
- Independence of the risk management function at the Bank

### Kesesuaian dengan *Internal Control Integrated Framework*

Sistem pengendalian intern Bank telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian intern menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern Bank yang telah diuraikan di atas.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Bank. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut.

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Kegiatan pemantauan

Kelima unsur pengendalian intern menurut COSO sejalan dengan Elemen Sistem Pengendalian Intern Bank menurut Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

### Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank senantiasa melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun Internal Audit Division.

### Conformity with *Internal Control Integrated Framework*

The Bank's internal control system is in accordance with the *Integrated Internal Control Framework* developed by *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). The objectives of internal control according to COSO include operational objectives, reporting objectives and compliance objectives. This is in accordance with the objectives of the Bank's internal control system described above.

Operational objectives relate to the effectiveness of operating efficiency. The purpose of reporting relates to the interests of financial reporting that meet the criteria of reliable, timely, transparent and other requirements set by the regulator and the Bank. Whereas the purpose of compliance is related to the Bank's compliance with laws and regulations.

According to COSO, the elements of internal control include the following components:

1. Control environment
2. Risk assessment
3. Control activities
4. Information and Communication
5. Monitoring activities

The five elements of internal control according to COSO are in line with the Elements of the Bank's Internal Control System according to OJK Circular Letter No. 35/SEOJK.03/2017 concerning Guidelines for Standards of Internal Control Systems for Commercial Banks.

### Review of Effectiveness on Internal Control Systems

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System  
The Bank continues to monitor continuously the overall effectiveness of the implementation of internal control. Monitoring of the Bank's main risks must be prioritized and function as part of the Bank's daily activities, including periodic evaluations, both by operational Divisions and the Internal Audit Division.

Bank juga memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian *interen* secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas Sistem Pengendalian Internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

*The Bank also monitors and evaluates the adequacy of the internal control system continuously in relation to changes in internal and external conditions and must increase the SPIN capacity so that its effectiveness can be increased.*

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

*Broadly speaking, the steps taken by the Bank in order to ensure the implementation of effective monitoring activities include:*

- Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank.
- Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.
- Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
- Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, management review dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/ penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang.
- Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.
- Menetapkan informasi/*feedback* dalam format dan frekuensi yang tepat.

- *Ensuring that the activation function must be clear and well-structured within the Bank's organization.*
- *Establish a work unit/employee assigned to be approved for internal control.*
- *Determine the appropriate frequency for monitoring activities related to risks inherent in the Bank and the nature/frequency of changes that occur in operational activities.*
- *Integrate SPIN into operational activities and provide routine reports such as bookkeeping journals, management reviews and reporting on approval of/deviations from established policies and procedures (justification of irregularities) which are then reviewed.*
- *Review the documentation and evaluation results of the work unit /employee assigned to coordinate.*
- *Determine information/feedback in the right format and frequency.*

# Manajemen Risiko

## Risk Management

Penerapan manajemen risiko di BWS merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan Bank dan secara aktif untuk mendukung pertumbuhan bank yang berkesinambungan terutama didalam masa pandemi COVID-19. Pengelolaan Manajemen risiko di lingkup BWS pada dasarnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan OJK yaitu Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka kerja manajemen risiko Bank menetapkan pendekatan pengelolaan risiko dan kerangka pengendalian di mana risiko dikelola untuk mendapatkan keseimbangan antara risiko (*risk*) dan pendapatan (*return*). Penerapan kerangka kerja manajemen risiko dilakukan melalui perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), dan toleransi risiko (*risk tolerance*) bagi setiap jenis risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkesesuaian serta pengembangan struktur pengendalian internal secara terpadu. Selain itu, Bank juga membangun budaya risiko yang menitikberatkan kesadaran seluruh karyawan akan risiko dan efektivitas proses manajemen risiko di dalam organisasi BWS dalam menghadapi pandemi.

Untuk tetap menjaga kondisi lingkungan bisnis dan pertumbuhan Bank, serta fokus manajemen risiko di tahun 2021 terdapat beberapa eksposu risiko utama bank yang perlu menjadi perhatian.

### Tata Kelola dalam Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank dikelola melalui pembentukan Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris serta Komite Manajemen Risiko dan *Asset & Liability Committee* (ALCO) pada tingkat Direksi.

Sesuai kewenangan yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, dan memantau implementasinya, mengembangkan budaya pengelolaan risiko serta memastikan sumber daya yang memadai telah dikembangkan untuk memastikan pengelolaan risiko di Bank. Sementara Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dengan tugas utamanya menyusun dan memperbarui kebijakan manajemen risiko serta mengkoordinir penerapannya, memantau kecukupan permodalan Bank terhadap eksposur

*The implementation of risk management at BWS is one of the main factors in supporting the success of the Bank and actively supporting the Bank's sustainable growth, especially during the COVID-19 pandemic. Risk Management implementation in BWS basically refers to OJK regulation, namely OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks. The Bank's risk management framework establishes a risk management approach and control framework in which risk is managed to achieve a balance between risk and return. The implementation of the risk management framework is carried out through the formulation of the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance for each type of risk, the development of appropriate risk management policies and procedures and the development of an integrated internal control structure. In addition, the Bank also establishes a risk culture that emphasizes awareness of all employees on risks and the effectiveness of the risk management process within the BWS organization in dealing with the pandemic.*

*In order to maintain the condition of the Bank's business environment and growth, as well as the focus of risk management in 2021, there are several main risk exposures for the Bank that need attention.*

### Risk Management Governance

*The implementation of the Bank's risk management is managed through the establishment of a Risk Monitoring Committee at the Board of Commissioners level and the Risk Management Committee and the Asset & Liability Committee (ALCO) at the Board of Directors level.*

*In accordance with the authority delegated by the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee evaluates risk management policies, and monitors their implementation, develops a culture of risk management and ensures that adequate resources have been developed to ensure risk management at the Bank. While the Risk Management Committee is responsible to the President Director with his main task of preparing and updating risk management policies and coordinating their implementation, monitoring the Bank's capital adequacy against risk exposure in accordance with*

risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai keseluruhan komposisi risiko dalam portofolio Bank.

Direktur Risiko & Kepatuhan (selaku Direktur yang ditugaskan khusus dalam penerapan manajemen risiko) mengelola Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap fungsi Bisnis dan Operasional Bank serta fungsi yang melakukan Audit. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko dan mengkaji secara berkala terhadap proses manajemen risiko termasuk pengkajian setiap usulan produk dan aktivitas baru.

Dalam rangka proses pengukuran dan pemantauan risiko, Departemen Manajemen Risiko menyusun laporan profil risiko yang merupakan laporan penilaian terhadap eksposur risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (*inherent risk*) serta kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Laporan profil risiko disusun dan disampaikan secara berkala minimal secara triwulan yang dilaporkan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

Penerapan manajemen risiko di lingkup BWS meliputi empat pilar utama dan secara ringkas dijabarkan di bawah ini.

*applicable regulations, and assessing the overall composition of risk in the Bank's portfolio.*

*The Director of Risk & Compliance (as Director assigned specifically in the application of risk management) manages the Compliance & Risk Management Division that is independent of the Bank's Business and Operational functions as well as the functions that conduct the Audit. Risk Management Division and Compliance Division is responsible for monitoring the implementation of risk management and periodically reviewing the risk management process including the review of each proposed new product and activity.*

*In order to the process of measuring and monitoring risks to create a risk profile report, Department of Risk Management compiles a risk profile report which is an assessment report on inherent risk exposure and adequacy of risk control system. Risk profile reports are prepared monthly and will be reported to the Board of Directors and discussed in the Risk Management Committee.*

*The implementation of risk management within the BWS includes four main pillars and is briefly described as follows.*

**Pilar 1  
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

*Pillar 1  
Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors*

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko di lingkup Bank. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko di BWS. Sedangkan Direksi bertanggung jawab untuk memaksimalkan fungsi dari manajemen risiko serta secara teratur melakukan pemantauan dan pengendalian atas setiap jenis risiko.

*The Board of Commissioners and the board of Directors play an active role in supervising the implementation of risk management within the scope of the Bank. The Board of Commissioners is responsible for evaluating the Risk Management policy and the Board of Directors accountability for implementing the Risk Management policy at the BWS. Whereas the Board of Directors is responsible for maximizing the function of risk management and regularly monitoring and controlling each type of risk.*

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko BWS. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pengawasan dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*). Komite Aset dan Liabilitas (*ALMA Committee*), Komite Kredit (*Loan Committee*) dan Gugus Tugas Anti *Fraud* (*Anti Fraud Task Force Team*).

*Actively Board of Directors monitoring is carried out by preparing and evaluating on the policies and procedures of BWS Risk Management. In carrying out its function to implement the effective risk management, Board of Directors is assisted by Risk Management Unit. The Monitoring is carried out by the Meetings of Risk Management Committee, ALMA Committee, Loan Committee and Anti Fraud Task Force Team.*

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui persetujuan dan evaluasi atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui Rapat Direksi dan Komisaris (*Radirkom*) maupun dalam Rapat Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*).

*Actively Board of Commissioners monitoring is carried out by approval and Evaluation for General Policies of Risk Management which prepared by Board of Directors. In regular, Board of Commissioners evaluate the implementation of risk management policies by Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners and Risk Monitoring Committee Meetings.*



**Pilar 2**  
**Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit**

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dilakukan pengkinian sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan. Dalam implementasinya, Kebijakan-kebijakan ini di-review secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan. Direksi Bank memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

Arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko harus sejalan dengan visi, misi dan strategis bisnis serta perubahan peraturan yang berlaku. Dalam implementasinya, prosedur manajemen risiko merupakan penjabaran serta aturan pelaksanaan dari Kebijakan manajemen risiko yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan risiko setiap Unit Pengelolaan risiko. Evaluasi dan pengkinian terhadap Kebijakan dan Prosedur Manajemen risiko dilakukan secara berkala atau dalam hal terjadi perubahan secara signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha BWS.

Kebijakan pengelolaan risiko dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disusun secara berkala setiap awal tahun disesuaikan dengan perkembangan/perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal serta memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan terutama pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Salah satu strategi bank untuk melakukan pengendalian risiko, BWS menetapkan toleransi risiko dan limit risiko yang dilakukan review secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

*Pillar 2*  
*Adequacy of Policies, Procedures, and Limit Determination*

*The formulation of Adequacy of Policies, Procedures and Limit Determination is updated in line with the bank's overall strategic and business goals. In implementation, these policies are reviewed periodically with approval up to the Board of Directors level through committee meetings or through circulation to the board of Directors in accordance with the level of authority. The Board of Directors of the Bank has the authority to set risk limits, tolerance levels for each type of risk, and risk exposures, by taking into account experience, capital capability, the ability of the system and risk management tools, resources, and applicable regulations.*

*Written Directions in applying the risk management is stipulated in the Risk Management Policies and should be relevant with the vision, mission and business strategies and changes to applicable regulations. In the implementation, risk management procedures is the provisions from the risk management policies which is used as a guidelines to implement the risk management in each risk management units. Evaluation and updating to the risk management policies and procedures is carried out regularly or in the event of significant changes that affects BWS's business activities.*

*Risk management policies has been stipulated in Bank Business Plan which prepared regularly at the beginning of year and in accordance with the latest progress/development, either in internal and external and considered to the impact against the capital especially to meet the Capital Adequacy Ratio (CAR). One of Bank strategies is to conduct the risk control, where is BWS determined the risk tolerance and the risk limit and conduct the regular review by approval up to the level of Board of Directors with committee meetings and/or circular meeting to Board of Directors in accordance with the authority level.*

**Pilar 3**  
**Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Proses manajemen risiko meliputi tahapan Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya terhadap BWS. Sedangkan pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang telah ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal yang dikembangkan berdasarkan best practice dalam pengukuran risiko. Untuk mengantisipasi kondisi yang kurang baik, pengukuran risiko juga dilengkapi dengan *stress testing* untuk risiko kredit, pasar dan likuiditas.

Proses pemantauan risiko terhadap hasil pengukuran risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain dengan melakukan pemantauan terhadap limit risiko dan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh unit kerja pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan secara berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

*Pillar 3*  
*Adequacy of Identification, Measurement, Monitoring and Risk Control and Risk Management Information System*

*Risk management process includes the identification, measurement, monitor and control to 8 (eight) types of risks which carried out in order to analyze the sources and possible risks and their impacts to BWS. Meanwhile risk measurements is carried out to measure the Bank's risk exposure as a reference in risk control. Risk measurement is carried out periodically, both quantitatively and/or qualitatively according to the measurement method determined by the regulator or by using an internal method developed based on best practice. To anticipate unfavorable conditions, risk measurement is also equipped with stress testing for credit, market and liquidity risks.*

*The risk monitoring process on the results of risk measurement is carried out to ensure that risk has been managed properly, among others, by monitoring work limits and risk tolerance. Monitoring is carried out by the implementing work unit as well as by the Risk Management Division. Monitoring results are presented in periodic reports submitted to Management in order to mitigate risks and take necessary actions.*

#### Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko

Sistem pengendalian intern diimplementasikan di BWS dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas Pemilik risiko (*Risk Taking Unit*) sebagai *first line of defense* yang melakukan pengelolaan terhadap risiko yang melekat di bisnis dan fungsinya. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan bertindak sebagai *second line of defense/risk control unit*. dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertindak sebagai *Third Line Of Defense/ Risk Assurance* unit yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas secara independen untuk memastikan kesesuaian proses penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dengan ketentuan dari Regulator.

#### Pillar 4 Internal Risk Management Control System

The BWS internal control system is carried out by using the *Three Lines of Defense* model which consists of the *Risk Taking Unit* as the *first line of defense* that manages the risks inherent in the business and its functions. *Risk Management Unit*, *Compliance Unit* acts as the *second line of defense/ risk control unit*. and the *Internal Audit Division (SKAI)* acts as the *Third Line Of Defense/Risk Assurance* unit that is responsible to the President Director and is tasked independently to ensure the suitability of the risk management implementation process and internal control system with established policies and procedures and in accordance with the provisions of the Regulator.

#### Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko. Selain itu, terdapat unit kerja yang bertindak sebagai *risk counterpart* dari setiap unit bisnis dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, BWS senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal maupun eksternal secara berkala.

#### Manajemen Permodalan

Perhitungan rasio kewajiban modal minimum telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku sejak 2 Februari 2016 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016.

Bank menghitung modal minimum sesuai profil risiko pada posisi Desember 2021.

#### Risk Management Division

*Risk Management Division* is responsible to manage all of Bank risks, *Risk Management Division* is responsible for managing all risks faced by the Bank, including in developing the supporting tools needed in business processes and risk management. In addition, in the risk management task force there is a work unit that acts as the *risk counterpart* of each business unit in the *four-eye* crediting process. Realizing that risk management is the responsibility for all work units in the Bank, so the success of risk management is determined by the risk awareness in all working units of the Bank accompanied by adequate technical capabilities. Therefore, BWS continuously improves the capabilities and knowledge of all employees, especially in terms of risk management, by conducting internal and external training periodically.

#### Capital Management

Calculation of the minimum capital liability ratio is in accordance with OJK regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning "Capital Adequacy Ratio for Commercial Banks" which effective on 2 February 2016 and as amended by OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 regarding Amendments to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016.

The Bank calculates CAR based on Risk Profile for the position of December 2021 period.

**Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Konvensional**

Calculation Report on Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for Conventional & Commercial Banks

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

Komponen Modal Capital Component	31 Desember 2021 December 31, 2021		31 Desember 2020 December 31, 2020	
	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation
I Modal Inti (Tier 1) Common Equity (Tier 1)	7.273.883		5.262.010	
1 CET 1 CET 1	7.273.883		5.262.010	
1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) Paid-Up Capital (Deducted by Treasury Stock)	856.823		658.094	
1.2 Cadangan Tambahan Modal *) Disclosed Reserve *)	8.177.920		6.380.895	
1.2.1 Faktor Penambah Addition Factors	8.424.408		6.628.453	
1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya Other Comprehensive Incomes	7.681		1.161	
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan Positive Adjustment Due to Financial Statement	-		-	
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Unrealized Gain from Increases in Financial Asset Fair Values Classified in Other Comprehensive Incomes	7.681		1.161	
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap Fixed Asset Revaluation Surplus Balance	-		-	
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) other disclosed reserves	8.416.727		6.627.292	
1.2.1.2.1 Agio Agio	4.172.986		2.946.908	
1.2.1.2.2 Cadangan umum General Reserve	135.465		135.465	
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu Previous Years Earnings	3.479.110		3.008.918	
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan Current Years Earnings	629.167		536.001	
1.2.1.2.5 Dana setoran modal Capital Deposit Fund	-		-	
1.2.1.2.6 Lainnya Others	-		-	
1.2.2 Faktor Pengurang Deduction Factors	246.488		247.558	
1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya Other Comprehensive Incomes	380		730	
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan Negative Adjustment Due to Financial Statement	-		-	
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Unrealized Loss from Decreases in Financial Asset Fair Values Classified in Other Comprehensive Incomes	380		730	

Komponen Modal Capital Component		31 Desember 2021 December 31, 2021		31 Desember 2020 December 31, 2020	
		Individual Individual	Konsolidasian Consolidation	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation
1.2.2.2	Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) <i>Disclosed Reserve</i>	246.108		246.827	
1.2.2.2.1	Disagio <i>Disagio</i>	-		-	
1.2.2.2.2	Rugi tahun-tahun lalu <i>Previous Years Loss</i>	-		-	
1.2.2.2.3	Rugi tahun berjalan <i>Current Years Loss</i>	-		-	
1.2.2.2.4	Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif <i>Negative Difference Between Regulatory Provision for Quality Asset Losses (PPKA) on Earning Assets and Allowance For Impairment Losses (CKPN) on Earning Assets</i>	236.060		246.503	
1.2.2.2.5	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book <i>Negative Difference of Total Adjustment in Fair Values from Financial Instruments in Trading Book</i>	-		-	
1.2.2.2.6	PPKA non-produktif <i>Provision for Quality Asset Losses (PPKA) on Non-Earning Assets</i>	10.048		324	
1.2.2.2.7	Lainnya <i>Others</i>	-		-	
1.3	Kepentingan Non-Pengendali yang dapat diperhitungkan <i>Non-Controlling Interests That Can Be Counted</i>			1.776.980	
1.4	Faktor Pengurang Modal Inti Utama *) <i>Deduction Factors in CET 1 Capital *)</i>	1.760.861		-	
1.4.1	Pajak tangguhan <i>Deferred Tax</i>	-		1.474.492	
1.4.2	Goodwill <i>Goodwill</i>	1.474.492		1.776.531	
1.4.3	Aset tidak berwujud <i>Intangible Assets</i>	285.920		449	
1.4.4	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang <i>Investments is Taken into Account as A Deduction Factor</i>	449		-	
1.4.5	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi <i>Capital Shortfall in Subsidiary Company</i>	-		-	
1.4.6	Eksposur sekuritisasi <i>Securitization Exposure</i>	-		-	
1.4.7	Faktor pengurang modal inti utama lainnya <i>Other Deduction Factor of Common Equity Tier 1</i>	-		-	
1.4.7.1	Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain <i>Placement of Fund in Instrument at Another Bank That Meet The Criteria for Inclusion in at 1 and/or Tier 2</i>	-		-	
1.4.7.2	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained Due to Transfer Because of Law, Grant, or Bequest</i>	-		-	

Komponen Modal Capital Component		31 Desember 2021 December 31, 2021		31 Desember 2020 December 31, 2020	
		Individual Individual	Konsolidasian Consolidation	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation
1.4.7.3	Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) - Non Delivery Versus Payment <i>Exposures of Settlement Risk - Non Delivery Versus Payment</i>	-	-	-	-
1.4.7.4	Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada) <i>Exposures in Subsidiary Company That Carry Out Business Activities Based on Sharia Principles</i>	-	-	-	-
2	Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) *) <i>Additional Tier 1 (AT 1) *)</i>	-	-	-	-
2.1	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 <i>Instruments Issued by The Bank That Meet The Criteria for Inclusion in Additional Tier 1 Capital</i>	-	-	-	-
2.2	Agio/Disagio <i>Agio/Disagio</i>	-	-	-	-
2.3	Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan *) <i>Deduction Factor *)</i>	-	-	-	-
2.3.1	Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain <i>Placement of Fund in Instrument at Another Bank That Meet The Criteria for Inclusion in at 1 And/Or Tier 2</i>	-	-	-	-
2.3.2	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained Due to Transfer Because of Law, Grant, or Bequest</i>	-	-	-	-
II	Modal Pelengkap (Tier 2) <i>Tier 2 Capital</i>	307.967	-	255.290	-
1	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 <i>Capital Instruments in The Forms of Stocks or Other Forms That Meet The Requirement in Tier 2 Capital</i>	-	-	-	-
2	Agio/Disagio <i>Agio/Disagio</i>	-	-	-	-
3	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) <i>General Allowance for Losses on Earning Assets (Max. 1.25% from Risk-Weighted Assets)</i>	344.479	-	255.290	-
4	Faktor Pengurang Modal Pelengkap *) <i>Deduction Factor of Tier 2 Capital*)</i>	-	-	-	-
4.1	Sinking Fund <i>Sinking Fund</i>	-	-	-	-
4.2	Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain <i>Placement of Fund in Instrument at Another Bank That Meet The Criteria for Inclusion in Tier 2 Capital</i>	36.511	-	-	-
4.3	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained Due to Transfer Because of Law, Grant, or Bequest</i>	-	-	-	-
Total Modal <i>Total Capital</i>		7.581.850	-	5.517.300	-



Komponen Modal Capital Component	31 Desember 2021 December 31, 2021		31 Desember 2020 December 31, 2020	
	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO RISK-WEIGHTED ASSETS (RWAs)				
ATMR RISIKO KREDIT RWAs CONSIDERING CREDIT RISK	27.552.473		24.614.749	
ATMR RISIKO PASAR RWAs CONSIDERING MARKET RISK	750.992		370.908	
ATMR RISIKO OPERASIONAL RWAs CONSIDERING OPERATIONAL RISK	2.671.709		2.615.548	
TOTAL ATMR TOTAL RISK-WEIGHTED ASSETS	30.975.174		27.601.204	
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%) CAR RATIO BASED ON RISK PROFILE (%)	9,52%		9,75%	
ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO CAR ALLOCATION BASED ON RISK PROFILE				
Dari CET 1 (%) From CET 1 (%)	8,53%		8,83%	
Dari AT 1 (%) From AT 1 (%)	0,00%		0,00%	
Dari Tier 2 (%) From Tier 2 (%)	0,99%		0,92%	
RASIO KPMM CAR Ratio				
Rasio CET 1 (%) CET 1 Ratio (%)	23,48%		19,06%	
Rasio Tier 1 (%) Tier 1 Ratio (%)	23,48%		19,06%	
Rasio Tier 2 (%) Tier 2 Ratio (%)	0,99%		0,92%	
Rasio KPMM (%) CAR Ratio (%)	24,48%		19,99%	
CET 1 UNTUK BUFFER (%) CET 1 FOR BUFFER (%)	14,95%		10,24%	
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%) REGULATORY BUFFER PERCENTAGE REQUIRED BY BANK (%)	2,50%		0,00%	
Capital Conservation Buffer (%) Capital Conservation Buffer (%)	2,50%		0,00%	
Countercyclical Buffer (%) Countercyclical Buffer (%)	0,00%		0,00%	
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%) Capital Surcharge For Systemic Bank (%)	0,00%		0,00%	

\*) Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

\*) Detail statements may not be displayed if the value is nil

## Pengelolaan dan Pengungkapan Eksposur Risiko serta Mitigasi yang Dilakukan oleh BWS

- Pengelolaan Risiko Kredit  
Ketidakpastian dan perlambatan perekonomian dikarenakan pengaruh masih adanya Pandemi COVID-19 selama tahun 2021 sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini cukup berdampak pada kinerja dan kualitas kredit perbankan secara umum. Namun dalam kondisi ini Portofolio kredit BWS dapat tumbuh cukup agresif yaitu sebesar 13,10% pada tahun 2021. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) BWS dapat terjaga dan terus menunjukkan perbaikan dari 1,12% pada tahun 2020 menjadi 0,93% pada tahun 2021.

Selama tahun 2021, BWS sangat proaktif dalam upaya melakukan penyempurnaan pengelolaan kredit untuk mengantisipasi dan mengendalikannya risiko kredit yang diakibatkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya selama kondisi Pandemi. Untuk mempertahankan kemampuan Bank menyerap risiko yang mungkin timbul dan mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti secara bertahap BWS mengimplementasikan sistem peringatan dini (*early warning system*) yaitu suatu monitoring untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini yang digunakan sebagai indikator bagi tindakan lebih lanjut sebelum kredit jatuh menjadi *Net Performing Loan* melalui pengelolaan kredit kualitas rendah antara lain peningkatan fungsi *credit risk review* serta pembentukan *Task Force Team* yang beranggotakan lintas divisi untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan lebih dini dan terintegrasi.

Dalam rangka pengelolaan risiko kredit BWS telah memiliki model rating berupa *internal rating system scoring* debitur untuk membantu analisa kualitas debitur dalam proses perkreditan. Untuk menjaga portofolio bank tidak terkonsentrasi pada debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka BWS telah menetapkan pembatasan kredit sesuai risk appetite, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK, BWS telah menetapkan limit batas yang prudent yang disesuaikan dengan limit BMPK sesuai ketentuan regulator.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro baik dikarenakan pandemi, BWS secara berkala melakukan *stress testing* risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi bank serta kemampuan bank menghadapi kondisi tersebut.

## Risk Exposure Management and Disclosure and Mitigation Conducted by BWS

- *Credit Risk Management*  
*Uncertainty and economic slowdown due to the impact of the COVID-19 pandemic during 2021 greatly affects economic conditions in Indonesia. This has a considerable impact on the performance and quality of banking credit in general. However, in this condition BWS credit portfolio can grow quite aggressively by 13.10% in 2021. BWS Non Performing Loan ratio can be maintained and continues to show improvement from 1.12% in 2020 to 0.93% in 2021.*

*During 2021, BWS is very proactive in efforts to improve credit management to anticipate and control credit risk caused by the failure of debtors in fulfilling their obligations during pandemic conditions. To maintain the Bank's ability to absorb risks that may arise and anticipate uncertain economic conditions BWS gradually implements an early warning system that is a monitoring to identify potential risks early on that is used as an indicator for further actions before credit falls into Net Performing Loan through low quality credit management, among others, improved credit risk review function and the establishment of a Task Force Team consisting of cross divisions to perform rescue and credit settlement measures more early and integrated.*

*In order to manage credit risk BWS has a rating model in the form of internal rating system scoring debtors to help the analysis of the quality of debtors in the credit process. To keep the bank's portfolio not concentrated in debtors and certain economic sectors, BWS has set credit restrictions in accordance with risk appetite, while in anticipation of LLL Excess, BWS has set prudent limit limits adjusted to the LLL limits in accordance with regulatory regulations.*

*As part of credit risk measurement and to anticipate changes in macro factors due to pandemics, BWS periodically conducts credit risk stress testing to assess changes in credit portfolio and its effect on banks and the bank's ability to deal with such conditions.*

## Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Region - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 December 31, 2021			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	5.767.154	-	5.767.154
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	8.504	-	8.504
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	331.697	-	331.697
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	5.323	14.872	2.273	22.468
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.436	6.460	-	7.896
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	5.161.398	1.978.883	6.411.664	13.551.946
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	690.944	2.088.582	332.553	3.112.079
9	Tagihan kepada Korporasi	156.946	17.686.186	748.543	18.591.674
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	998	26	2.624	3.647
11	Aset Lainnya	341.015,58	549.740	383.992,23	1.274.748
	<b>TOTAL</b>	<b>6.358.060</b>	<b>28.432.104</b>	<b>7.881.650</b>	<b>42.671.814</b>

### » Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen. Pembagian wilayah ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian tagihan bersih dari masing-masing wilayah.
4. Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

31 Desember 2020 December 31, 2020					Portfolio Category	
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region				Jumlah Total		
Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others				
(7)	(8)	(9)	(10)			
-	3.478.976	-	3.478.976	Receivables on government		
-	169.907	3.514	173.421	Receivables on public sector entities		
-	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions		
499	314.173	-	314.672	Receivables on banks		
6.172	15.662	1.024	22.858	Loans secured by residential property		
1.532	7.726	-	9.258	Loans secured by commercial real estate		
6.690.907	327.583	5.525.675	12.544.165	Employee/retired loans		
1.355.708	684.383	436.144	2.476.236	Receivables on micro, small business & retail portfolio		
5.315.177	9.504.975	1.919.365	16.739.517	Receivables on corporate		
941	-	-	941	Past due receivables		
-	1.159.694	-	1.159.694	Other assets		
13.370.936	15.663.080	7.885.722	36.919.738	Total		

» Disclosure of Net Receivables by Region

1. Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in financial position statements, exposure in Administrative Account Transactions (TRA) and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.
2. Portfolio category determination and net receivables calculation refer to the provisions on the calculation of risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. The division of region is carried out at the discretion of each Bank, according to the management report. The division of region is determined at least 3 (three) regions. The bank must disclose in the report, the details of disclosure of net receivables by each region.
4. Determination of region is carried out based on the debtor's project location.

## Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 December 31, 2021					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Net Receivables by Contractual Maturity					
		< 1 tahun <1 year	> 1 thn s.d. 3 thn >1 to 3 years	> 3 thn s.d. 5 thn >3 to 5 years	> 5 thn >5 years	Non Kontraktual Non-Contractual	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.690.778	174.057	948.672	635.849	1.317.798	5.767.154
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	8.504	-	-	-	-	8.504
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	4.595	136.083	108	46	190.866	331.697
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.121	2.820	704	17.823	-	22.468
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.228	-	4.799	1.870	-	7.896
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	108.392	491.234	851.832	12.100.488	-	13.551.946
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	950.964	166.427	351.395	1.643.293	-	3.112.079
9	Tagihan kepada Korporasi	11.786.024	2.927.033	2.671.890	1.206.727	-	18.591.674
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	713	79	150	2.706	-	3.647
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	1.274.748	1.274.748
	TOTAL	15.552.318	3.897.734	4.829.549	15.608.802	2.783.412	42.671.814

### » Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

- Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
- Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- Pemetaan ke dalam skala waktu dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos laporan posisi keuangan, Transaksi Rekening Administratif dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang memiliki jatuh tempo kontraktual. Untuk pos laporan posisi keuangan, transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non maturity items*) dimasukkan ke dalam kolom non-kontraktual.



dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

31 Desember 2020 December 31, 2020							Portfolio Category
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Net Receivables by Contractual Maturity							
< 1 tahun <1 year	> 1 thn s.d. 3 thn >1 to 3 years	> 3 thn s.d. 5 thn >3 to 5 years	> 5 thn >5 years	Non Kontraktual Non-Contractual	Jumlah Total		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
3.478.976	-	-	-	-	3.478.976	Receivables on government	
3.419	-	-	-	170.002	173.421	Receivables on public sector entities	
-	-	-	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions	
314.247	126	249	50	-	314.672	Receivables on banks	
6.466	394	4.961	11.038	-	22.858	Loans secured by residential property	
7.734	30	-	1.494	-	9.258	Loans secured by commercial real estate	
349.706	997.079	669.139	10.528.240	-	12.544.165	Employee/retired loans	
995.860	330.636	195.954	953.785	-	2.476.236	Receivables on micro, small business & retail portfolio	
12.731.619	1.172.312	1.867.429	777.595	190.562	16.739.517	Receivables on corporate	
58	-	62	822	-	941	Past due receivables	
-	-	-	-	1.159.694	1.159.694	Other assets	
17.888.085	2.500.576	2.737.794	12.273.024	1.520.258	36.919.738	Total	

» Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity

1. Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in financial position statements, exposure in administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.
2. Portfolio category determination and net receivables calculation refer to the provisions on the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. Mapping into the timescale is carried out based on contractual maturity for the post statement of financial position, administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk that has contractual maturities. For post in the financial position statements, administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk that does not have a contractual maturity (non maturity items) inserted into non-contractual column.

## Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Economic Sectors - Bank Only

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on Government</i>	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Entity Sector</i>	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2021						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					-
2	Pertambangan dan Penggalian					-
3	Industri pengolahan					-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin					-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah					-
6	Konstruksi					-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor					46
8	Pengangkutan dan Pergudangan					-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum					-
10	Informasi dan Komunikasi					-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi				331.697	-
12	Real Estat					-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis					-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya					-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib					-
16	Pendidikan					-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial					-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi					-
19	Aktivitas Jasa Lainnya					-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja					-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya					-
22	Bukan Lapangan Usaha					22.423
23	Lainnya	5.767.154	8.504	-		-
	<b>TOTAL</b>	<b>5.767.154</b>	<b>8.504</b>	<b>-</b>	<b>331.697</b>	<b>22.468</b>

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivables</i>	Aset Lainnya <i>Other assets</i>	Economic Sectors
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							December 31, 2021
	-	4.273	3.531	646.573	-		Agriculture, forestry, and fishery
	-	-	10.686	917.433	-		Mining and quarrying
	4.774	2.551	787.128	9.677.208	649		Manufacturing
	-	-	-	213.831	-		Procurement of Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air
	-	-	-	-	-		Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management
	-	-	20.624	916.298	-		Construction
	1.534	4.223.796	644.157	705.745	523		Wholesale and retail trading. Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles
	-	-	313	507.583	-		Transportation and warehousing
	-	303	1.522	698.630	-		Hotel and food & beverage
	-	-	1.505	3.596	-		Information and Communication
	-	-	293	441.611	-		Financial Activities and Insurances
	-	191	-	1.502.781	-		Real estate
	-	-	-	195.311	-		Professional, Scientific, and Technical Activities
	-	-	61.713	235.037	-		Rental and Lease Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
	-	4.175	1.225	-	-		Public administration, defense and compulsory social security
	-	827	6.057	10.028	-		Education
	-	1.080	25	-	-		Human health and social work activities
	-	-	266	387.359	-		Arts, entertainment and Recreation
	-	4.939	192.808	27.941	-		Other Service Activities
	-	-	-	-	-		Activities of households as employers
	-	-	-	-	-		International institution and other extra international agencies
	1.588	9.309.412	1.380.214	25.631	2.475		Non business field
	-	401	12	1.479.079	-	1.274.748	Others
	7.896	13.551.946	3.112.079	18.591.674	3.647	1.274.748	TOTAL

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on Government</i>	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Entity Sector</i>	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2020						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	3.514	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	49
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3.478.976	169.907	-	314.672	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	4.943
23	Lainnya	-	-	-	-	17.866
TOTAL		3.478.976	173.421	-	314.672	22.858

» Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivables</i>	Aset Lainnya <i>Other assets</i>	Economic Sectors
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
<i>December 31, 2020</i>						
-	-	9.022	535.781	-	-	<i>Agriculture, forestry, and fishery</i>
-	-	58.889	613.383	-	-	<i>Mining and quarrying</i>
-	55.342	702.352	5.592.659	-	-	<i>Manufacturing</i>
-	-	-	-	-	-	<i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air</i>
-	-	-	238.724	-	-	<i>Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management</i>
-	6.602	23.439	802.796	-	-	<i>Construction</i>
3.115	2.858.409	276.776	259.901	548	-	<i>Wholesale and retail trading, Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles</i>
5.236	-	4.055	729.111	-	-	<i>Transportation and warehousing</i>
-	202	1.465	384.466	-	-	<i>Hotel and food &amp; beverage</i>
-	-	-	-	-	-	<i>Information and Communication</i>
-	60	5.789	5.144.819	-	-	<i>Financial Activities and Insurances</i>
-	-	75.153	1.915.554	-	-	<i>Real estate</i>
-	-	-	-	-	-	<i>Professional, Scientific, and Technical Activities</i>
-	-	-	-	-	-	<i>Rental and Lease Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support</i>
-	-	-	-	-	-	<i>Public administration, defense and compulsory social security</i>
-	5.276	1.864	10.085	-	-	<i>Education</i>
-	373	2	-	-	-	<i>Human health and social work activities</i>
-	18.967	196.498	433.934	-	-	<i>Arts, entertainment and Recreation</i>
-	-	4.918	41.116	-	-	<i>Other Service Activities</i>
-	-	-	-	-	-	<i>Activities of households as employers</i>
-	-	-	-	-	-	<i>International institution and other extra international agencies</i>
707	7.625.299	672.743	24.093	354	-	<i>Non business field</i>
200	1.973.634	443.273	13.096	39	1.159.694	<i>Others</i>
9.258	12.544.165	2.476.236	16.739.517	941	1.159.694	<b>TOTAL</b>

» *Disclosure of Net Receivables by Economic Sectors*

- Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in financial position statements, exposure in administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.*
- The determination of portfolio categories and net receivables calculation refers to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.*

- Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam laporan bulanan kepada otoritas, dengan tambahan sektor Lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.

Selama tahun 2021, Bank berhasil mengantisipasi dan membatasi risiko kreditnya dengan baik, dimana portofolio kredit sebesar Rp33,941 Triliun dengan rasio tagihan yang telah jatuh tempo (tagihan atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari) sebesar 0,93% (*Non Performing Loan nett* sebesar 0,56%)

### Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Disclosure of Receivables and Provisioning by Region - Bank Only

No.	Keterangan	31 Desember 2021 December 31, 2021			
		Wilayah Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan	7.710.115	26.019.641	8.900.613	42.630.369
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)				
	a. Belum jatuh tempo	106.901	666.550	133.796	907.247
	b. Telah jatuh tempo	-	-	8.314	8.314
3	CKPN - Stage 1	14.169	103.999	38.919	157.086
4	CKPN - Stage 2	5.673	95.314	6.802	107.788
5	CKPN - Stage 3	24.982	65.142	37.593	127.717
6	Tagihan yang dihapus buku	42.647	34.802	33.878	111.328

» Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

- Tagihan adalah nilai aset keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (*gross*).
- Definisi penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen. Pembagian wilayah ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian dari masing-masing wilayah.
- Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.
- Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode berjalan.
- Untuk Laporan posisi Juli - Desember 2021, Bank dapat mengosongkan laporan posisi tahun sebelumnya.

Metode Perhitungan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu secara individual dan kolektif yang dibagi berdasarkan tingkat signifikansi. Perhitungan CKPN individual terdiri dari kredit yang memiliki nilai diatas tingkat signifikansi dan terdapat bukti objektif mengalami penurunan nilai, yaitu dilakukan langsung oleh pengelola masing-masing debitur.

CKPN secara kolektif dihitung dengan menggunakan data kerugian historis (perhitungan *incurred loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) dari masing-masing kelompok aset tertentu. BWS juga telah mengimplementasikan pengembangan metodologi perhitungan *impairment* (CKPN) sesuai IFRS 9 (PSAK 71).



- The division of economic sectors refers to the economic sector listed in the monthly report to regulators, with the addition of other sectors to the net receivables that cannot be classified in the one of existing sectors.

Throughout 2021, the Bank managed to anticipate and limit its credit risk quite well, where the credit portfolio was recorded at Rp33.941 Trillion with a ratio of receivables that were due (receipts for principal payments and/or interest payments that were more than 90 days) of 0.93% (Non-Performing Loan net of 0.56%).

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

31 Desember 2020 December 31, 2020					Description
Wilayah Region				Jumlah Total	
Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others			
(7)	(8)	(9)	(10)		
7.650.355	15.382.577	6.381.233	29.414.165	Receivables	
				Impaired receivables (stage 2 and stage 3)	
59.124	156.263	49.906	265.293	a. Non past due	
114.582	141.561	76.302	332.445	b. Past due	
56.094	92.200	56.311	204.605	Allowance for impairment losses - Stage 1	
8.949	40.089	10.683	59.721	Allowance for impairment losses - Stage 2	
61.827	52.171	54.511	168.508	Allowance for impairment losses - Stage 3	
147.864	225.988	41.125	414.977	Written-off receivables	

» Disclosure of Receivables and Provisioning by Region

- Receivables is the financial asset values recorded in the financial position statement before deducting CKPN (gross).
- Definition of impairment and CKPN calculation of financial assets refers to the applicable financial accounting standards.
- The division of region is carried out at the discretion of each Bank, according to the management report. Division of region is assigned at least 3 (three) regions. The Bank shall disclose in the report, the details of each Region.
- Determination of region is carried out based on the debtor's project location. ]
- Past due receivables refer to the definition of past due receivables portfolio category in the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
- Written-off receivables is a written-off receivables during the current period.
- For the July - December 2021 position, the Bank may vacate the previous year's position report.

Calculation Method in Establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN) is divided into 2 (two) methods, namely individually and collectively divided by significance level. The calculation of individual CKPN consists of credits that have a value above the level of significance and there is objective evidence of a decrease in value, which is conducted directly by the manager of each debtor.

CKPN is collectively calculated using historical loss data (incurred loss calculation based on probability of default (PD) and Loss Given Default (LGD) estimates of each particular asset group. BWS has also implemented the development of impairment calculation methodology (CKPN) in accordance with IFRS 9.

## Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Receivables and Provisioning based on Economic Sectors

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jawa Barat <i>Net Receivables based on West Java Region</i>	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired Receivables</i>		Jumlah Total <i>Total</i>
			Belum Jatuh Tempo <i>Non Past Due</i>	Telah jatuh tempo <i>Past Due</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2021					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	655.492	3.010,76	-	3.568
2	Pertambangan dan Penggalian	928.119	-	-	6.516
3	Industri pengolahan	10.560.787	476.088,34	1.081	73.306
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	213.831	-	-	1.859
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-
6	Konstruksi	941.390	18.851,22	-	3.358
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5.600.721	106.714,24	627	14.785
8	Pengangkutan dan Pergudangan	507.945	361,96	-	3.696
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	700.486	124,71	-	3.550
10	Informasi dan Komunikasi	336.802	33,12	-	23
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	468.995	38.395,93	-	1.547
12	Real Estat	1.506.556	42.812,33	-	10.300
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	198.893	3.582,25	-	1.496
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	296.749	-	-	2.303
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.400	-	-	11
16	Pendidikan	11.711	-	-	149
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.106	2,66	-	2
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	387.625	-	-	2.827
19	Aktivitas Jasa Lainnya	218.721	2.922,19	-	755
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	10.818.172	210.076,18	6.606	22.698
23	Lainnya	8.270.866	4.271,40	-	4.339
	<b>Total</b>	<b>42.630.369</b>	<b>907.247</b>	<b>8.314</b>	<b>157.086</b>

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 3	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables	Economic Sectors
	(7)	(8)	(9)	
				December 31, 2021
	0	1.115	91	Agriculture, forestry, and fishery
	-	-	-	Mining and quarrying
	68.526	20.544	-	Manufacturing
	-	-	-	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
	-	-	-	Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management
	-	4.467	2.429	Construction
	3.840	21.164	2.960	Wholesale and retail trading, Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles
	-	49	-	Transportation and warehousing
	10	22	25	Hotel and food & beverage
	-	12	-	Information and Communication
	23.416	3.337	1.010	Financial Activities and Insurances
	-	3.585	5.191	Real estate
	-	3.582	-	Professional, Scientific, and Technical Activities
	-	-	-	Rental and Lease Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
	-	-	256	Public administration, defense and compulsory social security
	-	-	307	Education
	-	1	-	Human health and social work activities
	-	-	2.902	Arts, entertainment and Recreation
	-	1.699	-	Other Service Activities
	-	-	-	Activities of households as employers
	-	-	-	International institution and other extra international agencies
	11.197	66.214	89.465	Non business field
	800	1.925	6.691	Others
	107.788	127.717	111.327,74	Total

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jawa Barat <i>Net Receivables based on West Java Region</i>	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired Receivables</i>		Jumlah <i>Total</i>
			Belum Jatuh Tempo <i>Non Past Due</i>	Telah jatuh tempo <i>Past Due</i>	
31 Desember 2020					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	540.243	-	3.556	1.851
2	Pertambangan dan Penggalian	670.984	-	-	5.362
3	Industri pengolahan	9.141.089	110.401	68.453	49.976
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	238.675	-	-	986
6	Konstruksi	809.910	-	21.281	4.331
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3.307.060	24.629	60.082	27.230
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	731.674	-	60	4.488
10	Informasi dan Komunikasi	389.509	-	396	2.220
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	329.295	36.691	1.950	919
12	Real Estat	1.981.676	-	-	15.731
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
16	Pendidikan	17.192	-	-	146
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	372	-	3	3
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	641.227	-	7.001	4.838
19	Aktivitas Jasa Lainnya	35.110	-	12.450	76
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	8.186.094	69.906	117.715	66.787
23	Lainnya	2.394.055	23.666	39.498	19.661
	<b>Total</b>	<b>29.414.165</b>	<b>265.293</b>	<b>332.445</b>	<b>204.605</b>

- » Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi
1. Tagihan adalah nilai aset keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (*gross*).
  2. Definisi penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
  3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam laporan bulanan ke otoritas, dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 3	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables	Economic Sectors
				December 31, 2020
	-	948	17.719	Agriculture, forestry, and fishery
	-	-	378	Mining and quarrying
	2.894	21.911	62.408	Manufacturing
	-	-	-	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
	-	-	3.306	Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management
	-	6.992	22.243	Construction
	4.347	32.044	13.096	Wholesale and retail trading, Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles
	-	-	-	Transportation and warehousing
	-	17	-	Hotel and food & beverage
	-	54	561	Information and Communication
	35.879	1.149	81.253	Financial Activities and Insurances
	-	-	-	Real estate
	-	-	-	Professional, Scientific, and Technical Activities
	-	-	-	Rental and Lease Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
	-	-	64	Public administration, defense and compulsory social security
	-	-	3.558	Education
	-	1	194	Human health and social work activities
	-	4.908	89.448	Arts, entertainment and Recreation
	-	2.108	14.939	Other Service Activities
	-	-	-	Activities of households as employers
	-	-	-	International institution and other extra international agencies
	12.785	74.156	22.396	Non business field
	3.816	24.221	83.414	Others
	59.721	168.508	414.977	Total

» Receivables and Provisioning based on Economic Sectors

1. Receivables is the financial asset values recorded in the financial position statement before deducting CKPN (gross).
2. Definition of impairment and CKPN calculation of financial assets refers to the applicable financial accounting standards.
3. The division of economic sector refers to the economic sector listed in the monthly report to regulators, with the addition of other sectors to the net receivables that cannot be classified in the one of existing sectors.

4. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
5. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode berjalan.

### Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank

Disclosure of Movements of Allowance for Impairment Losses - Bank

No.	Keterangan	31 Desember 2021 December 31, 2021		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo awal CKPN	216.233	89.167	172.552
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)			
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	83.392	124.436	113.632
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(142.538)	(105.815)	(47.140)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan			(111.328)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan			
	Saldo akhir CKPN	157.086	107.788	127.717

- » Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
1. Definisi penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan.
  2. Pembentukan (pemulihan) lainnya dilaporkan antara lain untuk selisih penjabaran valuta asing.
  3. Untuk Laporan posisi Juli - Desember 2020, Bank dapat mengosongkan laporan posisi tahun sebelumnya.

Bagian dari risiko kredit diantaranya *Counterparty Credit Risk* yang merupakan risiko akibat kegagalan pihak lawan sebelum penyelesaian akhir dari arus kas pada transaksi tersebut baik dipengaruhi oleh kondisi usaha maupun karena faktor pergerakan nilai wajar atau nilai pasar untuk transaksi derivatif dan kewajiban komitmen yang timbul dari transaksi derivatif dan transaksi *repo* maupun *reverse repo*. Untuk perhitungan kecukupan modal dengan mempertimbangkan hasil perhitungan ATMR pendekatan standar, maka telah disiapkan perhitungan tambahan ATMR risiko kredit dari *counterparty risk* dengan memasukan komponen eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*



4. Past due receivables refer to the definition of past due receivables portfolio category in the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
5. Written-off receivables is a written-off receivables during the current period.

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 December 31, 2020			Description
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	
	(3)	(4)	(5)	
	190.714	1.741	191.920	Balance beginning of CKPN
				Establishment (Recovery) of Allowance for Impairment Losses at the year (Net)
	68.120	88.269	47.649	Establishment of Allowance for Impairment Losses at the year
	(42.601)	(843)	(67.017)	Recovery of Allowance for Impairment Losses at the year
				CKPN is used to write-off on claims at the year
				Other Establishment (Recovery) at the year
	216.233	89.167	172.552	Balance end of CKPN

» Disclosure of Movements of Allowance for Impairment Losses

1. Definition of impairment and CKPN calculation of financial assets refers to the applicable financial accounting standards.
2. Other additional/reversal allowance is reported among others for difference in foreign exchange translation.
3. For July - December 2020 position, Bank may vacate the previous year's position report.

Part of the credit risk includes Counterparty Credit Risk which is a risk arises from failure on the part of a counterparty before settlement date of cash flow in the transaction either influenced by business conditions or due to factors of fair value movement or market value for derivative transactions and commitment obligations arising from derivative transactions and repo and reverse repo transactions. For the capital adequacy calculation by calculation method of RWA standard approach, it has been prepared additional calculation of credit risk RWA from counterparty risk by including the weighted exposure component of Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets).

## Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Portfolio and Rating Category - Bank Only

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Net Receivables					
		Lembaga Pemeringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2021							
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on government</i>		5.767.154				
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>		8.504				
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>		-				
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>		135.907	23	51	323	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>						
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>						
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>		6.976				
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivables</i>						
11	Aset Lainnya <i>Other assets</i>						
	TOTAL		5.918.540	23	51	323	-
31 Desember 2020							
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on government</i>		3.478.976	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>		-	131.823	-	2.188	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>		-	-	-	-	-

	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Jumlah Total
	B+ s.d B-	< B-	A-1	A-2	A-3	< A-3		
	B+ s.d B-	< B-	F1+ s.d F1	F2	F3	< F3		
	B1 s.d B3	< B3	P-1	P-2	P-3	< P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	< B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	< F3(idn)		
	id B+ s.d id B-	< idB-	idA1	idA2	idA3 - idA4	< idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								December 31, 2021
								5.767.154
								8.504
								-
							195.395	331.697
							18.584.699	18.591.674
							18.780.093	24.699.030
								December 31, 2020
								3.478.976
		35.991					3.419	173.420

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Net Receivables					
		Lembaga Pemeringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>		-	314.173	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>						
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>						
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>		-	-	86.104	103.907	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivables</i>						
11	Aset Lainnya <i>Other assets</i>						
	TOTAL		3.478.976	445.995	86.104	106.095	-

» Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Lembaga pemeringkat yang diakui dan skala peringkat mengacu pada ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui otoritas.

	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Jumlah Total
	B+ s.d B-	< B-	A-1	A-2	A-3	< A-3		
	B+ s.d B-	< B-	F1+ s.d F1	F2	F3	< F3		
	B1 s.d B3	< B3	P-1	P-2	P-3	< P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	< B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	< F3(idn)		
	id B+ s.d id B-	< idB-	idA1	idA2	idA3 - idA4	< idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	57.154	371.327
	-	-	-	-	-	-	16.543.586	16.733.597
	-	35.991	-	-	-	-	16.604.159	20.757.321

» Disclosure of Net Receivables by Portfolio and Rating Category

1. Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in financial position statements, exposure in administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.
2. The determination of portfolio categories and the net receivables calculation refers to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. Recognized rating companies and rating scales refer to the provisions regarding rating agencies and ratings recognized by the authority.

### Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation - Bank Only

No.	Keterangan Description	31 Desember 2021 December 31, 2021						
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation						
		0%	15%	20%	25%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
A.	Eksposur Laporan Posisi Keuangan Balance Sheet Exposures							
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on government	5.171.909						-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on public sector entities		8.504					-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on multilateral development banks and international institutions							-
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on banks			322.205				-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans secured by residential property				7.251	15.218		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans secured by commercial real estate							-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/retired loans	2.500						-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on micro, small business & retail portfolio	5.657		37.057				-
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on corporate	385.088	-	894.939				-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due receivable							-
11	Aset Lainnya Other assets	417.810						-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan Total Exposures - Balance Sheet	5.982.964		1.254.201		15.218		-
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Off Balance Sheet Commitment/Contingency Receivables Exposures							
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on government	-						-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on public sector entities	-						-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on multilateral development banks and international institutions	-						-
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on banks	-						-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans secured by residential property	-						-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans secured by commercial real estate	-						-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/retired loans	-						-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on micro, small business & retail portfolio	136						-



dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

31 Desember 2021 December 31, 2021					ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation						
50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					-	-
					1.275,60	121
					-	-
					64.441,09	6.135
					7.138,86	680
		7.896			7.896,33	752
13.549.437					6.774.718,37	644.953
	3.050.726				2.295.456,13	218.527
		16.825.354			17.004.341,40	1.618.813
		605	3.042		5.168,21	492
		789.949	66.988		890.431,69	84.769
13.549.437	3.050.726	17.623.804	70.030		27.050.868	2.575.243
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
9					4,54	-
	18.503				13.876,93	1.321

No.	Keterangan Description	31 Desember 2021 December 31, 2021						
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation						
		0%	15%	20%	25%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on corporate	11.955						-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due receivable							-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif Total Exposures - Off Balance Sheet	12.091						-
C.	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Loan Risk) Counterparty Loan Risk Exposures							
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on government	595.244,84						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on public sector entities							
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on multilateral development banks and international institutions							
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on banks			9.492				
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on micro, small business & retail portfolio							
6	Tagihan kepada Korporasi Receivables on corporate							
	Total Eksposur Counterparty Loan Risk Total Exposures - Counterparty Loan Risk	595.245		9.492				-

No.	Keterangan Description	31 Desember 2020 December 31, 2021						
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation						
		0%	15%	20%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
A.	Eksposur Laporan Posisi Keuangan Balance Sheet Exposures							
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on government	3.288.405						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on public sector entities			131.823				
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on multilateral development banks and international institutions							
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on banks			365.538				
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans secured by residential property	4.454		5.780	12.625			
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans secured by commercial real estate							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/retired loans	1.433						

31 Desember 2021 December 31, 2021						ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation							
50%	75%	100%	150%	Lainnya Others			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		474.340			474.339,57	45.157	
					-	-	
9	18.503	474.340	-		488.221	46.479	
					-	-	
					-	-	
		11.486,35			13.384,71	1.274	
					-	-	
					-	-	
-	-	11.486	-		13.385	1.274	

31 Desember 2020 December 31, 2020						ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation							
50%	75%	100%	150%	Lainnya Others			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
5.607	-	-	35.991		83.154	83.154	
					73.108	73.108	
					5.864	5.864	
		9.258			9.258	9.258	
12.542.678	-	-			6.271.339	6.271.339	

No.	Keterangan Description	31 Desember 2020 December 31, 2021					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation					
		0%	15%	20%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>	18.603		11.134	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	170.447		974.608	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivable</i>	-		-	-	-	-
11	Aset Lainnya <i>Other assets</i>	394.228		-	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan <i>Total Exposures - Balance Sheet</i>	3.877.570		1.488.882	12.625	-	-
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif <i>Off Balance Sheet Commitment/Contingency Receivables Exposures</i>						
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on government</i>	-		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>	-		-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	-		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	-		-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>	-		-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>	-		-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>	-		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>	166		-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	68.897		1.091	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivable</i>	-		-	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif <i>Total Exposures - Off Balance Sheet</i>	69.062		1.091	-	-	-
C.	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Loan Risk) <i>Counterparty Loan Risk Exposures</i>						
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on government</i>	30.571		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>	-		-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	-		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	-		-	-	-	-

31 Desember 2020 December 31, 2021						
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation					ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
50%	75%	100%	150%	Lainnya Others		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	2.443.898	-	-		1.835.150	1.835.150
86.104	-	15.154.803	-		15.392.776	15.392.776
-	-	502	440		1.162	1.162
-	-	544.265	71.909		652.128	652.128
12.634.388	2.443.898	15.708.826	108.340		24.323.938	24.323.938
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
53	-	-	-		26	26
-	2.436	-	-		1.827	1.827
-	-	277.649	-		277.867	277.867
-	-	-	-		-	-
53	2.436	277.649	-		279.720	279.720
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-

No.	Keterangan Description	31 Desember 2020 December 31, 2021					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation					
		0%	15%	20%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Loan Risk <i>Total Exposures - Counterparty Loan Risk</i>		30.571	-	-	-	-	-

- » Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
- Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
  - Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih, dan perhitungan dampak mitigasi risiko kredit mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
  - Beban modal adalah hasil perkalian ATMR dengan rasio minimum KPMM sesuai POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
  - Contoh pengisian:  
Bank memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Tagihan tidak memiliki peringkat sehingga dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen). Sebagian dari tagihan dimaksud yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*) yang memiliki bobot risiko 0% (nol persen). Pengisian pada baris tagihan kepada korporasi dilakukan sebagai berikut: Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) dimasukkan dalam kolom bobot risiko 100% (seratus persen), dan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dimasukkan dalam kolom bobot risiko 0% (nol persen).

### Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables and Loan Risk Mitigation Techniques - Bank Only

No.	Keterangan Description	31 Desember 2021 December 31, 2021					
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
A.	Eksposur Laporan Posisi Keuangan <i>Balance Sheet Exposures</i>						
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on government</i>	5.171.909					5.171.909
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>	8.504					8.504
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	-					-



31 Desember 2020 December 31, 2021						ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation							
50%	75%	100%	150%	Lainnya Others			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

» Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation

1. Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in the statement of financial position exposure in administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.
2. Portfolio category determination, net receivables calculation, and credit risk mitigation impact calculation refer to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. Capital charge is the result of multiplication of RWA with minimum CAR ratio in accordance with the OJK provisions regarding the minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks.
4. Example of filling:

The Bank has receivables that belongs to portfolio category of receivables on corporate amounting to IDR100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). The receivables does not have a rating so it is subject to a risk weight of 100% (one hundred percent). Part of receivables is IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) guaranteed with cash collateral that has a risk weight of 0% (zero percent). Charging on receivables on corporate is carried out as follows: IDR70,000,000,000.00 (seventy billion rupiah) is included in the risk weight column of 100% (one hundred percent), and IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) is included in 0% (zero percent) risk weight.

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

31 Desember 2020 December 31, 2020					
Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
3.288.405	-	-	-	-	3.288.405
173.420	-	-	-	-	173.420
-	-	-	-	-	-

No.	Keterangan Description	31 Desember 2021 December 31, 2021					Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	322.205					322.205
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>	22.468					22.468
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>	7.896					7.896
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>	13.551.937	2.500				13.549.437
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>	3.093.440	5.657	37.057			3.050.726
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	18.105.380	385.088	894.939			16.825.354
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivable</i>	3.647					3.647
11	Aset Lainnya <i>Other assets</i>	1.274.748					1.274.748
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan <i>Total Exposures - Balance Sheet</i>	41.562.135	393.245	931.995	-		40.236.895
B.	Eksposur Transaksi Rekening Adminstratif <i>Off Balance Sheet Exposures</i>						
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on government</i>	-					-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>	-					-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	-					-
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	-					-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>						-
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>						-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>	9,07					9
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>	18.639	136				18.503
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	486.294	11.955				474.340

31 Desember 2020 December 31, 2020					
Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
365.538	-	-	-		365.538
22.859	4.454	-	-		18.405
9.258	-	-	-		9.258
12.544.112	1.433	-	-		12.542.678
2.473.634	18.603	11.134	-		2.443.898
16.385.961	170.447	974.608	-		15.240.906
942	-	-	-		942
1.010.401	-	-	-		1.010.401
36.274.529	194.937	985.742	-		35.093.850
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
53	-	-	-		53
2.602	166	-	-		2.436
347.636	68.897	1.091	-		277.649

No.	Keterangan Description	31 Desember 2021 December 31, 2021					Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivable</i>						-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif <i>Total Exposures - Off Balance Sheets</i>	504.942	12.091	-	-		492.851
C.	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Loan Risk) <i>Counterparty Loan Risk Exposures</i>						
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on government</i>	595.245	582.128				13.117
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>						-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>						-
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	9.492					9.492
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business &amp; retail portfolio</i>						-
6	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>						-
	Total Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Loan Risk) <i>Total Exposures - Counterparty Loan Risk</i>	604.737	582.128	-	-		22.609
	<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>42.671.814</b>	<b>987.463</b>	<b>931.995</b>	<b>-</b>		<b>40.752.355</b>

» Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

1. Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih dan kriteria teknik mitigasi risiko kredit yang dapat digunakan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
2. Contoh pengisian:  
Bank memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sebagian dari tagihan dimaksud yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*) dan sebagian tagihan yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dijamin dengan garansi dari penerbit yang diakui sesuai ketentuan. Maka sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diisi dalam kolom Bagian yang Dijamin dengan Agunan, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diisi dalam kolom Bagian yang Dijamin dengan Garansi, dan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) diisi dalam kolom Bagian yang Tidak Dijamin.

31 Desember 2020 December 31, 2020					
Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-
350.291	69.062	1.091	-	-	280.138
190.571	160.000	-	-	-	30.571
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
190.571	160.000	-	-	-	30.571
<b>36.815.391</b>	<b>423.999</b>	<b>986.833</b>	-	-	<b>35.404.559</b>

» Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Techniques

1. Determination of portfolio categories, net receivables calculation and criteria of credit risk mitigation techniques that can be used refer to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.

2. Example of filling:

The Bank has receivables that belongs to portfolio category of receivables on corporate amounting to IDR100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). Part of receivables is IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) guaranteed with cash collateral and Part of receivables is IDR50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah) guarantees from recognized issuers in accordance with the provisions. Then total of IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) is filled in the column of Portion Secured by Collateral, IDR50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah) is filled in the column of Portion Secured by Guarantee, and IDR20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah) is filled in Unsecured Portion.

» Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Individual

### 1. Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

Asset Exposure in The Statement of Financial Position, Except Securitization Exposures

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 December 31, 2021		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	5.171.909	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	5.171.909	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	322.205	65.502	65.502
	Tagihan Jangka Pendek	222.810	38.320	38.320
	Tagihan Jangka Panjang	99.395	27.181	27.181
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	22.468	7.139	7.139
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	7.896	7.896	7.896
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	13.551.937	6.775.968	6.774.718
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3.093.440	2.320.080	2.295.456
9.	Tagihan Kepada Korporasi	18.098.404	18.112.776	17.011.738
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3.647	5.168	5.168
	Kredit Beragun Rumah Tinggal	605	605	605
	Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.042	4.563	4.563
11.	Aset Lainnya	1.274.748		890.432
	Uang tunai, emas, dan commemorative coin	417.810		-
	Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	-		-
	Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-		-
	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	-		-
	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	-		-
	Aset tetap dan inventaris neto	398.058		398.058
	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	66.988		100.482
	Antar kantor neto	-		-
	Lainnya	391.891		391.891
	<b>TOTAL</b>	<b>41.546.656</b>	<b>27.294.530</b>	<b>27.058.049</b>



» Disclosure of Risk Weighted Asset Calculation for credit risk with Standard Approach - Bank Only

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 December 31, 2020			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM	
	(6)	(7)	(8)	
				Receivables on government
	3.288.405	-	-	Receivables on Indonesia government
	-	-	-	Receivables on other government
	173.420	83.154	83.154	Receivables on public sector entities
	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions
				Receivables on banks
	329.028	65.806	65.806	Short-term Receivables
	36.510	7.302	7.302	Long-term Receivables
	22.859	7.423	5.864	Loans secured by residential property
	9.258	9.258	9.258	Loans secured by commercial real estate
	12.544.112	6.272.056	6.271.339	Employee/retired loans
	2.473.634	1.855.226	1.835.150	Receivables on micro, small business & retail portfolio
	16.385.961	16.342.909	15.392.776	Receivables on corporate
	942	1.162	1.162	Past due receivables
	502	502	502	Loans secured by residential property
	440	660	660	Except Loans secured by residential property
				Other assets
	394.228		-	Cash, gold and commemorative coin
	-		-	Investments ( except capital deduction factors)
	-		-	Temporary Capital Investments in relation to credit restructuring
	-		-	Investments to financial company does not listed at the bourse
	-		-	Investments to financial company that listed at the bourse
	510.193		510.193	Fixed Asset and net inventory
	71.909		107.864	Foreclosed assets
	-		-	Net inter office
	34.072		34.072	Others
	36.274.529	24.644.295	24.323.938	TOTAL

## 2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

Off Balance Sheets Commitment/Contingency Receivables Exposures, except Securitization Exposures

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 December 31, 2021		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank			
	Tagihan Jangka Pendek	-	-	-
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	9	9	9
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	18.639	18.639	18.639
9.	Tagihan Kepada Korporasi	486.294	486.294	486.294
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo			
	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
	Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>504.942</b>	<b>504.942</b>	<b>504.942</b>

## 3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Counterparty Credit Risk Exposures

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 December 31, 2021		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	595.245	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	595.245	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
	Tagihan Jangka Pendek	-	-	-
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>595.245</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 December 31, 2020			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM	
	(6)	(7)	(8)	
				Receivables on government
	-	-	-	Receivables on Indonesia government
	-	-	-	Receivables on other government
	-	-	-	Receivables on public sector entities
	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions
				Receivables on banks
	-	-	-	Short-term Receivables
	-	-	-	Long-term Receivables
	-	-	-	Loans secured by residential property
	-	-	-	Loans secured by commercial real estate
	53	26	26	Employee/retired loans
	2.602	1.951	1.827	Receivables on micro, small business & retail portfolio
	347.636	347.636	277.867	Receivables on corporate
				Past due receivables
	-	-	-	Loans secured by residential property
	-	-	-	Except Loans secured by residential property
	<b>350.291</b>	<b>349.614</b>	<b>279.720</b>	<b>TOTAL</b>

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 December 31, 2020			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM	
	(6)	(7)	(8)	
				Receivables on government
	190.571	-	-	Receivables on Indonesia government
	-	-	-	Receivables on other government
	-	-	-	Receivables on public sector entities
	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions
				Receivables on banks
	-	-	-	Short-term Receivables
	-	-	-	Long-term Receivables
	-	-	-	Loans secured by residential property
	-	-	-	Loans secured by commercial real estate
	<b>190.571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>

#### 4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

Settlement Risk Exposures

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2021 December 31, 2021		
		Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Delivery versus payment</i>			
	Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-
	Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-
	Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-
	Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-	
<b>TOTAL</b>		-	-	-

#### 5. Eksposur Sekuritisasi

Securitization Exposures

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
		Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)		-
	<i>First Loss Facility</i>	-	-
	<i>Second Loss Facility</i>	-	-
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)		2.206
	Bank merupakan Kreditur Asal		
	Bank bukan merupakan Kreditur Asal	-	
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-	
<b>TOTAL</b>		-	<b>2.206</b>

#### 6. Eksposur Derivatif

Derivative Exposures

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	9.492	1.898
	Tagihan Jangka Pendek	9.492	1.898

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 December 31, 2020			Type of Transaction
	Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA	
	(6)	(7)	(8)	
				Delivery versus payment
				Capital charge 8% (5-15 days)
				Capital charge 50% (16-30 days)
				Capital charge 75% (31-45 days)
				Capital charge 100% (more than 45 days)
				Non-delivery versus payment
	-	-	-	TOTAL

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2019 / December 31, 2019		Type of Transaction
	Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA	
	(3)	(4)	
		-	RWA for securitization exposures calculated by External Rating Base Approach (ERBA) method
	-	-	First Loss Facility
	-	-	Second Loss Facility 0 0 Beban Modal 50% (16-30 hari)
		4.746	RWA for securitization exposures calculated by Standardized Approach (SA) method
			Bank acts as Originating Loanor
	-		Bank does not act as Originating Loanor
	-		Securitization exposures as deduction factor of core capital
	-	4.746	TOTAL

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 / December 31, 2020		Type of Transaction
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA	
	(5)	(6)	
			Receivables on government
	-	-	Receivables on Indonesia Government
	-	-	Receivables on Other Government
	-	-	Receivables on public sector entities
	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions
			Receivables on banks
	5.789	1.158	Short-term Receivables

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tagihan Jangka Panjang	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
7.	Eksposur tertimbang dari Loan Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)		7.923
<b>TOTAL</b>		<b>9.492</b>	<b>9.821</b>

## 7. Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)

Total Loan Risk Measurement (1+2+3+4+5+6)

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT TOTAL RISK WEIGHTED ASSETS CREDIT RISK	(A)
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: CREDIT RISK RWA DEDUCTION FACTOR	(B)
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B) TOTAL RWA CREDIT RISK (A) - (B)	(C)
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL TOTAL CAPITAL DEDUCTION FACTOR	(D)

- » Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar  
Perhitungan ATMR Risiko Kredit mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

## Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)

Analysis of Counterparty Credit Risk Exposures (CCR1)

Keterangan	31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	a	b	c	d	e	f
	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD Alpha used for EAD regulatory calculations	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA
SA-CCR (untuk derivatif)	2.093,70	4.686,16		1,4	9.492	1.898,36
Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					595.245	-
VaR untuk SFT					N/A	N/A
<b>TOTAL</b>						<b>1.898,36</b>



31 Desember 2020 / December 31, 2020		Type of Transaction
Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA	
(5)	(6)	
-	-	Long-term Receivables
-	-	Receivables on micro, small business & retail portfolio
-	-	Receivables on corporate
-	5.187	Loan Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)
<b>5.789</b>	<b>6.345</b>	<b>TOTAL</b>

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

31 Desember 2021 December 31, 2021	31 Desember 2020 December 31, 2020
27.558.297	24.614.749
5.824	-
27.552.473	24.614.749
-	-

- » Disclosure of Risk Weighted Asset Calculation for Credit Risk with Standard Approach  
Risk Weighted Asset Calculation for credit risk refers to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

31 Desember 2020 / December 31, 2020							Description
a	b	c	d	e	f		
Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD Alpha used for EAD regulatory calculations	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA		
2.773	1.363		1,4	5.789	6.345	SA-CCR (for derivatives)	
				N/A	N/A	Internal Model Method (for derivatives and SFT)	
				N/A	N/A	Standard approach to credit risk mitigation (for SFT)	
						Comprehensive approach to credit risk mitigation (for SFT)	
				N/A	N/A	VaR for SFT	
					6.345	<b>TOTAL</b>	

### Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment (CCR2)

Capital Charge for Credit Valuation Adjustment (CCR2)

Indonesia	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
	a	b
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA
Total portfolios berdasarkan Advanced CVA capital charge	N/A	N/A
(i) komponen VaR (termasuk 3x multiplier)		N/A
(ii) komponen Stressed VaR (termasuk 3x multiplier)		N/A
Semua Portfolio sesuai Standardised CVA Capital Charge	9.492	7.923
Total sesuai CVA Capital Charge	9.492	7.923

### Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

CCR Exposure by Portfolio Category and Risk Weight

Bobot Risiko Kategori Portofolio	31 Desember 2021 / December 31, 2021								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih Total Net Receivables
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	595.245								595.245
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Lain	-	-	9.492	-	-	-	-	-	9.492
Tagihan kepada perusahaan sekuritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	595.245	-	9.492	-	-	-	-	-	604.737

### Eksposur Sekuritisasi pada Banking book (SEC 1)

Securitization Exposure to banking book (SEC 1)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021								
	a	b	c	e	f	g	h	i	j
	Bank sebagai originator Bank as originator			Bank sebagai sponsor Bank as sponsor			Bank sebagai investor Bank as an investor		
	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total
Retail (total) –antara lain									
Kredit perumahan									
Kartu kredit									

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 / December 31, 2020		Indonesia
	a	b	
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA	
	N/A	N/A	Total portfolios based on Advanced CVA capital charge
		N/A	(i) VaR components (including 3x multipliers)
		N/A	(ii) Stressed VaR components (including 3x multipliers)
	5.789	5.187	All Portfolios according to Standardised CVA Capital Charge
	5.789	5.187	Total according to CVA Capital Charge

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 / December 31, 2020									Portfolio Category and Risk Weight
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih Total Net Receivables	
	190.571	-	-	-	-	-	-	-	190.571	Receivables on government and Central Bank
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on public sector entities
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on other banks
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Securities Companies
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on corporate
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on micro, small business & retail portfolio
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other assets
	190.571	-	-	-	-	-	-	-	190.571	Total

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 / December 31, 2020									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	Bank sebagai originator Bank as originator			Bank sebagai sponsor Bank as sponsor			Bank sebagai investor Bank as an investor			
	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	
										Retail (total) – among others
										Housing loans
										Credit card

	31 Desember 2021 / December 31, 2021								
	a	b	c	e	f	g	h	i	j
	Bank sebagai originator <i>Bank as originator</i>			Bank sebagai sponsor <i>Bank as sponsor</i>			Bank sebagai investor <i>Bank as an investor</i>		
	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total
Eksposur ritel lainnya			-			-			-
Re-sekuritisasi			-			-			-
Non-retail (total) – antara lain			-			-	15.480		15.480
Kredit korporasi			-			-	15.480		15.480
Kredit komersil			-			-			-
Sewa dan piutang			-			-			-
Non-retail lainnya			-			-			-
Re-sekuritisasi			-			-			-

#### Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya - bank yang Bertindak Sebagai Investor (SEC4)

Securitization Exposure to the Banking Book and its Capital Requirements - Banks Acts as Investors

Indonesia	31 Desember 2021 / December 31, 2021							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko) <i>Exposure values (based on Risk Weight)</i>					Exposure Values		
	≤20% Bobot Risiko <i>Risk Weight</i>	>20% to 50% Bobot Risiko <i>Risk Weight</i>	>50% to 100% Bobot Risiko <i>Risk Weight</i>	>100% to <1250% Bobot Risiko <i>Risk Weight</i>	1250% Bobot Risiko <i>Risk Weight</i>	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA
Total Eksposur	15.480							15.480
Sekuritisasi Tradisional	15.480							15.480
Dimana Underlying Sekuritisasi	15.480							15.480
Ritel								
Non-Retail	15.480							15.480
Dimana Re-Sekuritisasi								
Senior								
Non-Senior								
Sekuritisasi Sintetis								
Dimana Underlying Sekuritisasi								
Ritel								
Non-Retail								
Dimana Re-Sekuritisasi								
Senior								
Non-senior								

31 Desember 2020 / December 31, 2020									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Bank sebagai originator Bank as originator			Bank sebagai sponsor Bank as sponsor			Bank sebagai investor Bank as an investor			
Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	
									Other retail exposures
									Re-securitization
									Non-retail (total) – among others
						31.046		31.046	Corporate Credit
									Commercial credit
									Rent and receivables
									Other non-retail
									Re-securitization

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

										English	
i	j	k	l	m	n	o	p	q			
Exposure Values	ATMR RWA				Capital Charge After Cap						
1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%			
			2.206				2.206			Total Exposure	
			2.206				2.206			Traditional Securitization	
			2.206				2.206			Where is Underlying Securitization	
										Retail	
			2.206				2.206			Non-Retail	
										Where to Re-Securitize	
										Senior	
										Non-Senior	
										Synthetic Securitization	
										Where is Underlying Securitization	
										Retail	
										Non-Retail	
										Where is Re-Securitize	
										Senior	
										Non-Senior	

Indonesia	31 Desember 2020 / December 31, 2020							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko) Exposure values (based on Risk Weight)					Exposure Values		
	≤20% Bobot Risiko Risk Weight	>20% to 50% Bobot Risiko Risk Weight	>50% to 100% Bobot Risiko Risk Weight	>100% to <1250% Bobot Risiko Risk Weight	1250% Bobot Risiko Risk Weight	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA
Total Eksposur								
Sekuritisasi Tradisional								
Dimana Underlying Sekuritisasi								
Ritel								
Non-Retail								
Dimana Re-Sekuritisasi								
Senior								
Non-Senior								
Sekuritisasi Sintetis								
Dimana Underlying Sekuritisasi								
Ritel								
Non-Retail								
Dimana Re-Sekuritisasi								
Senior								
Non-senior								

• Pengelolaan Risiko Pasar

Aktivitas bisnis pada portofolio *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko pasar karena terdapat potensi pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan perubahan harga surat berharga yang dimiliki. Bank senantiasa melakukan pengawasan terhadap perubahan yang terjadi pada portofolio aset yang terekspose risiko pasar. Pemantauan terhadap pergerakan potensi risiko pasar dilakukan oleh Divisi Tresuri, Divisi Manajemen Risiko, Divisi *Funding*, dan Divisi terkait yang tergabung dalam *Asset-Liability Committee* (ALCO).

Pemantauan dilakukan dengan metode valuasi *mark to market* perubahan nilai pasar pada portofolio yang dimiliki oleh Bank. Pengendalian risiko pasar dilakukan melalui penetapan maksimum eksposur untuk *unrealized loss* untuk surat berharga, Penetapan limit Posisi Devisa Neto (PDN), Limit maksimum perubahan *Economic Value of Equity* (EVE) pada IRRBB sesuai *hard limit* yang ditetapkan oleh Regulator, dan penetapan *limit cut loss*.

Pengukuran Risiko terhadap aktivitas Bank yang terkespose Risiko Pasar meliputi :

1. Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar meliputi:
  - a) Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)
    - Metode Risiko Spesifik
    - Metode Risiko Umum
  - b) Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book* dan *Trading Book*)
2. *Interest Rate Risk in the Banking Book*



	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
	Exposure Values	ATMR RWA				Capital Charge After Cap				
		1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	
				31.046						Total Exposure
				31.046						Traditional Securitization
				31.046						Where is Underlying Securitization
				-						Retail
				31.046						Non-Retail
				-						Where to Re-Securitize
				-						Senior
				-						Non-Senior
				-						Synthetic Securitization
				-						Where is Underlying Securitization
				-						Retail
				-						Non-Retail
				-						Where is Re-Securitization
				-						Senior
				-						Non-Senior

• **Market Risk Management**

Business activities in portfolios of trading book and banking book are exposed to market risk due to the potential movement of interest rates, exchange rates, and changes in the price of securities owned. The Bank continues to monitor changes in portfolio of assets exposed to market risk. Monitoring of potential market risk movements is carried out by Treasury Division, Risk Management Division, Funding Division, and related Divisions incorporated in Asset Liability Committee (ALCO).

Monitoring is carried out by valuation method of mark to market changes in market value in portfolios owned by the Bank. Market risk control is carried out through determination of maximum exposure to unrealized loss for securities, Determination of Net Open Position (NOP) limit, maximum limit of Economic Value of Equity (EVE) changes in IRRBB in accordance with the hard limit set by Regulator, and determination of cut loss limit.

Risk Measurement to Bank activities that are exposed by Market Risk include:

1. Market Risk using Standard Methods include:
  - a) Interest Rate Exposure (Trading Book)
    - Specific Risk Methods
    - General Risk Methods
  - b) Exchange Rate Exposure (Banking Book and Trading Book)
2. Interest Rate Risk in the Banking Book

## Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

Disclosure of Market Risk Using Standardized Method

No.	Keterangan	31 Desember 2021 December 31, 2021			
		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	37.051	463.141		
	Risiko Spesifik	-	-		
	Risiko Umum	37.051	463.141		
2	Risiko Nilai Tukar	23.028	287.850		
3	Risiko Ekuitas *)				
4	Risiko Komoditas *)				
5	Risiko Option				
	<b>Total</b>	<b>60.079</b>	<b>750.992</b>		

\*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

\*) For banks that have subsidiaries that have intended risk exposure

## Laporan Hasil Perhitungan IRRBB

IRRBB Calculation Result Report

Tanggal	ΔEVE	
	31 Desember 2021 December 31, 2021	31 Desember 2020 December 31, 2020
<b>EVE at Current Rates</b>	<b>5.971</b>	<b>2.661</b>
Parallel Up	644	494
Parallel Down	(2.343)	(5.364)
Steeper	(662)	(641)
Flattener	(995)	(2.982)
Short Up	(353)	(1.683)
Short Down	(1.781)	(2.624)
Max EVE Loss	644	494
Tier 1 Capital	7.274	5.227
Impact on EVE as % of Tier 1 Capital	8,85%	9,44%
Max NII Loss		
NII Projection		
Impact on NII as % of NII Projection		

Eksposur risiko pasar karena fluktuasi suku bunga, perubahan kurs dan perubahan harga surat berharga yang dimiliki oleh Bank terus dipantau sehingga tidak menyebabkan kerugian secara finansial, pemberian limit terhadap portofolio Bank yang terekspos perubahan harga pasar telah disesuaikan dengan appetite dan skala bisnis Bank. Bank melakukan *Stress Test* secara berkala untuk melihat kerugian yang timbul dan membuat tindak lanjut yang akan diambil untuk mengantisipasi kerugian yang berlebihan. Perhitungan *Stress Test* dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bank diputuskan dalam rapat *Asset Liability Committee* (ALCO).

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	31 Desember 2020 December 31, 2020				Description
	Individual		Konsolidasian		
	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	
(7)	(8)	(9)	(10)		
	27.504	343.798			Interest rate risk
	-	-			Specific risk
	27.504	343.798			General risk
	2.169	27.110			Foreign exchange risk
					Equity risk *)
					Commodity risk *)
	-	-			Option risk
	<b>29.673</b>	<b>370.908</b>			<b>Total</b>

dalam miliar Rupiah  
in billion Rupiah

	ΔNII		Date
	31 Desember 2021 December 31, 2021	31 Desember 2020 December 31, 2020	
	209	(235)	Parallel Up
	(167)	214	Parallel Down
			Steeper
			Flattener
			Short Rate Up
			Short Rate Down
			Negative Maximum Value (Absolute)
			Tier 1 Capital (for ΔEVE) or Projected Income (for ΔNII)
			Maximum Value divided by Tier 1 Capital (for ΔEVE) or Projected Income (for ΔNII)
	209	214	
	842	760	
	24,81%	28,21%	

Market risk exposure due to fluctuations in interest rates, changes in the exchange rates and changes in the price of securities owned by Bank continues to be monitored so as not to cause financial losses, the limiting of Bank's portfolio exposed to changes in market prices has been adjusted to the appetite and scale of the Bank's business. Bank conducts Stress Tests periodically to see the losses incurred and make follow-ups that will be taken in anticipation of excessive losses. Calculation of Stress Test and follow-up to be conducted by Bank is decided in Asset Liability Committee (ALCO) meeting.

• Pengelolaan Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional merupakan suatu proses yang secara terus-menerus mengalami penyempurnaan. Hal tersebut dicapai melalui penerapan model Pertahanan 3 (tiga) Lapis (Three Lines of Defences) dalam pengendalian internal Bank. Pada lini pertama, risiko dikelola secara langsung oleh masing-masing unit kerja. Pada lini kedua, Divisi Manajemen Risiko melakukan pengawasan, evaluasi dan metodologi pengelolaan risiko secara organisasi. Pada lini ketiga, Satuan Kerja Audit Internal bertugas memberikan *review* yang menyeluruh terhadap kegiatan operasional Bank dan implementasi praktik kelola risiko yang dijalankan Bank. Selama tahun 2021, Bank telah melakukan:

- » Melakukan analisis/assessment Risiko Operasional pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank
- » Melakukan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar
- » Menyusun Kajian Risiko Operasional.
- » Mengevaluasi dokumen *Business Continuity Management (BCM)*, *Risk and Threat Analysis (RTA)* dan *Business Impact Analysis (BIA)*.

Terdapat 5 (lima) proses utama dalam mengelola risiko operasional Bank, yaitu proses identifikasi risiko, proses penilaian risiko, proses pengukuran risiko, proses pemantauan risiko, dan proses pengendalian risiko.

1. Identifikasi risiko

Dalam melakukan identifikasi dan pengurukan risiko operasional, metode yang digunakan bank antara lain: *Risk Self Assesment (RSA)*, *Key Risk Indicator (KRI)*, pemetaan risiko, pemetaan *control*, dan pemetaan kejadian risiko.

2. Penilaian Risiko

Masing-masing unit kerja (unit kerja bisnis maupun kantor pusat) selaku *risk taking unit* melakukan penilaian menggunakan metode *risk self assessment*. Mencakup penilaian atas dampak dan kemungkinan terjadinya suatu risiko beserta kemungkinan penyebab dan disertai dengan pengendalian yang dilakukan.

3. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko operasional yang digunakan Bank saat ini menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*)

4. Pemantauan Risiko

Unit kerja bisnis dan kantor pusat sebagai *first line of defence* melakukan pemantauan terhadap risiko utama yang ada pada aktivitas operasional Bank. Divisi Manajemen Risiko kemudian melakukan *review* dan evaluasi terhadap hasil *self assessment* yang dihimpun pada Laporan Pemantauan Risiko yang disampaikan ke Direksi secara periodik serta Laporan Profil Risiko Operasional.

5. Pengendalian Risiko

Mitigasi risiko operasional menggunakan mekanisme pengendalian internal yang menerapkan 5 (lima) strategi mitigasi risiko, yaitu hindari, alihkan, kelola, pantau, dan terima. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian akibat kegagalan atau tidak berfungsinya proses internal, faktor manusia, sistem dan teknologi, serta kejadian eksternal.

#### Operational Risk Management

Operational risk management is a process that is constantly improved. This was achieved through the implementation of Three Lines of Defences model in the Bank's internal control. In the first line, risk is directly managed by each work unit. In the second line, Risk Management Division conducts supervision, evaluation and methodology of risk management in an organizational manner. On the third line, Internal Audit Task Force is tasked with providing a thorough review of the Bank's operational activities and implementation of risk management practices carried out by the Bank. In 2021, Bank has conducted:

- » Bank performs analysis/assessment of operational risk to products, activities and new transaction/Bank existing
- » Calculating Risk Weight Assets (RWA) to operational risk by Basic Indicators Approach
  
- » Prepare Operational Risk Assessment.
- » Evaluating document of Business Continuity Management (BCM), Risk and Threat Analysis (RTA) and Business Impact Analysis (BIA)

There is 5 (five) main process in managing Bank's operational risk, namely risk identification process, risk assessment process, risk measurement process, risk monitoring process,

##### 1. Risk identification

In identifying and measuring operational risk, the methods used by the Bank include: Risk Self Assessment (RSA), Key Risk Indicator (KRI), risk mapping, control mapping, and risk event mapping.

##### 2. Risk Assessment

Each work unit (business work unit and head office) as a risk taking unit conducts an assessment using the risk self-assessment method. This includes an assessment of the impact and possibility of a risk occurring along with the possible causes along with the controls carried out.

##### 3. Risk Measurement

Operational risk measurement used by the Bank currently is the Basic Indicator Approach.

##### 4. Risk Monitoring

The business work unit and head office as the first line of defense monitor the main risks in the Bank's operational activities. The Risk Management Division then reviews and evaluates the results of the self-assessment which is compiled in the Risk Monitoring Report which is submitted to the Board of Directors periodically and Operational Risk Profile Report.

##### 5. Risk Control

Operational risk mitigation uses an internal control mechanism that implements 5 (five) risk mitigation strategies, namely avoid, transfer, manage, monitor, and accept. This is to minimize losses due to failure or ineffectiveness of internal processes, human errors, system and technology errors, as well as external incidents.

## Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Individual

Disclosure of Risk Operational

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 / 31 Desember 2021		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) <i>Gross Income (Average for the last 3 years)</i>	Beban Modal <i>Capital Charge</i>	ATMR <i>RWA</i>
(1)	(2)			
1	Pendekatan Indikator Dasar	1.424.912	213.737	2.671.709
<b>TOTAL</b>		<b>1.424.912</b>	<b>213.737</b>	<b>2.671.709</b>

### • Pengelolaan Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas dilakukan oleh Bank untuk memenuhi kewajiban yang mempunyai jatuh tempo atau dapat ditarik sewaktu-waktu oleh *Counterparty* atau nasabah dari pendanaan arus kas, aset likuid yang dijual atau diagunkan, atau menggantinya dengan sumber pendanaan yang lain.

Dalam mengelola likuiditas, Satuan Kerja Manajemen Risiko secara periodik menyusun laporan profil risiko likuiditas, mengukur pemenuhan rasio-rasio likuiditas yang ditetapkan regulator berupa *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan melakukan identifikasi pengukuran risiko likuiditas berupa proyeksi arus kas secara kontraktual dan behavioral. Pengendalian risiko likuiditas Bank melakukan penyediaan sumber pendanaan kas, pemeliharaan aset likuid, serta membuka fasilitas likuiditas berupa *committed* atau *uncommitted* dengan counterparty jika Bank membutuhkan likuiditas.

Pemantauan yang dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko berupa :

1. Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR);
2. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR); dan
3. Aset terikat (*Encumbrance*).

## Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Triwulanan

Calculation Report to Fulfillment Obligations of Quarterly Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Komponen	2021			
	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan dengan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> ). <i>Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.</i>			
	TW I 2021 <i>Q1 2021</i>	TW II 2021 <i>Q2 2021</i>	TW III 2021 <i>Q3 2021</i>	TW IV 2021 <i>Q4 2021</i>
Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR	61	59	63	65
<b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b>				
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)	4.890.656	4.809.152	4.749.762	5.026.632
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>				
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:				
Simpanan/Pendanaan stabil	187.588	208.442	215.553	220.121
Simpanan/Pendanaan kurang stabil	196.955	169.378	182.483	194.962
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:				
Simpanan operasional	755.149	828.106	765.499	982.383



dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

31 Desember 2020 / 31 Desember 2020			Portfolio category
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Income (Average for the last 3 years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	
(6)	(7)	(8)	
1.413.659	212.049	2.650.611	Basic Indicators Approach
<b>1.413.659</b>	<b>212.049</b>	<b>2.650.611</b>	<b>TOTAL</b>

• Liquidity Risk Management

Liquidity risk management is carried out by the Bank to meet due account payable or may be withdrawn at any time by Counterparty or customers from funding cash flows, liquid assets sold or used, or replacing them with other sources of funding.

In managing liquidity, Risk Management Task Force periodically prepares liquidity risk profile reports, measures the fulfillment of liquidity ratios determine by regulators in the form of Net Stable Funding Ratio (NSFR), Liquidity Coverage Ratio (LCR) and identifies liquidity risk measurement in the form of contractual and behavioral cash flow projections. The Bank's liquidity risk control provides cash funding sources, maintenance of liquid assets, and opens liquidity facilities in the form of committed or uncommitted with counterparties if Bank needs liquidity.

Monitoring conducted by Risk Management Task Force in the form of:

1. Liquidity Coverage Ratio (LCR);
2. Net Stable Funding Ratio (NSFR); and
3. Encumbrance assets.

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

2020				Component
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> ). Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.				
TW I 2020 Q1 2020	TW II 2020 Q2 2020	TW III 2020 Q3 2020	TW IV 2020 Q4 2020	
63	57	62	59	Number of Points data for LCR calculation
				HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
3.874.513	3.568.007	3.958.913	4.300.960	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
				Cash Out Flow
				Individual Deposit and MSME Funding, consist of :
137.711	148.643	149.139	165.800	Stable Deposit/Funding
174.089	167.057	191.856	192.049	Unstable Deposit/Funding
				Funding from corporate customers, consisting of
560.360	604.599	615.850	668.465	Operational deposits

Komponen	2021			
	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan dengan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> ). Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.			
	TW I 2021 Q1 2021	TW II 2021 Q2 2021	TW III 2021 Q3 2021	TW IV 2021 Q4 2021
Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	1.562.018	1.714.252	1.835.998	1.613.064
Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank				
Pendanaan dengan agunan ( <i>secured funding</i> )	-	-	-	-
Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:				
Arus Kas Keluar Atas Transaksi Derivatif	463	267	236	599
Arus Kas Keluar Atas Peningkatan Kebutuhan Likuiditas	-	-	-	-
Arus Kas Keluar Atas Kehilangan Pendanaan	-	-	-	-
Arus Kas Keluar Atas Penarikan Komitmen Fasilitas Kredit Dan Fasilitas Likuiditas	12.721	12.923	8.040	6.356
Arus Kas Keluar Atas Kewajiban Kontraktual Lainnya Terkait Penyaluran Dana	1.186.327	561.526	1.004.630	560.691
Arus Kas Keluar Atas Kewajiban Kontijensi Pendanaan Lainnya	4.426	3.815	6.133	4.061
Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya	126.564	103.441	178.722	85.553
<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>	<b>4.032.210</b>	<b>3.602.151</b>	<b>4.197.296</b>	<b>3.667.790</b>
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>				
Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-	-	-
Tagihan berasal dari pihak lawan ( <i>counterparty</i> )	774.034	899.422	849.776	975.368
Arus kas masuk lainnya	162.652	108.983	105.155	91.846
<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>	<b>936.685</b>	<b>1.008.405</b>	<b>954.930</b>	<b>1.067.214</b>
<b>TOTAL HQLA</b>	<b>4.890.656</b>	<b>4.809.152</b>	<b>4.749.762</b>	<b>5.026.632</b>
<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>	<b>3.095.525</b>	<b>2.593.746</b>	<b>3.242.365</b>	<b>2.600.576</b>
LCR (%)	157,99%	185,41%	146,49%	193,29%

Component	2020			
	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> ). Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.			
	TW I 2020 Q1 2020	TW II 2020 Q2 2020	TW III 2020 Q3 2020	TW IV 2020 Q4 2020
Non-operational Deposits and/or other non-operational liabilities	939.845	942.702	1.071.685	1.261.608
Bond issued by Bank	-	-	-	-
Secured Funding	-	-	-	-
Other cash outflow (additional requirement), consisting of:				
Cash outflow from derivative transactions	1.196	441	858	140
cash outflow from increased liquidity requirements	-	-	-	-
cash outflow from lost funding	-	-	-	-
cash outflow from withdrawal of commitments for credit facilities and liquidity facilities	4.434	3.983	7.228	8.041
cash outflow from other contractual liabilities related to channelling of funds	715.706	921.861	1.460.735	1.355.250
cash outflow from other contingency funding liabilities	14.386	13.105	4.991	5.350
Other contractual cash outflow	132.261	124.188	165.646	177.261
<b>TOTAL CASH OUTFLOW</b>	<b>2.679.987</b>	<b>2.926.580</b>	<b>3.667.988</b>	<b>3.833.963</b>
CASH INFLOW				
Secured lending	-	-	-	-
Receivables by counterparty	563.887	848.561	750.587	864.031
Other cash inflow	252.758	66.318	85.069	121.540
<b>TOTAL CASH INFLOW</b>	<b>816.645</b>	<b>914.879</b>	<b>835.656</b>	<b>985.571</b>
<b>TOTAL HQLA</b>	<b>3.874.513</b>	<b>3.568.007</b>	<b>3.958.913</b>	<b>4.300.960</b>
<b>TOTAL NET CASH OUTFLOWS</b>	<b>1.863.342</b>	<b>2.011.700</b>	<b>2.832.332</b>	<b>2.848.392</b>
LCR (%)	207,93%	177,36%	139,78%	151,00%

## Net Stable Funding Ratio

Net Stable Funding Ratio

No.	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan Desember - 2021 Position Report Dated December - 2021					Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity					
		Tanpa Jangka Waktu' No Specified Maturity'	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < 1 year	≥ 1 tahun ≥ 1 year		
1	Modal :	9.260.966	-	-	-	9.260.966	
2	Modal sesuai POJK KPMM	9.285.176	-	-	-	9.285.176	
3	Instrumen modal lainnya	(24.209)	-	-	-	(24.209)	
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	3.904.472	6.886.584	493.857	64.707	10.340.568	
5	Simpanan dan pendanaan stabil	1.272.312	1.084.196	32.257	6.117	2.275.443	
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	2.632.160	5.802.389	461.600	58.591	8.065.125	
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	4.170.694	14.470.488	2.225.870	1.431.905	7.898.605	
8	Simpanan operasional	4.137.480	-	-	-	2.068.740	
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	33.214	14.470.488	2.225.870	1.431.905	5.829.865	
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	332.108	-	-	-	
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	732.405	29.458	269	704	46.803	
12	NSFR liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	732.405	29.458	269	704	46.803	
14	Total ASF					27.546.942	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					100.516	
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	190.866	-	-	-	95.433	
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus ( <i>performing</i> )	1.831	7.729.087	4.103.226	22.268.834	24.799.690	
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-	
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	1.831	125.626	90.655	327	64.498	
20	kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia dan bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain, yang diantaranya:	-	7.603.271	4.011.977	22.149.307	24.634.535	
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-	
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijamin, yang diantaranya :	-	189	484	15.542	13.548	
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	2	110	5.276	3.485	

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

	Posisi Tanggal Laporan Desember - 2020 Position Report Dated December - 2020					ASF Components
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity				Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	
	Tanpa Jangka Waktu' No Specified Maturity'	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < year	≥ 1 tahun ≥ 1 year		
	7.194.837	-	-	-	7.194.837	Capital :
	7.209.682	-	-	-	7.209.682	Regulatory Capital
	(14.846)	-	-	-	(14.846)	Other capital instruments
	3.448.347	5.593.853	470.885	74.909	8.697.462	Deposits from individual customers and funding from micro and small business customers:
	1.134.325	73.388	7.817	5.015	1.159.769	Stable deposit/funding
	2.314.022	5.520.465	463.068	69.895	7.537.693	Unstable deposit/funding
	2.863.732	10.909.632	3.543.458	2.582.700	8.501.318	Funding from corporate customers, consisting of
	2.863.732	-	-	-	1.431.866	Operational Deposits
	-	10.909.632	3.543.448	2.582.700	7.069.448	Other funding from corporate customers
	-	663.480	3.928	-	-	Liabilities with matching interdependent assets
	480.585	17.396	444	245	46.431	Other liabilities and assets :
		-	-	-		NSFR derivative liabilities
	480.585	17.396	444	245	46.431	All other liabilities and equity not included in the above categories
					24.440.043	Total ASF
					68.281	Total NSFR HQLA
	328.308	-	-	-	164.154	Deposits held at other financial institutions for operational purposes
	-	7.877.748	4.069.110	18.205.820	21.382.542	Performing loans and securities
	-	-	-	-	-	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA
	-	119.914	49.775	856	43.730	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions
	-	7.757.719	4.019.164	18.184.054	21.321.690	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to government, other government, Bank Indonesia, central banks and public sector entities, of which:
	-	-	-	-	-	Meet qualification for a risk weight of 35% or less according to SE OJK "RWA for Credit Risk"
	-	116	96	13.786	11.824	Performing residential mortgages, of which:
	-	-	75	3.968	2.616	Meet qualification for a risk weight of 35% or less according to SE OJK "RWA for Credit Risk"

No.	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan Desember - 2021 Position Report Dated December - 2021					Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity					
		Tanpa Jangka Waktu' No Specified Maturity'	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < 1 year	≥ 1 tahun ≥ 1 year		
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar ( <i>performing</i> ) yang tidak sedang dijaminan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	-	-	98.382	83.625	
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	332.108	-	-	-	
26	Aset lainnya :	698.606	312.460	5.771	2.148.846	3.165.683	
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-	-	-	-	-	
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai <i>initial margin</i> untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default <i>fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)	-	-	-	-	-	
29	NSFR aset derivatif	-	-	-	-	-	
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>	-	-	-	-	-	
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	698.606	312.460	5.771	2.148.846	3.165.683	
32	Rekening Administratif	-	3.152.702	-	-	34.893	
33	Total RSF	-	-	-	-	28.196.215	
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih ( <i>Net Stable Funding Ratio</i> (%))	-	-	-	-	97,70%	

### Risiko Likuiditas - Aset terikat (*Encumbrance*) (ENC)

*Risk of Asset Encumbrance Liquidity*

31 Desember 2021 / December 31, 2021			
Aset Terikat <i>Encumbered</i>	aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas <i>assets that are kept or agreed upon with Central Bank but have not been used to generate liquidity</i>	Aset tidak terikat <i>Unencumbered</i>	Total
595.244,88	1.042.841,62	4.539.549,56	6.177.636,06

#### • Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko kerugian finansial atau lainnya yang terjadi karena litigasi atau kasus hukum. Pengelolaan risiko hukum dilakukan oleh Departemen *Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Departemen *Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis berperan sebagai mitra bagi seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa semua risiko hukum potensial yang berkaitan dengan transaksi/perjanjian antara Bank dengan nasabah, karyawan dan pihak ketiga lainnya dapat dimitigasi dengan baik.

Proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui mekanisme:

- » *Review* secara berkala atas perjanjian Bank dengan pihak ketiga dan mengupayakan perbaikan atas kelemahan perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
- » Menangani perkara hukum yang melibatkan Bank serta memantau proses penanganannya dengan melakukan upaya sesuai hukum untuk melindungi kepentingan hukum dan bisnis Bank.
- » Melakukan analisis/*assessment* Risiko Hukum pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank.



Posisi Tanggal Laporan Desember - 2020 Position Report Dated December - 2020						ASF Components
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity				Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value		
Tanpa Jangka Waktu' No Specified Maturity'	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < year	≥ 1 tahun ≥ 1 year			
-	-	-	3.155	2.682		Securities with performing and non performing categories that are unsecured, not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities
-	663.480	3.928	-	-	Assets with matching interdependent liabilities	
307.111	408.964	3.151	2.204.547	2.923.772	Other Assets	
-	-	-	-	-	Physical traded commodities, including gold	
-	-	-	-	-	Cash, securities, and other assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	
-	-	-	-	-	NSFR derivative assets	
-	-	-	-	-	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin	
307.111	408.964	3.151	2.204.547	2.923.772	All other assets not included in the above categories	
-	4.330.119	64.459	17.750	21.583	Off-balance sheet items	
-	-	-	-	24.560.333	Total RSF	
-	-	-	-	99,51%	Net Stable Funding Ratio (%)	

dalam jutaan Rupiah  
in million Rupiah

31 Desember 2020 / December 31, 2020			
Aset Terikat (Encumbered)	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas Assets that are kept or agreed upon with Central Bank but have not been used to generate liquidity	Aset tidak terikat Unencumbered	Total
190.571,39	885.741,75	366.180,39	1.442.493,54

• Legal Risk Management

Legal risk is the risk of financial or other loss arising from litigation or legal cases. Legal risk management is carried out by Corporate Legal and Legal Support Department in the Business Unit together with Risk Management Task Force. Corporate Legal and Legal Support Department in the Business Unit serves as a partner for all work units to ensure that all potential legal risks relating to transactions/ agreements between the Bank and customers, employees and other third parties can be properly mitigated.

The legal risk management process is conducted through the mechanisms:

- » Periodic review of the Bank's agreements with third parties and seek improvement of the weaknesses of the agreements that may cause losses to the Bank.
- » Handle legal cases involving the Bank and monitor its handling process by making legal efforts to protect the Bank's legal and business interests.
- » Conducting analysis/assessment of Legal Risk on new/existing products, activities and transactions of the Bank.

- **Pengelolaan Risiko Strategik**

Pengelolaan Risiko Strategik menjadi tanggung jawab Direksi yang dilakukan bersamaan dengan pengawasan dari Dewan Komisaris. Dalam prosesnya, pengelolaan risiko ini dilaksanakan oleh Divisi Corporate Planning dengan dukungan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Risiko strategik merupakan fungsi identifikasi, pengukuran serta pengelolaan dari kesesuaian antara tujuan strategis organisasi, strategi bisnis yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut, dan kualitas implementasinya. Melalui penetapan rencana bisnis jangka pendek dan menengah yang mempertimbangkan risiko, baik dari internal maupun eksternal, bank mampu mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Hal ini disertai dengan evaluasi rencana bisnis dan analisa berkala atas lingkungan bisnis, makro dan mikro, termasuk perkembangan regulasi.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil aktual. Selain itu, faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi bank di pasar, dan kondisi makro ekonomi.

- **Pengelolaan Risiko Kepatuhan**

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK. Risiko Kepatuhan di lingkup Bank dikelola oleh bersama-sama oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan kerangka kerja sesuai kebijakan kepatuhan serta memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalkan dampak risiko yang ditimbulkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional yang didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten dari seluruh unit kerja.

- **Strategic Risk Management**

*Strategic Risk Management is the responsibility of the Board of Directors carried out in conjunction with the supervision of the Board of Commissioners. In the process, this risk management is carried out by the Corporate Planning Division with the support of the Risk Management Task Force and the Compliance Task Force.*

*Strategic risk is a function in identification, measurement and management of the conformity between the strategic objectives of organization, business strategies prepared to achieve the goals, and quality of their implementation. Through the establishment of short- and medium-term business plans that consider risks, both internal and external, banks are able to identify and respond to changing business environments. This is accompanied by evaluation of the business plan and periodic analysis of the business environment, macro and micro, including regulatory developments.*

*Strategic risk measurement and its measurement parameters are carried out based on the Bank's performance by comparing the results achieved with the actual results. In addition, other factors in identification of strategic risks include the suitability of strategy to conditions of bank's position in the market, and macroeconomic conditions.*

- **Compliance Risk Management**

*Compliance Risk is a risk arising cause the Bank does not comply with and/or not implement the prevailing laws and regulations and not fulfilling the commitments agreed with OJK. Compliance Risks within the Bank are managed jointly by the Risk Management Task Force and the Compliance Task Force responsible for establishing and maintaining a framework in accordance with compliance policies and ensuring that the risk management process can run properly so as to minimize the impact of risks posed by non-compliance with the applicable provisions and/or regulations.*

*Compliance risk management strategy is carried out through the implementation of tasks and responsibilities of the Risk Management Task Force that is independent of operational work units supported by the consistent implementation of internal control systems for all of work units.*

• Pengelolaan Risiko Reputasi

Bank menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan operasional perbankannya dengan memprioritaskan pelayanan kepada nasabahnya. Risiko reputasi sangat mungkin timbul dari kegagalan mitigasi yang efektif dari satu atau lebih risiko kredit, likuiditas, pasarhukum, regulasi, dan risiko operasional, atau gagal untuk mematuhi standar sosial, lingkungan dan etika yang memberi dampak terhadap harapan dari *stakeholders* dan perolehan pendapatan di kemudian hari. Risiko Reputasi pada Bank dikelola oleh Departemen *Corporate Communication* dan *Departemen Service Quality*, dengan dukungan dari Divisi Manajemen Risiko yang melakukan pemantauan atas kesesuaian pelaksanaannya.

Strategi pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- » Pemantauan pemberitaan yang berhubungan dengan Bank dalam berbagai media
- » Penetapan/standarisasi kualitas layanan dan pengujian atas kualitas layanan yang dijalankan oleh unit-unit bisnis
- » Komunikasi aktif dan terbuka dengan seluruh pihak *stakeholder*; baik pada saat kondisi normal maupun pada saat kondisi krisis reputasi.
- » Melakukan analisis/assessment Risiko Reputasi pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank.

• Reputation Risk Management

*The Bank's maintains the principle of prudence in carrying out its banking operational policies by prioritizing services to its customers. Reputational risks are highly likely to arise from the failure of effective mitigation of one or more credit, liquidity, market, laws, regulations, and operational risks, or failure to comply with social, environmental and ethical standards that impact the expectations of stakeholders and future revenue generation. Reputation Risk at the Bank is managed by the Corporate Communication Department and Service Quality Department, with the support of the Risk Management Division which conducts monitoring of the suitability of its implementation.*

*Reputation risk management strategy is carried out through the following activities:*

- » *Monitoring of news related to the Bank in various media;*
- » *Determination/ standardization of service quality and testing of the quality of services run by business units;*
- » *Active and open communication with all stakeholders; both in normal times and in times of reputational crisis.*
- » *Performing Reputation Risk analysis/assessment on new/existing products, activities and transactions of the Bank.*

### Tinjauan atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

Fungsi pengawasan dan evaluasi atas proses manajemen risiko Bank dilakukan oleh berbagai komite yang berkaitan dengan risiko dan Divisi SKAI. Informasi hasil evaluasi dari beberapa komite eksekutif yang beranggotakan seluruh jajaran Direksi dan Pejabat Eksekutif dibahas pula melalui rapat Direksi yang dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam rapat tersebut, selain dilakukan pembahasan atas laporan eksposur risiko setiap bulan, juga dilakukan pembahasan terhadap hal-hal spesifik lainnya seperti pembahasan kecukupan modal terhadap tingkat risikonya, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, persetujuan atas limit risiko serta persetujuan metodologi yang digunakan dalam proses pengukuran risiko.

### Review on Effectiveness of the Implementation of Risk Management

*The oversight and evaluation functions of the Bank's risk management process are carried out by various committees relating to risk and the Internal Audit Division. Information on the results of evaluations from several executive committees - consisting of all members of the Board of Directors and Executive Officers - was also discussed through a Board of Directors meeting chaired by the President Director. In a reesebut meeting, in addition to discussing the risk exposure report every month, also discussing other specific matters such as discussion of capital adequacy on the level of risk, approval of policies and procedures, approval of risk limits and approval of methodology used in the measurement process risk.*

Adapun peran Divisi SKAI sebagai pelaksana atas pengendalian internal Bank secara rutin melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kualitas dan proses GCG secara bankwide. Disamping evaluasi secara internal, evaluasi manajemen risiko secara independen juga diperoleh dari audit eksternal maupun pihak-pihak eksternal lainnya seperti Bank Woori Korea sebagai entitas induk. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan selama tahun 2021, secara umum sistem manajemen risiko yang diterapkan Bank telah memadai dan berjalan efektif.

Hasil penilaian manajemen risiko sesuai SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pada bulan desember 2021 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk memiliki peringkat 2, mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

*The role of the Internal Audit Division as the executor of the Bank's internal control routinely evaluates and recommends the quality and process of GCG on a bankwide basis. Besides internal evaluation, an independent risk management evaluation is also obtained from external audits and other external parties such as Bank Woori Korea as the parent entity. Based on the results of the assessment conducted in 2020, in general the risk management system implemented by the Bank is adequate and effective.*

*The results of the risk management assessment are in accordance with SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 concerning Assessment of Commercial Bank Soundness Level. In december 2021, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk was at the 2<sup>nd</sup> rank, which reflected the condition of the Bank which is generally healthy so that it is considered capable of facing significant negative effects from changes in business conditions, and other external factors reflected in the ratings of the assessment factors, including profile risk, GCG implementation, profitability, and generally good capital. If there are weaknesses, in general these weaknesses are less significant.*

# Fungsi Kepatuhan

## Compliance Function

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank sejalan dengan perkembangan teknologi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, Bank dihadapkan pada penambahan eksposur risiko sehingga diperlukan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) untuk memitigasi risiko tersebut.

Peran dan fungsi kepatuhan dalam perbankan adalah memastikan eksposur risiko dalam kegiatan usaha Bank dapat ditekan dengan berbagai cara tindakan yang bersifat preventif (*ex-ante*). Merujuk pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, disebutkan bahwa fungsi kepatuhan meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Saat ini BWS telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

### Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

BWS telah menunjuk Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan yaitu Sadhana Priatmadja dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.

*Due to the increasing number of the complexity of the Bank's business activities in accordance to technology development, globalization and financial market integration, Bank is facing on adding risk exposure so that preventive (*ex-ante*) or curative (*ex-post*) effort can be needed to mitigating the risk.*

*The role and function for Compliance in bank are ensuring risk exposure in Bank's Business activities can be pressed with variety of action that are preventive (*ex-ante*). Referring to OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, mentioned that the Compliance function is including to action:*

- *Realizing the implementation of a culture of compliance at all levels of the Bank's organization and business activities.*
- *Managing compliance risks faced by the Bank.*
- *Ensuring that the policies, regulations, systems, procedures and business activities carried out by the Bank are in accordance with OJK Regulations and applicable laws and regulations.*
- *Monitor the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the OJK and/or other authorized supervisory authorities.*

*At present, BWS has policies and procedures for compliance was stated the duties and responsibilities of Compliance Division (SKK) in carrying out the compliance function.*

### Director in charge of Compliance Function

*BWS has appointed a Director in charge of Compliance Function namely Sadhana Priatmadja with the following duties and responsibilities:*

- *Formulating strategies to encourage the creation of a bank compliance culture.*
- *Proposing compliance policies or compliance principles that will be determined by the Board of Directors.*
- *Establishing compliance systems and procedures that will be used to develop Bank internal rules and guidelines.*
- *Ensuring that all system and procedure policies and business activities carried out by the bank are in accordance with the provisions of the OJK/Bank Indonesia and applicable laws and regulations.*
- *Minimizing bank compliance risk.*

Nama Pelatihan Training Names	Peserta Participants	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Inhouse Training: Tindak Pidana Bank with speaker: 1. Dr. Lastuti Abubakar SH. MH. 2. Elvis Kabangnga SH. MH. <i>Inhouse Training: Bank Crime with the following speakers: 1. Dr. Lastuti Abubakar SH. MH. 2. Elvis Kabangnga SH. MH.</i>	1	23 Juni 2021 June 23, 2021	Bank Indonesia
Pelatihan Tindak Pidana Perbankan <i>Training on Banking Crime</i>	3	27 Juni 2021 June 27, 2021	Mardika Edukasi Gemilang
Workshop Prosedur Internal Kode Etik Pasar <i>Workshop on Internal Procedure of Market Code of Conduct</i>	2	30 Juni 2021 June 30, 2021	Bank Indonesia
Efisiensi dan Efektivitas pada SSK <i>SSK Efficiency and Effectiveness</i>	1	1 Juli 2021 July 1, 2021	LPPI
Business Continuity Managamnet System (BCMS) Based On ISO 22301:2019: Manajemen Keberlangsungan Bisnis Selama Pandemi COVID-19 <i>Business Continuity Managamnet System (BCMS) Based On ISO 22301:2019: Business Continuity Management During the COVID-19 Pandemic</i>	1	1-2 Juli 2021 July 1-2, 2021	Infobank
Virtual Seminar LPPI #53-Menuju Bank Digital : Pertarungan antara Bank Besar dan Perusahaan Digital Kecil <i>LPPI Virtual Seminar #53-Towards a Digital Bank: Competition between Top Banks and Small Digital Companies</i>	1	15 Juli 2021 July 15, 2021	LPPI
Tinjauan Hukum mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Legal Review on Anti-Tipping Off Provisions in the Prevention and Eradication of Money Laundering</i>	1	21 Juli 2021 July 21, 2021	PPATK
EY - Forensics webinar: ISO 37001 - Lessons Learnt from Early Implementation & Anti-Bribery Controls Improvement <i>EY - Forensics webinar: ISO 37001 - Lessons Learnt from Early Implementation &amp; Anti-Bribery Controls Improvement</i>	1	28 Juli 2021 July 28, 2021	EY Forensic
Undangan Launching & Registrasi Aplikasi SIPENDAR <i>Invitation to SIPENDAR Application Launch &amp; Registration</i>	1	2 Agustus 2021 August 2, 2021	PPATK
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 <i>Risk Management Certification Level 4</i>	1	21-22 Agustus 2021 August 21-22, 2021	Efektifpro
Perkembangan Teknologi di Indonesia dan Visi Digitalisasi Nasional Kepada Seluruh Pelaku Sektor Jasa Keuangan <i>Technological Development in Indonesia and National Digitalization Vision for All Financial Services Sector Actors</i>	1	27 Agustus 2021 August 27, 2021	OJK
Sosialisasi Ketentuan Bank Umum <i>Socialization on Commercial Bank Provisions</i>	3	1 – 2 September 2021 September 1-2, 2021	OJK
Sosialisasi SPAN dengan Kementerian Keuangan <i>Socialization by SPAN and Ministry of Finance</i>	1	8 September 2021 September 8, 2021	Kementerian Keuangan
Undangan Diskusi Lanjutan mengenai Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) <i>Invitation to Follow-Up Discussion on the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) Policy</i>	2	10 September 2021 September 10, 2021	Bank Indonesia
OJK Meeting terkait Mendukung Akselerasi Transformasi Digital Industri Perbankan <i>OJK Meeting related to Supporting the Acceleration of the Digital Transformation of the Banking Industry</i>	2	13 September 2021 September 13, 2021	OJK
Business Matching Digitalisasi Pembiayaan UMKM <i>Business Matching Digitizing MSME Financing</i>	1	18 September 2021 September 18, 2021	OJK
OJK Webinar on "Pencegahan Penyuapan melalui Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis SNI ISO 37001 dan Pemaparan SE KPK tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Industri Jasa Keuangan <i>OJK Webinar on "Prevention of Bribery through Implementation of Anti-Bribery Management System Based on SNI ISO 37001 and Presentation of KPK Circular Letter on Gratification Control related to the Financial Services Industry</i>	1	21 September 2021 September 21, 2021	OJK
LPPI Mengelola Risiko Siber dalam Industri Digital <i>LPPI Managing Cyber Risk in the Digital Industry</i>	1	23 September 2021 September 23, 2021	LPPI



- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku.
  - Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan.
- *Taking precautionary measures so that the policies and/or decisions taken by the Bank's Directors do not deviate from OJK/Bank Indonesia Regulations and applicable laws and regulations.*
  - *Performing other tasks related to the compliance function*

### Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara umum tugas dan tanggung jawab dari SKK adalah sebagai berikut:

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Bank memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank. Berikut adalah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh Satuan Kerja Kepatuhan sepanjang tahun 2021.

### Compliance Division

*Compliance Division was formed by referring to OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks. In general, the duties and responsibilities of the Compliance Division is as follows:*

- *Making steps in order to support the creation of a compliance culture in all Bank business activities at every organizational level.*
- *To identify, measurement, monitoring and controlling on Compliance Risk with referred to OJK Regulation concerning the Implementation of the Risk Management of Commercial Banks.*
- *Assessing and evaluating the effectiveness, the sufficiency and the adequacy of policies, provisions, systems, and procedures that were owned by the Bank with the applicable law and regulation.*
- *Review and/or recommendation towards update and refinement of policies, provisions, systems, and procedures that were owned by the Bank to comply with OJK/Bank Indonesia Regulations and the applicable law and regulation.*
- *Endeavored to ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities were in accordance with OJK/Bank Indonesia Regulations and applicable laws and regulations.*

### Competency Development for Compliance Division

*Bank has policies related to the development and improvement of competencies of the Compliance Division, conducted through various trainings and education with funding fully that become the Bank's responsibility. The following are the development and training programs participated by the Compliance Division throughout 2021.*

Nama Pelatihan Training Names	Peserta Participants	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Sosialisasi POJK dan SEOJK APOLO <i>Socialization on POJK and SEOJK APOLO</i>	1	14 Januari 2021 <i>January 14, 2021</i>	OJK
Sosialisasi Digitalisasi Laporan Perbankan <i>Socialization on Digitization of Banking Reports</i>	3	15 Januari 2021 <i>January 15, 2021</i>	OJK
Worshop SPAN BWS dan Kementerian Keuangan <i>Worshop by BWS SPAN and the Ministry of Finance</i>	1	20 Januari 2021 <i>January 20, 2021</i>	Kementerian Keuangan
Sosialisasi POJK dan SEOJK SLIK <i>Socialization on POJK and SEOJK SLIK</i>	1	21 Januari 2021 <i>January 21, 2021</i>	OJK
Sosialisasi Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui Front Office Perizinan Bagi Bank <i>Socialization on Bank Indonesia Integrated Licensing through Front Office Licensing for Banks</i>	1	3 Februari 2021 <i>February 3, 2021</i>	Bank Indonesia
Sosialisasi terkait Key Performance Indicator (KPI) <i>Socialization related to Key Performance Indicators (KPI)</i>	1	22-23 Februari 2021 <i>February 22-23, 2021</i>	FRESH CONSULTANT
Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Terbaru atas Bea Meterai <i>Socialization on the Latest Minister of Finance Regulation on Stamp Duty</i>	1	4 Maret 2021 <i>March 4, 2021</i>	Direktorat Jenderal Pajak
Data Privacy Webinar Series I - Personal Data Protection di Era Digital <i>Data Privacy Webinar Series - Personal Data Protection in Digital Era</i>	1	24 Maret 2021 <i>March 24, 2021</i>	PERBANAS
Pembahasan Diskontinuitas LIBOR dan Fasilitas Kredit Grup Sritex (Diskusi dengan Pengawas OJK) <i>Discussion on LIBOR Discontinuity and Sritex Group Loan Facility (Discussion with OJK Supervisor)</i>	1	5 April 2021 <i>April 5, 2021</i>	OJK
Sosialisasi Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP21) <i>Socialization on the 2020-2025 Indonesia Banking Development Roadmap (RP21)</i>	1	7 April 2021 <i>April 7, 2021</i>	FKDKP
Seminar Virtual LPPI - Sustainability Report <i>LPPI Virtual Seminar - Sustainability Report</i>	1	8 April 2021 <i>April 8, 2021</i>	LPPI
Sosialisasi Ketentuan LTV/FTV dan Uang Muka serta Ketentuan RIM PLM <i>Socialization on LTV/FTV Provisions and Advances as well as RIM PLM Provisions</i>	1	9 April 2021 <i>April 9, 2021</i>	Bank Indonesia
Virtual Meeting Sosialisasi Perubahan PMK bersama PERBANAS <i>Virtual Meeting for Socialization on PMK Changes with PERBANAS</i>	1	27 April 2021 <i>April 27, 2021</i>	PERBANAS
Seminar Virtual LPPI - Internal Control <i>LPPI Virtual Seminar - Internal Control</i>	1	29 April 2021 <i>April 29, 2021</i>	LPPI
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laku Pandai <i>Draft OJK Regulation on Laku Pandai</i>	1	11 Mei 2021 <i>May 11, 2021</i>	OJK
Mekanisme Pengkinian Data Berupa Penghapusan Tagging Restrukturisasi COVID-19 pada SLIK <i>Data Update Mechanism in the Form of Elimination of COVID-19 Restructuring Tagging on SLIK</i>	1	20 Mei 2021 <i>May 20, 2021</i>	OJK
Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum <i>LPS Regulation Number 1 of 2021 concerning Resolution Plans for Commercial Banks</i>	1	27 Mei 2021 <i>May 27, 2021</i>	LPS
Virtual Seminar: Keuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional <i>Virtual Seminar: Sustainable Finance in National Economic Recovery</i>	1	15 Juni 2021 <i>June 15, 2021</i>	LPPI
Sosialisasi APOLO (Aplikasi Laporan Online OJK) Laporan APUPPT <i>Socialization on APOLO (OJK Online Report Application) AML CFT Report</i>	1	16 Juni 2021 <i>June 16, 2021</i>	OJK
Webinar tentang Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi <i>Webinar on Economic Recovery during a Pandemic</i>	1	18 Juni 2021 <i>June 18, 2021</i>	Univ. Sebelas Maret
Rapat Koordinasi terkait Persiapan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) <i>Coordination Meeting related to Preparation for Implementation of Information System Application for Suspected Terrorism Financing (SIPENDAR)</i>	1	22 Juni 2021 <i>June 22, 2021</i>	PPATK
Pelatihan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal bersama UNODC <i>Training on Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction with UNODC</i>	1	23-24 Juni 2021 <i>June 23-24, 2021</i>	OJK

Nama Pelatihan Training Names	Peserta Participants	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Dialog Regulasi terkait Pembiayaan UMKM <i>Regulatory Dialogue regarding MSME Financing</i>	1	24 September 2021 <i>September 24, 2021</i>	Bank Indonesia
OJK Webinar on Keamanan Siber: Ancaman Potensial, Mitigasi Risiko, dan Mekanisme Koordinasi Antar Lembaga <i>OJK Webinar on Cyber Security: Potential Threats, Risk Mitigation, and Inter-Agency Coordination Mechanisms</i>	1	27 September 2021 <i>September 27, 2021</i>	OJK
Konvensi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNi) bidang Manajemen Risiko <i>National Convention on the Draft Indonesian National Qualifications Framework (RKKNi) in the field of Risk Management</i>	1	28 September 2021 <i>September 28, 2021</i>	PPATK
Training Antifraud Awareness & Sanction <i>Training on Antifraud Awareness &amp; Sanction</i>	1	6 Oktober 2021 <i>October 6, 2021</i>	Kantor Pusat Treasury
OJK Mengajar 2021: Pengembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia <i>OJK Teaching 2021: Development of Digital Financial Innovations and Beware of Illegal Investments in Indonesia</i>	1	7 Oktober 2021 <i>October 7, 2021</i>	OJK
FKDKP Meeting: Cyber Security <i>FKDKP Meeting: Cyber Security</i>	1	7 Oktober 2021 <i>October 7, 2021</i>	FKDKP
Training Antifraud Awareness & Sanction <i>Training Antifraud Awareness &amp; Sanction</i>	1	14 Oktober 2021 <i>October 14, 2021</i>	Kantor Pusat Treasury
Workshop Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) <i>Workshop on Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM)</i>	2	19 Oktober 2021 <i>October 19, 2021</i>	Bank Indonesia
Webinar : Leadership under Uncertainties <i>Webinar : Leadership under Uncertainties</i>	1	21 Oktober 2021 <i>October 21, 2021</i>	OJK
OJK Mengajar : Transformasi Perbankan di Era Digital <i>OJK Teaching: Banking Transformation in the Digital Era</i>	1	22 Oktober 2021 <i>October 22, 2021</i>	OJK
Launching Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan <i>Launching of Blueprint for Digital Banking Transformation</i>	1	26 Oktober 2021 <i>October 26, 2021</i>	OJK
Undangan Dengar Pendapat dan Tanggapan Rancangan Surat Edaran OJK tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional <i>Invitation to Hearing and Responses to Draft OJK Circular Letter on Banking Accounting Guidebook for Conventional Commercial Banks</i>	1	29 Oktober 2021 <i>October 29, 2021</i>	OJK
E-learning Soft Skill Series "Be Proactive" <i>E-learning Soft Skill Series "Be Proactive"</i>	2	8 – 19 November 2021 <i>November 8 - 19, 2021</i>	Internal
OJK Mengajar 2021 : Dampak Pandemi terhadap Perekonomian dan Sistem Keuangan, serta Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional <i>OJK Teaching 2021: The Impact of the Pandemic on the Economy and Financial System, and The Role of the OJK in the National Economic Recovery</i>	1	12 November 2021 <i>November 12, 2021</i>	OJK
OJK Mengajar 2021 : Bijak Berinvestasi di Pasar Modal Bagi Investor Pemula dan Kebijakan Strategis OJK di Masa Pandemi untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional <i>OJK Teaching 2021: Wisely Investing in the Capital Market for Beginners and OJK's Strategic Policies in the Pandemic to Accelerate National Economic Recovery</i>	1	18 November 2021 <i>November 18, 2021</i>	OJK
E-learning Soft Skill Series "Effective Coaching Skills" <i>E-learning Soft Skill Series "Effective Coaching Skills"</i>	1	23 November – 6 Desember 2021 <i>November 23 - December 6, 2021</i>	Internal
Sosialisasi BI-FAST <i>Socialization on BI-FAST</i>	1	25 November 2021 <i>November 25, 2021</i>	Bank Indonesia
Sosialisasi Tips and Trick Pengajuan Permohonan Persetujuan dan Pelaporan Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel <i>Socialization on Tips and Trick for Application for Approval and Reporting on Retail Payment System Development</i>	1	25 November 2021 <i>November 25, 2021</i>	Bank Indonesia
Sosialisasi Materi Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2021 <i>Socialization on Report Materials for Compliance Inspection 2021</i>	1	9 Desember 2021 <i>December 9, 2021</i>	Bank Indonesia

Nama Pelatihan Training Names	Peserta Participants	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Diseminasi Peraturan PPATK Nomo 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK <i>Dissemination of PPATK Regulation No. 15 of 2021 concerning Procedures for Requesting Information to PPATK</i>	1	14 Desember 2021 December 14, 2021	OJK
Diskusi Awal Perubahan Ketentuan GWM, RIM dan PLM seiring implementasi BI-FAST <i>Initial Discussion on Changes to Statutory Reserves, RIM and PLM Provisions in line with BI-FAST implementation</i>	3	15 Desember 2021 December 15, 2021	Bank Indonesia
Undangan Sosialisasi Penerbitan Penyempurnaan Ketentuan GWM dan RIM & PLM seiring Implementasi BI-FAST <i>Invitation to Issuance of Completion of Statutory Reserves and RIM &amp; PLM Provisions in line with BI-FAST Implementation</i>	3	30 Desember 2021 December 30, 2021	Bank Indonesia

### Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2021

### Implementation of the Compliance Division Program in 2021

Dalam mengimplementasikan fungsi kepatuhan, di tahun 2021 Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui:

*In implementing the compliance function, in 2021 the Director who supervises the compliance function is assisted by Compliance Division which is responsible for making steps in order to support the creation of a compliance culture in all Bank business activities at every organizational level, including through:*

- Melakukan analisa kepatuhan terhadap berbagai kegiatan yang memiliki eksposur risiko kepatuhan, antara lain penerbitan produk dan/atau aktivitas baru, rencana pengembangan jaringan kantor (pembukaan, penutupan, pemindahan alamat atau peningkatan status) maupun aktivitas lainnya yang dirasakan memerlukan analisa kepatuhan.
- Melakukan pemantauan secara terus menerus atas penerbitan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta menyampaikannya kepada Unit Kerja Terkait.
- Penyusunan *compliance* info yang menyampaikan isu-isu terkait kepatuhan melalui media situs web internal "Corporate Management System (CMS)".
- Pelaksanaan sosialisasi ketentuan internal Bank.
- Pelaksanaan *compliance test*.

- *Analyzing compliance with activities that have compliance risk exposures, including the issuance of new products and/or activities, office network development plans (opening, closing, changing addresses or status enhancements) and other activities that require compliance analysis.*
- *Conduct continuous monitoring of the issuance of OJK provisions and other statutory provisions, and submit them to the Related Division.*
- *Preparation of compliance info that addresses issues related to compliance through the internal media website "Corporate Management System (CMS)".*
- *Promulgation of internal provisions of the Bank.*
- *Implementation of compliance tests.*

# Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU & PPT)

## Implementation of The Anti Money Laundering & Combating The Financing of Terrorism Program (AML & CFT Program)

Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang termasuk di dalamnya penggunaan rekening untuk menampung hasil tindak pidana dan pendanaan terorisme, maka penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan penyelenggara jasa keuangan.

*Considering the growing spread of money laundering practices, including the use of accounts to accommodate the proceeds of crime and terrorism financing, the implementation of Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML and CFT) programs is an obligation for financial services companies.*

Merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, BWS telah memiliki Departemen APU & PPT yang bertugas melakukan berbagai upaya agar Bank menerapkan program APU dan PPT dengan pendekatan yang berbasis risiko.

*Referring to the Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Law No. 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Action of Terrorism, and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No. 23/POJK.01/2019 amendment of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 12/POJK.04/2017 concerning the implementation of Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism program in the financial services sector, BWS has an AML & CFT Department which has task in carried out various efforts so that the Bank implement the AML and CFT Program based on a risk-based approach.*

### Kebijakan APU & PPT

Sejalan dengan regulasi penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, BWS telah melakukan penyempurnaan Kebijakan penerapan program APU dan PPT Penerapan program APU dan PPT di BWS meliputi:

### AML & CFT Policies

*In accordance with the implementation of Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program in Financial Services Sector, BWS has carried out the policy refinement in implementing of the AML and CFT Program. Implementation of AML and CFT program in BWS, including:*

Pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris <i>Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta melaksanakan pengawasan aktif melalui laporan rutin pelaksanaan program APU dan PPT <i>Provide approval for the policies and procedure the implementation of AML and CFT program and conducting active supervision through regular report of AML and CFT program implementation.</i>
Kebijakan dan Prosedur <i>Policies and Procedure</i>	Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan aktivitas Bank. <i>Ensuring that the policies and written procedure of AML and CFT program has been suitable with prevailing Law and regulations and suitability with the Bank's activities.</i>
Pengendalian Intern <i>Internal Control</i>	Pelaksanaan pemantauan secara rutin oleh Internal dan Eksternal Audit, untuk mengukur penerapan program APU PPT sesuai dengan peraturan yang berlaku. <i>Regularly monitoring by Internal and External Audit, to measure AML &amp; CFT program implementation in accordance with applicable regulation.</i>



Sistem Informasi Manajemen <i>Management Information System</i>	Pengembangan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi dan menyediakan Laporan profil dan transaksi yang mendukung penerapan program APU dan PPT <i>Development of Information system that can be identify and provide profile and transaction report in supporting to AML and CFT implementation.</i>
Sumber Daya Manusia dan Pelatihan <i>Human Resources and Training</i>	Pemberian pelatihan bagi seluruh karyawan termasuk pelatihan secara periodik kepada Frontliner, baik secara tatap muka ataupun e-learning. <i>Provide the training for all employees including periodic training for frontliner, either face to face or e-learning</i>

## Pelaksanaan Program APU & PPT di Tahun 2021

BWS memiliki komitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara berkelanjutan yang sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2021, BWS telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang antara lain meliputi:

- Melaksanakan aktivitas uji tuntas nasabah (CDD – *Customer Due Diligence*) kepada seluruh Nasabah dan uji tuntas tingkat lanjut (EDD – *Enhance Due Diligence*) untuk nasabah PEP dan nasabah berisiko tinggi lainnya.
- Melaksanakan aktivitas pelaporan kepada PPAK dan menindaklanjuti permintaan PPAK.
- Melaksanakan aktivitas pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Menindaklanjuti permintaan data dan informasi dari terkait penerapan APU dan PPT dari Bank koresponden.
- Menindaklanjuti permintaan informasi dan pemblokiran rekening dari KPK/Kantor Pajak/APGAKUM.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan pemenuhan realisasi target pengkinian data. Pada tahun 2021, BWS telah memenuhi target yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Meningkatkan penerapan fungsi *sanction screening* di dalam aktivitas operasional.
- Melaksanakan perbaikan Peraturan internal terkait penerapan APU dan PPT
- Melaksanakan pelatihan kepada karyawan internal terutama kepada *frontliner*. Di tahun 2021 telah dilaksanakan 28 kali internal training APU dan PPT
- Mengikuti training dan atau seminar dari eksternal sebanyak 26 kali.

## Implementation of the AML & CFT Program in 2021

BWS is committed to implement an Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Program in a sustainable manner that is in line with prevailing regulations and laws. During 2020, BWS has carried out various activities as the effort to implement the Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Program, includes the following:

- Conducting customer recognition (CDD) program and advanced customer recognition (EDD) for PEP customers and high-risk customers.
- Reporting the program's activity to The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC), and follow-up on INTRAC request.
- Reporting the program's activity to OJK.
- Follow-up on data request and information related to implementation of correspondent banks AML and CFT.
- Follow-up on information request and accounts blocking by KPK/Tax Office/APGAKUM.
- Coordinating the implementation of customer data update through target preparation and monitoring the fulfillment of target realization on data update. In 2020, BWS has fulfilled the target that submitted to OJK.
- Improving the implementation of screening sanction list function in operational activities.
- Improve the internal regulation related to AML and CFT implementation.
- Conducting training programs to all employees, especially to frontliner. In 2021, was held 28 times internal training of AML and CFT.
- Participate in the external training and or seminar for 26 times.



- Melaksanakan implementasi goAML untuk pelaporan ke PPATK mulai 1 Februari 2021.
  - Melaksanakan Financial Integrity Rating (FIR) dari PPATK dengan nilai 8.38 (kategori "Sangat Baik").
  - Melaksanakan implementasi Sistem Informasi terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) untuk pelaporan ke PPATK mulai 2 Agustus 2021.
- *Preparing the implementation of goAML system for PPATK reporting starting February 1, 2021.*
  - *Conduct financial integrity rating (FIR) from PPATK with score 8.38 ("Excellent" category).*
  - *Implementing the Information System for suspected Terrorism Financing (SIPENDAR) for PPATK reporting starting on August 2, 2021.*

### Rekapitulasi Pelaporan kepada PPATK

Recapitulation report to PPATK

Jenis Laporan Type of Reports	Jumlah Laporan Total Reports
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) <i>Reporting Transaction Finance Cash (LTKT)</i>	1.132
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) <i>Reporting Transaction Finance Suspicious (LTKM)</i>	17
Laporan Transaksi Dalam dan Ke Luar Negeri (LTKL) <i>Reporting Transaction Finance Transfer Fund (LTKL)</i>	186.222
Laporan SIPESAT <i>SIPESAT Report</i>	99.551

## Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

### Affiliate Transaction and Conflict of Interest

Pengungkapan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan adalah upaya pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

*Disclosure of affiliate transactions and conflicts of interest is an effort to fulfill OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliation Transaction and Conflict of Interest Transaction.*

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan BWS sesuai dengan Peraturan OJK di atas.

*Throughout 2021 there is no affiliated transactions in accordance with the OJK Regulations.*

Tanggal Date	Jenis Transaksi Type of Transactions	Pihak Terafiliasi Type of Transactions	Nilai Transaksi (Rp-juta) Transaction Value (IDR-million)	Hubungan Relationship
Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan pemilik Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

*In the event of a conflict of interest between the Bank and the owner of the Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Executive Officers and/or other parties related to the Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Executive Officers are prohibited from taking actions that have the potential to loss or reduce the Bank's profits.*

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

*Disclosure of transactions containing conflicts of interest, at least includes name and position for conflict of interest parties, name and position for decision maker, type of transaction, transaction value, and description.*

Selama tahun 2021 Bank tidak memiliki transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

*During 2021 the Bank does not have transactions containing Conflicts of Interest*

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position for Conflict of Interest Parties</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Position for Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transactions</i>	Nilai Transaksi (Rp-juta) <i>Transaction Value (IDR-million)</i>	Hubungan <i>Relationship</i>
Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>

## Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

### *Provision of Funds to Related Party and Large Exposures*

Pemberian kredit (penyediaan dana) kepada pihak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

*Provision of funds to related party has been implemented in accordance to prevailing provisions and has been approved by the Board of Commissioners.*

BWS telah menetapkan suatu kebijakan tertulis untuk BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait, serta penyediaan dana besar. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait, BWS menyusun dan melakukan pengkinian data daftar rincian pihak terkait secara terus-menerus. Data tersebut merupakan rincian pihak-pihak yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

*BWS has established a written policy regarding to Legal Lending Limit (LLL) and and the allocation of funds to related parties. In addition, to improve and facilitate the supervision of the provision of funds to related parties, BWS compiles and updates data of a detailed list of related parties on an ongoing basis. The data is a detail of the parties that share a common control relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management, and/or financial relationships.*

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti selama 2021 adalah sebagai berikut:

*Provision of funds to related parties and core debtors during 2021 is as follows:*

Penyediaan Dana <i>Provisions of Funds</i>	Jumlah Debitur <i>Total Debtor</i>	Nominal (Rp-juta) <i>(IDR-million)</i>
Kepada Pihak Terkait *) <i>To Related Party *)</i>	7	500.762
Kepada Debitur Inti: <i>To Core Debtors:</i>		
Individu <i>Individual</i>	25	5.486.656
Grup <i>Group</i>	25	9.290.898

# Rencana Kerja dan Kebijakan Strategis

## Work Plan and Strategic Policy

Di tahun 2020, dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada semua sektor terutama sektor ekonomi. Pandemi ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar. Lambatnya perekonomian ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Hal ini terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan.

Pandemi ini juga memberi dampak signifikan pada sector perbankan. Penyaluran kredit menjadi salah satu bisnis inti perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Selain itu, risiko kredit mengalami peningkatan sehingga perbankan mulai memitigasi risiko dengan semakin selektif dalam penyaluran kredit, tidak terkecuali BWS. Namun, dengan pengalaman bisnis dan inisiatif strategis yang dilakukan dapat menjadi faktor pendukung BWS dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Pada tahun 2021, BWS diproyeksikan akan mampu meningkatkan penyaluran kredit 10%-12% dibandingkan realisasi tahun 2020, dengan realisasi pertumbuhan penyaluran kredit mencapai 12,68%. Rasio efisiensi atau BOPO tahun 2021 ditargetkan sebesar 70%-76% dengan realisasi sebesar 70,28%. Hal ini berimbas pada Margin Bunga Bersih (NIM) yang ditargetkan sebesar 5%, dengan realisasi 4,16%. Selain itu, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ditargetkan 24%-27%, dengan realisasi sebesar 24,68%. Untuk pengelolaan kualitas aset atau NPL ditargetkan 1,1%-1,3% dengan realisasi sebesar 0,93%. Pada saat yang sama, BWS juga terus fokus pada perkembangan pembiayaan segmen konsumen dan korporasi dan berusaha untuk mencapai efisiensi dalam berbagai aspek operasional. Selama tiga tahun mendatang, BWS akan melakukan peningkatan bisnis secara berkelanjutan dengan pertumbuhan pada kisaran 15%-20% di tengah persaingan yang semakin ketat dan meningkatnya permintaan nasabah. Selain itu, BWS akan terus meningkatkan modal inti secara organik untuk memperkuat struktur permodalan.

*In 2020, the world including Indonesia faces the challenge of the COVID-19 pandemic which has a major impact on all sectors, especially the economic sector. The pandemic resulted in slow economic growth, making various countries combine policies for handling and large economic stimulus. The slow economy is characterized by worsening external environmental conditions and weakening domestic demand in line with declining business and consumer sentiment. This comes at the same time as falling commodity prices and financial market turmoil.*

*The pandemic also had a significant impact on the banking sector. Lending, which is one of the core banking businesses, was slightly restrained due to uncertainty and falling economic activity that resulted in a turnaround of money. In addition, credit risk has increased so that banks begin to mitigate risk by increasingly selective in lending, not least PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk ("BWS"). However, with business experience and strategic initiatives undertaken, BWS can face challenges in the future.*

*In 2021, BWS is projected to increase loan disbursement by 10%-12% compared to realization in 2020, by realizing the growth in loan disbursement reached 12.68%. Efficiency ratio or BOPO for 2021 is targeted at 70%-76% with a realization of 70.28%. This has an impact on the Net Interest Margin (NIM) which targeted at 5%, with a realization of 4.16%. In addition, the ratio Capital Adequacy Ratio (CAR) is targeted at 24%-27%, with a realization of 24.68%. For asset quality management or NPL is targeted at 1.1%-1.3% with a realization of 0.93%. At the same time, BWS also focuses on the development of consumer and corporate segment financing and strives to achieve efficiency in various aspects of operations. Over the next three years, BWS will continuously improve its business with growth in the range of 15%-20% amid increasing competition and increasing customer demand. In addition, BWS will continue to increase its core capital organically to strengthen its capital structure.*

Kebijakan dasar manajemen ditetapkan melalui 6 pilar utama yang meliputi:

1. Meningkatkan keunggulan bisnis dan operasional  
BWS akan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pengawasan di semua bidang, berinvestasi dalam sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dalam tiga tahun kedepan.
2. Mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang  
BWS akan meningkatkan penerapan budaya berbasis kinerja untuk memastikan peningkatan produktivitas yang lebih baik untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan operasional dan membangun hubungan yang mendalam dengan nasabah, baik institusi maupun individu.
3. Memprioritaskan kemudahan akses dan kualitas layanan  
BWS akan memperluas jaringan melalui unit pengembangan jaringan eksternal terutama segmen ritel dengan terus berinvestasi dalam pengembangan aplikasi dan sistem untuk mendukung perluasan bisnis dan terus memberikan kualitas dalam semua proses bisnis untuk menjadi penyedia layanan terbaik bagi nasabah.
4. Meningkatkan kesehatan dan efisiensi  
BWS akan mengambil langkah selektif dan akuntabel dan meningkatkan transparansi untuk meningkatkan sistem tata kelola, manajemen risiko yang efektif, dan sistem pengendalian intern yang memadai. BWS akan terus berupaya mendorong usaha-usaha untuk memperoleh dana murah untuk meningkatkan efisiensi dan menguatkan fungsi intermediasi.
5. Memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan  
BWS akan menggunakan kekuatan perusahaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial yang menyangkut lingkungan, kesehatan dan pendidikan, dengan terlibat dalam dialog konstruktif, berusaha untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan berkontribusi terhadap realisasi pembangunan sosial yang berkelanjutan.
6. Memperkuat organisasi dan sumber daya manusia  
BWS akan berusaha untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dinamis dan terbuka sehingga dapat berkembang dan tumbuh bersama dan melakukan investasi dalam sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dengan penerapan pelatihan yang terencana.

Untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana disebutkan diatas, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan mengembangkan produk Bank baru.
2. Meningkatkan layanan kepada pelanggan.

*The basic management policy is established through 6 main pillars which include:*

1. *Improving business and operational excellence  
BWS will improve and improve infrastructure, strengthen governance and improve the quality of supervision in all areas, invest in human resources to realize the vision in the next three years*
2. *Realizing sustainable and balanced growth  
BWS will enhance the implementation of a performance based culture to ensure better productivity improvements to optimize increased operating income and build deep relationships with customers, both institutional and individual.*
3. *Prioritize ease of access and quality of service  
BWS will expand the network through external network development units especially the retail segment by continuing to invest in application and system development to support business expansion and continue to provide quality in all business processes to become the best service provider for customers.*
4. *Improve health and efficiency  
BWS will take selective and accountable steps and increase transparency to improve governance systems, effective risk management, and adequate internal control systems. BWS will continue to strive to encourage efforts to obtain cheap funds to improve efficiency and strengthen the intermediation function.*
5. *Fulfilling social and environmental responsibilities  
BWS will use the power of the company to help address social issues concerning the environment, health and education, by engaging in constructive dialogue, seeking to fulfill social responsibility and contribute to the realization of sustainable social development.*
6. *Strengthen organization and human resources  
BWS will strive to create a dynamic and open organizational environment so that it can develop and grow together and invest in human resources through competency improvement with the implementation of planned training.*

*To achieve the vision and mission in accordance with the policy direction as mentioned above, the following steps are taken:*

1. *Prepare and develop new Bank products.*
2. *Improve service to customers*

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mencapai pertumbuhan dalam berbagai bisnis strategis yang meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bisnis korporasi</li> <li>b. Kredit UMKM</li> <li>c. Bisnis konsumen/ritel</li> <li>d. <i>Treasury dan Trade Finance</i></li> <li>e. Produk pendanaan</li> </ol> </li> <li>4. Akselerasi bisnis korporasi dengan membangun aliansi dengan perusahaan-perusahaan di industri utama yang memiliki pertumbuhan stabil.</li> <li>5. Kredit konsumen akan fokus pada peningkatan pertumbuhan melalui penguatan hubungan dengan mitra-mitra strategis dan penggunaan aplikasi dalam pinjaman.</li> <li>6. Kredit UMKM akan melanjutkan proses penguatan di arbisnis utama yang merupakan kekuatan dan kompetensi BWS untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan mempertahankan rasio kredit UMKM sebesar minimal 20% sesuai dengan peraturan OJK.</li> <li>7. Dana pihak ketiga yang berfokus kepada peningkatan kebijakan dan struktur sumber pendanaan.</li> <li>8. Memperkuat likuiditas dan akan terus memantau dampak perlambatan ekonomi global terhadap Indonesia.</li> <li>9. Perluasan jaringan yang mempertimbangkan efisiensi.</li> <li>10. Pengembangan <i>digital banking</i> dengan menciptakan ekosistem digital guna menunjang kebutuhan perbankan nasabah serta terus menerus memperkuat bisnis ke arah digital.</li> <li>11. Terus berupaya mengurangi kredit macet dan menjaga NPL pada tingkat rendah dengan meningkatkan kualitas aset dan mengurangi kredit bermasalah (NPL) secara signifikan melalui penagihan secara intensif, restrukturisasi, dan menjual aset agunan.</li> <li>12. Manajemen risiko dalam aktivitas bisnis.</li> <li>13. Memperkuat organisasi yang efisien, efektif dan dapat bersaing di pasar.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>Achieve growth in a variety of strategic businesses that include:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Corporate business</i></li> <li>b. <i>MSME Loans</i></li> <li>c. <i>Consumer/retail business</i></li> <li>d. <i>Treasury dan Trade Finance</i></li> <li>e. <i>Funding products</i></li> </ol> </li> <li>4. <i>Accelerate corporate business by building alliances with companies in key industries that have stable growth</i></li> <li>5. <i>Consumer loans will focus on improving growth through strengthening partnership relationships with strategic partners and the use of applications in loans.</i></li> <li>6. <i>MSMEs loans will continue the process of strengthening in the main business area which is the strength and competence of BWS to improve and develop businesses with a high rate of return and maintain the MSME loan ratio of at least 20% in accordance with OJK regulations.</i></li> <li>7. <i>Third-party funds that focus on improving the policy and structure of funding sources.</i></li> <li>8. <i>Strengthen liquidity and will continue to monitor the impact of the global economic slowdown on Indonesia.</i></li> <li>9. <i>Network expansion that takes efficiency aspects into account.</i></li> <li>10. <i>Development of digital banking by creating a digital ecosystem to support customer banking needs and continuously strengthen the business structure towards digital.</i></li> <li>11. <i>Continuously strive to reduce bad loans and keep NPLs at low levels by improving asset quality and significantly reducing non-performing loans (NPLs) through intensive billing, restructuring, and selling collateral assets.</i></li> <li>12. <i>Risk management in business activities</i></li> <li>13. <i>Strengthen organizations that are efficient, effective and can compete in the market.</i></li> </ol> |
|---|--|

Dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, akan selalu waspada terhadap kemungkinan memburuknya kondisi keuangan dan bisnis nasabah.

*In anticipation of the impact of the global economic crisis, will always be alert to the possibility of worsening financial and business conditions of customers.*

# Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (ESOP/MSOP) dan Opsi Saham

*Share Ownership Program by Management and Employees (ESOP/MSOP) and Stock Options*

Di tahun 2021 BWS tidak melaksanakan Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan Manajemen, atau *Employee/Management Stock Option Program (ESOP/MSOP)*. Program ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2010. BWS juga tidak melaksanakan program Opsi Saham di sepanjang tahun 2021.

*In 2021 the Bank did not implement the Employee/Management Stock Ownership Program, or the Employee/Management Stock Option Program (ESOP/MSOP). This program was last implemented in 2010. BWS juga tidak melaksanakan program Opsi Saham di sepanjang tahun 2021.*

# Pembelian Kembali Saham dan/atau Obligasi Bank

*Buyback of Bank Shares and/or Bonds*

Sepanjang tahun 2021 BWS tidak menyelenggarakan pembelian kembali saham dan/atau obligasi Bank.

*In 2021, BWS did not implement buy back of Bank Shares and/or bonds.*

# Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

*Transparency of The Financial and Non-Financial Condition Unrevealed in Other Reports*

## Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan BWS telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

- Laporan Tahunan
  - » Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

## Transparency of Financial Condition

Information of the BWS financial condition has been stated clearly and transparent in some reports, including as follows:

- *Annual Report*
  - » *Key financial highlight including stock highlight, the Board of Commissioner report, the Board of Director report, Company profile, Management discussion and analysis regarding to business and financial performance, corporate governance and corporate social responsibility.*



- » Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- » Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- » Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan OJK tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BWS telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK dan pemegang saham.
- » Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi BWS telah termuat pada situs web dengan alamat [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com) dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.
- Laporan Publikasi Triwulanan
  - » BWS telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku pada surat kabar dan situs web BWS.
  - » Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Bank dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk Bank dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi.
  - » Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BWS berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- Laporan Publikasi Bulanan
  - Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku pada situs web Bank.
- » *Annual financial reports has been audited by a Public Accountant and Public Accountant office has registered in Otoritas Jasa Keuangan. Annual financial report made for 1 (one) fiscal year and presented with comparison in 1 (one) previous fiscal year, as well as the beginning of the previous comparative year.*
- » *Statement of Responsibility Report of the Board of Commissioner and the Board of Directors on the correctness of the contents in the annual report. The Statement was stated in statement sheets was signed by all of the Board of Commissioner and Director members.*
- » *In accordance to OJK regulation regarding to transparent and published financial statements of the Bank and OJK regulation regarding to annual reports of the listed company or public company, the Company has submitted an Annual Report to OJK and shareholders.*
- » *Annual Report (financial and non-financial) and the Company's Published Financial Report has contained in the Company's website [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com) and published through Indonesian language daily newspaper with national publishing.*
- *The Quarterly Publication Report*
  - » *BWS has announced the Quarterly Publication Report in accordance to prevailing OJK Regulation on the news paper and BWS's website.*
  - » *Announcement of Quarterly Publication Report on newspaper in the form of Consolidated financial statement of the Company's and subsidiaries is carried out on 2 (two) newspaper and Financial statement of the Company's is carried out on 1 (one) newspaper. The newspaper used is Indonesian language daily newspaper with national publishing. The Quarterly Publication Financial Report was signed by President Director and 1 (one) members of the Company Directors.*
  - » *Announcement of Quarterly Publication Report on the Company's website in the form of Financial Statements or other reports are maintained at least for the last 5 (five) of fiscal year.*
- *Monthly Publication Report*
  - Bank has announced Monthly Publication Report suitable with applicable OJK Regulation on the website of the Bank.*

## Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Bank telah memberikan informasi mengenai produk secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui BWS Call atau situs web BWS.

Selain itu, BWS menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

## Transparency of Non-Financial Conditions

Bank has provided information regarding to the Company's product in clear, accurate, and up to date. The informaton can be taken easily by customer, including with leaflet, brochure, or other written forms at each of the Company's branch offices in locations that are easily accessed by customer, and/or in the form of electronic information that provided with BWS Call or the BWS's website.

In addition, BWS also provides and informs the procedure of customer complaints and a dispute settlement to customer convenient to Bank Indonesia/OJK regulation regarding to customer complaints and banking mediation.

# Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi

## Legal Cases and Administrative Sanctions

### Perkara Hukum

Jumlah permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Bank, Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

### Legal Cases

The number of problems and/or legal cases faced by the Bank, the Board of Commissioners and the board of Directors are as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	2021		2020	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
<b>Dewan Komisaris dan Direksi</b> <i>Board of Commissioners and Board of Directors</i>				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i>	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	-	-	-	-
<b>BWS</b> <i>BWS</i>				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i>	-	-	4	1
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	1	-	4	-
<b>Entitas Anak</b> <i>Subsidiaries</i>				
BWS tidak memiliki entitas anak usaha <i>BWS has no subsidiaries</i>				
<b>Jumlah</b> <i>Total</i>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

## Uraian Perkara 2020

Cases in 2020

<b>Nama Perkara</b> Case Name	Perdata Civil
<b>Para Pihak</b> Parties	Debitur atas nama PT Armidian Karyatama Debtor on behalf of PT Armidian Karyatama
<b>Pokok Perkara</b> Subject matter	Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perjanjian Perdamaian Telah Disetujui (homologasi). Granted the Application for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and the Reconciliation Agreement Has Been Approved (homologation).
<b>Nilai Perkara</b> Case Value	Rp42.000.000.000 IDR42.000.000.000
<b>Risiko bagi Bank</b> Risk for Bank	-
<b>Status Perkara</b> Case Status	Berkekuatan Hukum Tetap Permanent Legal Force

<b>Nama Perkara</b> Case Name	Kepailitan Bankruptcy
<b>Para Pihak</b> Parties	Debitur atas nama PT SJ Mode Indonesia Debtor on behalf of PT SJ Mode Indonesia
<b>Pokok Perkara</b> Subject matter	Debitur dimohonkan PKPU Oleh Supplier, namun dikarenakan Debitur tidak menghadiri sidang ataupun mengajukan Proposal Perdamaian, maka Debitur dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Harta pailit telah dijual oleh curator dan daftar pembagian terdapat keberatan dari kreditor preferent (pajak dan buruh) dan saat ini pada tingkat kasasi. The Debtor was requested for PKPU by the Supplier. However, the Debtor did not attend the court nor submitted a Peace Proposal. The Debtor was declared Bankrupt with all the legal consequences. Bankruptcy assets have been sold by the curator and the distribution list has objections from preferred creditors (tax and labor) and is currently at the level of cassation.
<b>Nilai Perkara</b> Case Value	USD1.789.149,03 USD1,789,149.03,-
<b>Risiko bagi Bank</b> Risk for Bank	Terdapat potensial lost kurang lebih 20% dari kewajiban pokok dikarenakan harta pailit hanya asset yang dijamin ke BWS dan hasil penjualan oleh kurator harus dibagikan kepada kreditor preferent (pajak dan buruh) There is a loss potential of approximately 20% of the principal liability because bankruptcy assets are only assets which are pledged to BWS and the sales by the curator must be distributed to preferred creditors (taxes and labor).
<b>Status Perkara</b> Case Status	Berkekuatan Hukum Tetap Permanent Legal Force

<b>Nama Perkara</b> Case Name	PMH dan Pidana PMH and Criminal
<b>Para Pihak</b> Parties	Debitur atas nama PT Multi Ekstrak Yutama Debtor on behalf of PT Multi Ekstrak Yutama
<b>Pokok Perkara</b> Subject matter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat sengketa kepemilikan atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan pelunasan hutang.</li> <li>Terdapat Laporan Polisi atas dugaan Pemalsuan Dokumen yang berkaitan dengan Jaminan, kemudian terdapat upaya Sita yang diajukan oleh Penyidik Polda Jawa Barat, namun BWS telah menolak memberikan Sertifikat Asli dan hanya memberikan Copy Sertifikat.</li> <li>Pada peradilan tingkat pertama, tingkat Banding dan kasasi telah dinyatakan Debitur dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak atas objek sengketa, upaya penyelesaian melalui penagihan kepada personal guarantee.</li> <li>There were disputes over land and buildings ownership which were being used as collateral for debt repayment.</li> <li>There was a Police Report concerning documents forgery related to Collateral. There was also an attempt of confiscation by the West Java Police Investigator, but BWS had refused to provide the Original Certificate and only provided a Copy of the Certificate.</li> <li>During the first instance court, the Appeal and cassation levels had been declared. The debtor was declared as a party who was not entitled to the object of the dispute, the settlement effort was through billing to the personal guarantee.</li> </ul>
<b>Nilai Perkara</b> Case Value	Rp1.583.200.000 IDR1,583,200,000
<b>Risiko bagi Bank</b> Risk for Bank	-
<b>Status Perkara</b> Case Status	Perkara perdata telah Berkekuatan Hukum Tetap This civil case had permanent legal force

<b>Nama Perkara</b> Case Name	Perdata Civil
<b>Para Pihak</b> Parties	Debitur atas nama PT Taejin Perkasa Debtor on behalf of PT Taejin Perkasa
<b>Pokok Perkara</b> Subject matter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gugatan Perdata yang dilakukan oleh Komisaris sekaligus pemilik Jaminan ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan mengandung unsur <i>error in persona</i> (gugatan kurang pihak). Komisaris sekaligus pemilik Jaminan melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimana permohonan banding tersebut telah ditolak selanjutnya mengajukan kasasi di MA .</li> <li>Telah dilakukan upaya Hukum Aanmaning untuk menegur para pihak agar segera menyelesaikan utangnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum melakukan upaya hukum sita dan lelang eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> <li>Civil lawsuits carried out by the Commissioner as well as the owner of the Collateral were rejected by the Panel of Judges because they contained an element of error in persona (a lawsuit that lacked parties). The Commissioner as well as the owner of the Guarantee made an appeal at the DKI Jakarta High Court where the appeal had been rejected and then filed a cassation in the Supreme Court.</li> <li>Aanmaning (warning) legal efforts have been made to admonish the parties to immediately settle their debts through the South Jakarta District Court before taking legal action of confiscation and an execution auction through the South Jakarta District Court.</li> </ul>
<b>Nilai Perkara</b> Case Value	Rp3.830.000.000 IDR3,830,000,000
<b>Risiko bagi Bank</b> Risk for Bank	-
<b>Status Perkara</b> Case Status	Belum Berkekuatan Hukum Tetap It is not legally binding yet

<b>Nama Perkara</b> Case Name	Kepailitan Bankruptcy
<b>Para Pihak</b> Parties	Debitur atas nama PT Asli Motor Klaten Debtor on behalf of PT Asli Motor Klaten
<b>Pokok Perkara</b> Subject matter	Debitur saat ini dalam kondisi Pailit setelah tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan isi dalam proposal perdamaian. The debtor is currently in a state of Bankruptcy after neglecting their obligations in accordance with the contents of the reconciliation proposal.
<b>Nilai Perkara</b> Case Value	Rp6.233.170.659,46 IDR6,233,170,659.46
<b>Risiko bagi Bank</b> Risk for Bank	-
<b>Status Perkara</b> Case Status	Berkekuatan Hukum Tetap Permanent Legal Force

<b>Nama Perkara</b> Case Name	Kepailitan Bankruptcy
<b>Para Pihak</b> Parties	Debitur atas nama PT Hanjung Indonesia Debtor on behalf of PT Hanjung Indonesia
<b>Pokok Perkara</b> Subject matter	Debitur di Palitkan oleh Supplier dan saat ini sedang dalam proses pembebasan Harta Pailit (pembagian hasil penjualan asset Debitur). The debtor was declared as bankrupt by the Supplier and is currently in the process of taking care the bankruptcy estate (sharing the sale results from the debtor's assets).
<b>Nilai Perkara</b> Case Value	USD786.781,48 USD786,781.48
<b>Risiko bagi Bank</b> Risk for Bank	-
<b>Status Perkara</b> Case Status	Berkekuatan Hukum Tetap Permanent Legal Force

<b>Nama Perkara</b> Case Name	Perdata Civil
<b>Para Pihak</b> Parties	Debitur atas nama PT Sumber Tangguh Eksindo Debtor on behalf of PT Sumber Tangguh Eksindo
<b>Pokok Perkara</b> Subject matter	Terdapat Perlawanan yang diajukan oleh Pemilik Jaminan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, dan telah diajukan upaya hukum banding oleh BWS dimana upaya hukum banding tersebut Pengadilan Tinggi Bandung menerima banding yang diajukan dan membatalkan putusan tingkat pertama, selanjutnya pemilik jaminan mengajukan upaya hukum kasasi. There was a resistance submitted by the Guarantee Owner which was granted by the Karawang District Court, and an appeal was filed by BWS where the appeal was filed and accepted by the Bandung High Court and canceled the first-degree decision, then the guarantee owner filed an appeal.
<b>Nilai Perkara</b> Case Value	USD1.705.000,00 USD1,705,000.00
<b>Risiko bagi Bank</b> Risk for Bank	-
<b>Status Perkara</b> Case Status	Belum Berkekuatan Hukum Tetap It is not legally binding yet

<b>Nama Perkara</b> Case Name	Perdata Civil
<b>Para Pihak</b> Parties	Yogi Indrayana (Penggugat) melawan BWS (tergugat) Yogi Indrayana (Plaintiff) against BWS (Defendant)
<b>Pokok Perkara</b> Subject matter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gugatan ditolak pada tingkat Pengadilan Negeri, Pihak Penggugat Mengajukan Banding atas putusan Majelis Hakim tingkat Pertama.</li> <li>Proses Banding telah selesai dengan Putusan Menguatkan Putusan Pengadilan negeri (Putusan Pengadilan Negeri bandung No:261/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 20 Desember 2019).</li> <li>Debitur mengajukan upaya Hukum Kasasi (Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi ( 11 November 2019).</li> <li>BWS Mengirimkan Kontra Memori Kasasi 22 November 2019. Dan putusan Kasasi yaitu menolak kasasi sehingga memenangkan BWS, debitur telah melakukan pelunasan</li> <li>The lawsuit was rejected at the District Court level, the Plaintiff Filed an Appeal against the decision of the Panel of Judges at the First level.</li> <li>The appeal process has been completed with the decision to strengthen the decision of the district court (bandung district court decision No: 261/Pdt.G/2018/PN.Bdg dated December 20, 2019).</li> <li>The debtor filed a cassation lawsuit (Relaas / Summons Notice of Cassation Statement (November 11, 2019).</li> <li>BWS Sent a Counter Memory of Cassation November 22, 2019. And the decision of the Cassation was to reject the cassation so that BWS won and the debtor has paid off their debts</li> </ul>
<b>Nilai Perkara</b> Case Value	Rp412.398.037,60 IDR412,398,037.60
<b>Risiko bagi Bank</b> Risk for Bank	-
<b>Status Perkara</b> Case Status	Berkekuatan Hukum Tetap Permanent Legal Force

## Uraian Perkara 2021

Cases in 2021

<b>Nama Perkara</b> Case Name	Perdata Civil
<b>Para Pihak</b> Parties	Debitur atas nama PT Arsidinamika Debtor on behalf of PT Arsidinamika
<b>Pokok Perkara</b> Subject matter	Gugatan dari debitur melalui LBH Perlindungan Konsumen terhadap keabsahan pemasangan hak tanggungan melalui klausula baku. A lawsuit from the debtor through the Consumer Protection LBH against the legality of establishing mortgage rights through standard clauses
<b>Nilai Perkara</b> Case Value	Rp6.775.000.000 IDR6,775,000,000
<b>Risiko bagi Bank</b> Risk for Bank	-
<b>Status Perkara</b> Case Status	Belum Berkekuatan Hukum Tetap It is not legally binding yet

## Sanksi Administrasi

Selama periode tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank Woori Saudara dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

## Administrative Sanctions

During the period of 2021, there were no material administrative sanctions affecting the business continuity of BWS and there were no administrative sanctions imposed on the Board of Commissioners and the Board of Directors.

# Kode Etik

## Code of Conduct

Dalam menjaga reputasi dan citra Bank sesuai dengan penerapan GCG, saat ini Bank akan melakukan proses perencanaan untuk menyusun Kode Etik yang menjelaskan masalah pola aturan yang digunakan sebagai pedoman berperilaku berdasarkan nilai dan pertimbangan integritas, kesadaran diri dan profesionalisme, reputasi Bank, keluarga dan pribadi. Selanjutnya, setiap karyawan wajib mengisi formulir Pakta Integritas Pelaksanaan Kode Etik yang pada prinsipnya berjanji untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan dan perbuatan yang melanggar Kode Etik Bank.

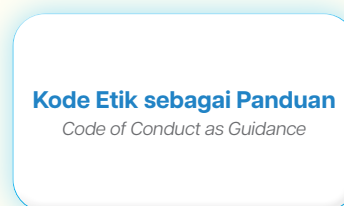
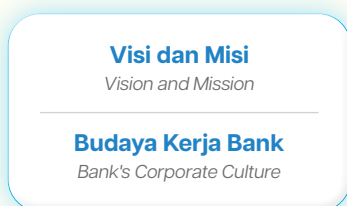
In maintaining the reputation and image of the Bank in accordance with the implementation of GCG, the Bank will now carry out a planning process to develop a Code of Conduct that explains the problem of the pattern of rules used as guidelines for behaving based on values and considerations of integrity, self-awareness and professionalism, the Bank's reputation, family and personal. Furthermore, each employee must fill out the Form of Integrity Pact for the Implementation of the Code of Conduct, which in principle promises not to take any actions and actions that violate the Bank's Code of Conduct.

## Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank sebagai Landasan Kode Etik

Penyusunan Kode Etik BWS dilandasi pada Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank yang merupakan arah dan tujuan pengembangan Bank secara berkelanjutan. Sebagai bagian upaya membangun lingkungan kerja yang kondusif dan etika kerja yang produktif, Bank terus melakukan beberapa inisiatif untuk membentuk budaya kerja yang positif. Budaya kerja yang dimiliki Bank berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, tingkah laku, dan cara kerja karyawan dan manajemen, yang bermuara pada peningkatan kualitas kinerja Bank.

## Vision, Mission and Corporate Culture as the Basis for Code of Conducts

The preparation of BWS Code of Conduct is based on the Bank's Vision, Mission and Work Culture which is become direction and objective of sustainable development of the Bank. In an effort to build a conducive work environment and productive work ethic, the Bank continues to undertake several initiatives to establish a positive work culture. The Bank's work culture contains values, norms and habits that influence the minds, behavior, and workings of employees and management, which expected to improving the quality of Bank's performance.



Tentang Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Related to the Bank's Vision, Mission and Corporate Culture can be found in the Company Profile chapter of this Annual Report.



## Pengesahan Kode Etik dan Pokok-pokok Isi Kode Etik

BWS telah memiliki Kode Etik yang disahkan melalui Keputusan Direksi No. 102/KEP-DIR/A-11/IX/20. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Karyawan termasuk dalam hal ini jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

Pokok-pokok isi Kode Etik BWS yaitu:

1. Janji Kepada Pelanggan  
Kami harus menempatkan prioritas tertinggi dalam memastikan kebahagiaan pelanggan.
2. Janji Kepada Pemegang Saham  
Kami harus menegakkan hak-hak pemegang saham dengan nilai tertinggi.
3. Janji Kepada Pejabat Eksekutif dan Karyawan  
Bank harus memperlakukan para eksekutif dan karyawan sebagai aset yang paling berharga.
4. Janji Kepada Bangsa dan Masyarakat  
Kami akan memenuhi tanggung jawab sosial dan berkontribusi untuk kemajuan nasional.

## Sosialisasi, Penyebaran dan Penegakan Kode Etik

Bank berkomitmen dalam menjalankan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi *code of conduct* terhadap seluruh jajaran Bank.
2. Melaksanakan evaluasi atas pencapaian kepada jajaran.
3. Pengkajian secara berkala butir-butir aturan *code of conduct* dalam rangka pengembangan *code of conduct* selanjutnya.
4. Melaksanakan pembacaan kode etik secara berkala pada seluruh jaringan kantor.

Mekanisme penegakan Kode Etik diatur sebagai berikut:

1. Terdapatnya laporan pelanggaran Kode Etik baik melalui media surat atau email kepada Atasan Langsung Pegawai.
2. Setiap pelaporan yang masuk akan diperhatikan secara serius dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang sudah ditetapkan Bank.
3. Pelaksanaan proses penyelidikan.
4. Penetapan sanksi apabila hasil penyelidikan menyatakan pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik.

Oleh karena itu, karyawan memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik, baik yang dilakukan oleh sesama karyawan atau pihak-pihak yang terkait, secara sengaja atau

## Ratification of the Code of Conduct and Principles of the Contents of the Code of Conduct

*BWS has code of conduct was approved by Board of Directors Decree No. 102/KEP-DIR/A-11/IX/20. This code of conducts applies to all employees including Board of Directors and Board of Commissioners.*

*The main contents of BWS's Code of Conducts are:*

1. *Promises to Customer*  
*We have to put the highest priority in ensuring the customer happiness.*
2. *Promises to Shareholders*  
*We have to uphold the rights of shareholders with the highest value.*
3. *Promises to Executive Officers and Employee*  
*Banks have to treat the executive officers and employees as the most valuable assets.*
4. *Promises to Nation and Society*  
*We will fulfill the social responsibility and contribute to the national progress.*

## Socialization, Dissemination and Enforcement of the Code of Conduct

*The Bank is committed to carrying out effective and comprehensive socialization through the following steps:*

1. *Conducting socialization of code of conduct for all Bank employees.*
2. *Carry out an evaluation of the achievement of the ranks.*
3. *Periodically review the points of the code of conduct in the context of further development of the code of conduct.*
4. *Conduct periodic code readings throughout the office network.*

*The mechanism for enforcing the Code of conduct is as follows:*

1. *There are reports of violations of the Code of conduct either through a media letter or email to the Employer's Direct Supervisor.*
2. *Every incoming report will be considered seriously and will be followed up in accordance with procedures established by the Bank.*
3. *Implementation of the investigation process.*
4. *Stipulation of sanctions if the result of an investigation states that an employee has violated the Code of conduct.*

*Therefore, employees have the right and obligation to report suspected violations and / or violations of the Code of Conduct, whether committed by fellow employees or related parties, intentionally or unintentionally, which may affect the Bank's*

tidak sengaja, yang dapat mempengaruhi reputasi Bank. Hak pelaporan ini harus dipergunakan secara bertanggung jawab dan dilakukan hanya apabila diyakini terjadi pelanggaran, bukan pelaporan yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

*reputation. This reporting right must be used responsibly and is carried out only if a violation is believed to occur, not reporting aimed at bringing someone down.*

### Pakta Integritas

Bank memiliki pakta integritas yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, guna menciptakan pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkungan bisnis. Pakta integritas tersebut berisikan tentang berbagai hal yang dapat menegakan implementasi GCG di dalam Bank sebagai berikut:

- Seluruh insan Bank telah menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.
- Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham telah menandatangani kontrak manajemen yang memuat kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham tentang target-target kinerja yang akan dicapai pada 2021.
- Dalam rangka mengupayakan pemenuhan aspek komitmen, Bank telah menunjuk personil yang memantau penerapan tata kelola pada jajaran Bank dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

### Integrity Pact

*The Bank has an integrity pact that aims to foster openness and honesty, in order to create quality, effective, efficient and accountable tasks in the business environment. The integrity pact contains various things that can uphold the implementation of GCG in the Bank as follows:*

- *All Bank personnel have signed a statement of compliance with the Code of Conduct.*
- *The board of Directors, Commissioners and Shareholders have signed a management contract that contains an agreement between the board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders regarding performance targets to be achieved in 2021.*
- *In an effort to fulfill the commitment aspect, the Bank has appointed personnel who monitor the implementation of governance at the Bank level and submit periodic reports to the board of Directors and Board of Commissioners.*

### Transparansi Terkait Penyimpangan Internal

Berikut disampaikan pelanggaran Kode Etik berupa penyimpangan internal yang terjadi, dan upaya Bank dalam melakukan penyelesaiannya.

### Internal Fraud Transparency

*The following is a violation of the Code of conduct in the form of internal deviations that have occurred, and the Bank's efforts to resolve them.*

Internal Fraud <i>Internal Fraud</i>	2021	2020
<i>Fraud yang Dilakukan Pengurus/Manajemen</i> <i>Fraud conducted by Management / Management</i>	-	-
<i>Fraud yang Dilakukan Pegawai Tetap</i> <i>Fraud by Permanent Employees</i>	4	2
<i>Fraud yang Dilakukan Pegawai Tidak Tetap</i> <i>Fraud by Temporary Employees</i>	-	-
<i>Fraud yang Dilakukan Pihak Eksternal</i> <i>External parties' fraud</i>	2	2
<i>Fraud yang Telah Diselesaikan</i> <i>Resolved Fraud</i>	3	1
<i>Fraud yang Dalam Proses Penyelesaian</i> <i>Fraud Under Construction</i>	3	3
<i>Fraud yang Belum Ditindaklanjuti</i> <i>Unfollowed Fraud</i>	-	-
<b>Jumlah Fraud Terjadi</b> <i>Number of Fraud Happened</i>	<b>6</b>	<b>4</b>

Tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud* selama 2021, antara lain:

1. Mengingatkan Unit Bisnis (melalui media komunikasi internal/ CMS Site) mengenai *risk/fraud awareness*, fungsi verifikasi, supervisi serta budaya patuh atas ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan kewajiban pengecekan dan monitoring proses pencairan KUPEN Umum (*take over*) dan KUPEN Hybrid.
3. Melakukan training/pelatihan (*refreshment*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait proses *take over* kredit.
4. Divisi Audit Internal menerbitkan memo rekomendasi perbaikan/mitigasi terjadinya pengulangan kasus yang sama kepada divisi terkait.
5. Melakukan pelatihan (*refreshment*) terkait prosedur transaksi tunai, termasuk diantaranya *reminder* kewajiban *supervisor* untuk melakukan pemeriksaan seluruh transaksi harian.

*Follow-up for the settlement of fraud cases during 2021, among others:*

1. *Remind Business Units (by internal media communication /CMS Site) regarding risk/fraud awareness, verification, supervision functions and a compliance culture with applicable regulations.*
2. *Establish the obligation to check and monitor the disbursement process of General KUPEN (take over) and Hybrid KUPEN.*
3. *Conducting training/refreshment and Focus Group Discussion (FGD) related to credit take over process.*
4. *Internal Audit Division issues a recommendation memos for the recurrence improvement/mitigation on the same case to relevant divisions.*
5. *Conducting training (refreshment) related to cash transaction procedures, including reminders of the supervisor's obligation to check all daily transactions.*

# Whistleblowing System

## Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau dikenal juga dengan sebutan *Whistleblowing System* (WBS) merupakan perangkat yang dirancang untuk memberikan saluran terkait pengaduan pelanggaran yang mengedepankan kerahasiaan identitas pelapor dan jaminan keamanan bagi pelapor, baik dari internal maupun eksternal. Regulator telah mendorong pengelolaan WBS secara mandiri dalam tubuh organisasi entitas usaha, dengan tujuan menciptakan independensi penanganan pengaduan.

*The Violation Reporting System, also known as the Whistleblowing System (WBS) is a device designed to provide a channel for complaints of violations that emphasizes the confidentiality of the reporter's identity and security guarantees for the reporter, both internal and external. The regulator has encouraged the management of WBS independently within the body of the business entity organization, with the aim of creating independence in handling complaints.*

### Keberadaan WBS Bank

Implementasi WBS di lingkup BWS mulai dilakukan pada bulan Mei 2019. Bersama dengan itu BWS mengesahkan Prosedur WBS dengan Surat Edaran No. 006/SE-DIR/B-01/V/19.

### The Existence of WBS Bank Woori Saudara

*WBS Implementation is carried out in May 2019, along with it, BWS ratified the WBS procedure with Circular Letter No. 006/SE-DIR/B-01/V/19.*

Bank diwajibkan melaporkan beberapa poin sebagaimana terdapat pada peraturan Bapepam No. KEP-431/BL/2012, 1 Agustus 2012 mengenai penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik poin G.13 perihal uraian sistem pelaporan pelanggaran.

*Banks are required to report several points as contained in Bapepam Regulation No. KEP-431/BL/2012, 1 August 2012 concerning the submission of the Annual Report of Issuers or Public Companies point G.13 regarding the description of the violation reporting system.*

### Ruang Lingkup Pengaduan Melalui WBS Bank

WBS terbuka untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan penipuan, pelanggaran terhadap hukum, peraturan bank, kode etik, maupun benturan kepentingan yang terjadi di lingkup Bank.

### Scope of Complaints through WBS Bank

*WBS is open to reporting actions/behaviors/events related to fraud, violations of laws, bank regulations, codes of conduct, or conflicts of interest that occur within the scope of the Bank.*

### Pengelola WBS Bank dan Saluran WBS Bank

Pengelolaan WBS dilakukan oleh internal BWS melalui sistem aplikasi *whistleblowing* dan media lainnya yang ditetapkan oleh BWS.

### WBS Bank Manager and WBS Bank Channels

*WBS management is carried out by internal of BWS through whistleblowing application system and other media established by BWS.*

### Perlindungan Bagi Pelapor

Sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, BWS memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.

### Protection for Reporters

*As a real Company's commitment to maintain the confidentiality of data, BWS provides:*

1. *Guarantee on the confidentiality of the reporter's identity.*
2. *Confidentiality guarantee on the contents of the report submitted.*

Pelapor dalam mengungkapkan pelanggaran harus dilakukan dengan niat baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atau didasari kehendak buruk/fitnah. Pelapor diwajibkan untuk mencantumkan identitas dengan jelas pada laporan yang dibuat dengan bukti pendukung yang relevan. Tim Investigasi wajib merahasiakan identitas pelapor sebagai bagian dari upaya Bank dalam memberikan perlindungan bagi pelapor. Bank turut menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

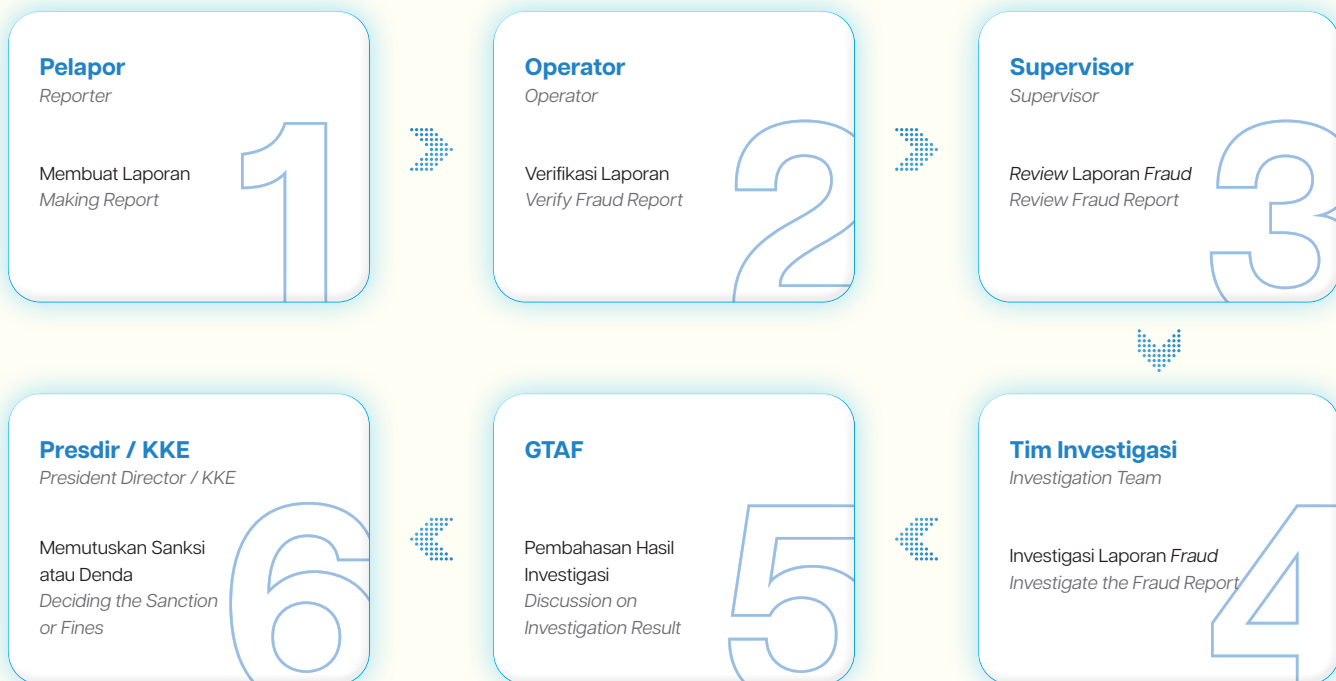
*Reporting in disclosing violations must be done in good faith and is not a personal complaint or based on bad will/ slander. Reporters are required to clearly state their identity on reports that are made with relevant supporting evidence. The Investigation Team must keep the identity of the reporter confidential as part of the Bank's efforts to provide protection for the reporter. The Bank also provides legal protection in accordance with the applicable laws and regulations.*

**Mekanisme Penanganan Pengaduan yang Masuk Melalui Saluran WBS**

**Complaints Handling Mechanisms that Enter Through WBS Channels**

Secara umum alur pengaduan yang masuk melalui mekanisme WBS Bank adalah sebagai berikut:

*In general, flow chart of complaints that enter through WBS is as follows:*



Penindaklanjutan pelaporan yang berpengaruh negatif terhadap citra Bank di masyarakat wajib dilakukan untuk mengetahui secara rinci permasalahan yang terjadi. Melalui Departemen Investigasi, Bank memberikan kewenangan kepada SKAI untuk memeriksa dan mendalami kasus-kasus. Tim Investigasi bertugas melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan rekomendasi terkait kasus yang ditangani.

Dalam menangani pengaduan, Tim Investigasi melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan/informasi atau permintaan dari pihak internal bank/pihak lain mengenai kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan, pengurus bank, eksternal bank atau kolaborasi pihak internal dan eksternal bank dan melakukan pemeriksaan berdasarkan pengolahan database/core banking.

Dalam pelaksanaannya, investigasi dilakukan sesuai standar, pedoman, dan peraturan Bank, dimana Bank memegang teguh kode etik yang telah ditetapkan. Tim Investigasi wajib mengamankan dokumen yang relevan dalam pemeriksaan investigasi, di mana Tim Investigasi akan memeriksa, mengumpulkan dan menilai kecukupan dan relevansi bukti. Selanjutnya, Tim Investigasi wajib mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan dapat diterima untuk dijadikan acuan dan meminimalisir potensi kerugian Bank.

Setelah terungkap pihak yang bersalah, maka pihak yang dinyatakan tidak bersalah akan terbebas dari tuduhan dan wajib dipulihkan nama baiknya, di mana tim investigasi tetap menjaga kerahasiaan saksi. Tim juga memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyimpangan yang terjadi dan segera mengambil keputusan tepat untuk langkah selanjutnya. Jika gambaran tersebut telah layak, maka Presiden Direktur akan membuat keputusan mengenai hasil investigasi dan tindaklanjutnya.

Tim Investigasi turut memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya penyimpangan dengan tepat. Rekomendasi tersebut merupakan saran dan arahan yang didasarkan kepada kebijakan Bank, dimana pemberian rekomendasi tersebut bukan merupakan keputusan sanksi yang akan diberikan.

*Reports that adversely affect the Bank's image in the public should be followed-up in order to find out every detail of the problems occurred. Through Investigation Team, the Bank has granted an authority to Internal Audit to investigate the cases. Investigation Team has duty to conduct examination process, investigation, as well as providing recommendations related to cases handled.*

*In handling complaints, the Investigation Team carries out checks based on reports/information or requests from internal banks/other parties regarding possible irregularities committed by employees, bank management, external banks or collaboration between internal and external parties of the bank and conducts checks based on database processing/core banking.*

*In its implementation, the investigation is carried out in accordance with the Bank's standards, guidelines and regulations, where the Bank upholds the established code of conduct. The Investigation Team must secure relevant documents in the investigation investigation, in which the Investigation Team will examine, collect and assess the adequacy and relevance of the evidence. Furthermore, the Investigation Team must collect sufficient and acceptable evidence to be used as a reference and minimize the potential loss of the Bank.*

*After the guilty party is revealed, the party found not guilty will be free from accusations and must be restored to a good name, where the investigation team continues to maintain the confidentiality of witnesses. The team also obtained a clear picture of the deviations that occurred and immediately made the right decision for the next step. If the description is appropriate, the President Director will make a decision regarding the results of the investigation and its follow-up.*

*The Investigation Team also provided recommendations on how to properly manage the risk of irregularities. These recommendations are suggestions and directions based on the Bank's policy, where the recommendation is not a sanction decision that will be given.*



Hasil pengaduan akan disampaikan oleh Tim kepada Gugus Tugas Anti Fraud (GTAF) sebelum diserahkan kepada Presiden Direktur dengan memuat kesimpulan dari penanganan yang dilakukan. GTAF juga menyampaikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya penyimpangan dengan tepat, dan menyajikan laporan perkembangan (*progress report*) secara berkala untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi tahap berikutnya. Investigasi bisa bersifat iterative, yaitu suatu investigasi atas dugaan kejahatan/kecurangan berpotensi menghasilkan temuan baru yang melahirkan dugaan tambahan atau suatu dugaan baru.

*The results of the complaint will be submitted by the Team to the President Director with the conclusions of the handling taken. The team also made recommendations on how to properly manage the risk of irregularities, and presented progress reports periodically to help make decisions regarding the next stage of investigations. Investigation can be iterative, that is, an investigation of alleged crime / fraud has the potential to produce new findings that give rise to additional suspicions or a new suspicion.*

Oleh karena itu, penanganan pengaduan atau penanganan berdasarkan deteksi Auditor bertujuan agar aktivitas Bank semakin baik dan memotivasi seluruh pihak dan karyawan untuk bekerja secara profesional dengan menjaga keharmonisan hubungan kerja, serta transaksi yang berpotensi merugikan Bank atau dapat mengganggu jalannya operasional Bank dengan aman.

*Therefore, handling complaints or handling based on Auditor detection aims to improve Bank activities and motivate all parties and employees to work professionally by maintaining harmonious working relationships, as well as transactions that have the potential to harm the Bank or can disrupt the Bank's operations safely.*

### Jumlah Pengaduan (Pelaporan)

### Number of Complaints (Reporting)

Selama tahun 2021 berikut adalah jumlah pengaduan (pelaporan) yang masuk diterima dan ditindaklanjuti oleh Bank.

*During 2021 the following are the number of complaints (reporting) that were received and acted upon by the Bank.*

Penanganan Laporan Handling Reports	Jumlah Total
Laporan Pengaduan yang Masuk <i>Incoming Complaints Report</i>	1
Laporan Pengaduan yang Tidak Ditindaklanjuti <i>Non-action Complaints Report</i>	-
Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti <i>Follow-up Complaints Report</i>	1
Jumlah <i>Total</i>	1

BWS telah menerbitkan memo terkait rekomendasi penyusunan ketentuan sehubungan dengan pelaporan tersebut ke divisi terkait.

*BWS has issued a memo to the related division regarding the regulation arrangement recommendation based on the report.*

# Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

## *Limited Liability Company Governance Guidelines Implementation*

Road Map GCG yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014 memiliki dampak yang besar bagi perkembangan GCG di lingkungan dunia usaha. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar menjadi bahasan yang dapat menjadi pegangan bagi entitas usaha, khususnya bagi perusahaan terbuka. Demikian pula dengan hak pemegang saham tanpa terkecuali, khususnya pemegang saham minoritas yang harus menjadi perhatian dari emiten atau perusahaan terbuka.

Secara umum, Bank sebagai perusahaan terbuka telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Khususnya terkait pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tersebut yang memuat aspek, prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik berguna untuk mendorong penerapan praktik GCG sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani perusahaan terbuka. Bank wajib menerapkan pedoman tersebut, dan jika belum menerapkannya, Bank wajib menjelaskan alasan tidak diterapkannya pedoman tersebut. Pengungkapan penerapan atas rekomendasi dalam pedoman tersebut disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan terbuka.

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 sebagai standar penerapan GCG yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip GCG yang harus diterapkan Bank. Ikhtisar kepatuhan Bank terhadap Peraturan dan Surat Edaran OJK tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*The GCG Road Map issued by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in 2014 had a major impact on the development of GCG in the business world. Emphasis on transparency, accountability, and the delivery of reasonable information becomes a discussion that can become a guide for business entities, especially for public companies. Likewise, the rights of shareholders without exception, especially minority shareholders must be a concern of the issuer or public company.*

*In general, the Bank as a publicly listed company has implemented all the regulations issued by the OJK, and will continue to make improvements to create added value for shareholders and stakeholders. Specifically related to the guidelines for Public Company Governance that are regulated based on OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance, which is set out in OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 concerning Guidelines for Open Corporate Governance. The guideline which contains aspects, principles and recommendations of good corporate governance is useful in encouraging the application of GCG practices in accordance with international practices that should be emulated by public companies. Banks are required to apply these guidelines, and if they have not implemented them, Banks are required to explain the reasons for not implementing them. Disclosure of the application of the recommendations in the guidelines is conveyed in the annual report of the public company.*

*Based on OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 as a standard for implementing GCG which includes 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 (twenty five) recommendations for the application of GCG aspects and principles. Recommendations on the application of GCG aspects and principles in the Governance Guidelines are standard implementation of GCG aspects and principles that must be applied by the Bank. An overview of the Bank's compliance with OJK Regulations and Circular Letters regarding Open Corporate Governance Guidelines can be seen in the table below.*

## Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup BWS dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Conformity in the Development of GCG Implementation in BWS Scope with OJK Circular No. 32 / SEOJK.04 / 2015 concerning Guidelines for Open Corporate Governance

### Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect 1: Public Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights

#### Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1: Increase the Value of GMS

Rekomendasi 1: Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.

*Recommendation 1: Public companies have a method or technical procedure for voting (open or closed voting) that promotes independence and the interests of shareholders.*

#### Keterangan Rekomendasi:

Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.

#### Description of Recommendation:

*Each share with voting rights issued has one vote (one share one vote). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially in decision making by voting. However, the mechanism for decision making by way of voting (voting) either openly or closedly has not been regulated in detail.*

#### Penerapan di Bank atas rekomendasi

BWS telah melaksanakan pemungutan suara, baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata-Tertib RUPS. Prosedur pengambilan suara dalam RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar, apabila dalam RUPS tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat, maka pengambilan suara dilakukan dengan cara *voting* atau pengumpulan suara, pengumpulan suara diatur dalam Tata Tertib RUPS yang disampaikan dan dibacakan pada saat acara RUPS.

#### Application at the Bank for recommendations

*BWS has carried out the voting, either in open or close that stated in the GMS Guidelines Procedure of voting in GMS is stipulated in Articles of Association, if in GMS a consensus cannot be reached, so the decision will be held with voting, the voting settled in GMS Guidelines that submitted and read in GMS.*

Rekomendasi 2: Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.

*Recommendation 2: All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS*

#### Keterangan Rekomendasi:

Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.

#### Description of Recommendation:

*The presence of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company is intended so that each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners can pay attention, explain and answer directly the problems that occur or questions raised by shareholders related to the agenda at the GMS.*

#### Penerapan di Bank atas rekomendasi

Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan tahun 2021, terdapat beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berhalangan hadir.

#### Application at the Bank for recommendations

*In the 2020 Annual GMS held in 2021, there were several members of the Board of Directors and Board of Commissioners who were unable to attend.*

Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.  
*Recommendation 3: A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.*

**Keterangan Rekomendasi:**

Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.

*Description of Recommendation:*

*The Public Company is required to make a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and foreign languages (at least in English), and be announced 2 (two) working days after the GMS is held to the public, one of which is through the Public Company Website. The availability of a summary of the minutes of a GMS on the Public Company Website provides an opportunity for shareholders who are not present to obtain important information in holding a GMS easily and quickly. Therefore, the provisions regarding the minimum time period for the availability of summary minutes of the GMS on the Website are intended to provide sufficient time for shareholders to obtain this information.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS telah membuat Ringkasan Risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang salah satunya melalui situs web [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com) dengan jangka waktu penyediaan selama 5 (lima) tahun.

**Application at the Bank for recommendations**

*BWS has made the summary of GMS minutes of meetings in Indonesian and english language and has been announced 2 (two) working days after the GMS, and one of which is through the Company's website [www.bankwoorisaudara.com](http://www.bankwoorisaudara.com) with period of presented for 5 (five) years.*

**Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.**

*Principle 2: Improve the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.*

Rekomendasi 4: Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.  
*Recommendation 4: Public Company has a communication policy with shareholders or investors.*

**Keterangan Rekomendasi:**

- Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.
- Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.

*Description of Recommendation:*

- *The communication between the public company and shareholders or investors is intended so that shareholders or investors get a clearer understanding of information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as the implementation of public company governance. In addition, shareholders or investors can also submit their input and opinions to the management of the Public Company.*
- *The communication policy with shareholders or investors shows the commitment of the public company in carrying out communication with shareholders or investors. The policy can include strategies, programs, and timing of communication, as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in the communication.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS telah menjalankan kegiatan-kegiatan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor melalui investor meetings dan juga Perusahaan telah membentuk unit Investor Relations untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun demikian BWS belum memiliki kebijakan tertulis perihal komunikasi dengan pemegang saham.

**Application at the Bank for recommendations**

*BWS has carried out communication activities with shareholders or investor through investor meetings and the Company has also formed the Investor Relation Units to conduct these functions. However, BWS has not yet a written policy regarding to communication with shareholders.*

Rekomendasi 5: Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.  
*Recommendation 5: Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.*

**Keterangan Rekomendasi:**

Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.

*Description of Recommendation:*

*Disclosure of communication policies is a form of transparency of the commitment of the public company in providing equality to all shareholders or investors for the implementation of communication. Disclosure of this information also aims to increase participation and the role of shareholders or investors in the implementation of the public company communication program.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS telah memiliki web perusahaan yang digunakan sebagai media informasi pemegang saham investor dan pemangku kepentingan lainnya yang merujuk pada ketentuan keterbukaan informasi perusahaan terbuka yang berlaku.

**Application at the Bank for recommendations**

*BWS had the Company's website that used as media information for shareholders or investor and other stakeholders which referring to prevailing provisions for disclosure of public company information.*

## Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Aspect 2: Function and Role of the Board of Commissioners

### Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Principle 3: Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners

Rekomendasi 6: Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.

Recommendation 6: Determination of the number of members of the Board of Commissioners considering the condition of the Public Company.

#### Keterangan Rekomendasi:

Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

#### Description of Recommendation:

The number of members of the Board of Commissioners can affect the effectiveness of carrying out the duties of the Board of Commissioners. Determination of the number of members of the Board of Commissioners of a Public Company must refer to the provisions of the applicable laws and regulations, which consist of at least 2 (two) people based on the provisions of the OJK regulations concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of an Issuer or Public Company. In addition, it is also necessary to consider the condition of the Public Company which includes, among others, the characteristics, capacity, and size, as well as the achievement of objectives and meeting the different business needs of the Public Company. However, too large a number of members of the Board of Commissioners has the potential to interfere with the effectiveness of the Board of Commissioners' functions.

#### Penerapan di Bank atas rekomendasi

BWS telah memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris BWS berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris non Independen.

#### Application at the Bank for recommendations

BWS has been fulfilled the Provisions in Article 20 of POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding to the Directors and Board of Commissioners of Public Company, namely the number of Board of Commissioner members is of more than 2 (two) persons. The number of Board of Commissioners of BWS is 3 (three) person consist of 2 (two) Independent Commissioners and 1 (one) Non-Independent Commissioners.

Rekomendasi 7: Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Recommendation 7: Determination of the composition of the members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.

#### Keterangan Rekomendasi:

Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

#### Description of Recommendation:

The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the organs of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, in accordance with the needs of the Public Company. These characteristics can be reflected in the determination of expertise, knowledge, and experience needed in carrying out supervisory duties and providing advice by the Board of Commissioners of the Public Company. The composition that has taken into account the needs of the public company is a positive thing, especially related to decision making in the context of implementing the supervisory function carried out by considering a broader range of aspects.

#### Penerapan di Bank atas rekomendasi

Persyaratan-persyaratan untuk mengusulkan Calon Dewan Komisaris telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha BWS yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta gender.

#### Application at the Bank for recommendations

The requirements to propose the candidates of Board of Commissioners has been conducted with considering the needs and complexity of BWS business namely with considering the diversity of expertise, experience and educational background, and gender.

**Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**

*Principle 4: Improve the Quality of Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.*

**Rekomendasi 8: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.**

*Recommendation 8: The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.*

Keterangan Rekomendasi:

- Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.
- Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

*Description of Recommendation:*

- *The Board of Commissioners Self-Assessment Policy is a guideline used as a form of accountability for collegially evaluating the performance of the Board of Commissioners. Self-assessment or self-assessment is intended by each member to assess the implementation of the performance of the Board of Commissioners collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this Self Assessment it is expected that each member of the Board of Commissioners can contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis.*
- *The policy can include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodic implementation time, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with recommendations given by the Public Company nomination and remuneration functions, where such functions have been required in the OJK Regulations concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme *Self Assessment* berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

**Application at the Bank for recommendations**

*Performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by each member of the Board of Commissioner through mechanism of self assessment based on the assessment criteria related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*

**Rekomendasi 9: Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.**

*Recommendation 9: Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners, disclosed through the Annual Report of the Public Company.*

Keterangan Rekomendasi:

Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris.

*Description of Recommendation:*

*Disclosure of the Self Assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is done not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for carrying out its duties, but also, to provide confidence especially to shareholders or investors of the efforts that need to be done in improving the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors are aware of the check and balance mechanism for the performance of the Board of Commissioners.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

**Application at the Bank for recommendations**

*Self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioner has been stated in this Annual Report.*



Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.  
*Recommendation 10: The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners when involved in financial crimes*

Keterangan Rekomendasi:

- Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
- Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

*Description of Recommendation:*

- *The resignation policy of members of the Board of Commissioners involved in financial crimes is a policy that can increase the confidence of stakeholders in public companies, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the course of business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the public company. The policy can be covered in the Guidelines or the Code of conduct that applies to the Board of Commissioners.*
- *Furthermore, what is meant by being involved in financial crimes is the existence of the status of a convicted member of the Board of Commissioners of the competent authority. Financial crimes referred to as manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as Money Laundering Acts as referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.*

#### **Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar BWS, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.

#### **Application at the Bank for recommendations**

*BWS has the policy related to the resignation of the Board of Commissioner members if they involved in financial crimes as stated in BWS of Articles of Association, namely the service period of Board of Commissioner will be ended if they violate the laws and regulation and if they take resignation by theirself.*

Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

*Recommendation 11: The Board of Commissioners or Committees that carry out the Nomination and Remuneration functions formulate a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Director.*

Keterangan Rekomendasi:

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.

*Description of Recommendation:*

*Based on the provisions of the OJK Regulation on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the task to prepare the policies and criteria needed in the Nomination process for candidates for Directors. One of the policies that can support the Nomination process referred to is the succession policy for members of the Board of Directors. The succession policy aims to maintain the continuity of the regeneration process or the regeneration of leadership in the company in order to maintain business sustainability and the long-term goals of the company.*

#### **Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham dalam hal, antara lain:

1. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris.

#### **Application at the Bank for recommendations**

*BWS has a Nomination and Remuneration Committee who assist the Board of Commissioner to submit suggestions for shareholders in the matters, among others:*

1. *Preparation, implementation and analysis the criteria and procedure of nomination for candidat the Board of Commissioners and Directors.*
2. *Identifying the candidates of Directors, either within and outside and the candidat of the Board of Commissioners who meet the requirements to be submitted/appointed becoma Directors or Board of Commissioners.*

**Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi**

*Aspect 3: Function and Role of board of Directors*

**Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.**

*Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of board of Directors.*

**Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.**  
*Recommendation 12: Determine the number of members of the Board of Directors to consider the condition of the public company and its effectiveness in decision making.*

**Keterangan Rekomendasi:**

Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektifitas pengambilan keputusan Direksi.

*Description of Recommendation:*

*As a corporate organ that is authorized in managing the company, determining the number of Directors greatly influences the performance of the Public Company. Therefore, the determination of the number of members of the Board of Directors must be done through careful consideration and must refer to the provisions of the prevailing laws and regulations, which are based on OJK Regulations on the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company, consisting of at least 2 (two) people. In addition, the determination of the number of the Board of Directors must be based on the need to achieve the goals and objectives of the Public Company and adapted to the conditions of the Public Company, including the characteristics, capacity and size of the Public Company and how effective the decision making of the Board of Directors is.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS telah memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2021, jumlah Direksi BWS sebanyak 6 (enam) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BWS.

**Application at the Bank for recommendations**

*BWS has been fulfilled the Provisions in Article 20 of POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding to the Directors and Board of Commissioners of Public Company, namely the number of Board of Director members at least consist of 2 (two) persons. As of December 31, 2021, the number of Board of Directors of BWS is 6 (six) person and in its determination based on the needs and complexity of BWS.*

**Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.**

*Recommendation 13: Determination of the composition of members of the Board of Directors pays attention to the diversity of expertise, knowledge and experience required*

**Keterangan Rekomendasi:**

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.

*Description of Recommendation:*

*Like the Board of Commissioners, the diversity of the composition of members of the Board of Directors is a combination of desired characteristics both in terms of the organs of the Board of Directors and individual members of the Board of Directors, in accordance with the needs of the Public Company. The combination is determined by taking into account the appropriate expertise, knowledge and experience in the division of duties and functions of the Board of Directors' position in achieving the goals of the Public Company. Therefore, consideration of the combination of characteristics referred to will have an impact on the accuracy of the nominating process and the appointment of individual members of the Board of Directors or the Board of Directors collegially.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

Penetapan komposisi Direksi BWS telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha BWS yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik.

**Application at the Bank for recommendations**

*Determination of the Director Composition of BWS has been conducted with considering the needs and complexity of BWS business namely with considering the diversity of expertise, experience and educational background, and gender. The diversity of Director Composition is expected to provide the alternative settlements on the complex problem faced by the Bank was compared with homogeneous members of the Director, so that the result of decision can be the best decision.*

Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.  
*Recommendation 14: Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.*

Keterangan Rekomendasi:

- Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.
- Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.

*Description of Recommendation:*

- Financial Report is a report of management responsibility for managing resources owned by a publicly listed company, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as related OJK regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector which regulates presentation and disclosure of Public Company Financial Statements. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector that governs the responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements, the Board of Directors is jointly responsible for the Financial Statements, which are signed by the President Director and members of the Board of Directors in charge of the accounting or financial sector.*
- Therefore, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will depend on the expertise and / or knowledge of the the Board of Directors, especially members of the the Board of Directors who are in charge of accounting or finance. The expertise and / or knowledge qualifications in accounting that are at least possessed by the members of the Board of Directors can provide confidence in the preparation of the Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by the stakeholders as the basis for economic decision making related to the said Public Company. Such expertise and / or knowledge can be proven*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BWS adalah Presiden Direktur, yaitu Sdr. Hwang Gyusoon dengan pengalaman di bidang perencanaan, pembiayaan perdagangan, kredit, pendanaan, *general affair* dan terakhir sebagai *Managing Director* di Woori Bank.

**Application at the Bank for recommendations**

*Director in charge of accounting or financial in BWS is President Director, namely Mr. Choi Jung Hoon with International trade experience, Audit and the last in the Risk Management.*

**Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.**

*Principle 6: Improving the Quality of Performing Duties and Responsibilities of the Board of Directors*

Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.

*Recommendation 15: the Board of Directors have a self-assessment policy (Self Assessment) to assess the performance of the Board of Directors.*

Keterangan Rekomendasi:

- Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.
- Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

*Description of Recommendation:*

- As with the Board of Commissioners, the Board of Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for collegially evaluating the performance of the Board of Directors. Self Assessment or self-assessment is intended by each member of the Board of Directors to assess the collegial performance of the Board of Directors, and not to evaluate the individual performance of each member of the Board of Directors. With this Self Assessment it is expected that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis.*
- The policy can cover the assessment activities carried out along with the aims and objectives, the period of implementation periodically, and the benchmarks or evaluation criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration functions of the Public Company, where the establishment of these functions has been required in the FSA Rules concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

Penilaian Kinerja Anggota Direksi dilakukan oleh secara kolektif oleh anggota Direksi melalui mekanisme *Self Assessment* berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi.

**Application at the Bank for recommendations**

*Performance assessment of the Director members has conducted by collective through mechanism of self assessment based on the assessment criterias that related to the duties and responsibilities of the Director members.*

Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.  
*Recommendation 16: Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the annual report of the Public Company.*

Keterangan Rekomendasi:

Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.

*Description of Recommendation:*

*Disclosure of the Self Assessment policy on the performance of the Board of Directors is done not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide important information for improvement efforts in the management of the Public Company. This information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is a certainty that the management of the company will continue in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors are aware of the check and balance mechanism for the Board of Directors' performance.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2021.

**Application at the Bank for recommendations**

*The policy of self assessment to assess the Board of Directors performance has stated in 2021 Annual Report.*

Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.  
*Recommendation 17: The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors when involved in financial crimes.*

Keterangan Rekomendasi:

- Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.
- Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

*Description of Recommendation:*

- *The resignation policy of members of the Board of Directors involved in financial crimes is a policy that can increase the confidence of stakeholders in public companies, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the course of business activities. In addition, in terms of morality, this policy will build an ethical culture in the environment of a public company. The policy can be covered in the Guidelines or the Code of conduct that applies to the Board of Directors.*
- *Furthermore, what is meant by being involved in financial crimes is the existence of the status of a convicted member of the Board of Directors of the authorized party. Financial crimes referred to as manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as Money Laundering Acts as referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank.

**Application at the Bank for recommendations**

*BWS has the policy that related with the resignation of the Director members if they involved in financial crime as stated in the Article of Associations.*

**Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan**  
Aspect 4: Stakeholder Participation

**Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.**  
Principle 7: Enhance Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.

**Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.**  
Recommendation 18: Public Company has a policy to prevent insider trading.

**Keterangan Rekomendasi:**

Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.

**Description of Recommendation:**

Someone who has inside information is prohibited from conducting a Securities transaction using inside information as referred to in the Capital Market Law. Public Company can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by strictly separating data and / or information that is confidential from the public nature, as well as dividing tasks and responsibilities for the management of said information proportionally and efficiently.

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

Ketentuan untuk mencegah terjadinya insider trading diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perusahaan serta Kode Etik Kepatuhan. BWS juga telah mengatur penerapan pengenaan sanksi kepada Karyawan.

**Application at the Bank for recommendations**

Provisions to prevent the insider trading has regulated in the code of conduct and the Company's Work Guidelines and Code of Compliance. BWS has also arranged the implementation of sanctions to employee.

**Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.**  
Recommendation 19: Public companies have anti-corruption and anti-fraud policies

**Keterangan Rekomendasi:**

Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara *legal, prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.

**Description of Recommendation:**

The anti-corruption policy is useful to ensure that the business activities of the public company are carried out legally, prudently and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of the code of conduct, or in its own form. The policy may include among others the programs and procedures carried out in dealing with corrupt practices, kickbacks, fraud, bribes and / or gratuities in public companies. The scope of the policy must illustrate the prevention of public companies against all corrupt practices, both giving and receiving from other parties.

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS memiliki kebijakan pengendalian gratifikasi dan penerapan strategi anti *fraud*.

**Application at the Bank for recommendations**

BWS has policy to control the gratification and the implementation of anti fraud strategy.

**Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.**  
Recommendation 20: Public Company has a policy regarding the selection and improvement of the ability of suppliers or vendors.

**Keterangan Rekomendasi:**

- Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.
- Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.

**Description of Recommendation:**

- The policy on selecting suppliers or vendors is useful to ensure that the public company obtains the goods or services needed at competitive prices and good quality. While the policy to increase the ability of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply / fulfill the goods or services needed by the company will affect the quality of the company's output.
- The implementation of these policies can guarantee supply continuity, both in terms of quantity and quality required by the public company. The scope of this policy includes criteria in selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the ability of suppliers or vendors, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors.

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS memiliki kebijakan terkait pembelian barang dan jasa yang menggunakan vendor.

**Application at the Bank for recommendations**

BWS has the policy related to the purchase of goods and services that using the vendors.



Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor.  
*Recommendation 21: Public Company has a policy regarding the fulfillment of debtor rights.*

**Keterangan Rekomendasi:**

Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditor. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditor terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditor.

*Description of Recommendation:*

*The policy on fulfilling debtors' rights is used as a guide in making loans to debtors. The purpose of the policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain debtor trust in the public company. The policy includes considerations in entering into agreements, as well as follow-up in fulfilling public company obligations to debtors.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor yang diatur dalam SPO Produk Dana, Manual Produk dan SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah, yang secara ringkas mengatur:

- a. Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk.
- b. Hak untuk mendapat mengakses syarat dan ketentuan produk dana melalui situs web.
- c. Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan e-banking atau sarana lainnya yang ditetapkan BWS.
- d. Memperoleh bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

**Application at the Bank for recommendations**

*BWS has the policy regarding to the fulfillment of debtor rights which is regulated in SPO of product funds, product manual and SPO of Customer Complaint handling, which is set to:*

- a. *The rights to obtain the adequacy of explanation regarding to product characteristic.*
- b. *The rights to get access of the terms and conditions of funds product through website*
- c. *Ease of transaction through the branches, e-banking services or other facilities has established by BWS.*
- d. *Obtained the interest which amount convenient with prevailing provisions.*

Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *whistleblowing system*  
*Recommendation 22: Public Company has a whistleblowing system policy*

**Keterangan Rekomendasi:**

Kebijakan *system whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan *system whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *system whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

*Description of Recommendation:*

*A well-structured whistleblowing system policy will provide certainty for the protection of witnesses or reporters for an indication of violations committed by employees or management of a public company. Application of the system policy will have an impact on the formation of a culture of good corporate governance. The whistleblowing system policy covers, among others, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, the method of complaints, the protection and guarantee of confidentiality of the reporter, the handling of complaints, the party that manages complaints, and the results of handling and following up on complaints.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS telah memiliki prosedur yang mengatur *Whistleblowing System* (WBS).

**Application at the Bank for recommendations**

*BWS has the procedure that regulating to whistleblowing systems (WBS).*

Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan  
*Recommendation 23: Public companies have a long-term incentive policy for the Board of Directors and employees*

**Keterangan Rekomendasi:**

- Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.
- Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.

*Description of Recommendation:*

- *Long-term incentives are incentives based on achieving long-term performance. The long-term incentive plan has the premise that the company's long-term performance is reflected in the growth in value of the shares or other long-term targets of the company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to the Board of Directors and employees to improve their performance or productivity which will have an impact on improving the company's performance in the long run.*
- *The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Company to encourage the implementation of long-term incentives for the Board of Directors and Employees with terms, procedures and forms that are tailored to the long-term goals of the Public Company. The said policy may include, among others: the purpose and objectives of providing long-term incentives, the terms and procedures for providing incentives, as well as the conditions and risks that must be considered by the Public Company in providing incentives. The policy can also be covered by the existing Public Company remuneration policy*



**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS melakukan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan dalam bentuk ESOP & MSOP pada tahun 2010 dan selanjutnya melakukan pengkajian dalam penyusunan kebijakan pemberian insentif jangka panjang agar tepat sasaran, efektif dan efisien.

**Application at the Bank for recommendations**

*BWS provides the long term incentive to Directors and employees in the form of ESOP & MSOP in 2010 and subsequently conducted the review in preparation of the long term incentive policy so that can achieve the target, effective and efficient.*

**Aspek 5: Keterbukaan Informasi**

*Aspect 5: Information Openness*

**Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.**

*Principle 8: Improve Implementation of Information Disclosure.*

**Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.**

*Recommendation 24: Public Companies make greater use of information technology in addition to the Website as a medium for information disclosure.*

**Keterangan Rekomendasi:**

Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.

*Description of Recommendation:*

*The use of information technology can be useful as a medium of information disclosure. As for the disclosure of information, not only is the disclosure of information that has been regulated in the legislation, but also other information related to the Public Company which is considered beneficial for shareholders or investors to know. With the wider use of information technology other than the Website it is hoped that companies can increase the effectiveness of the dissemination of company information. Even so, the use of information technology is still taking into account the benefits and costs of the company.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

Dalam situs web BWS, terdapat segala informasi yang terkait dengan Keterbukaan Informasi. Selain situs web, BWS memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti *Internet Banking, Mobile Banking, Instagram, dan Facebook*.

**Application at the Bank for recommendations**

*In the BWS website, there is all of information related to disclosure information. In addition to website, BWS is using technology and other social media application, such as Internet Banking, Mobile Banking, Instagram, and Facebook.*

**Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali.**

*Recommendation 25: The Annual Report of the Public Company discloses the final beneficial owner in the ownership of the shares of the Public Company at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the ownership of the shares of the Public Company through the main and controlling shareholders.*

**Keterangan Rekomendasi:**

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.

*Description of Recommendation:*

*Legislation in the Capital Market sector that regulates the submission of annual reports of the Public Company has set the obligation to disclose information about shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of the Public Company as well as the obligation to disclose information about the major and controlling shareholders of the Public Company both directly or indirectly up to the last beneficial owner in the ownership of said shares. In the Governance Guidelines it is recommended to disclose the final beneficial owner of the shares of the Public Company at least 5% (five percent), in addition to disclosing the final beneficial owner of shares ownership by the main and controlling shareholders.*

**Penerapan di Bank atas rekomendasi**

BWS telah mengungkapkan informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham BWS (kode: SDRA) dalam Laporan Tahunan di bagian Komposisi Pemegang Saham.

**Application at the Bank for recommendations**

*The Company has disclosed information regarding to 5% or more shares ownership in Annual Report in the Shareholders composition section.*